

R K P D

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Musi Rawas

2023



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2022**



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Pasal 263 ayat (4) dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781”);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas

Tahun 2016 Nomor 10);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas,
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten tahun 2023.

- (2) RKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai acuan dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten dan sekaligus menjadi tolak ukur terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten.

BAB II SISTEMATIKA NASKAH RKPD

Pasal 3

Naskah RKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
- BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2023
- BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
- BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
- BAB VII PENUTUP

Pasal 4

Rincian RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti

pada tanggal **13 Juli** 2022

BUPATI MUSI RAWAS,



Diundangkan di Muara Beliti

pada tanggal **13 Juli** 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS



BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2022 NOMOR **.16**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala segala karunia dan kekuatan-Nya sehingga kita dapat menyelesaikan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas tahun 2023.

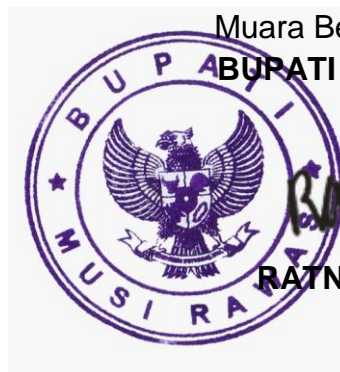
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas tahun 2023, disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas tahun 2021-2026, serta mengacu pada rancangan RKP tahun 2023 dan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023.

Sesuai fungsinya dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan teknis operasional tahunan. Oleh karena itu perannya sangat penting dalam menentukan arah perkembangan pembangunan daerah dan menjadi pedoman dalam proses penganggaran Rancangan APBD Kabupaten Musi Rawas tahun 2023. Untuk selanjutnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kabupaten Musi Rawas harus mempedomani serta melakukan langkah-langkah sinkronisasi/memaduserasikan rencana program, kegiatan dan subkegiatan hingga pelaksanaannya.

Pada kesempatan ini juga, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas tahun 2023.

Muara Beliti, Juli 2022

BUPATI MUSI RAWAS



RATNA MACHMUD

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii-iv
DAFTAR TABEL	v-x
DAFTAR GRAFIK	xi-xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	I.1
1.1. Latar Belakang	I.1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I.11
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I.13
1.3.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan.....	I.13
1.3.2 Kerangka Pikir Penyusunan RKPD Tahun 2023	I.16
1.3.3 Prinsip dan Pendekatan	I.17
1.4. Maksud dan Tujuan.....	I.20
1.4.1 Maksud	I.20
1.4.2 Tujuan	I.20
1.5. Sistematika Dokumen RKPD Tahun 2023.....	I.20
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II.1
2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah	II.1
2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis	II.1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II.22
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	II.38
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	II.76
2.2. Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan RKPD Tahun 2021, Analisis Indikator Makro dan Realisasi Target Sasaran RPJMD Tahun 2021	II.78
2.2.1 Evaluasi Kondisi Makro Kabupaten Musi Rawas	II.78
2.2.2 Analisis Indikator Makro Kabupaten Musi Rawas	II.80
2.2.3 Realisasi Pelaksanaan Program RKPD Tahun 2021 dan Realisasinya.....	II.80
2.2.4 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Sampai dengan Tahun Berjalan.....	II.85
2.3. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Musi Rawas	II.96
2.4. Permasalahan Pembangunan dan Strategi Penanganan Masalah pada Tahun Berjalan	II.97
2.5. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	II.115

2.6.	Evaluasi Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021	II.113
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III.1
3.1.	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III.1
3.1.1	Analisis Perekonomian Global	III.2
3.1.2	Analisis Perekonomian Nasional Tahun 2021 ..	III.6
3.1.3	Proyeksi Perekonomian Nasional Tahun 2022.	III.10
3.1.4	Proyeksi Perekonomian Nasional Tahun 2023.	III.15
3.1.5	Proyeksi Perekonomian Sumatera Selatan Tahun 2022.	III.20
3.1.6	Proyeksi Perekonomian Sumatera Selatan Tahun 2023	III.24
3.1.7	Proyeksi Perekonomian Daerah Tahun 2023 Pasca Pandemi Covid-19.....	III.28
3.1.8	Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023	III.34
3.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas	III.38
3.2.1	Arah Kebijakan Pendapatan daerah	III.38
3.2.2	Arah Kebijakan Belanja Daerah	III.41
3.2.3	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III.48
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2023	IV.1
4.1	Tujuan Dan Sasaran Pembangunan	IV.2
4.2.	Tema dan Tematik Pembangunan Daerah Tahun 2023	IV.4
4.3.	Telaah Terhadap Dokumen Perencanaan untuk Penentuan Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Tahun 2023.....	IV.8
4.3.1	Telaah Terhadap RKP 2023.....	IV.8
4.3.2	Telaah RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023.....	IV.10
4.3.3	Telaah Terhadap Pemenuhan Janji Kepala Daerah Pada Saat Kampanye yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026	IV.10
4.3.4	Telaah Terhadap Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Musi Rawas	IV.17
4.3.5	Telaah Terhadap Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Sebelumnya	IV.17

4.3.6	Telaah Terhadap RTRW Kabupaten Musi Rawas	IV.19
4.3.7	Telaah Terhadap Isi Strategis	IV.22
4.4	Prioritas, Sasaran, Arah Kebijakan, Program Prioritas Program Nomeklatur Pembangunan Daerah Tahun 2023.....	IV.23
4.5	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 dengan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2023.....	IV.41
4.5.1	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 Dengan Prioritas Nasional Tahun 2023.....	IV.41
4.5.2	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 Dengan Prioritas Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023	IV.42
4.5.3	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJMD Tahun 2023	IV.43
4.5.4	Sandingan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Musi Rawas yang Dilengkapi Dengan Indikator Prioritas Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Serta Program Prioritas Kabupaten Musi Rawas.....	IV.45
4.6	Strategi Pendukung Tujuan Pembangunan	IV.49
4.6.1	Strategi Untuk Pencegahan dan Penanganan Pandemi Covid-19.....	IV.49
4.6.2	Strategi Untuk Mendukung Pencapaian Tujuan SDGs.....	IV.51
4.6.3	Strategi Untuk Mendukung Pengarusutamaan Gander (PUG)	IV.56
4.6.4	Strategi Untuk Mendukung Penurunan Stunting	IV.57
4.6.5	Strategi Untuk Mendukung Pelaksanaan SPM	IV.58
4.7	Arah Pengembangan Kecamatan	IV.59

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH..... V.1

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH ... VI.1

BAB VII PENUTUP VII.1

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Prinsip Penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023.....	I.18
Tabel 1.2	Pendekatan Penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 Yang Berorientasi Pada Proses.....	I.18
Tabel 1.3	Pendekatan Penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 Yang Berorientasi Pada Substansi	I.19
Tabel 2.1	Jumlah Kelurahan, Desa dan Luas Wilayah di Kab. Musi Rawas.....	II.2
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Kabupaten Musi Rawas.....	II.9
Tabel 2.3	PDRB Kabupaten Musi Rawas Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2021 (Milyar Rupiah)	II.23
Tabel 2.4	Struktur Ekonomi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019-2021 (%)	II.25
Tabel 2.5	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Musi Rawas Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2020-2021 (%)	II.26
Tabel 2.6	Capaian PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	II.28
Tabel 2.7	Laju Inflasi Implisit (Tingkat Produsen) % Kabupaten Musi Rawas 2017-2021	II.29
Tabel 2.8	Capaian Kinerja Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018-2021.....	II.42
Tabel 2.9	Daerah Irigasi Pusat	II.46
Tabel 2.10	Daerah Irigasi Provinsi.....	II.46
Tabel 2.11	Daerah Irigasi kabupaten Musi Rawas	II.46
Tabel 2.12	Struktur Ruang dan Fungsi yang Diemban Kecamatan	II.51
Tabel 2.13	Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019- 2021	II.54
Tabel 2.14	Tingkat Setengah Pengangguran Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021.....	II.56
Tabel 2.15	Tingkat Setengah Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2021	II.56
Tabel 2.16	Tingkat Setengah Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2021	II.57
Tabel 2.17	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Musi Rawas Tahun 2019-2021..	II.58
Tabel 2.18	Kinerja Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015- 2020.....	II.59
Tabel 2.19	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab.Musi Rawas Tahun 2019-2021	II.61

Tabel 2.20	Capaian Kinerja Urusan Persandian Kab.Musi Rawas Tahun 2019-2021	II.66
Tabel 2.21	Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kab. Musi Rawas Tahun 2021.....	II.67
Tabel 2.22	Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kab.Musi Rawas Tahun 2021	II.68
Tabel 2.23	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021.....	II.68
Tabel 2.24	Kunjungan Wisata Tahun 2021.....	II.70
Tabel 2.25	Capaian Kinerja Indikator Urusan Penelitian dan Pengembangan tahun 2021.....	II.75
Tabel 2.26	Capaian Kinerja Perda dan Keputusan DPRD yang Diputuskan Tahun 2020	II.76
Tabel 2.27	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Kab.Musi Rawas Tahun 2021	II.77
Tabel 2.28	Fokus Iklim Berinvestasi Kab.Musi Rawas Tahun 2019-2021.....	II.77
Tabel 2.29	Fokus Sumberdaya Manusia Kab. Musi Rawas Tahun 2016- 2020.....	II.78
Tabel 2.30	Capaian Indikator Makro Daerah dan Target RPJMD Musi Rawas Dari Tahun 2021-2026	II.79
Tabel 2.31	Rekap Realisasi Fisik dan Keuangan Belanja Langsung per OPD Tahun 2021.....	II.80
Tabel 2.32	Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja RKPDP Tahun 2021	II.93
Tabel 2.33	Permasalahan dan Isu Strategis	II.98
Tabel 2.34	Indikator Kinerja Tata Kelola Pemerintahan	II.99
Tabel 2.35	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	II.100
Tabel 2.36	Alokasi Anggaran Tahun 2021.....	II.100
Tabel 2.37	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan.....	II.101
Tabel 2.38	Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2020	II.104
Tabel 2.39	Alokasi Anggaran Tahun 2021.....	II.105
Tabel 2.40	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.....	II.105
Tabel 2.41	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020	II.106
Tabel 2.42	Alokasi anggaran Tahun 2021	II.107
Tabel 2.43	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	II.107

Tabel 2.44	Rincian Anggaran, Program dan Kegiatan Penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2021	II.108
Tabel 2.45	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II.108
Tabel 2.46	Alokasi Anggaran Pelaksanaan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2021	II.109
Tabel 2.47	Standar Pelayanan Minimal Dinas Sosial	II.110
Tabel 2.48	Alokasi Anggaran Pelaksanaan SPM Bidang Sosial Tahun 2021	II.112
Tabel 3.1	Laju Pertumbuhan PDB Lapangan Usaha (seri 2010) Tahun 2021	III.8
Tabel 3.2	Pertumbuhan PDB Sisi Permintaan Tahun 2021–2022 (Persen, yoy)	III.12
Tabel 3.3	Pertumbuhan PDB Sisi Lapangan Usaha Tahun 2021–2022 (Persen, yoy).....	III.13
Tabel 3.4	Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2023.....	III.17
Tabel 3.5	Proyeksi Pertumbuhan Komponen PDRB ADHK Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 (%)	III.21
Tabel 3.6	Proyeksi Pertumbuhan Sektor PDRB ADHK Sisi Lapangan Usaha Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023	III.25
Tabel 3.7	Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 dan proyeksi Tahun 2022	III.23
Tabel 3.8	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Musi Rawas Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2018 – 2021 serta proyeksi pada Tahun 2022 dan 2023	III.29
Tabel 3.9	PDRB Kabupaten Musi Rawas ADHB menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 dan Proyeksi Tahun 2022-2023 (milyar rupiah)	III.31
Tabel 3.10	Target Makro Ekonomi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023.....	III.35
Tabel 3.11	Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi Melalui Penguatan Sektor-sektor Strategis	III.36
Tabel 3.12	Strategi Dan Arah Kebijakan Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi (Sisi pengeluaran)	III.36
Tabel 3.13	Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 dan proyeksi Tahun 2023	III.40
Tabel 3.14	Struktur Belanja Tahun Anggaran 2022 dan Proyeksi Belanja Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Musi Rawas...	III.43

Tabel 3.15	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 dan Proyeksi Tahun 2023.....	III.49
Tabel 4.1	Keterkaitan Misi dan Tujuan Pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026	IV.2
Tabel 4.2	Sasaran Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023.....	IV.3
Tabel 4.3	Tema dan Tematik Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023	IV.6
Tabel 4.4	Keselarasan Tema Pembangunan RKP Nasional Tahun 2023 dan Tema Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 dengan Tema Pembangunan Musi rawas Tahun 2023	IV.7
Tabel 4.5	Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Sasaran RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026	IV.14
Tabel 4.6	Isu Strategis Pembangunan Daerah	IV.22
Tabel 4.7	Prioritas Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023.....	IV.23
Tabel 4.8	Prioritas, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah Musi Rawas Tahun 2023	IV.26
Tabel 4.9	Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023.....	IV.32
Tabel 4.10	Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2023	IV.32
Tabel 4.11	Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2023	IV.33
Tabel 4.12	Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2023	IV.33
Tabel 4.13	Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2023	IV.33
Tabel 4.14	Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2023	IV.34
Tabel 4.15	Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2023	IV.34
Tabel 4.16	Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2023	IV.35
Tabel 4.17	Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2023	IV.35
Tabel 4.18	Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2023	IV.35

Tabel 4.19	Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2023	IV.36
Tabel 4.20	Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2023	IV.36
Tabel 4.21	Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2023	IV.36
Tabel 4.22	Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2023	IV.37
Tabel 4.23	Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2023	IV.37
Tabel 4.24	Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2023	IV.37
Tabel 4.25	Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2023	IV.38
Tabel 4.26	Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2023	IV.38
Tabel 4.27	Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2023	IV.38
Tabel 4.28	Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2023	IV.39
Tabel 4.29	Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2023	IV.39
Tabel 4.30	Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2023	IV.39
Tabel 4.31	Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2023	IV.40
Tabel 4.32	Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2023	IV.40
Tabel 4.33	Sinkronisasi Prioritas Daerah Tahun 2023 dengan Prioritas Tahun 2023.....	IV.42
Tabel 4.34	Sinkronisasi Prioritas Daerah Tahun 2023 dengan RPJMD 2021-2026	IV.43
Tabel 4.35	Korelasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 Dalam Merespon Program SDGs	IV.50
Tabel 4.36	Korelasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 Dalam Merespon Program SDGs.....	IV.54
Tabel 4.37	Dukungan Prioritas Daerah Terhadap Pengarustamaan Gender	IV.56
Tabel 5.1	Rencana Program dan Kegiatan Berdasarka Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023	V.2
Tabel 5.2	Rencana Rekap Pendanaan Per Perangkat Daerah Tahun 2023.....	V.4

Tabel 6.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Musi Rawas	VI.1
Tabel 6.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas	VI.8

DAFTAR GRAFIK

		Halaman
Grafik 2.1	Persentase Terhadap Luas Wilayah (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas	II.3
Grafik 2.2	Persentase Luas Lahan Berdasarkan Klasifikasi Jasa Ekosistem Penyediaan Serat Kabupaten Musi Rawas ..	II.6
Grafik 2.3	Curah Hujan Dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021	II.8
Grafik 2.4	PDRB Dasar Harga Berlaku Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan	II.24
Grafik 2.5	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021	II.27
Grafik 2.6	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota di Sumatera Selatan Tahun 2021	II.27
Grafik 2.7	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Selatan.....	II.28
Grafik 2.8	Gini Ratio Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017-2021	II.30
Grafik 2.9	Gini Ratio Kabupaten/Kota Sumatera Selatan Tahun 2021	II.30
Grafik 2.10	Gini Ratio Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2017-2021	II.31
Grafik 2.11	Angka Kemiskinan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 – 2021	II.32
Grafik 2.12	Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2021	II.33
Grafik 2.13	Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017-2021	II.33
Grafik 2.14	Kedalaman Kemiskinan Kabupaten/Kota Sumatera Selatan Tahun 2021	II.34
Grafik 2.15	Kemiskinan Ekstrem Kabupaten/Kota Tahun 2020.....	II.35
Grafik 2.16	Angka Melek Hurup Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019-2021	II.36
Grafik 2.17	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019-2021	II.37
Grafik 2.18	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2021	II.37
Grafik 2.19	Grafik APK SD/MI Kabupaten Musi Rawas, Provinsi dan Nasional Tahun 2018-2021	II.39
Grafik 2.20	Grafik APK SMP/MTS Kabupaten Musi Rawas Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2021	II.40
Grafik 2.21	Grafik APM SD/MI Kabupaten Musi Rawas Provinsi dan Nasional Tahun 2018-2021	II.41

Grafik 2.22	Grafik APM SMP/MTS Kabupaten Musi Rawas Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2021	II.41
Grafik 2.23	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Musi Rawas Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2021	II.43
Grafik 2.24	Kondisi Jalan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019-2021	II.45
Grafik 2.25	Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Layak	II.52
Grafik 2.26	Air Minum	II.52
Grafik 2.27	Rehab Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019-2021	II.53
Grafik 2.28	Persentase Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2019-2021	II.54
Grafik 2.29	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Musi Rawas tahun 2017-2021	II.55
Grafik 2.30	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019-2021	II.56
Grafik 2.31	Ketersediaan Pangan (Ton) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019-2021	II.58
Grafik 2.32	Persentase Penanganan Sampah Tahun 2019-2021	II.59
Grafik 2.33	Indeks Lingkungan Hidup Tahun 2019-2021.....	II.60
Grafik 2.34	Persentase Penduduk yang berusia 17 Tahun ke atas/telah menikah yang memiliki KTP Tahun 2019-2021	II.61
Grafik 2.35	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive prevalence rate/CPR) % Tahun 2019-2021	II.62
Grafik 2.36	Angka kelahiran Total Fertility Rate (TFR) Tahun 2016-2020	II.62
Grafik 2.37	Persentase layanan penyebarluasan informasi pembangunan daerah Tahun 2019-2021	II.63
Grafik 2.38	Persentase Koperasi Aktif Tahun 2019-2021.....	II.64
Grafik 2.39	Usaha Mikro Kecil Aktif Tahun 2019-2021	II.65
Grafik 2.40	Persentase Peningkatan Investasi	II.65
Grafik 2.41	Jumlah produksi ikan (ton) Tahun 2016-2020	II.69
Grafik 2.42	Produksi Padi Tahun 2019 – 2021	II.70
Grafik 2.43	Produksi Jagung Tahun 2019 – 2021	II.71
Grafik 2.44	Produksi Kedelai Tahun 2019-2021	II.72
Grafik 2.45	Persentase Peningkatan Rasio Elektrifikasi Tahun 2019-2021	II.72
Grafik 2.46	Prosentase Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Tahun 2016-2020	II.73
Grafik 3.1	Indeks PDB Riil beberapa Negara Tahun 2019-2021	III.3
Grafik 3.2	CBOE VIX dan MSCI ACWI Index dan Monetary Base (Persen, yoy).....	III.4
Grafik 3.3	Pertumbuhan Ekonomi Global (Persen, yoy)	III.6

Grafik 3.3	Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi dan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015-2020 dan Proyeksi Tahun 2021-2022	III.17
Grafik 3.4	Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi dan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019-2021 dan Target Tahun 2022 serta Proyeksi Tahun 2023	III.33
Grafik 3.5	Angka Kemiskinan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019-2021 dan Target Tahun 2022 serta Proyeksi Tahun 2023	III.34

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Tahun 2022.....	I.4
Gambar 1.2 Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Forum Konsultasi Publik Tahun 2022 dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023	I.4
Gambar 1.3 Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa	I.5
Gambar 1.4 Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan Tahun 2022.....	I.6
Gambar 1.5 Forum Organisasi Perangkat Daerah.....	I.8
Gambar 1.6 Musrenbang RKPD Tahun 2022 untuk Penyusunan RKPD 2023	I.8
Gambar 1.7 Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2022 untuk Penyusunan RKPD 2023	I.9
Gambar 1.8 Alur Proses Penyusunan RKPD Sampai dengan Penyusunan APBD	I.10
Gambar 1.9 Hubungan Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah dan OPD.....	I.14
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Musi Rawas	II.2
Gambar 2.2 Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Serat	II.7
Gambar 2.3 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Musi Rawas	II.22
Gambar 2.4 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Musi Rawas..	II.49
Gambar 2.5 Analisis kuadran Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kab/Kota di Sumsel, 2020	II.84
Gambar 2.6 Analisis Kuadran Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Sumsel, 2020	II.85
Gambar 2.7 Analisis Kuadran Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Kabupaten/Kota di Sumsel, 2020.....	II.86
Gambar 2.8 Analisis Kuadran Pertumbuhan Ekonomi dan IPM Kabupaten/Kota di Sumsel, 2020.....	II.87
Gambar 4.1 Peta Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten Musi Rawas.....	IV.20
Gambar 4.2 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 Dengan Prioritas Nasional Tahun 2022.....	IV.73

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas merupakan rencana kerja pemerintah tahunan yang diawali dengan penyusunan Rancangan Awal RKPD. Penyusunan Rancangan Awal RKPD berpedoman pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026, rancangan awal RKPD Provinsi Sumatera Selatan, rancangan awal RKP (Rencana Kerja Pemerintah), program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 75 Ayat (2) Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Setelah diterbitkannya Permendagri No. 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, menjadi babak baru bagi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Nomenklatur yang semula hanya pada level Program dan Kegiatan, kini menjadi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Pengelolaan data perencanaan pembangunan yang semula menggunakan SIMDA, kini harus berganti menggunakan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) yang disediakan oleh Kemendagri.

RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun. Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, RKPD mempunyai

kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dokumen RKPD secara umum mempunyai nilai strategis, antara lain:

1. Merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD;
2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja OPD, berupa program/kegiatan OPD dan/atau lintas OPD;
3. Mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD;
4. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD;
5. Menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan bahwa APBD telah disusun dengan berlandaskan RKPD.

Mengingat posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana telah dikemukakan di atas, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas memberikan perhatian dan daya upaya optimal secara sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD agar dapat menghasilkan dokumen RKPD yang berkualitas. Karakter RKPD yang berkualitas dimaknai dengan RKPD yang memenuhi kriteria antara lain:

1. Disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya;
2. Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD pada tahun berkenaan;
3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Musrenbang;
4. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) untuk program dan indikator kinerja keluaran (output) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur;
5. Program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan RKPD.

Pada tahap persiapan ini serangkaian aktivitas yang dilakukan meliputi:

- a. Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
- b. Orientasi mengenai RKPD oleh tim penyusun RKPD;
- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD;
- d. Penyiapan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

2. Penyusunan rancangan awal RKPD.

Pada tahap penyusunan rancangan awal RKPD aktivitas yang dilakukan terdiri atas perumusan dan penyajian rancangan awal RKPD.

a. Perumusan rancangan awal RKPD.

Dilakukan melalui serangkaian kegiatan berikut:

- 1) Pengolahan data dan informasi;
- 2) Analisis gambaran umum kondisi daerah;
- 3) Analisis ekonomi dan keuangan daerah;
- 4) Evaluasi kinerja tahun lalu;
- 5) Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah nasional;
- 6) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Musi Rawas;
- 7) Perumusan permasalahan pembangunan Kabupaten Musi Rawas;
- 8) Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah;
- 9) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif;
- 10) Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif;
- 11) Pelaksanaan forum konsultasi publik;

Forum Konsultasi Publik dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2022 dengan peserta dari stakeholder pelaku pembangunan yaitu, perwakilan dari organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, insan pers, dunia akademisi serta dari organisasi perangkat daerah.

Gambar 1.1. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Tahun 2022



Gambar 1.2. Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Forum Konsultasi Publik Tahun 2022 dalam rangka penyusunan RKPd Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023



b. Penyajian rancangan awal RKPD.

Rancangan awal RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

- 1) Pendahuluan;
- 2) Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
- 3) Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
- 4) Prioritas dan sasaran pembangunan;
- 5) Rencana program prioritas daerah.

3. Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan

Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan dilaksanakan pada bulan Januari 2022. Musrenbang di masing-masing Desa/Kelurahan dimaksudkan untuk membahas usulan kegiatan di tingkat desa untuk menghasilkan kesepakatan akan yang diusulkan di musrenbang kecamatan.

Gambar 1.3 Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa





4. Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan

Musrenbang tingkat Kecamatan dilaksanakan pada minggu I sampai dengan minggu III bulan Februari 2021. Musrenbang di masing-masing Kecamatan diawali dengan pelaksanaan pramusrenbang, dimana pada pelaksanaan pramusrenbang dilakukan pembahasan trilateral desk antara perwakilan desa, pihak kecamatan serta OPD. Dalam trilateral desk dilakukan penentuan usulan kegiatan berdasarkan skala prioritas dan verifikasi dari OPD. Hasil kesepakatan trilateral desk tersebut yang dibawa pada waktu pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan untuk disepakati oleh para pihak.

Gambar 1.4. Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan Tahun 2022





5. Penyusunan rancangan RKPD.

Penyusunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja OPD. Verifikasi sebagaimana dimaksud, adalah mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif pada setiap rancangan Renja OPD sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD.

6. Pelaksanaan Forum Organisasi Perangkat Daerah

Forum Organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan pada tanggal 22-25 Maret 2022. Proses yang cukup banyak serta panjang dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud, mencakup:

- a. Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan.
- b. Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas pada musrenbang.

- c. Indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Musi Rawas
- d. Prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.
- e. Sinergi dengan RKPD Provinsi Sumatera Selatan dan RKP

Gambar 1.5 Forum Organisasi Perangkat Daerah



7. Pelaksanaan Musrenbang RKPD.

Musrenbang RKPD dalam pelaksanaannya dilakukan setelah pelaksanaan Forum Perangkat Daerah. Selain itu juga diadakan kesepakatan bersama antara OPD, Bappeda Kabupaten Musi Rawas dengan stakeholder pembangunan.

Gambar 1.6 Musrenbang RKPD Tahun 2022 untuk Penyusunan RKPD 2023



Gambar 1.7 Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2022 untuk Penyusunan RKPD 2023



8. Perumusan rancangan akhir RKPD.
Berita acara hasil kesepakatan musrenbang RKPD dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD.
9. Fasilitasi rancangan akhir RKPD
Memenuhi amanat Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 102 yang mengatur dan menerangkan proses dan tata cara pengendalian dan evaluasi Dokumen Rancangan Akhir RKPD Kabupaten/Kota, maka rancangan akhir RKPD Kabupaten Musi Rawas diserahkan kepada Bappeda Provinsi Sumatera Selatan untuk difasilitasi. Hasil fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dijadikan bahan perbaikan rancangan akhir RKPD sebelum ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

10. Penetapan RKPD.

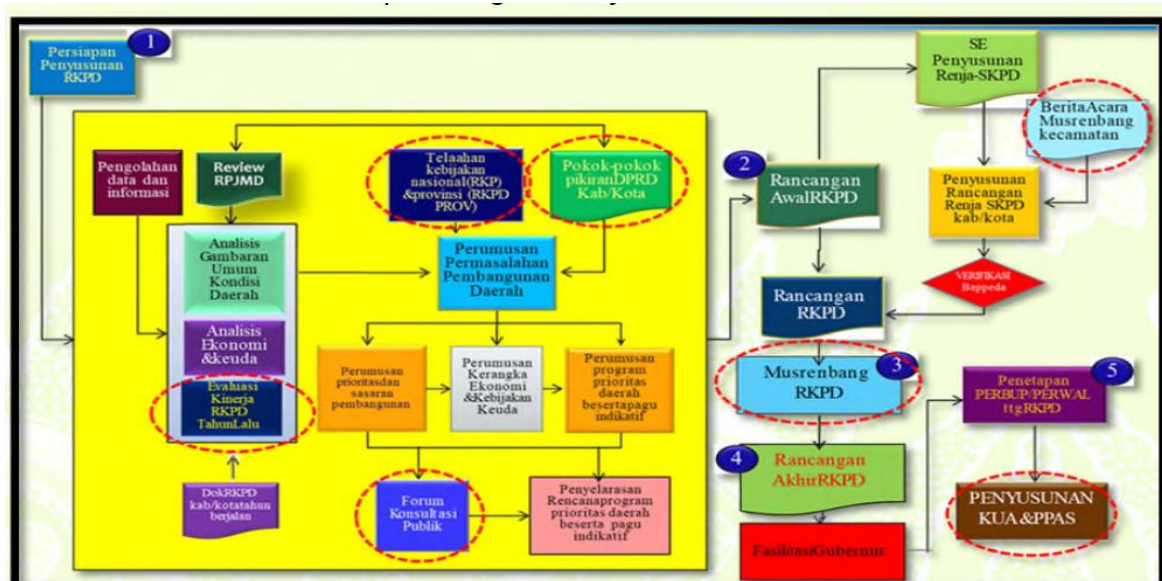
RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas setelah dilaksanakan fasilitasi RKPD Kabupaten Musi Rawas oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, hal ini diharapkan agar terjadi keselarasan antara perencanaan Kabupaten Musi Rawas dengan Provinsi Sumatera Selatan serta Pemerintah Pusat.

Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah diselaraskan dengan prioritas pembangunan di tingkat provinsi dan prioritas pembangunan di tingkat nasional, RKPD Tahun 2023 yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah merupakan bagian dari rencana pembangunan tahunan ke-3 (tiga) RPJMD Kabupaten Musi Rawas 2021-2026. Selanjutnya, akan digunakan sebagai landasan penyusunan rancangan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2023.

Diagram alir proses penyusunan RKPD sampai dengan penyusunan APBD disajikan dalam Gambar berikut ini.

Gambar 1.8

Alur Proses Penyusunan RKPD Sampai dengan Penyusunan APBD



Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 ini antara lain :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6794);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 7).

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas yang dituangkan dalam RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 sinkron dengan arah pembangunan yang dimuat dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional, dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dan dokumen perencanaan Kabupaten Musi Rawas.

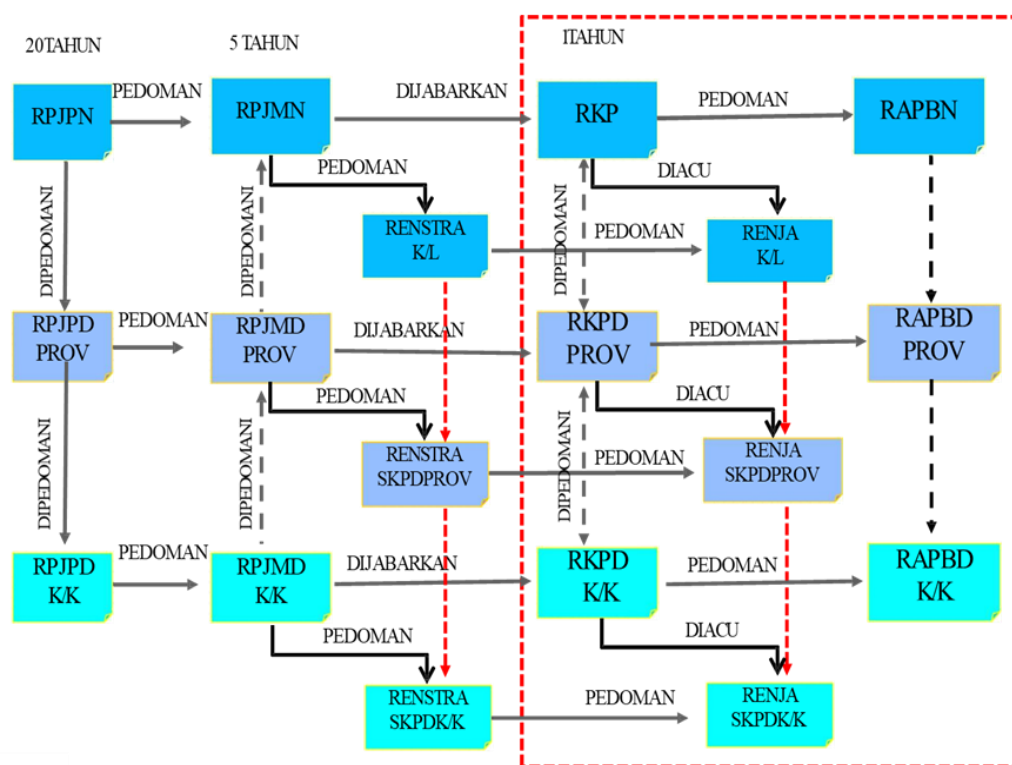
1.3.1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas yang dituangkan dalam RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 sejalan dengan

arah pembangunan yang dimuat dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional, dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dan dokumen perencanaan Kabupaten Musi Rawas. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Skema hubungan antara dokumen di tiap tingkat pemerintahan disajikan pada Gambar berikut ini :

Gambar 1.9 Hubungan Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah dan OPD



Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing - masing, selain itu juga dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Secara lengkap penjelasan masing-masing dokumen yang terkait dengan

penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023

RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 juga disusun dengan memperhatikan pada kebijakan RKP Tahun 2023 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023. RKP dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut sebagai acuan untuk mewujudkan sinergitas kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas dengan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan memastikan bahwa prioritas nasional sudah terintegrasi dalam RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2019-2023

Penyusunan RKPD Tahun 2023 memperhatikan dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, guna mewujudkan sinergitas kebijakan pembangunan Kabupaten Musi Rawas dengan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi, sehingga kebijakan pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Musi Rawas akan mendukung kebijakan pembangunan jangka menengah di tingkat provinsi.

3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

Guna mewujudkan sinergitas kebijakan pembangunan Kabupaten Musi Rawas dengan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi, kebijakan pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Musi Rawas tidak bertentangan dengan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi, untuk itu penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 mengacu dokumen RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023.

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026

RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 merupakan penjabaran Tahun ke

tiga RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026. RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas periode 2021-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Bupati Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2021.

5. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD)

Renstra OPD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang memuat program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026. Renstra OPD tersebut sebagai pedoman penyusunan Renja OPD Tahun 2023.

7. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)

RKPD Tahun 2023 akan menjadi acuan bagi OPD dalam menyusun dokumen Renja OPD Tahun 2023 sebagai rencana pembangunan tahunan di tingkat perangkat daerah sesuai dengan kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata perangkat daerah.

1.3.2 Kerangka Pikir Penyusunan RKPD Tahun 2023

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di Kabupaten Musi Rawas disusun dengan 4 (empat) agenda pembahasan substansi, yaitu :

1. Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Pada proses penyusunan rancangan awal RKPD merupakan tahapan awal yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang didalam proses penyusunannya dilakukan melalui beberapa mekanisme pembahasan substansi rancangan awal, melalui Arahan Bupati Musi Rawas kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Musi Rawas dan Arahan Bupati Musi Rawas kepada OPD. Arahan Bupati Musi Rawas tersebut selanjutnya menjadi bahan rancangan awal (rancangan teknokratis) RKPD yang dikonsultasikan kepada publik melalui Forum Konsultasi Publik.

2. Penyusunan Rancangan RKPD

Pada proses penyusunan Rancangan RKPD disusun berdasarkan masukan dari hasil pelaksanaan Konsultasi Publik dan masukan pokok – pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas, serta rancangan program/kegiatan OPD. Produk Rancangan RKPD tersebut selanjutnya akan menjadi masukan didalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Tahun 2023 untuk penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023.

3. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD

Rancangan akhir RKPD merupakan bagian dari rumusan finalisasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023. Produk rancangan akhir RKPD disusun mengacu dari hasil pelaksanaan forum-forum yang diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian proses Musrenbang Kabupaten Musi Rawas dan sudah memuat hasil kesepakatan pembahasan substansi termasuk didalamnya rumusan program/kegiatan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas;

4. Penetapan RKPD

Penetapan RKPD 2023 mengacu pada RKP, RKPD Provinsi Sumatera Selatan dan RPJMD Kabupaten Musi Rawas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas.

1.3.3 Prinsip dan Pendekatan

RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 disusun oleh Pemerintah Daerah secara swakelola dengan melibatkan stakeholder terkait sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Hal tersebut sesuai dengan regulasi yang mengatur mengenai perencanaan daerah dan didasarkan pada pertimbangan bahwa RKPD merupakan salah satu dokumen perencanaan publik, sehingga menjadi kewajiban aparat pemerintah daerah untuk menyusun mengimplementasikan dan mempertanggungjawabkannya.

Dalam rentang kendali untuk memastikan bahwa output hasil penyusunan yang berkualitas, taat regulasi dan operasional, maka pendekatan dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 menggunakan prinsip sebagai berikut:

Tabel 1.1.

Prinsip Penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023

PRINSIP	INDIKATOR
Keterkaitan	Tersedianya penjelasan mengenai keterkaitan antara Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten RKPD dengan RPJMD, RPJP, RKP, RKPD provinsi serta program prioritas daerah dengan provinsi dan nasional.
Kolaboratif	Dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan.
Kewilayahan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan. • Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki, sesuai dengan dinamika

Dalam aspek yang lain penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan yang berorientasi pada proses dan pendekatan yang berorientasi pada substansi. Detil konfigurasi orientasi pendekatan penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2.

Pendekatan Penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023
Yang Berorientasi Pada Proses

PENDEKATAN	PARAMETER
Teknokratik	Dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah
	Ketersediaan dan kelengkapan sumber data dan informasi dalam penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023.
Partisipatif	Dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan, untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

Politik	Dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD) yang dibahas bersama dengan DPRD.
	Saran dan pendapat DPRD yang disampaikan melalui Pokok – Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Musi Rawas dalam RKPD Kabupaten Musi Rawas tahun 2023.
Atas-bawah (<i>topdown</i>)	Sinkronisasi dan sinergitas Prioritas Daerah Dalam RKPD Kabupaten Musi Rawas dengan Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2023 dan Prioritas Provinsi Sumatera Selatan dalam RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023.
Bawah-atas (<i>bottom-up</i>)	Sinkronisasi usulan dari Musrenbangdes/Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas tahun 2023.
	Partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 melalui forum konsultasi publik.

Selain itu dalam penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas tahun 2023 yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan sebagai berikut:

Tabel1.3.

**Pendekatan Penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023
Yang Berorientasi Pada Substansi**

PENDEKATAN	PARAMETER
Holistik-Tematik	Dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan 3 unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
Integratif	Menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
Spasial	Dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1. Maksud

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk :

- a. Memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023;
- b. Menjadi acuan dalam penyusunan rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023;

1.4.2. Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Rawas (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 bertujuan mewujudkan sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RKPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan penyusunan RKPD, serta sistematika dokumen.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Berisi gambaran umum kondisi daerah dan hasil evaluasi RKPD tahun 2021, secara ringkas yaitu :

1. Kondisi Umum Daerah menjelaskan tentang kondisi daerah mencakup aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

2. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun 2021.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat arah kebijakan pembangunan daerah jangka panjang (RPJPD) tahap IV (masa transisi), serta prioritas pembangunan dengan memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD, arah kebijakan nasional, Provinsi dan Kabupaten Musi Rawas, serta keterkaitan arah kebijakan pada tiap tingkatan pemerintahan.

Bab IV juga memberi landasan bagi penyiapan formulasi kebijakan pembangunan daerah jangka panjang tahap IV sebagai bagian dari masa transisi sebelum ditetapkan RPJMD yang baru.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat rencana program prioritas dan kegiatan prioritas daerah tahun 2023 yang disusun berdasarkan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023, yang mempedomani RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026, RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 dan RPJMN Tahun 2019-2024.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang

ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun rencana.

BAB VII PENUTUP

Memuat kesimpulan dari dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023 di Kabupaten Musi Rawas.

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah**

Kabupaten Musi Rawas adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Kabupaten Musi Rawas terbentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan. Ibukota Kabupaten Musi Rawas terletak di Kecamatan Muara Beliti berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Musi Rawas Nomor 08/KPTS/DPRD/2004 tentang persetujuan usulan nama ibukota dan lokasi pusat pemerintahan.

Kabupaten Musi Rawas memiliki 14 Kecamatan, terdiri dari 13 Kelurahan dan 186 Desa. Jumlah penduduk Kabupaten Musi Rawas tahun 2021 berjumlah 410.210 jiwa dan luas wilayah sebesar 6.357,17 Km² dengan kepadatan penduduknya mencapai 63,52 jiwa/km². Kabupaten Musi Rawas dapat ditempuh melalui transportasi darat dan udara. Melalui darat menggunakan angkutan umum (Kereta Api, Bus, Travel) dan Udara dengan Pesawat langsung dari bandara Soekarno-Hatta Jakarta dan bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang ke Bandara Silampari.

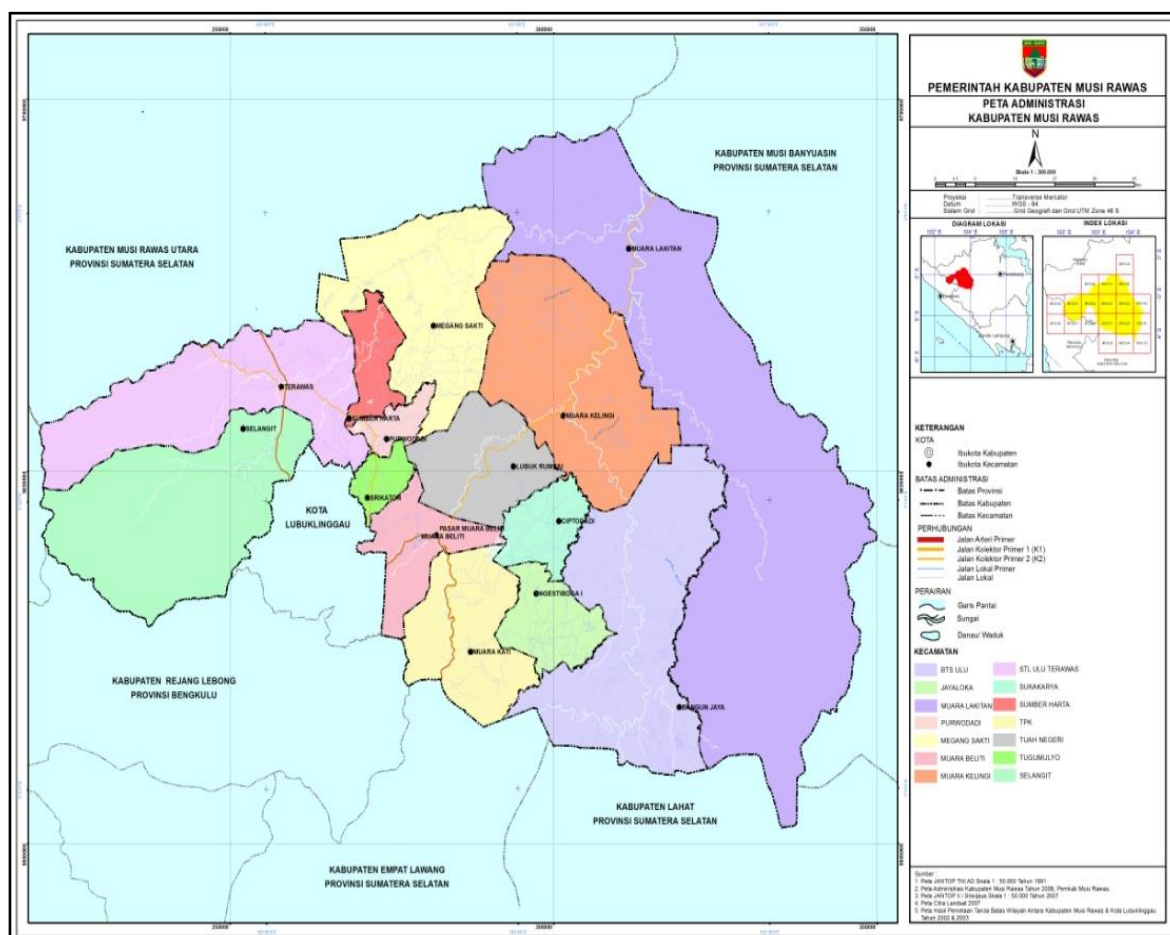
2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis**A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah**

Kabupaten Musi Rawas secara geografis terletak pada posisi $102^{\circ}30'00''$ – $103^{\circ}40'10''$ Bujur Timur dan $03^{\circ}05'00''$ – $03^{\circ}38'40''$ Lintang Selatan dengan luas wilayah sebesar 635.717,15 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas Utara.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Lahat.

- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kota Lubuklinggau dan Provinsi Bengkulu.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dan Kabupaten Musi Banyuasin.

Gambar 2.1 Peta Admistrasi Kabupaten Musi Rawas



Kabupaten Musi Rawas memiliki 14 Kecamatan, terdiri dari 13 Kelurahan dan 186 Desa dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1

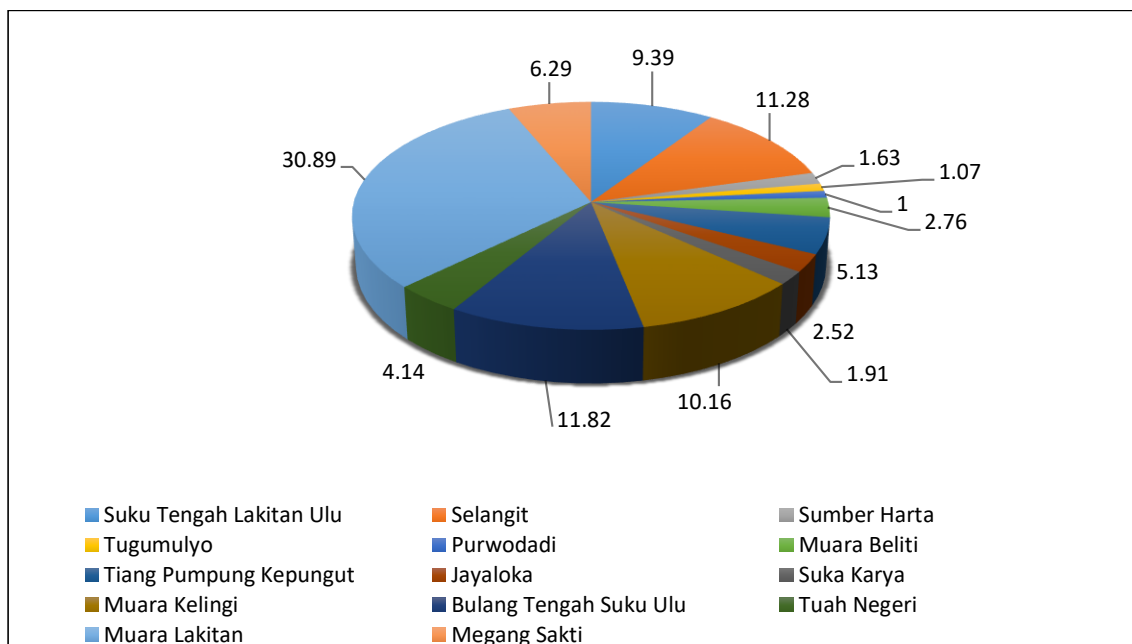
Jumlah Kelurahan, Desa dan Luas Wilayah di Kab. Musi Rawas

No	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas Wilayah (Ha)
1	Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas	1	12	596,92
2	Selangit	1	11	717,34
3	Sumber Harta	1	9	103,78
4	Tugumulyo	1	17	67,71
5	Purwodadi	2	9	63,26
6	Muara Beliti	1	11	175,63

No	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas Wilayah (Ha)
7	Tiang Pumpung Kepungut	0	10	326,42
8	Jayaloka	1	12	160,46
9	Sukakarya	0	8	121,53
10	Muara Kelingi	1	20	645,82
11	Bulang Tengah Suku Ulu	1	18	751,54
12	Tuah Negeri	0	11	263,45
13	Muara Lakitan	1	19	1.963,54
14	Megang Sakti	2	19	399,78
J U M L A H		13	186	6.357,17

Sumber : BPS Kab. Musi Rawas Tahun 2020

Grafik 2.1
Persentase Terhadap Luas Wilayah (Ha) Menurut Kecamatan
di Kabupaten Musi Rawas



Sumber : BPS Kab. Musi Rawas Tahun 2020

Kondisi fisik Kabupaten Musi Rawas mempunyai topografi yang bergelombang, dengan ketinggian berkisar 25-1000 m dari permukaan laut, dengan kemiringan bervariasi dari 0-2%, sampai lebih dari 40%. Luas wilayah yang dominan adalah wilayah dengan kemiringan 0-15% yang merupakan daerah potensial untuk pertanian, selebihnya berupa tanah perbukitan yang mempunyai kemiringan sangat curam yang sebagian besarnya berupa Bukit Barisan yang memanjang dari utara sampai selatan, khususnya di bagian barat daerah ini yang termasuk kedalam kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) yang

membentang luas dalam 4 (empat) provinsi. Keadaan alam Kabupaten Musi Rawas terdiri dari hutan potensial, sawah, ladang, kebun karet dan kebun lainnya. Di Kabupaten Musi Rawas tidak terdapat gunung berapi, sedangkan di sebelah barat terdapat dataran rendah yang sempit dan berbatasan dengan bukit barisan.

Keadaan tanah di Kabupaten Musi Rawas secara umum cocok untuk perkebunan, khususnya perkebunan karet dan sawit. Hal ini sangat mendukung perekonomian masyarakatnya yang banyak menggantungkan penghidupan pada perkebunan. Keadaan tanah di Kabupaten Musi Rawas terbagi atas beberapa jenis, antara lain jenis aluvial, litosol, asosiasi latisol, regosol, podsolik, dan asosiasi podsolik. Penyebaran jenis tanah di Kabupaten Musi Rawas terdiri dari :

1. *Aluvial* dengan ciri warna coklat kekuning-kuningan terbentuk oleh endapan liat dan pasir dijumpai di Kecamatan Tugumulyo dan Muara Kelingi. Tanah jenis ini seluas $\pm 8,05\%$ dari luas kabupaten dan sangat cocok untuk tanaman padi dan palawija.
2. *Litosol* seluas $\pm 7,17\%$ dari luas kabupaten baik dimanfaatkan untuk tanaman keras, rumput-rumputan dan usaha ternak.
3. *Asosiasi Latisol* hanya terdapat di kecamatan STL Ulu Terawas.
4. *Regosol* luasnya sama seperti asosiasi latisol, di mana $\pm 55,89\%$ berada di Kecamatan Muara Beliti, yang diidentifikasi sangat cocok untuk budidaya tanaman padi sawah, palawija dan tanaman keras lainnya.
5. *Podsolik* merupakan jenis tanah terluas di Kabupaten Musi Rawas. Sebagian besar terdapat di Kecamatan Muara Lakitan dan Kecamatan Jayaloka, baik untuk tanaman padi sawah, padi ladang dan tanaman karet.
6. *Asosiasi Podsolik* hanya terdapat di Kecamatan Muara Lakitan.

Kabupaten Musi Rawas dialiri oleh empat sungai utama yang utamanya dapat dilayari, yaitu Sungai Musi, Sungai Lakitan, Sungai Kelingi dan Sungai Semangus. Selain itu, masih terdapat sungai-sungai lainnya yang merupakan anak sungai-sungai utama tersebut seperti Sungai Keruh, Sungai Lintang dan Sungai Kungku yang merupakan anak dari Sungai Musi. Selain memiliki sungai-sungai besar, di Kabupaten Musi Rawas terdapat danau yaitu Danau Aur di Kecamatan

Sumber Harta dan Danau Gegas di Kecamatan Suka Karya. Selain fungsinya sebagai penampung air, danau ini juga merupakan potensi wisata bagi Kabupaten Musi Rawas.

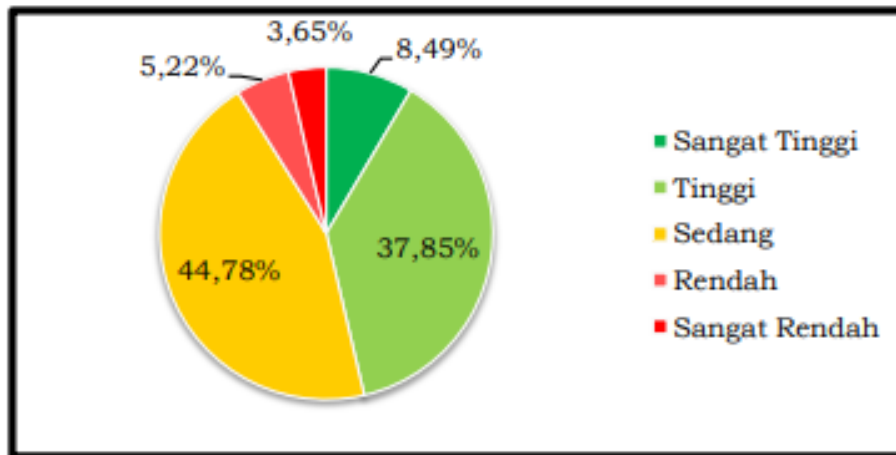
Kabupaten Musi Rawas yang sebagian besar merupakan kawasan hutan dengan beberapa jenis tumbuhan seperti jenis tanaman kayu merawan, sungkai, merbau, kolim, rotan dan jenis tumbuhan kayu lainnya.

Wilayah Kabupaten Musi Rawas berada di ketinggian 129 meter dpl, terdiri dari 66,5% dataran rendah yang subur dengan struktur 62,75% tanah liat. Keadaan alam wilayah Kabupaten Musi Rawas terdiri atas hutan potensial, sawah, ladang, kebun karet, cadas dan kebun lainnya. Di sebelah Barat terdapat dataran rendah yang sempit dan berbatasan dengan bukit barisan, dataran ini semakin ke Timur semakin luas.

Ekosistem menyediakan serat alami yang meliputi serat yang diproduksi oleh tumbuh-tumbuhan, hewan, dan proses geologis. Serat alami dapat digolongkan ke dalam (1) serat tumbuhan /serat pangan, (2) serat kayu, (3) serat hewan, dan (4) serat mineral seperti logam dan carbon. Sebagian besar wilayah Kabupaten Musi Rawas mempunyai klasifikasi sedang untuk penyediaan serat. Luasnya mencapai 282.209,62 hektar atau 44,78% dari luas total wilayah. Klasifikasi tinggi mempunyai luas 238.531,31 hektar atau 37,85% yang berada di Kecamatan Muara Lakitan. Klasifikasi sangat tinggi di Musi Rawas mencapai 53.499,33 hektar atau 8,49% yang juga berada di Kecamatan Muara Lakitan seluas 29.545,56 hektar. Luasan untuk klasifikasi penyediaan serat rendah seluas 32.908,4 hektar atau 5,22% sedangkan yang sangat rendah seluas 23.020,31 hektar atau 3,65% dan berada di Kecamatan Tugumulyo dengan luas 4.526,24 hektar.

Grafik 2.2

Persentase Luas Lahan Berdasarkan Klasifikasi Jasa Ekosistem Penyediaan Serat Kabupaten Musi Rawas

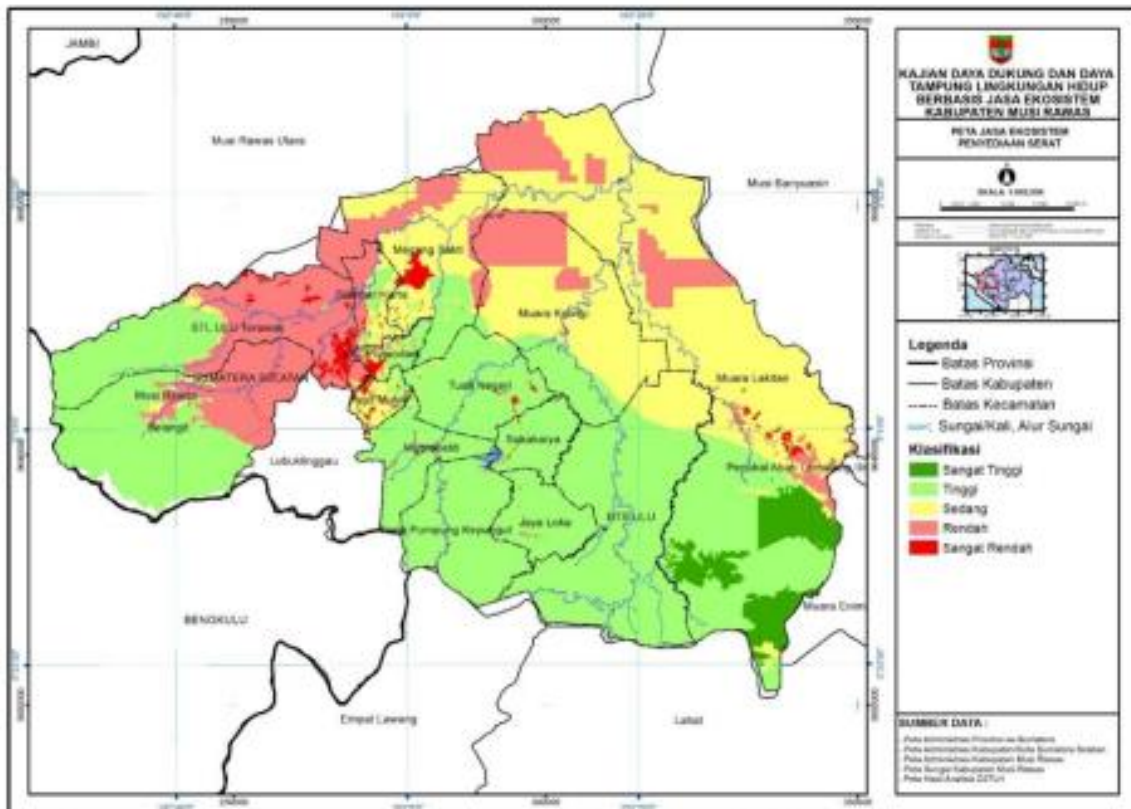


Sumber : Kajian DDDTLH Kabupaten Musi Rawas, 2020

Penyediaan serat mempunyai potensi tinggi di penggunaan lahan dengan komoditas yang menghasilkan serat. Penggunaan lahan sawah, semak belukar dan hutan termasuk dalam klasifikasi tinggi. Padi di sawah merupakan bagian dari tanaman yang menghasilkan serat pangan, baik dari tumbuhannya maupun biji padi. Beberapa jenis pohon di hutan yang dimanfaatkan seratnya untuk bahan baku industri. Contoh kayu jarum (softwood) dan kayu daun (hardwood) untuk dimanfaatkan seratnya untuk pulp dan kertas. Fauna yang ada di hutan juga menjadi sumber serat hewan. Kawasan hutan perlu dijaga kelestariannya selain untuk menjaga fungsi lindung juga melindungi sumber serat. Pemanfaatan hutan untuk bahan baku industri harus dikendalikan agar tidak mengurangi fungsi lindung. Penggunaan lahan lainnya memiliki potensi rendah untuk penyediaan serat seperti permukiman atau tegalan /ladang.

Gambar 2.2

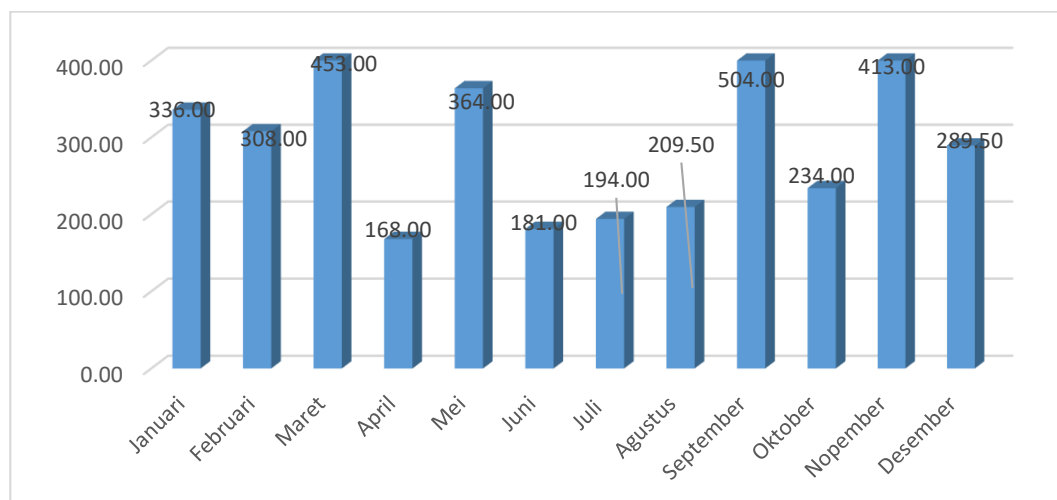
Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Serat



Sumber : Kajian DDDTLH Kabupaten Musi Rawas, 2020

Kabupaten Musi Rawas memiliki iklim tropis dan basah dengan curah hujan rata-rata per bulan pada tahun 2021 sebesar 285,50 mm dengan rata-rata hari hujan 18 hari per bulannya. Curah hujan rata-rata tertinggi dan hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Maret dan September.

Grafik 2.3
Curah Hujan Dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021



Sumber : Musi Rawas Dalam Angka 2022

Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama atau etnisitas tertentu. Dengan demikian data kependudukan adalah segala tampilan data penduduk dalam bentuk resmi maupun tidak resmi yang diterbitkan oleh Badan-badan pencatatan kependudukan (pemerintah maupun nonpemerintah), dalam berbagai bentuk baik angka, grafik, gambar dan lain-lain. Secara khusus UU No.24 Tahun 2013 pasal 1 point 9 menyebutkan bahwa data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Musi Rawas secara umum dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Kebijakan pemerintah dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk berorientasi pada penurunan tingkat kelahiran dan kematian serta meningkatkan mobilitas penduduk. Upaya untuk menurunkan tingkat kelahiran antara lain dengan mendorong kegiatan, seperti penundaan usia perkawinan, penggunaan alat kontrasepsi, dan kampanye program KB. Sementara upaya menurunkan kematian dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Penduduk Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2021 berjumlah 410.210 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Musi Rawas dengan perbandingan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 209.840 jiwa dan perempuan sebanyak 200.370 jiwa. (Sumber : Kemendagri, 2021).

Dengan luas wilayah sebesar 6.357,17 Km² maka tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Musi Rawas adalah 62,93 jiwa/km².

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Musi Rawas

	KECAMATAN	Data Agregat Kependudukan		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Tugumulyo	24,541	23,990	48,531
2.	Muara Lakitan	21,847	20,351	42,198
3.	Muara Kelingi	22,542	21,354	43,896
4.	Jayaloka	8,576	8,190	16,766
5.	Muara Beliti	13,862	13,489	27,351
6.	STL. Ulu Terawas	17,075	16,333	33,408
7.	Selangit	10,103	9,637	19,740
8.	Megang Sakti	29,233	27,598	56,831
9.	Purwodadi	8,147	7,946	16,093
10.	BTS. Ulu	15,677	14,836	30,513
11.	Tiang Pumpung Kepungut	6,414	6,196	12,610
12.	Sumber Harta	9,660	9,327	18,987
13.	Tuah Negeri	14,214	13,546	27,760
14.	Suka Karya	7,949	7,577	15,526
TOTAL		209,840	200,370	410,210

(Sumber : Data Kemendagri 2021).

B. Potensi Pengembangan Wilayah

Karakteristik wilayah Kabupaten Musi Rawas maka dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya dan kawasan lindung. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2031, kawasan budidaya di Kabupaten Musi Rawas terdiri dari:

1. Kawasan Hutan Produksi

Di Kabupaten Musi Rawas kawasan hutan produksi yang ada berupa: Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), dan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK). Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas 2011-2031 pengelolaan kawasan hutan produksi diarahkan untuk Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Tetap (HP), sedang kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) akan dialihgunakan untuk pengembangan perkebunan (kelapa sawit dan karet) melalui program agropolitan.

a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)

Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi hutan produksi terbatas di mana eksplorasinya hanya dapat dengan tebang pilih dan tanam. Luas Kawasan HPT sebesar 7.385,84 Ha, sebagian besar berada di Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas dan menempati lereng 16-40%, dengan jenis tanah seperti *podsolik haplik* dan *kambisol eutrik*. Batuan permukaan sedang dan bahaya erosi sedang-tinggi. Sebagian kawasan ini telah dirambah masyarakat dan digunakan untuk budidaya karet rakyat secara tradisional dan kegiatan perladangan.

Pengelolaan kawasan hutan produksi terbatas ini diarahkan agar selain dapat memberikan fungsi ekologis serta menghasilkan kayu hutan juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan hutan. Untuk itu pada kawasan hutan produksi terbatas yang telah dirambah oleh masyarakat sekitar hutan perlu dikembangkan kebijakan pola pengelolaan kawasan hutan yang melibatkan partisipasi masyarakat, melalui program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), yakni model pengelolaan

hutan partisipatif yang melibatkan masyarakat sekitar hutan sebagai subyek pembangunan perhutanan. Dengan demikian diharapkan kawasan hutan ini akan menjadi basis ekonomi rakyat sekitar hutan. Untuk itu penanaman tanaman sela yang memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat, seperti karet dan tanaman buah-buahan (rambutan, durian, nangka, cempedak, dll) dapat dikembangkan. Selain itu di kawasan ini juga cocok untuk pengembangan APIARI (Perlebahan) untuk menghasilkan madu.

Untuk meningkatkan pengayaan vegetasi dan tutupan lahan, maka pada areal-areal yang masih gundul atau bervegetasi jarang dapat dilakukan program reboisasi sebagai pemulihan dan pengkayaan keaneka-ragaman jenis dengan melakukan penanaman jenis-jenis kayu yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti: Merbau (*Intsia bijuga*), Bintangur (*Calophyllum inophyllum*), Mersawa (*Anoisoptera polyandra*), Nyatoh (*Palaquium gutta*), Terentang (*Camptosperma auriculata*), Medang (*Litsea firma*), Terap (*Artocarpus spp*), dan lain-lain. Diharapkan dengan pengelolaan hutan bersama masyarakat ini, maka kegiatan perambahan hutan dapat dikendalikan.

b. Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP)

Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi hutan produksi tetap di mana eksplorasinya hanya dapat dengan tebang pilih atau tebang habis dan tanam. Luas kawasan ini sebesar 177.976,26 Ha, sebagian besar menyebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Musi Rawas, antara lain: Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas, Kecamatan Jayaloka, Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu, Kecamatan Muara Kelingi, Kecamatan Muara Lakitan, dan Kecamatan Megang Sakti. Sebagian besar kawasan ini menempati lereng 16-40%, dengan jenis tanah berupa jenis tanah *podsolik haplik*, *kambisol eutrik*, dan *gleisol histik*. Batuan permukaan rendah-sedang dan bahaya erosi rendah-sedang. Sebagian kawasan ini telah dirambah masyarakat dan digunakan untuk budidaya karet rakyat secara tradisional dan kegiatan perladangan. Pengelolaan kawasan hutan produksi tetap ini diarahkan agar selain dapat memberikan fungsi ekologis serta menghasilkan kayu hutan juga dapat

memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan. Untuk itu pada kawasan hutan produksi tetap dapat dikembangkan melalui kemitraan dengan pihak swasta melalui program pengembangan Hutan Tanaman Industri (HTI). Selain itu kawasan hutan produksi tetap juga dapat dikelola bersama masyarakat (baik perorangan maupun kelompok/koperasi) melalui program Hutan Tanaman Rakyat (HTR), sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007, Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Petani hutan dapat mengelola hutan produksi dengan luasan tertentu, dalam jangka waktu tertentu dengan cara melakukan penanaman sampai pemasaran, melalui HTR secara legal. Diharapkan pengelolaan hutan melalui partisipasi masyarakat ini dapat meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dan secara khusus kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan dengan menerapkan sistem silvikultur intensif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan, yang dilakukan melalui peran aktif masyarakat di sekitar hutan.

c. Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK)

Hutan konversi ialah hutan produksi yang dapat diubah peruntukannya untuk memenuhi kebutuhan perluasan pengembangan wilayah di luar bidang kehutanan, misalnya transmigrasi, pertanian, perkebunan, industri, pemukiman dan lain-lain. Luas kawasan ini sebesar 7.385,84 Ha berada di Kecamatan Muara Kelingi dan Kecamatan Muara Lakitan.

2. Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan Peruntukan Pertanian merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan. Di Kabupaten Musi Rawas kawasan pertanian meliputi kawasan budidaya tanaman pangan, kawasan budidaya hortikultura dan kawasan budidaya perkebunan.

a. Kawasan Budidaya Tanaman Pangan

Kawasan budidaya tanaman pangan diarahkan dan direncanakan pada lahan basah di mana pengairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis. Dalam hal ini yang dimaksud adalah sawah baik yang beririgasi maupun tidak. Kawasan budidaya tanaman pangan sebagian besar menyebar di

Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas, Sumber Harta, Tugumulyo, Purwodadi, Megang Sakti, Muara Beliti dan Muara Lakitan.

- *Kawasan Pertanian Lahan Basah Beririgasi*

Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan basah di mana pengairannya dapat diperoleh secara irigasi, baik yang secara teknis bisa ditanami padi satu kali atau pun dua kali per tahun. Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan basah dengan pengairan secara irigasi teknis. Kawasan ini berupa dataran datar dengan jenis tanah aluvial yang memiliki status kesuburan tinggi dan dilengkapi infrastruktur irigasi teknis yang dibangun sejak pemerintahan Hindia Belanda.

Arahan pengelolaan kawasan ini ditujukan untuk mempertahankan fungsi kawasan sebagai lumbung padi dan tidak terjadi alih fungsi lahan, serta meningkatkan produktivitasnya melalui rehabilitasi sarana/jaringan irigasi dan jalan usaha tani, sehingga dapat mendorong peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dari IP-200 menjadi IP-300, dengan pola tanam: Padi-Padi-Palawija/Hortikultura atau Padi-Padi-Padi.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat mengenai lahan sawah abadi untuk mempertahankan fungsi sawah irigasi, maka pemerintah Kabupaten Musi Rawas akan melakukan pengendalian alih fungsi lahan sawah irigasi melalui instrumen insentif dan disinsentif. Petani yang tetap mempertahankan sawahnya untuk budidaya padi mendapat insentif berupa keringan pajak dan subsidi sarana produksi pertanian. Sedangkan bagi yang melanggar/melakukan alih fungsi sawah menjadi non sawah wajib dikenakan pajak 10 kali lipat dan dikenakan denda penggantian biaya pembangunan sarana dan prasarana irigasi.

- *Kawasan Pertanian Lahan Basah Tadah Hujan*

Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan basah di mana pengairannya sepenuhnya tergantung pada hujan. Kawasan ini menempati areal dengan topografi datar, jenis tanah aluvial dan gleisol, dan status kesuburan tinggi. Kawasan ini menyebar secara spot-spot diberbagai

wilayah kecamatan di Kabupaten Musi Rawas direncanakan pada Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas dengan luas total 723 ha.

Arahan pengembangan kawasan ditujukan untuk mempertahankan agar tidak terjadi alih fungsi lahan menjadi non pertanian. Untuk itu perlu pengendalian ketat terhadap perijinan untuk peruntukan lain. Selain pengendalian terhadap alih fungsi lahan, pengembangan kawasan ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas lahan dengan input teknologi irigasi pompanisasi baik air permukaan maupun tanah dangkal, guna meningkatkan indeks pertanaman IP-200 menjadi IP-300, dengan pola tanam padi-palawija-beras menjadi padi-padi-palawija/ hortikultura.

b. Kawasan Pertanian Hortikultura

Kawasan budidaya hortikultur diarahkan dan direncanakan pada lahan kering. Kawasan diperuntukan bagi tanaman semusim di dataran rendah. Kawasan ini menempati areal dengan bentuk wilayah datar (0-8%), jenis tanah aluvial dan podsolik, dengan pola penggunaan lahan eksisting: ladang (singkong, jagung, dan padi ladang).

c. Kawasan Perkebunan

Kawasan Perkebunan merupakan kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan. Kawasan perkebunan terdapat hampir di setiap kecamatan menyebar di Kecamatan Megang Sakti, Kecamatan Muara Kelingi, Kecamatan Muara Lakitan, Kecamatan Tuah Negeri, Kecamatan Muara Beliti, Kecamatan Sukakarya, Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu, Kecamatan Jayaloka, Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Kecamatan Selangit dan Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas.

Berikut perkebunan yang akan dikembangkan di Kabupaten Musi Rawas :

- *Kawasan Pertanian Tanaman Tahunan/Perkebunan*

Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman tahunan atau perkebunan yang menghasilkan baik bahan pangan maupun bahan baku industri. Di Kabupaten Musi Rawas kawasan pertanian tanaman tahunan diperuntukkan bagi kawasan pertanian tanaman tahunan kebun karet dan

kelapa sawit. Kawasan ini menempati areal dengan lereng datar hingga agak berbukit (0-25%), jenis tanah organosol, gleisol, kambisol, dan podsolik, bahaya banjir sedang, erosi sedang, dan pola penggunaan lahan eksisting: tegalan dan semak belukar. Kawasan ini menyebar di berbagai wilayah kecamatan di Kabupaten Musi Rawas. Arah pemanfaatan kawasan ini ditujukan untuk menjaga agar kelestarian lahan dapat dipertahankan dan produktivitas lahan dapat ditingkatkan melalui pola pemanfaatan Kebun Karet dan Kelapa Sawit.

- *Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN)*

Pola pertanian ini merupakan sistem pertanian perkebunan monokultur dengan jenis komoditi kelapa sawit dan karet. Status penguasaan lahan berupa Hak Guna Usaha selama 30 tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali, kawasan ini menyebar di Kecamatan Megang Sakti, Kecamatan Muara Kelingi dan Kecamatan Muara Lakitan. Pola pengelolaan diarahkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani sekitar kawasan melalui konsep pola PIR (pola Inti-Plasma) dimana perusahaan besar swasta nasional sebagai inti dan masyarakat petani sekitar sebagai plasma, dengan distribusi penguasaan lahan sampai 40:60.

- *Perkebunan Rakyat*

Pola pertanian ini merupakan sistem pertanian perkebunan monokultur dengan jenis komoditi kelapa sawit dan karet, dengan status penguasaan lahan berupa hak milik petani. Kawasan pengembangan perkebunan rakyat dengan komoditi karet diarahkan di Kecamatan Megang Sakti, Kecamatan Tuah Negeri, Kecamatan Muara Beliti, Kecamatan Muara Kelingi, Kecamatan Sukakarya, Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu, Kecamatan Jayaloka, dan Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut. Sedangkan untuk pengembangan perkebunan rakyat dengan komoditi kelapa sawit diarahkan untuk dibagian tengah dan utara wilayah kabupaten ini, yakni di Kecamatan Muara Lakitan. Pola pengelolaan perkebunan rakyat diarahkan melalui konsep pengembangan agropolitan, secara pola ruang kawasan

agropolitan mencakup kawasan produksi dan kawasan pelayanan. Sedangkan secara struktur kawasan akan di kembangkan pusat pelayanan (kota tani), pusat pengumpul, dan desa-desa sebagai basis produksi. Untuk memudahkan pengumpulan komoditi petani dari kawasan produksi ke pusat kota tani, maka perlu dilengkapi infrastruktur jalan desa, jalan usaha tani, terminal agribisnis, dan lain-lain. Di Kota Tani akan dibangun fasilitas pemasaran, jasa keuangan, dan pusat promosi. Kota Tani sebagai agrocenter akan dibangun di Muara Beliti. Guna mempertahankan status kesuburan tanah baik di kawasan perkebunan besar swasta nasional maupun di kawasan perkebunan rakyat (agropolitan), maka secara teknis pengolahan lahan perlu dilakukan penanaman tanaman penutup (*cover crop*) dari jenis kacang-kacangan, antara lain *Calopogonium centrocema* (Cc), *Calopogonium pubesciens* (Cp), dan *Calopogonium muconoides* (Cm).

- *Kawasan Kebun Campuran*

Di kawasan non hutan, dengan bentuk wilayah agak berbukit hingga agak bergunung (16-40%), diarahkan untuk pengembangan kebun campuran (talun kebun), yaitu suatu sistem pertanian hutan tradisional dimana dalam sebidang tanah ditanami berbagai macam tanaman yang diatur secara spasial dan temporal. Tanaman buah-buahan seperti: durian, rambutan, langsung, dan alpukat dibudidayakan bersama berbagai tanaman kayu-kayuan dan tanaman pangan lainnya. Kawasan ini terutama berada di Kecamatan Selangit.

Jenis tanaman kayu-kayuan yang dikembangkan merupakan kelompok kayu tidak keras dan cepat besar seperti sengon, kaliandra, turi, dan lain-lain. Jenis kayu ini memiliki nilai ekonomis sebagai sumber kayu bakar, papan cor, dan bahan peti kemas. Di bawah tanaman buah-buahan dan kayu-kayuan dapat dikembangkan jenis tanaman semusim, seperti kacang tanah, jagung, kedelai, dan sayur-sayuran. Setelah umur 8-10 tahun jenis tanaman kayu-kayuan ditebang, sehingga tingkat naungan berkurang. Dengan demikian tanaman buah-buahan dan tanaman semusim (tanaman

pangan) memperoleh kesempatan untuk memanfaatkan penyinaran matahari secara cukup. Selama 5 (lima) tahun lahan dibersihkan dari jenis tanaman bawah dan tidak ditanami jenis kayu-kayuan, sehingga lapisan tanah atas (*top soil*) memperoleh penyinaran matahari dan diharapkan terjadi proses pematangan tanah. Namun selama lima tahun itu pula dapat dikembangkan tanaman semusim, seperti kacang tanah, jagung, kedelai, dan lain-lain. Setelah lima tahun lahan dapat kembali jenis kayu-kayuan yang tidak keras sebagai sumber kayu bakar, papan cor, peti kemas, dan lain-lain. Demikian rotasi pertanaman ini terus dilakukan, sehingga sifat fisik dan kimia tanah tetap dapat dilestarikan.

3. Kawasan Peruntukan Perikanan

Rencana pengembangan peruntukan perikanan di Kabupaten Musi Rawas diarahkan pada perikanan tangkap, budidaya perikanan air tawar serta konservasi perikanan air tawar. Budidaya ikan air tawar terdiri dari budidaya perikanan sungai, kolam, dan sawah serta pembibitan ikan. Jenis ikan budidaya yang dikembangkan antara lain ikan Nila, Mas, Patin, dan Lele.

Alokasi ruang untuk pengembangan kawasan perikanan budidaya di Kabupaten Musi Rawas disesuaikan sesuai potensi dari masing-masing kecamatan yang ada, diantaranya:

- a. Pengembangan kegiatan perikanan tangkap yang dilakukan di Sungai Musi, Sungai Lakitan dan Sungai Kelingi.
- b. Pengembangan kegiatan budidaya air deras di Kecamatan Tugumulyo, Kecamatan Muara Beliti, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Sumber Harta, Kecamatan Megang Sakti dan Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas.
- c. Pengembangan kegiatan budidaya ikan air tenang di Kecamatan Tugu Mulyo, Kecamatan Muara Beliti, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Sumber Harta, Kecamatan Megang Sakti, Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas, Kecamatan Tuah Negeri, Kecamatan Muara Kelingi, Kecamatan Muara Lakitan, dan Kecamatan Sukakarya.

- d. Kegiatan pengembangan budidaya perairan umum di Sungai Musi, Sungai Lakitan, Sungai Kelingi, Sungai Merung dan Danau Aur.
- e. Kawasan peruntukan konservasi perikanan air tawar terdapat di daerah reservat Bendungan Air Gegas.

4. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan yang diperuntukkan bagi kawasan pertambangan yang secara ekonomis mempunyai potensi bahan tambang, mencakup tambang mineral, Migas dan pertambangan batu bara. Pertambangan mineral digolongkan atas pertambangan mineral radio aktif, mineral logam, mineral bukan logam dan batuan. Pertambangan mineral tersebar di Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas, Selangit, Sumber Harta, Tugumulyo, Purwodadi, Megang Sakti, Muara Beliti, Tiang Pumpung Kepungut, Bulang Tengah Suku Ulu, Muara Kelingi dan Muara Lakitan.

Pertambangan Minyak dan Gas tersebar di Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas, Selangit, Tugumulyo, Purwodadi, Muara Beliti, Tiang Pumpung Kepungut, Jayaloka, Sukakarya, Bulang Tengah Suku Ulu, Tuah Negeri, Muara Kelingi dan Muara Lakitan.

Sedangkan Pertambangan Batubara tersebar di Kecamatan Jayaloka, Bulang Tengah Suku Ulu, Muara Kelingi dan Muara Lakitan.

Kawasan pertambangan di Kabupaten Musi Rawas meliputi kawasan pertambangan bijih besi, timah hitam, seng, emas, batuan, batubara, minyak bumi dan gas. Kawasan ini menempati areal dengan bentuk wilayah datar–berombak (0-8%), jenis tanah podsolik, dan pola penggunaan lahan eksisting perkebunan rakyat dan hutan. Arahana pemanfaatan ruang untuk pertambangan dibatasi pada areal yang telah memperoleh ijin eksploitasi dan kontrak karya. Sedangkan untuk pengembangan pada areal lainnya sangat dibatasi guna menjaga kelestarian lingkungan. Kegiatan penambangan yang sudah ada wajib memperhatikan asas kelestarian lingkungan.

5. Kawasan Peruntukan Industri

Pengembangan kawasan peruntukan industri di Kabupaten Musi Rawas, diarahkan untuk industri pengelolaan potensi sumber daya alam untuk

peningkatan nilai tambah dan produktifitas wilayah secara berkelanjutan. Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Musi Rawas, diharapkan mampu menjadi stimulus percepatan perkembangan ekonomi daerah kabupaten dan kesejahteraan masyarakat sekitar dan wilayah lebih luas, dengan tetap memperhatikan upaya mencegah pencemaran fungsi lingkungan. Sebaran pengembangan kawasan industri pengelolaan sumber daya alam diarahkan pada kawasan sekitar pusat-pusat kegiatan utama Kabupaten.

Berdasarkan uraian di atas rencana kawasan industri di Kabupaten Musi Rawas direncanakan di Desa Durian Remuk Kecamatan Muara Beliti dengan luas 50 hektar. Kawasan Industri ini akan dilengkapi dengan sarana transportasi yaitu pembangunan jalur rel kereta api dengan ruas Durian Remuk-Kota Padang, yang nantinya akan terhubung dengan jalur kereta api Lubuklinggau-Palembang.

6. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan dapat mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budidaya lainnya di mana terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata. Peruntukan kawasan pariwisata di wilayah Kabupaten Musi Rawas berupa Kawasan wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan. Pengembangan pariwisata alam ini meliputi pemanfaatan didalam kawasan hutan dan perairan, pengembangan pariwisata buatan diarahkan pada kawasan Agropolitan Center dan pusat pemerintahan. Kawasan wisata alam, wisata budaya dan buatan yang ada di Kabupaten Musi Rawas diarahkan di :

a. Kawasan Wisata Alam

- pariwisata Danau Aur di Kecamatan Sumber Harta.
- pariwisata Bukit Cogong di Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas.
- pariwisata Gua Napal licin di Kawasan konservasi TNKS.
- pariwisata Danau Gegas di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut.

- pariwisata Danau Sukahati di Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas.
 - pariwisata Bukit Botak Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas.
 - pariwisata Air Terjun Telun Sukaraya di Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas.
 - pariwisata Air Terjun Satan di Kecamatan Muara Beliti.
 - pariwisata Air Terjun Sungai Dingin.
 - pariwisata Air Mancur SP II.
 - pariwisata Kawasan Konservasi TNKS.
 - pariwisata Danau Tingkip di Kecamatan Purwodadi.
 - pariwisata Hutan Bulian di Kecamatan Muara Kelingi.
 - pariwisata Arung Jeram Sungai Rawas di kawasan konservasi TNKS.
- b. Kawasan Wisata Buatan
- Pariwisata Air di kawasan Agropolitan Center; dan
 - pariwisata Hutan Kota kawasan Pusat Pemerintahan.
 - Sri Mulyo Edupark (SEP)
 - Taman Beliti Anggon

7. Kawasan Peruntukan Permukiman

a. Kawasan Permukiman Perkotaan

Menunjukkan areal kawasan permukiman perkotaan, kawasan ini menempati areal dengan bentuk wilayah datar–berombak (0-8%), jenis tanah aluvial, dan pola penggunaan lahan eksisting permukiman dan pekarangan. Kawasan ini menyebar secara spot-spot, terutama di pusat-pusat ibukota kecamatan dan desa/kelurahan di seluruh kecamatan di Kabupaten Musi Rawas.

Arahan pemanfaatan ruang ditujukan untuk mengoptimalkan dan mengendalikan peruntukan lahan dengan tetap mempertahankan keberadaan fungsi resapan melalui ruang terbuka hijau (RTH). Untuk itu perlu pengaturan aktivitas pembangunan melalui penerapan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangun (KLB). Guna mengoptimalkan fungsi layanan bagi penduduk kota serta pelayanan

ekonomi bagi wilayah belakangnya, maka perlu penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang memadai, serta dukungan prasarana jalan dan terminal antar kota baik berupa terminal penumpang maupun terminal barang yang menunjang pembangunan agropolitan.

b. Kawasan Permukiman Perdesaan

Menunjukkan areal kawasan permukiman perdesaan, kawasan ini menempati areal dengan bentuk wilayah datar–bergelombang (0-15%), jenis tanah podsolik, kambisol, aluvial, dan koluvial, dengan pola penggunaan lahan eksisting permukiman dan pekarangan. Kawasan ini menyebar di tiap kecamatan di wilayah Kabupaten Musi Rawas. Arah pemanfaatan ruang ditujukan untuk mengoptimalkan fungsi layanan bagi masyarakat perdesaan dengan pengaturan tata ruang permukiman dan pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum perdesaan yang mendukung kegiatan pertanian/agropolitan.

1. PDRB

PDRB salah satu indikator ekonomi yang menggambarkan kondisi riil ekonomi suatu daerah, indikator pertumbuhan PDRB ini menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam lingkup daerah dan mengenai geliat keberhasilan program pembangunan ekonomi makro daerah yang telah dicapai dalam meningkatkan kemakmuran masyarakat di suatu daerah. Salah satu tujuan pembangunan diantaranya adalah peningkatan Pendapatan Domestik Bruto penduduk Kabupaten Musi Rawas yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dengan memperhatikan realisasi PDRB dan distribusi PDRB atas dasar harga berlaku selama Tahun 2020-2021, seperti dalam tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
PDRB Kabupaten Musi Rawas Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2020-2021 (Milyar Rupiah)

Sektor PDRB	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,818.98	6,094.96
Pertambangan dan Penggalian	5,886.77	6,377.85
Industri Pengolahan	2,705.27	2,885.81
Pengadaan Listrik dan Gas	5.74	6.24
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.58	1.61
Konstruksi	1,109.63	1,153.04
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,793.01	1,901.68
Transportasi dan Pergudangan	88.03	89.99
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	66.71	68.44
Informasi dan Komunikasi	72.69	79.58
Jasa Keuangan dan Asuransi	123.80	127.61
Real Estate	274.17	285.83
Jasa Perusahaan	3.95	4.28
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	407.30	414.43
Jasa Pendidikan	527.47	555.73
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	146.80	160.33
Jasa lainnya	205.45	210.78
Produk Domestik Regional Bruto	19,237.35	20,418.19

(Sumber : BPS Kabupaten Musi Rawas, 2022)

Berdasarkan data pada tabel 2.3, nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan migas Kabupaten Musi Rawas meningkat dari Rp.19,23 Trilyun pada tahun 2020 meningkat pada tahun 2021 menjadi Rp.20,41 Trilyun atau mengalami kenaikan sebesar 6,13%.

Grafik 2.4
PDRB Dasar Harga Berlaku Kabupaten/kota
di Provinsi Sumatera Selatan



Sumber: BPS Provinsi Sumsel Tahun 2021

Data struktur ekonomi Kabupaten Musi Rawas dapat dilihat pada tabel 2.5 di bawah ini:

Tabel 2.4
Struktur Ekonomi Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2019-2021 (%)

Lapangan Usaha	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	29.28	30.16	29.85
Pertambangan dan Penggalian	32.54	30.80	31.24
Industri Pengolahan	13.48	14.01	14.13
Pengadaan Listrik dan Gas	0.03	0.03	0.03
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.01	0.01	0.01
Konstruksi	5.97	5.75	5.65
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.92	9.29	9.31
Transportasi dan Pergudangan	0.48	0.46	0.44
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.35	0.35	0.34
Informasi dan Komunikasi	0.33	0.38	0.39
Jasa Keuangan dan Asuransi	0.66	0.64	0.62
Real Estate	1.41	1.45	1.4
Jasa Perusahaan	0.02	0.02	0.02
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.05	2.11	2.03
Jasa Pendidikan	2.79	2.73	2.72
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.69	0.76	0.79
Jasa lainnya	1.02	1.06	1.03
Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Musi Rawas, 2022

PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Musi Rawas tahun 2020-2021 dapat dilihat pada tabel di berikut ini :

Tabel 2.5

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Musi Rawas Atas Dasar Harga Konstan Tahun
2020-2021 (%)

SEKTOR PDRB	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.96	3.76
Pertambangan dan Penggalian	-0.92	-0.65
Industri Pengolahan	0.75	4.39
Pengadaan Listrik dan Gas	13.1	6.56
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.46	0.23
Konstruksi	-1.44	1.3
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0.02	5.21
Transportasi dan Pergudangan	-4.57	1.92
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0.56	2.13
Informasi dan Komunikasi	15.1	8.38
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.46	1.57
Real Estate	1.05	3.04
Jasa Perusahaan	7.91	7.98
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.99	1.47
Jasa Pendidikan	0.35	4.69
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.48	8.12
Jasa lainnya	1.37	1.65
Produk Domestik Regional Bruto	0.23	2.33

Sumber : BPS Kabupaten Musi Rawas, 2022

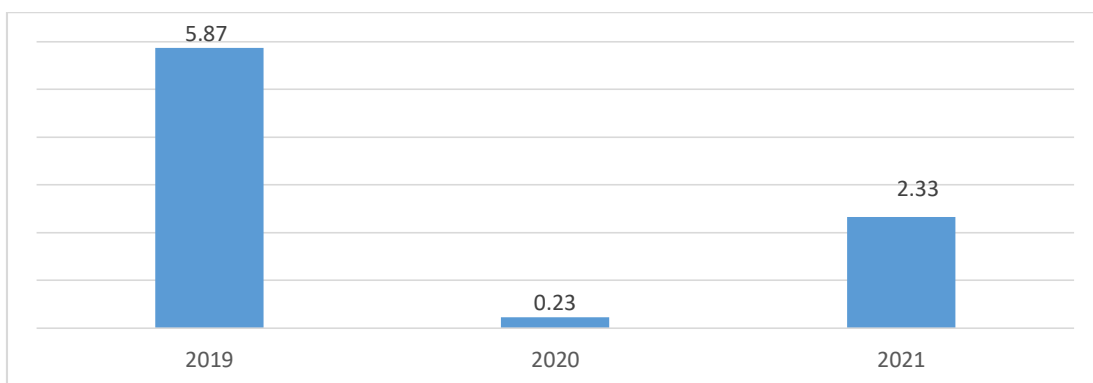
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Musi Rawas Atas Dasar Harga Konstan pada Tahun 2021 sebesar 2.33 persen atau mengalami kenaikan sebesar persen dibandingkan tahun 2020. Adanya pandemi Covid 19 menyebabkan terjadinya penurunan disetiap sektor PDRB. Hanya beberapa sektor mengalami peningkatan yaitu sektor Pengadaan Listrik dan

Gas sebesar, sektor Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.5

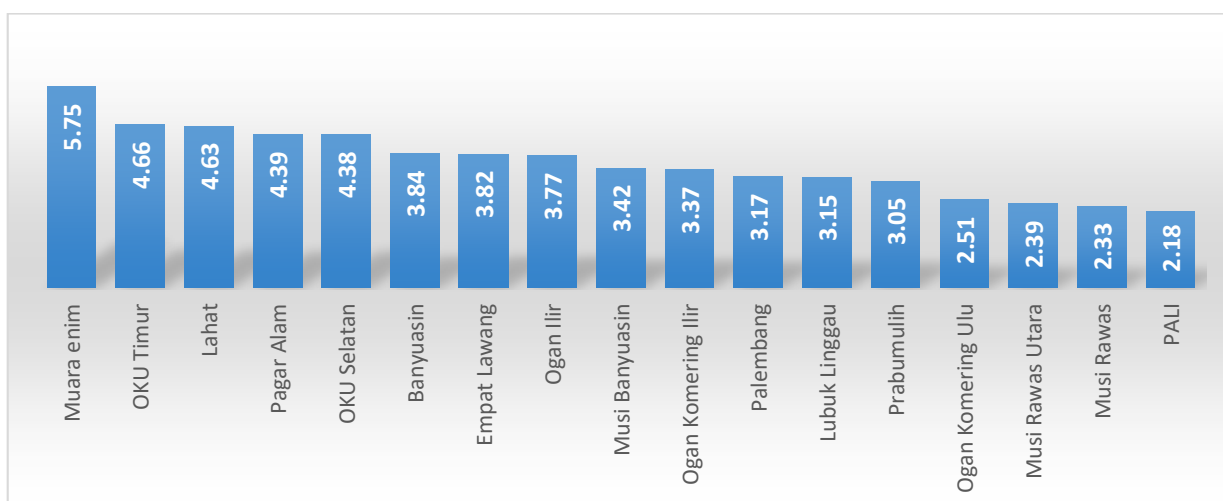
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021



Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2021 mencapai sebesar 2,33 dan berada pada peringkat ke enam belas tingkat Kabupaten/ Kota di Sumatera Selatan. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/ Kota di Sumatera Selatan dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.6

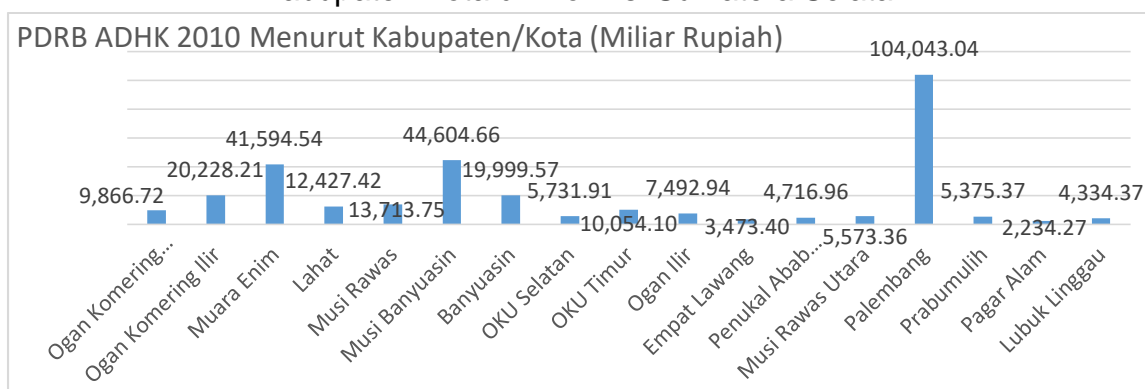
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota di Sumatera Selatan Tahun 2021



Sumber : BPS, 2022

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2020 mencapai sebesar 13.713,75. Apabila dibandingkan dengan wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, pertumbuhan PDRB ADHK cukup baik dengan Kabupaten/Kota di wilayah Sumatera selatan. Dapat dilihat pada Grafik berikut.

Grafik 2.7
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Selatan



Sumber: BPS Provinsi Sumsel Tahun 2021

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk dilihat dari nilai PDRB. Besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada Pengeluaran Makanan dan Non Makanan. Nilai PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2020 sebesar Rp. 47.279.700 mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar Rp.

Tabel 2.6
Capaian PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku

Indikator	Realisasi	
	2020	2021
PDRB perkapita ADHB	47.279.700	52.207.820

Sumber: BPS Kab. Musi Rawas

2. Inflasi

Indikator yang digunakan untuk melihat besaran kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi adalah inflasi. Inflasi sektoral yang dilihat dalam publikasi ini

digunakan untuk melihat besaran kenaikan harga barang dan jasa di tingkat produsen.

Tabel 2.7
Laju Inflasi Implisit (Tingkat Produsen) %
Kabupaten Musi Rawas 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Musi Rawas	3,94	2,42	2,10	1,97	1,63
Provinsi Sumsel	2,96	2,74	2,96	1,55	1,82
Nasional	3,61	3,13	2,72	1,68	1,53

Sumber: BPS Nasional dan BPS Provinsi Sumsel

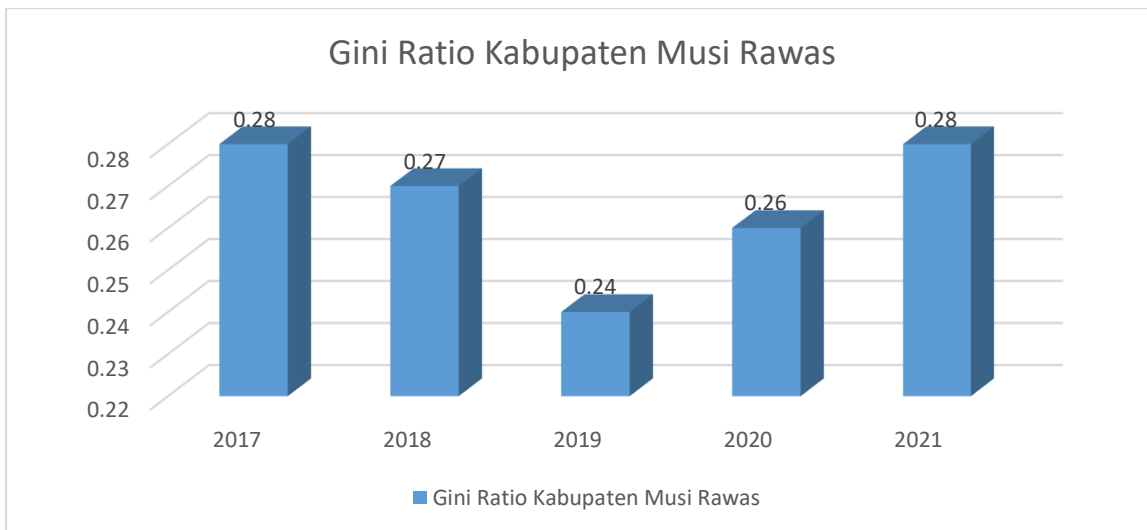
Angka Inflasi masih dianggap wajar apabila masih dibawah satu digit pada kisaran 0 dan dibawah 10%, apabila dibawah 0% atau deflasi dan diatas 10% sangat membahayakan bagi perekonomian terutama dalam mengurangi angka kemiskinan.

3.Gini Ratio

Gini Ratio merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Trend selama 5 (lima) tahun rata-rata Gini Rasio Musi Rawas menunjukkan kesenjangan semakin berkurang. Salah satu penyebab angka ketimpangan relatif lebih rendah tidak lepas dari perekonomian Kabupaten Musi Rawas masih bertumpu pada sektor Primer Pertanian yang mempunyai metode produksi yang padat karya, dengan mayoritas penduduk berprofesi sebagai buruh tani/perkebunan, buruh bangunan sehingga pembagian pendapatan relatif lebih merata atau disparitas pendapatan antar penduduk relatif kecil, bila dibandingkan sektor modern yang padat modal dalam produksi. Adanya Pandemi Covid 19 pada tahun 2020 menyebabkan Gini Ratio mengalami peningkatan. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Musi Rawas saja, tetapi terjadi diseluruh wilayah Indonesia. Gini Ratio Kabupaten Musi Rawas dapat dilihat pada grafik 2.8.

Grafik 2.8

Gini Ratio Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017-2021

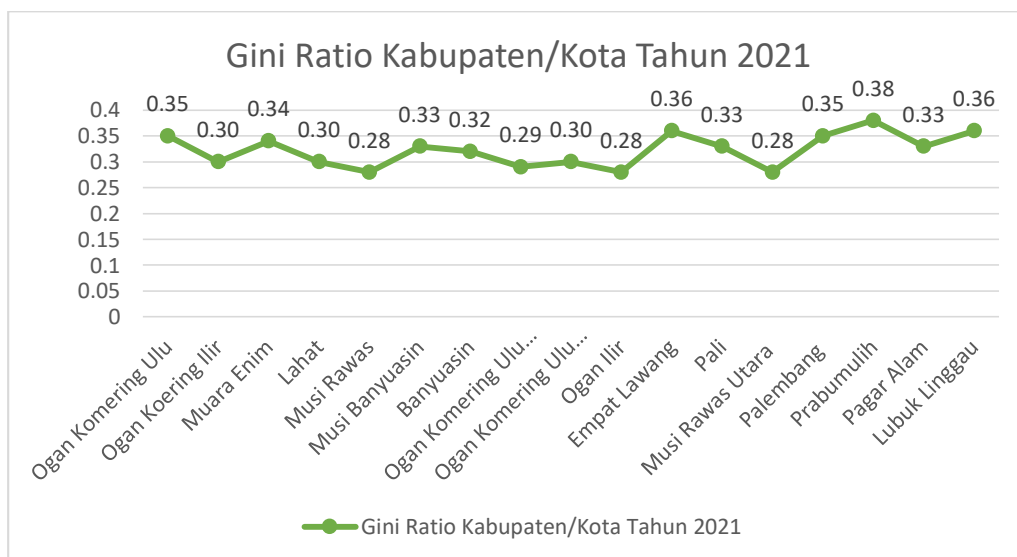


Sumber : BPS Sumsel Tahun 2022

Gini Ratio Kabupaten Musi Rawas apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan termasuk Kabupaten yang memiliki Gini Ratio rendah. Ini menunjukkan bahwa tingkat kemakmuran Kabupaten Musi Rawas lebih tinggi apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Selatan. Gini Ratio Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Grafik. 2.9.

Grafik 2.9

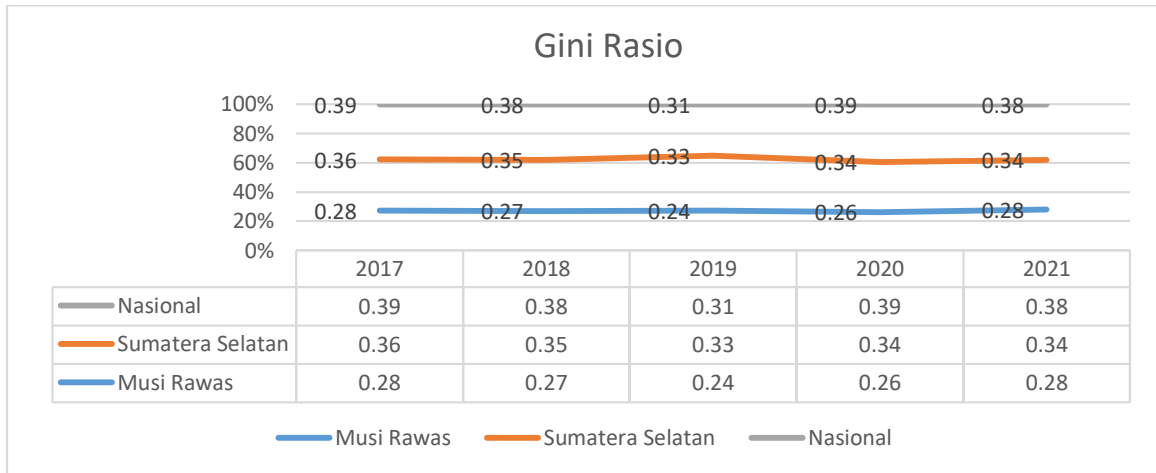
Gini Ratio Kabupaten/Kota Sumatera Selatan Tahun 2021



Sumber : BPS Sumsel Tahun 2021

Gini Ratio Kabupaten Musi Rawas apabila dibandingkan dengan nilai Gini Ratio Provinsi dan Nasional maka nilai Gini Ratio Kabupaten Musi Rawas berada di bawah nilai rata-rata Provinsi dan Nasional. Dapat dilihat pada grafik 2.10

Grafik 2.10
Gini Ratio Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan dan Nasional
Tahun 2017-2021



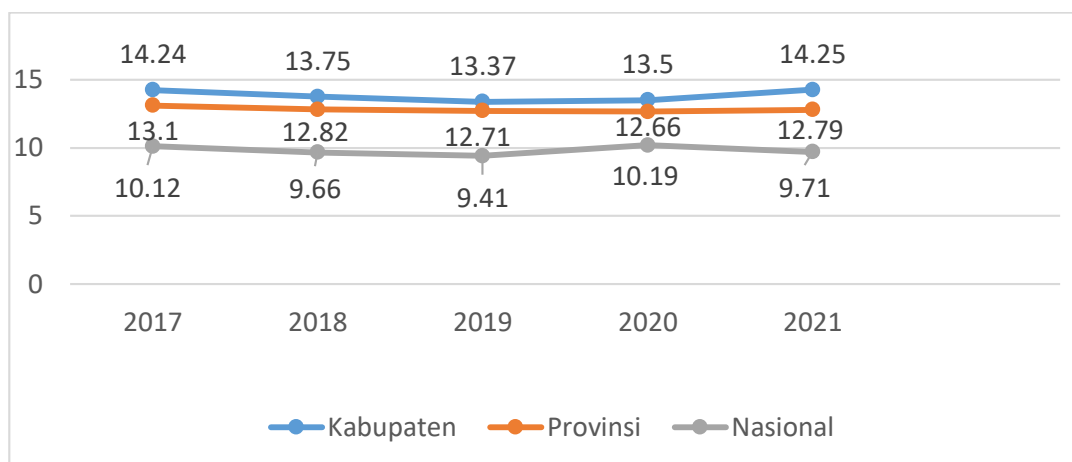
Sumber : BPS Sumsel Tahun 2022

Salah satu upaya pemerataan ekonomi di Musi Rawas adalah menekan tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah. Pada Tahun 2021 dengan adanya Pandemi Covid 19 menyebabkan peningkatan gini rasio menjadi 0,28. Akan tetapi jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi dan Nasional, maka nilai Gini Ratio Kabupaten Musi Rawas pada Tahun 2021 masih berada di bawah Provinsi Sumsel yang mencapai 0,34 dan Nasional yang mencapai 0,39.

4. Kemiskinan

Grafik 2.11

Angka Kemiskinan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 – 2021

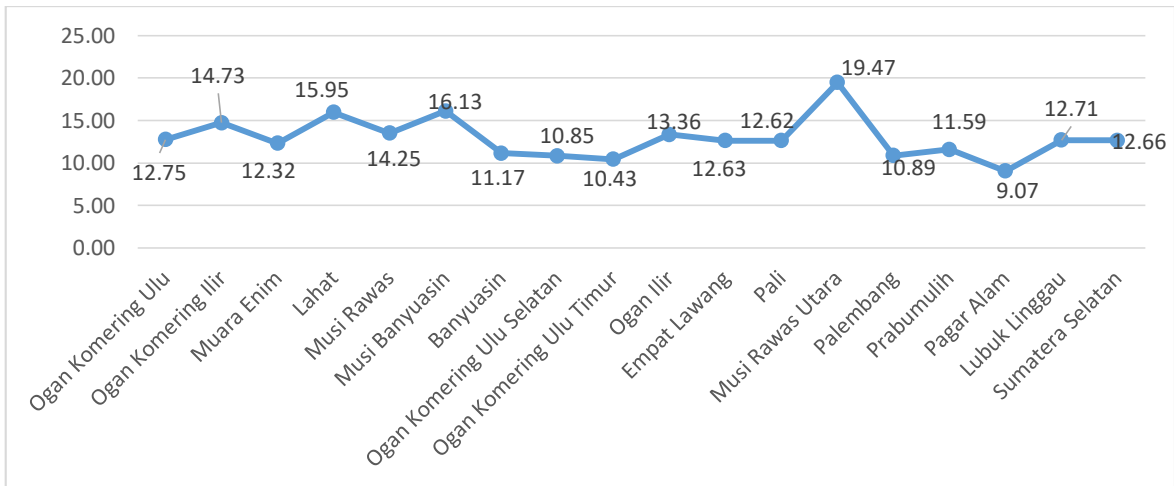


Sumber : BPS Tahun 2022.

Garis kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak miskin.

Berdasarkan data pada grafik 2.12 diatas, Tahun 2017 angka kemiskinan Kabupaten Musi Rawas sebesar 14,24% sampai dengan tahun 2019 turun menjadi 13,37%. Pada tahun 2020, angka kemiskinan mencapai 13,50% atau mengalami kenaikan sebesar 0.13% dan apada tahun 2021 mengalami peningkatan kembali sebesar 14.25%. Adanya Pandemi Covid 19 menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas. Meningkatnya angka kemiskinan juga terjadi di tingkat Provinsi dan tingkat Nasional. Untuk itu Kabupaten Musi Rawas telah berusaha melakukan upaya-upaya untuk pemulihan ekonomi dan melaksanakan program yang terintegrasi di berbagai sektor pembangunan.

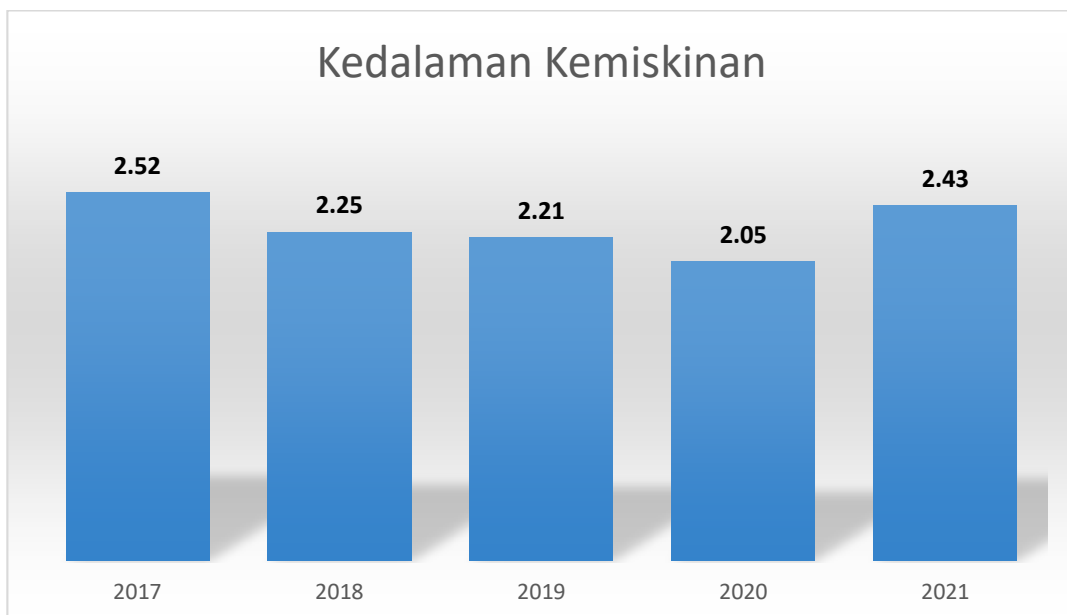
Grafik 2.12
Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2021



Sumber : BPS Provinsi Tahun 2021.

Pada grafik, Untuk wilayah Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, angka kemiskinan Kabupaten Musi Rawas berada pada urutan ke lima di Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.

Grafik 2.13
Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2017-2021

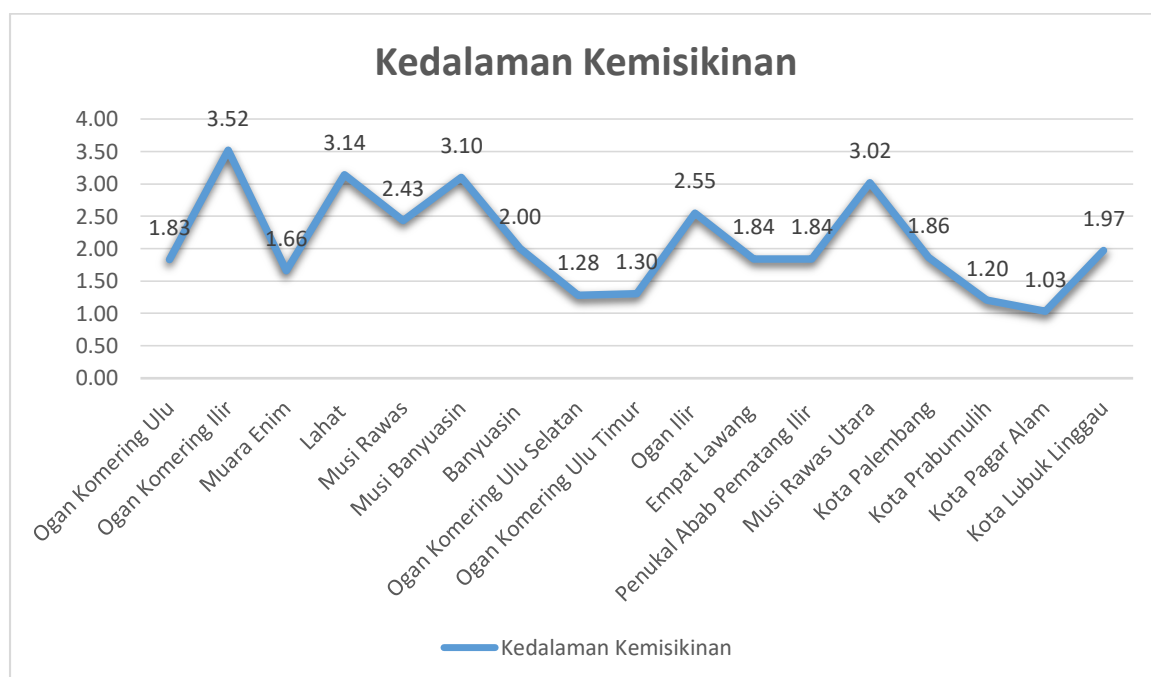


Sumber: BPS Nasional, BPS Provinsi

Dari grafik diatas dapat dilihat kedalaman kemiskinan Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2017 sebesar 2,52. Pada tahun 2018 kedalaman kemiskinan sebesar 2,25 mengalami penurunan sampai dengan tahun 2020 menjadi 2,05 dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 2,43.

Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2021, jika dibandingkan Kabupaten/Kota di sekitar Sumatera Selatan berada di posisi tengah atau kedalaman kemiskinan tidak terlalu tinggi dan rendah. Untuk melihat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada grafik berikut.

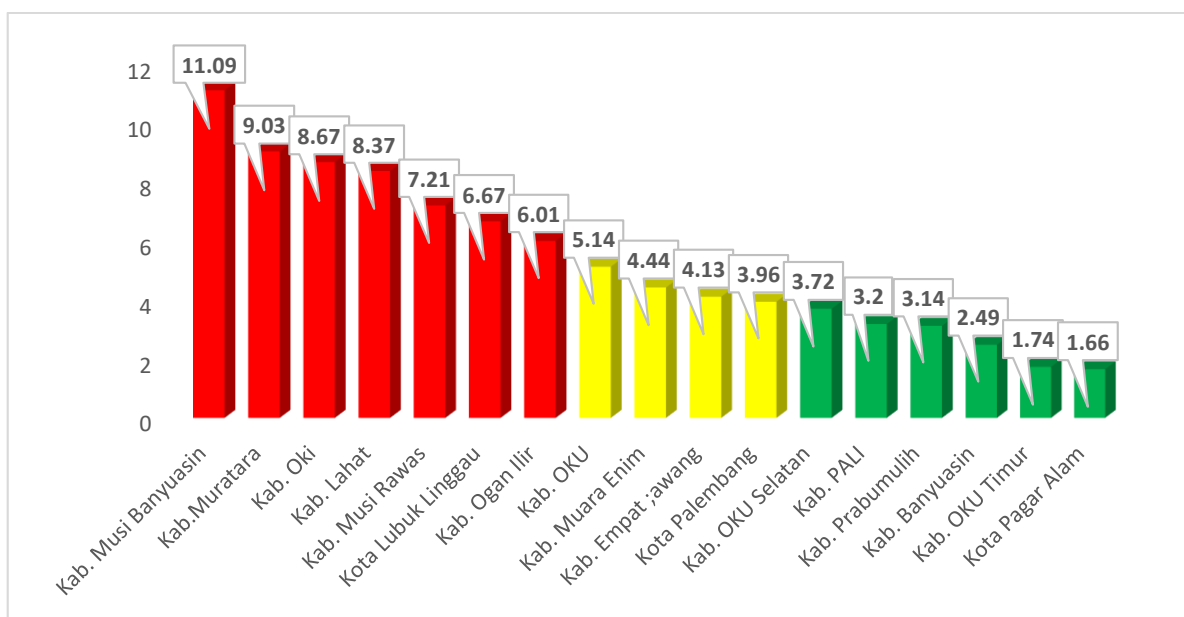
Grafik 2.14
Kedalaman Kemiskinan Kabupaten/Kota Sumatera Selatan
Tahun 2021



Bila disandingkan dengan capaian provinsi dan nasional, kedalaman kemiskinan Kabupaten Musi Rawas masih lebih tinggi, untuk lebih lanjut dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.15

Kemiskinan Ekstrem Kabupaten/Kota Tahun 2020



Keterangan	Musi Rawas	Sumatera Selatan	Indonesia
Tingkat Kemiskinan Ekstrem (persen)	7,21	5,32	3,85
Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (ribu jiwa)	29,36	454,6	10448,13
Tingkat Kemiskinan (persen)	13,5	12,66	9,78
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	54,95	1081,59	26424,02

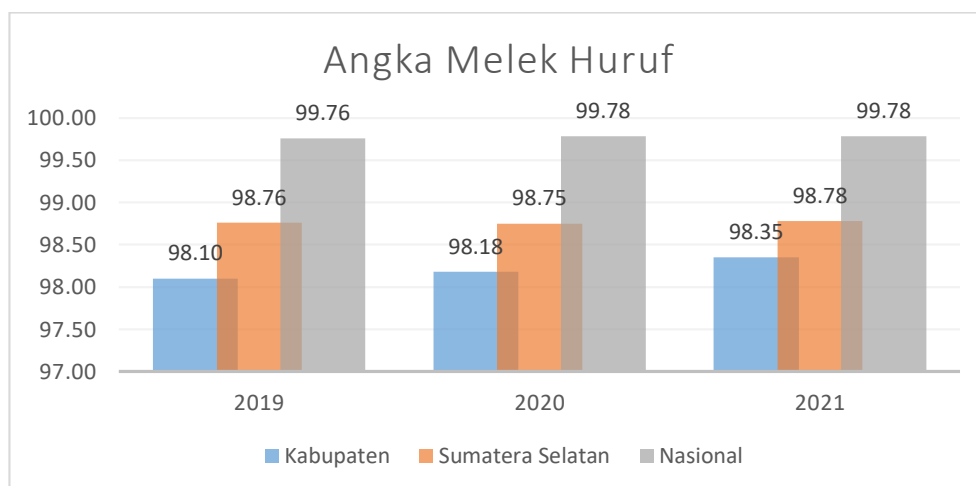
Sumber: Susenas Maret 2020, BPS

Musi Rawas memiliki memiliki tingkat miskin ekstrem sebesar 7,21 persen dengan besaran jumlah Penduduk Miskin Ekstrem 29,36 ribu jiwa. Tingkat kemiskinan ekstrem di Musi Rawas tersebut merupakan bagian dari penduduk miskin sebesar 13,5 persen atau 54,95 ribu jiwa. Sementara itu, tingkat kemiskinan ekstrem di provinsi Sumatera Selatan sebesar 5,32 persen atau sebesar 454,6 ribu jiwa. Tingkat kemiskinan ekstrem di Sumatera Selatan tersebut merupakan bagian dari penduduk miskin sebesar 12,66 persen atau 1081,59 ribu jiwa.

B. Fokus Kesejahteraan Sosial.

1. Angka Melek Hurup

Grafik 2.15
Angka Melek Hurup Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019-2021



Sumber : BPS Tahun 2020; BPS Provinsi Sumsel Tahun 2021

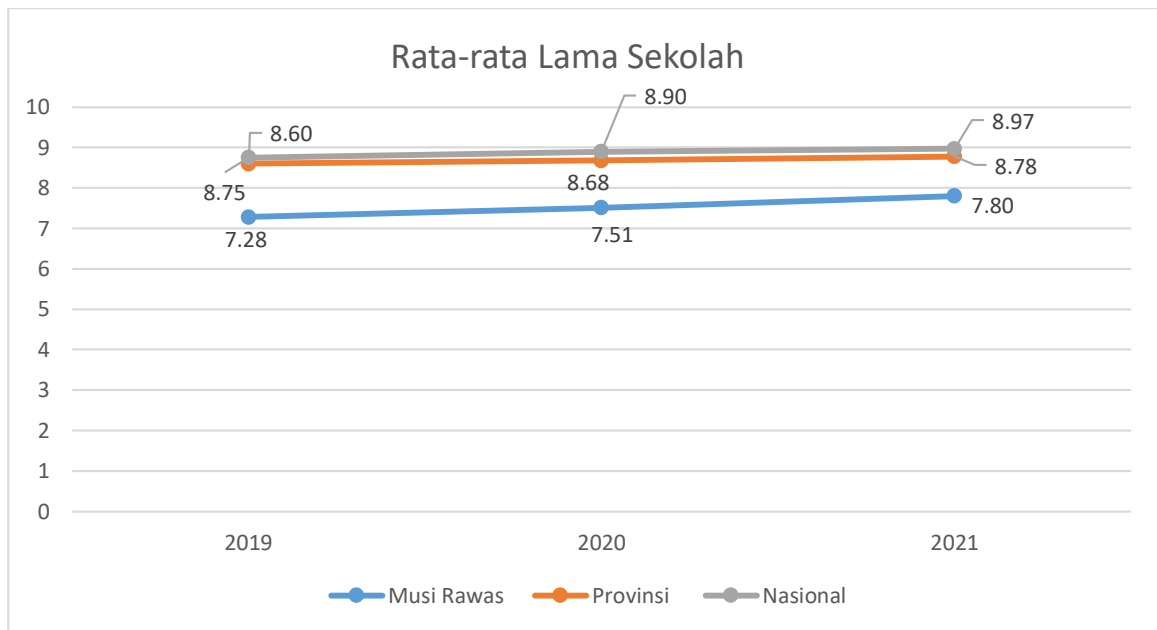
Angka Melek Huruf penduduk Kabupaten Musi Rawas dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, Angka Melek Huruf Kabupaten Musi Rawas sebesar 98,10 mengalami peningkatan ditahun 2020 mencapai 98,18 dan pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 98,35. Angka melek huruf Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2021 masih berada dibawah capaian Provinsi sebesar 98,78 dan capaian Nasional 99,78.

2. Angka Rata – Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan tahun belajar penduduk usia 15 Tahun keatas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun mengulang).

Grafik 2.16

Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019-2021

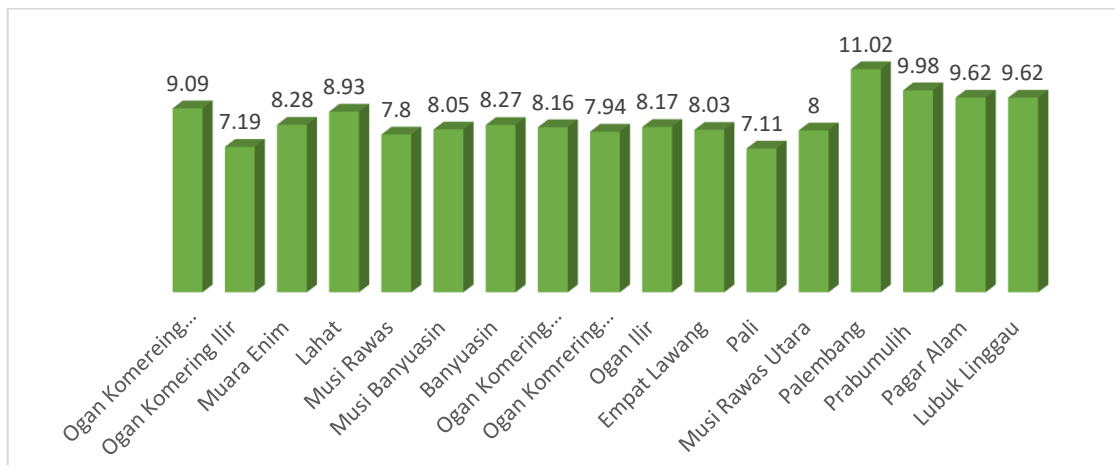


Sumber : BPS 2021 , BPS Provinsi dan BPS Kab. Mura

Dari data grafik diatas maka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Musi Rawas mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2021 sebesar 0,29. Pada tahun 2021 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Musi Rawas 7,80 dan masih berada dibawah dari Rata-rata Lama Sekolah Provinsi sebesar 8,78 dan Nasional sebesar 8,97.

Grafik 2.17

Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2021.



Sumber : BPS 2021 , BPS Provinsi dan BPS Kab. Mura

C. Fokus Seni Budaya

1. Budaya

Ragam budaya di Musi Rawas, secara umum terbagi menjadi dua yaitu benda cagar budaya dan benda cagar budaya tak benda. Selain itu terdapat juga cerita rakyat, kuliner dan bahasa lokal. Sebagaimana daerah lain di provinsi Sumatera Selatan, kebudayaan Kabupaten Musi Rawas dipengaruhi juga oleh budaya melayu, agama islam, agama hindu dan yang tak bisa lepas adalah keberadaan eksistensi Kerajaan Sriwijaya.

2. Seni

Kabupaten Musi Rawas dikenal memiliki moto darah yang disebut "*Lan Serasan Sekantenan*" secara harfiah diartikan Lan berasal dari bahasa sindang dan musi yang berarti kerja atau usaha sedangkan Serasan berarti mufakat. Sekantenan berasal dari bahasa rawas yang berarti berteman akrab atau kelompok. Kesimpulan dari "*Lan Serasan Sekantenan*" adalah karya mufakat yang kompak yang menunjukkan adanya kerja sama dalam mensukseskan setiap kegiatan pembangunan di daerah. Kabupaten Musi Rawas memiliki berbagai jenis tarian dan lagu daerah.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

A. Fokus Layanan Urusan Wajib

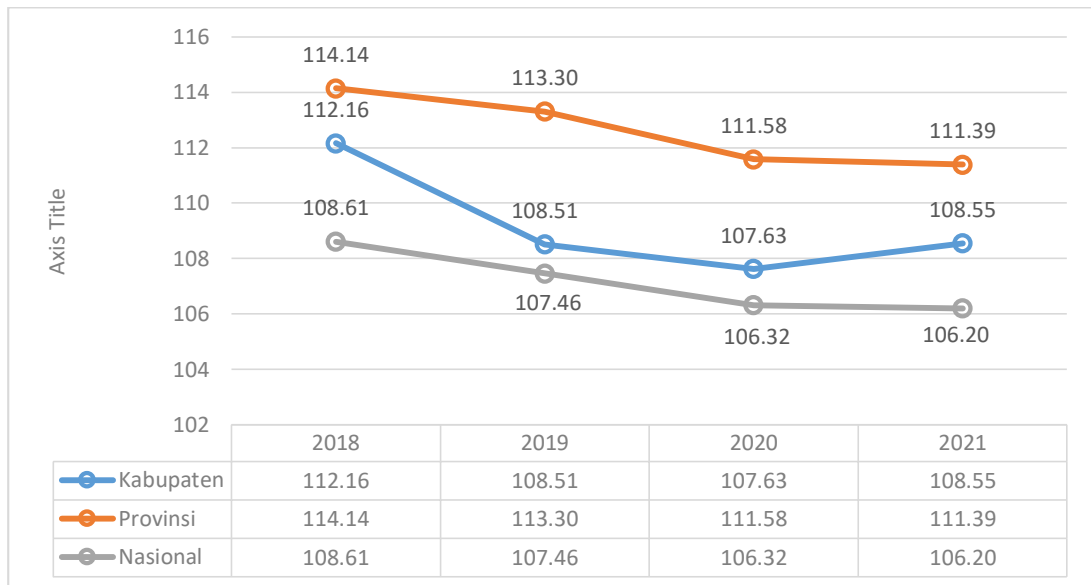
1. Pendidikan

Dengan adanya penerapan undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 maka pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan regulasi tersebut, kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan pendidikan usia dini dan pendidikan dasar. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator antara lain: Angka Partisipasi Kasar (APK) serta Angka Partisipasi Murni (APM).

a. Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Grafik 2.17
Grafik APK SD/MI Kabupaten Musi Rawas, Provinsi dan Nasional
Tahun 2018-2021

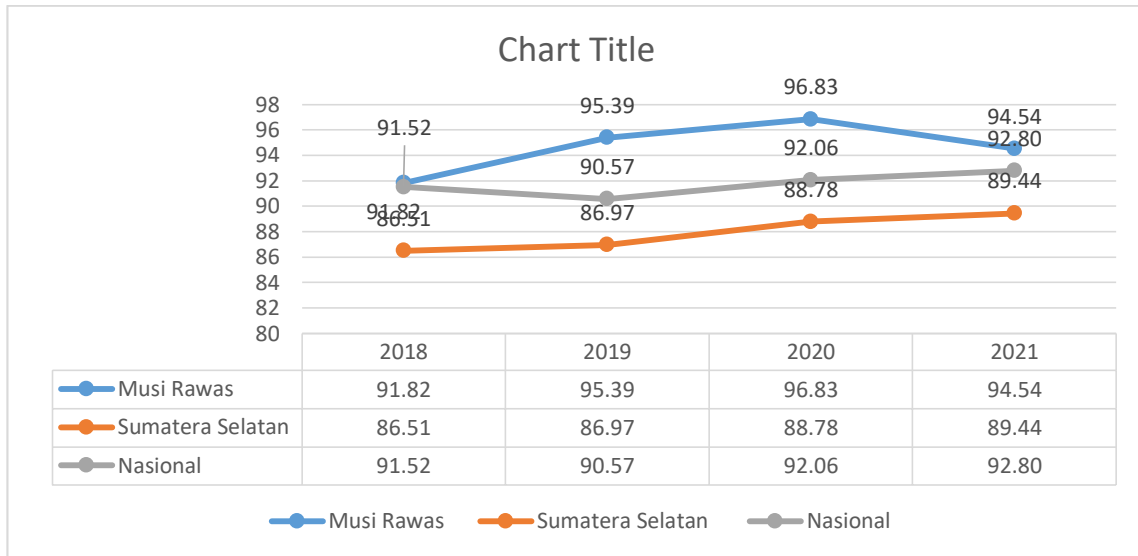


Sumber : BPS Musi Rawas, BPS Provinsi dan BPS Nasional

Dari grafik di atas dapat digambarkan bahwa nilai APK SD/MI Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2021 lebih kecil dibandingkan dengan APK Provinsi dan lebih besar dibanding dengan APK Nasional.

Grafik 2.18

Grafik APK SMP/MTS Kabupaten Musi Rawas Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2021



Sumber : BPS Musi Rawas 2021, BPS Musi Rawas, BPS Provinsi dan BPS Nasional

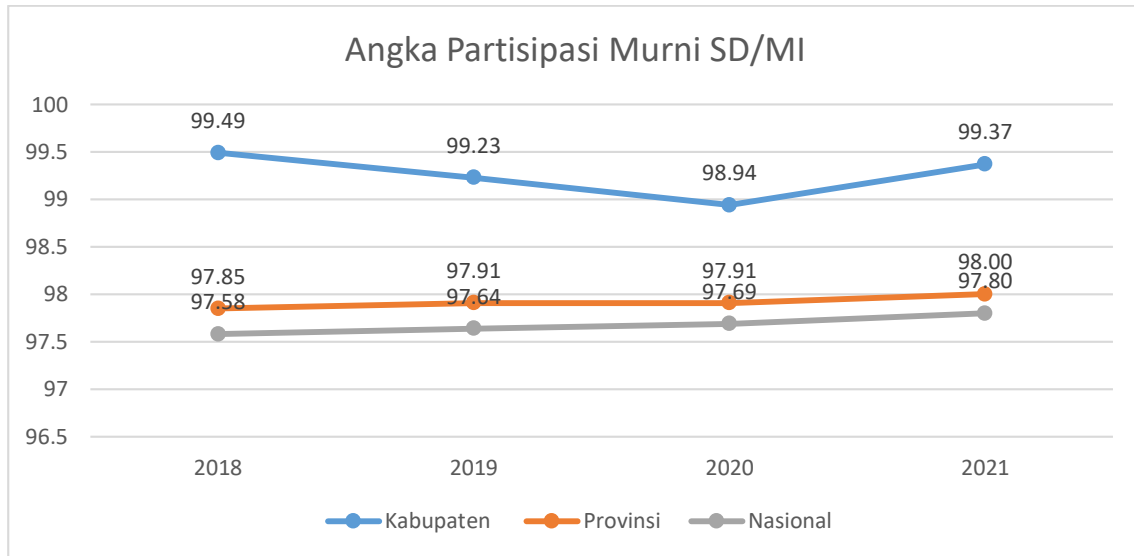
Dari grafik di atas dapat digambarkan bahwa nilai APK SMP/MTS Kabupaten Musi Rawas dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 berfluktuatif. Secara umum nilai APK SMP/MTS Kabupaten Musi Rawas berada diatas APK SMP/MTS Provinsi dan Nasional. Ini menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Musi Rawas mampu menampung usia sekolah lebih dari target yang telah ditetapkan.

b. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase pada jumlah anak pada usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Grafik 2.19

Grafik APM SD/MI Kabupaten Musi Rawas Provinsi dan Nasional Tahun 2018-2021

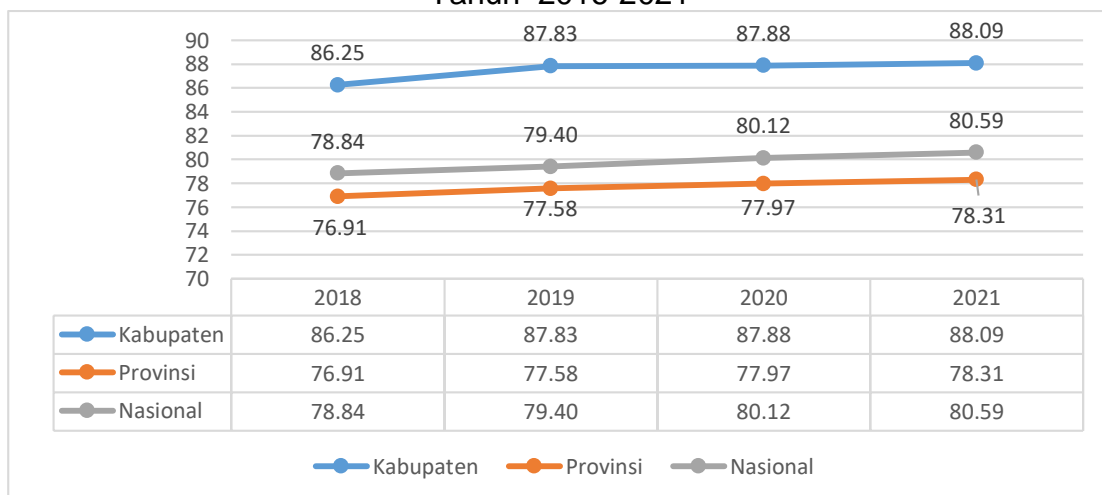


Sumber : BPS Musi Rawas 2021, BPS Musi Rawas, BPS Provinsi dan BPS Nasional

Dari grafik di atas dapat digambarkan bahwa nilai APM SD/MI Kabupaten Musi Rawas mengalami fluktuasi dari tahun 2018-2021. Pada tahun 2021 APM SD/MI Kabupaten Musi Rawas mencapai 99,37 persen atau lebih besar jika dibandingkan APM SD/MI Provinsi dan Nasional.

Grafik 2.20

Grafik APM SMP/MTS Kabupaten Musi Rawas Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2021



Sumber : BPS Musi Rawas 2021, BPS Musi Rawas, BPS Provinsi dan BPS Nasional

Dari grafik di atas dapat digambarkan bahwa nilai APM SMP/MTS Kabupaten Musi Rawas mengalami kenaikan dari tahun 2018-2021. Pada tahun 2021 APM SMP/MTS Kabupaten Musi Rawas mencapai 88,09 persen atau lebih besar jika dibandingkan APM SMP/MTS Provinsi dan Nasional.

. APM SMP/MTS Kabupaten Musi Rawas mendekati nilai 100 dan termasuk dalam katagori baik.

2. Kesehatan

a. Angka Harapan Hidup (AHH)

Capaian Kinerja kesehatan diukur dengan IK: Angka Kematian Bayi, Angka Harapan Hidup, Persentase Kabupaten Musi Rawas Gizi Buruk dan Angka Kematian Ibu /100.000 KH. Capaian kinerja kesehatan dapat dilihat dalam berikut.

Tabel 2.8

Capaian Kinerja Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018-2021

No	Indikator	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1.	Angka kematian bayi/1000 KH	6,46	3,98	3,1	6,17
2.	Angka Harapan Hidup (Tahun)	67,59	67,86	68,14	68,26
3.	Persentase Balita gizi Buruk	0,070	0,75	0,45	0,22
4.	Angka Kematian Ibu Melahirkan (100.000/pddk)	164,86	96,01	94,01	59,95
5.	Penurunan Stunting	1.499	856	1.857	503

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021

Pada tabel dapat dilihat bahwa adanya trend penurunan Angka Kematian Bayi dari tahun 2018 sebesar 6,46 sampai dengan tahun 2020 sebesar 3,1 dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 6,17 sedangkan Angka Kematian Ibu melahirkan (per 100.000 kelahiran hidup) juga mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 164,86 menjadi 94,01 pada tahun 2020 dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2021 sebesar 59,95.

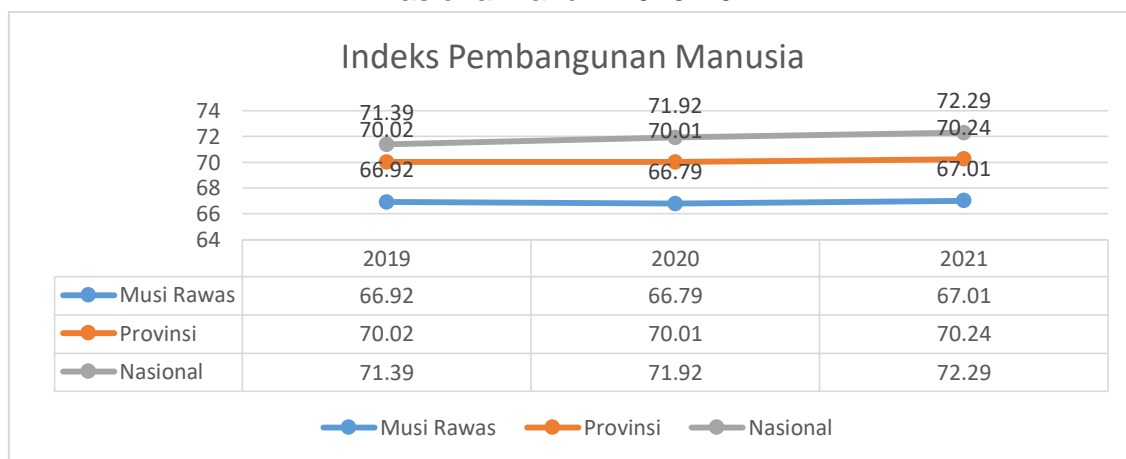
Untuk Angka Harapan Hidup (AHH) mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 67,59 sampai dengan tahun 2021 sebesar 68,26. Peningkatan tersebut didukung dengan peningkatan akses Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Usaha Kesehatan Primer (UKP) serta peningkatan preventif dan promotif.

Pertumbuhan anak-anak dengan tinggi badan kurang (pendek) dan sangat kurang (sangat pendek) yang dapat dikategorikan stunting. Pada tahun 2018 sampai tahun 2021 berfluktuatif. Pada tahun 2018, jumlah anak stunting sebesar 1.499 jiwa dan mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 856 jiwa. Pada tahun 2020, jumlah anak yang stunting meningkat kembali menjadi 1.857 jiwa dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2021 sebesar 503 jiwa. Hal ini merupakan pekerjaan yang harus dituntaskan melalui dinas Kesehatan dan crosscutting dengan beberapa Perangkat Daerah dan stakeholders terkait, upaya penuntasan stunting dapat dilakukan melalui berbagai program salah satunya yaitu dengan program perbaikan gizi masyarakat.

b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Capaian IPM Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2018 sebesar 66,18 meningkat pada tahun 2019 menjadi 66,92 dan pada tahun 2020 dengan adanya Pandemi Covid 19 IPM mengalami penurunan menjadi 66,79 atau menurun sebesar 0,13 berada dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 67,01 dibawah IPM Provinsi sebesar 70,24 dan IPM Nasional sebesar 72,29.

Grafik 2. 21
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Musi Rawas Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2021



Sumber : BPS Provinsi Sumsel 2021

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Pekerjaan Umum

Dampak pembangunan Infrastruktur dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi sendiri juga dapat menjadi tekanan bagi infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi yang positif akan mendorong peningkatan kebutuhan akan berbagai infrastruktur. Salah satu pembangunan infrastruktur adalah pembangunan jalan yang sangat tidak kalah penting dan diperlukan sebagai alat penghubung suatu tempat dengan tempat yang lain. Jalan di wilayah Kabupaten Musi Rawas berdasarkan statusnya dikategorikan dalam Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, dan Jalan Desa.

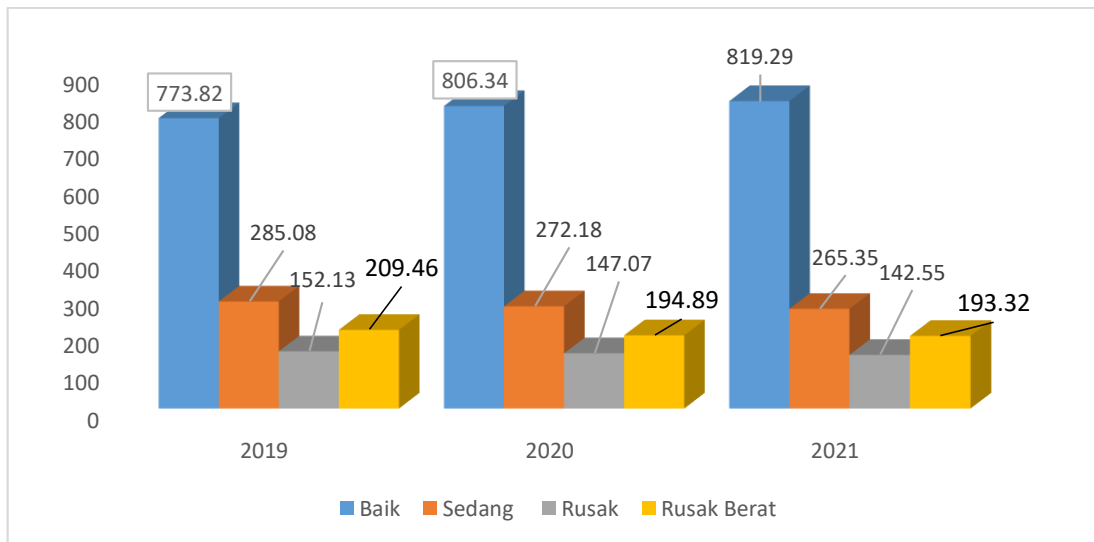
Berdasarkan Keputusan Meteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruang Jalan Dalam Jaringan Jalan Menurut Fungsi Sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1) bahwa ruas Jalan Nasional di wilayah Kabupaten Musi Rawas yaitu N12 (ruas Maur-Terawas 36,20 Km, yang masuk di wilayah Kabupaten Musi Rawas : batas Kab. Muratara-Terawas 9,3 Km), N13 (ruas Terawas-Batas Kota Lubuklinggau 24 Km), N15 (ruas Simpang Periuk-Muara Beliti 13,5 Km, yang masuk di wilayah Kabupaten Musi Rawas : batas Kota Lubuklinggau-Muara Beliti 9,88 Km), N16 (ruas Muara Beliti-Batas Kab. Musi Rawas 27,2 Km), dan N35 (ruas Batas Kab. Muba-Muara Beliti 78,26 Km). Jadi panjang Jalan Nasional yang masuk di wilayah Kabupaten Musi Rawas sepanjang 151,96 Km. Sedangkan ruas Jalan Provinsi di wilayah Kabupaten Musi Rawas ada 2 ruas yaitu P82 (ruas Simpang Periuk-Tugumulyo-Terawas 38 Km, yang masuk di wilayah Kabupaten Musi Rawas 33,28 Km) dan P83 (ruas Terawas-Taba Tinggi-Maur 56,25 Km, yang masuk di wilayah Kabupaten Musi Rawas : Terawas-Batas Kab. Muratara 17 Km). Maka panjang Jalan Provinsi yang masuk di wilayah Kabupaten Musi Rawas sepanjang 50,28 Km. Kemudian Jalan Kabupaten sepanjang 1.420,49 Km.

Jalan di Kabupaten Musi Rawas terdiri dari Jalan Nasional sepanjang 151,96 Km, Jalan Provinsi 94,25 Km, Jalan Kabupaten sepanjang 1.420,49 Km. Dengan rincian Jalan Aspal sepanjang 262,733 Km, Koral sepanjang 208,358 Km, Jalan Rigid Beton sepanjang 54,664 Km, Pembukaan Jalan 29,29 Km, Jalan desa 1.753,49 Km dan Jalan Non Status sepanjang 63 Km. Rasio panjang jalan terhadap

luas wilayah Kabupaten Musi Rawas 0,0022 Km/Ha. Sedangkan kondisi jalan dan jembatan di Kabupaten Musi Rawas dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.22

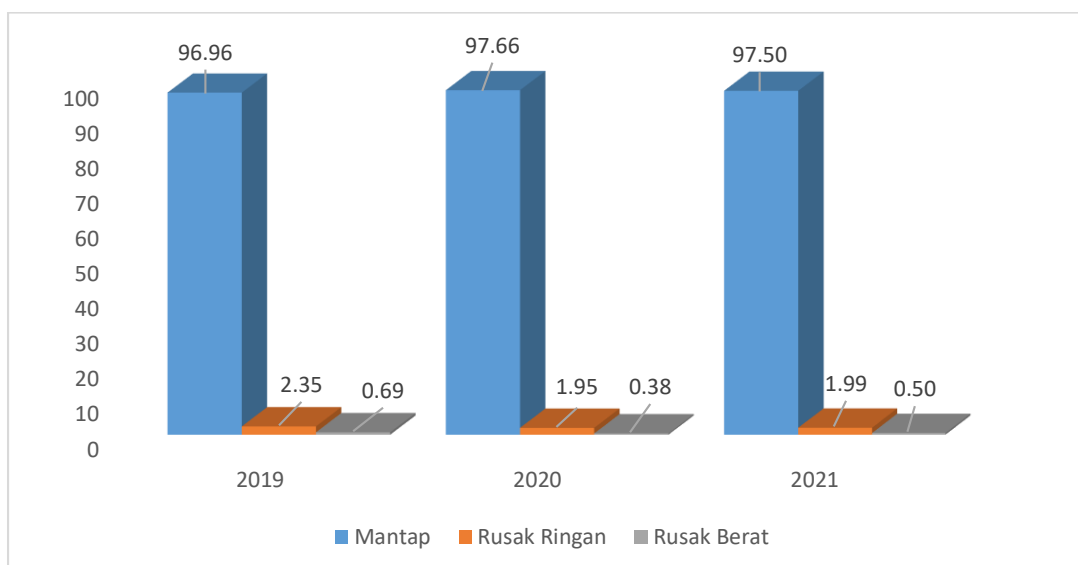
Kondisi Jalan Kabupaten Musi Rawas (km) Tahun 2019-2021



Sumber : Kompilasi Data BPS Kabupaten Musi Rawas dan Dinas PU Bina Marga (Data diolah)

Grafik 2.23

Kondisi Jembatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019-2021



Sumber : Kompilasi Data BPS Kabupaten Musi Rawas dan Dinas PU Bina Marga (Data diolah)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, ada 2 (dua) DI Pusat (DI Kelingi-Tugumulyo 8.841 Ha dan DI Air Lakitan 9.500 Ha), 4 (empat) DI Provinsi (DI Air Deras I 1.461 Ha, DI Gegas 2.300 Ha, DI Air Satan 1.175 Ha dan DI Megang Tikip 1.077 Ha) dan 43 (empat puluh tiga) DI Kabupaten Musi Rawas (31 DI di wilayah Kabupaten Musi Rawas dan 12 DI di wilayah Kab. Muratara).

Tabel 2.9
Daerah Irigasi Pusat

NO	DAERAH IRIGASI	TOTAL LUAS AREAL (HA)
1.	DI Kelingi-Tugumulyo	8.841
2.	DI Air Lakitan	9.500

Tabel 2.10
Daerah Irigasi Provinsi

NO	DAERAH IRIGASI	TOTAL LUAS AREAL (HA)
1.	DI Air Deras I	1.461
2.	DI Gegas	2.300
3.	DI Air Satan	1.175
4.	DI Megang Tikip	1.077

Tabel 2.11
Daerah irigasi kabupten Musi Rawas

NO	DAERAH IRIGASI	LOKASI	KLASIFIKSI JARINGAN IRIGASI	TOTAL LUAS AREAL (HA)
1.	DI Air Deras II	Sumber Harta		928
	DI Air Deras II (Aur)	Sumber Harta	Irigasi Teknis	542
	DI Air Deras II (Moyan)	Sumber Harta	Irigasi Teknis	386
2.	DI Megang Tikip	Purwodadi (Sumber Sari dan Wonosari)	Irigasi Teknis	912

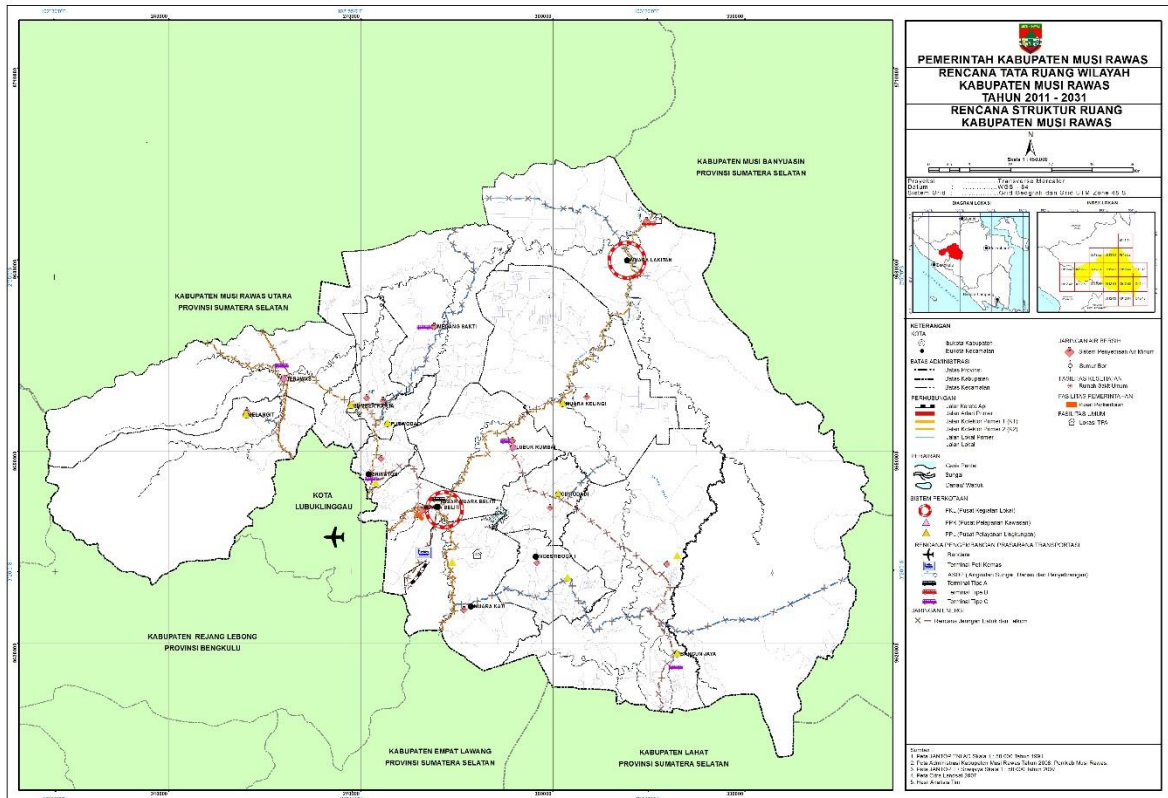
NO	DAERAH IRIGASI	LOKASI	KLASIFIKASI JARINGAN IRIGASI	TOTAL LUAS AREAL (HA)
3.	DI Air Tupak	Tugumulyo dan Purwodadi	irigasi Semi Teknis	778
4.	DI Ketuan Kecil/Bumi Agung	Muara Beliti (Bumi Agung)	irigasi Semi Teknis	593
5.	DI Pelita Jaya	Muara Lakitan (Pelita Jaya)	irigasi Semi Teknis	400
6.	DI Air Kelingi SP II	Muara Kelingi	irigasi Semi Teknis	400
7.	DI Jajaran Baru	Megang Sakti	irigasi Semi Teknis	360
8.	DI Sri Kemuning	STL Ulu Terawas (Srimulyo)	irigasi Semi Teknis	360
9.	DI Air Nangka	Muara Lakitan (Semeteh)	irigasi Semi Teknis	360
10.	DI Sukamana	STL Ulu Terawas (Sukamana dan Kosgoro)	irigasi Semi Teknis	314
11.	DI Air Cekar SP III	BTS Ulu (Cekar SP III)	irigasi Semi Teknis	300
12.	DI Sukakarya	STL Ulu Terawas (Sukakarya)	irigasi Semi Teknis	250
13.	DI Sawah Pangeran	Mura Lakitan (sawah Pangeran)	irigasi Semi Teknis	250
14.	DI Sukaraya	STL Ulu Terawas	irigasi Semi Teknis	246
15.	DI Sukarame	Sumber Harta (Sukarame)	irigasi Semi Teknis	200
16.	DI Dangku	Megang Sakti (dangku dan Sendang Sari)	irigasi Semi Teknis	200
17.	DI Air Kambil	Megang Sakti	irigasi Semi Teknis	200
18.	DI Pelita Jaya I	Muara Lakitan (Pelita Jaya)	irigasi Semi Teknis	200
19.	DI Setia Marga	Mura Lakitan	irigasi Semi Teknis	200
20.	DI Kosgoro	STL Ulu Terawas	irigasi Semi Teknis	160
21.	DI Paduraksa	STL Ulu Terawas (Paduraksa)	irigasi Semi Teknis	150
22.	DI Sidomulyo	Muara Lakitan	irigasi Semi Teknis	100
23.	DI Marga Baru	Muara Lakitan (Marga Baru)	irigasi Semi Teknis	100
24.	DI BPD Pendo	Purwodadi	Irigasi Teknis	361
25.	DI Kasang Tinggi	Megang Sakti	irigasi Semi Teknis	300
26.	DI Pelita Jaya II	Muara Lakitan (Pelita Jaya)	irigasi Semi Teknis	200
27.	DI Sungai Pinang	Muara Lakitan	irigasi Semi Teknis	200
28.	DI Paduraksa II	STL Ulu Terawas	irigasi Semi Teknis	110
29.	DI Megang Sakti V	Megang Sakti	irigasi Semi Teknis	200
30.	DI Wonosari	Megang Sakti	irigasi Semi Teknis	50
31.	DI Q2 Wonorejo	Tugumulyo	irigasi Semi Teknis	30
TOTAL				9412

Sumber : Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan

b. Penataan Ruang

Dalam konstelasi regional (provinsi) dan sebagaimana yang diamanatkan dalam RTRW Provinsi Sumatera Selatan, Kota Lubuklinggau berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah dan Kecamatan Muara Beliti sebagai Pusat Kegiatan Lokal. Maka struktur ruang Kabupaten Musi Rawas diarahkan pada penguatan peran Kecamatan Muara Beliti sebagai pusat ibukota kabupaten dan pusat agropolitan, pengembangan pusat-pusat pelayanan pada kawasan perbatasan sehingga menempatkan peran Kabupaten Musi Rawas sebagai pusat agropolitan regional. Struktur ruang kawasan agropolitan merupakan gambaran sistem pusat kegiatan kawasan dan jaringan prasarana yang dikembangkan untuk mengintegrasikan kawasan selain untuk melayani kegiatan pertanian dalam arti luas, baik tanaman pangan, perikanan, perkebunan, kehutanan, maupun peternakan. Jaringan prasarana pembentuk struktur ruang kawasan agropolitan meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air. Peta struktur ruang Kabupaten Musi Rawas dapat dilihat pada peta berikut :

Gambar 2.4
Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Musi Rawas



Pada gambar di atas sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2031, maka arahan struktur ruang adalah sebagai berikut:

1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Adapun yang akan diarahkan menjadi PKL adalah:

- a. Kota Muara Beliti;
- b. Muara Lakitan.

2. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Adapun yang akan diarahkan menjadi PPK adalah :

- a. Simpang Terawas (Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas); adalah pusat permukiman yang berada antara Simpang Nibung dengan

Lubuklinggau dan juga berada pada lintas trans Sumatera. Pusat pelayanan kawasan ini diarahkan untuk melayani:

- 1) Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas
- 2) Kecamatan Selangit, dan
- 3) Kecamatan Sumber Harta

b. Mengang Sakti; diarahkan sebagai pusat pelayanan kawasan yang meliputi beberapa kecamatan disekitarnya, yaitu :

- 1) Kecamatan Purwodadi dan
- 2) Kecamatan Tugumulyo

c. Simpang Semambang (Tuah Negeri); adalah pusat permukiman yang berada pada jalan lintas Lubuklinggau - Palembang terletak antara Muara Beliti dengan Muara Lakitan. Pusat pelayanan kawasan ini diarahkan untuk melayani;

- 1) Kecamatan Buah Negeri
- 2) Kecamatan Muara Kelingi
- 3) Kecamatan Jayaloka
- 4) Kecamatan Sukakarya
- 5) Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu
- 6) Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut

3. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Adapun yang akan diarahkan menjadi PPL adalah ibukota dari kecamatan berikut: :

- a. Tugu Mulyo (Kecamatan Tugumulyo)
- b. Muara Kelingi (Kecamatan Muara Kelingi)
- c. Jayaloka (Kecamatan Jayaloka)
- d. Selangit (Kecamatan Selangit)
- e. Sumber Harta (Kecamatan Sumber Harta)
- f. Purwodadi (Kecamatan Purwodadi)
- g. Ciptodadi (Kecamatan Sukakarya)
- h. Muara Kati Baru I (Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut)
- i. Bangun Jaya (Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu)

Fungsi-fungsi pelayanan untuk masing-masing pusat pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12
Struktur Ruang dan Fungsi yang Diemban Kecamatan

N O	KECAMATAN	HIRARK I	FUNGSI YANG DIEMBAN PUSAT KEGIATAN/PELAYANAN															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Muara Beliti	PKL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	Muara Lakitan	PKL		X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	
3	Simpang Terawas/ STL. Ulu Terawas	PPK		X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	
4	Megang Sakti	PPK		X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	
5	Simpang Semambang/ Tuah Negeri	PPK		X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	
6	Selangit	PPL		X			X		X			X	X	X	X	X	X	
7	Sumber Harta	PPL		X			X		X			X	X	X	X	X	X	
8	Tugumulyo	PPL		X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	
9	Purwodadi	PPL		X			X		X			X	X	X	X	X	X	
10	T.P. Kepungut	PPL		X			X		X			X	X	X	X	X	X	
11	Jayaloka	PPL		X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	
12	BTS. Ulu	PPL		X			X		X			X	X	X	X	X	X	
13	Sukakarya	PPL		X			X		X			X	X	X	X	X	X	
14	Muara Kelingi	PPL		X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	

Sumber : RTRW Kabupaten Musi Rawas 2011-2031

Keterangan :

- | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------|
| 1. Pemerintah Kabupaten | 6. Jasa Persewaan dan Perbankan, | 11. Kesehatan | 16. Air Limbah |
| 2. Pemerintah Lokal | 7. Jasa Koperasi Unit Desa | 12. Listrik | |
| 3. Ditribusi dan Koleksi | 8. Jasa Hukum dan Konsultasi | 13. Telekomunikasi | |
| 4. Industri | 9. Pariwisata dan Jasa penginapan | 14. Irigasi | |
| 5. Perdagangan, Kios dan Los Pasar | 10. Pendidikan | 15. Air Minum Bersih | |

PKL : Pusat Kegiatan Lokal; PPK: Pusat Pelayanan Kawasan; PPL: Pusat Pelayanan Lingkungan

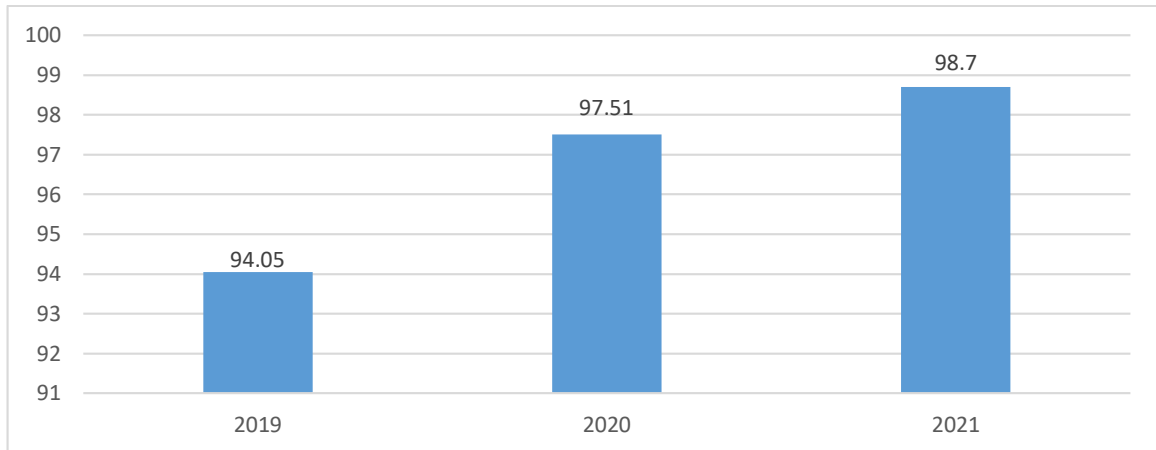
4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

a. Sanitasi

Akses sanitasi yang layak Kabupaten Musi Rawas selama tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang sangat baik, pada tahun 2019 sebesar 94,05% meningkat 3,46 % pada tahun 2020 menjadi 97,51% dan 98,7% di tahun 2021 atau

meningkat sebesar 1,19%. Data akses sanitasi yang layak Kabupaten Musi Rawas dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.24
Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Layak

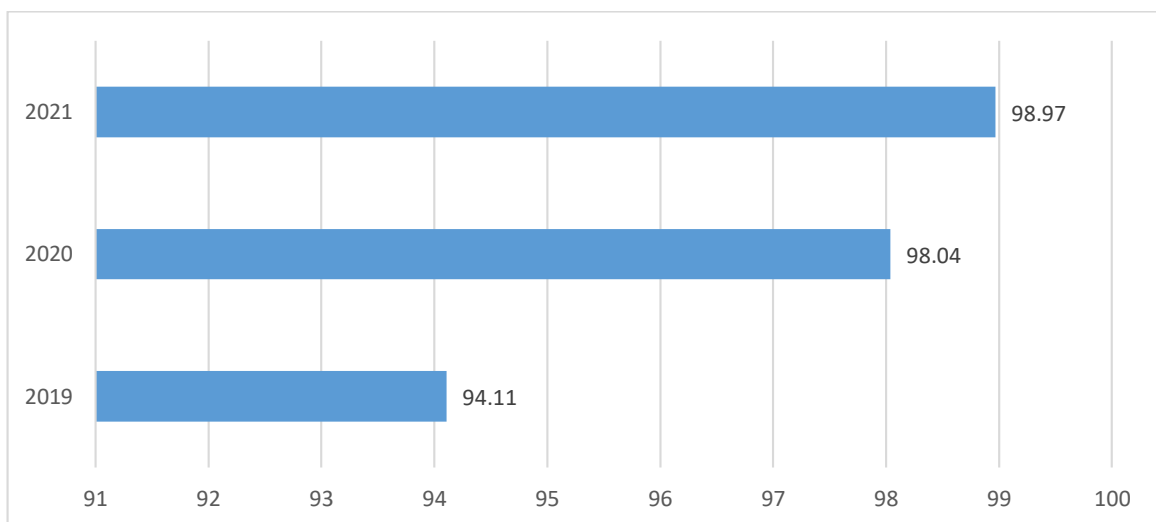


Sumber : Dinas Pu Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan 2021

b. Air Minum

Akses air minum yang layak Kabupaten Musi Rawas mengalami peningkatan pada tahun 2021 mencapai 98,97. Nilai akses air bersih yang layak Kabupaten Musi Rawas dari tahun 2016-2020 dapat lihat pada grafik berikut.

Grafik 2.25
Air Minum



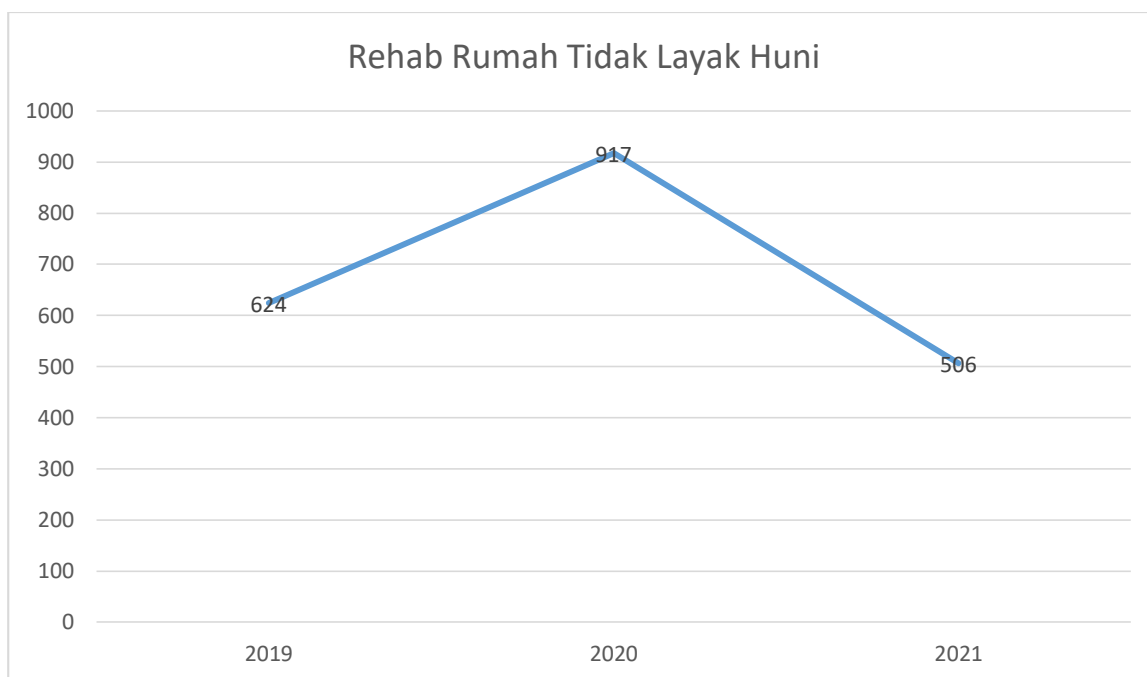
Sumber : : Dinas Pu Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan, 2021

c. Rumah Tidak Layak Huni

Rumah tidak layak huni merupakan rumah dengan kondisi bangunan tidak layak dan tidak memiliki akses prasarana yang layak, rehab rumah tidak layak huni pada tahun 2021 sebesar 506 Unit sebagaimana tercantum dalam grafik berikut:

Grafik 2.26

Rehab Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019-2021



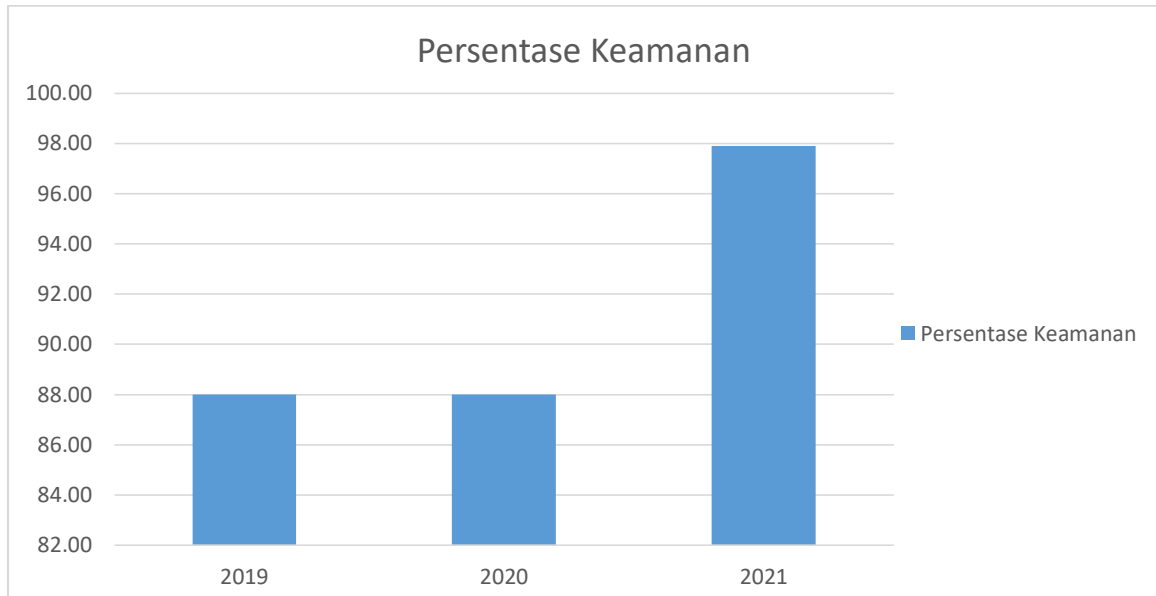
Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2021

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah disebutkan bahwa salah satu urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten adalah penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2019, Angka Kriminalitas mencapai 7/10.000 penduduk.

Grafik 2.27

Persentase Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2019-2021



Sumber : Data SatPolIPP Kabupaten Musi Rawas 2021

6. Urusan Sosial

Berdasarkan Undang Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial disebutkan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warganegara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani mencapai 93,20 % pada tahun 2021. Data urusan sosial dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.13
Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2019- 2021

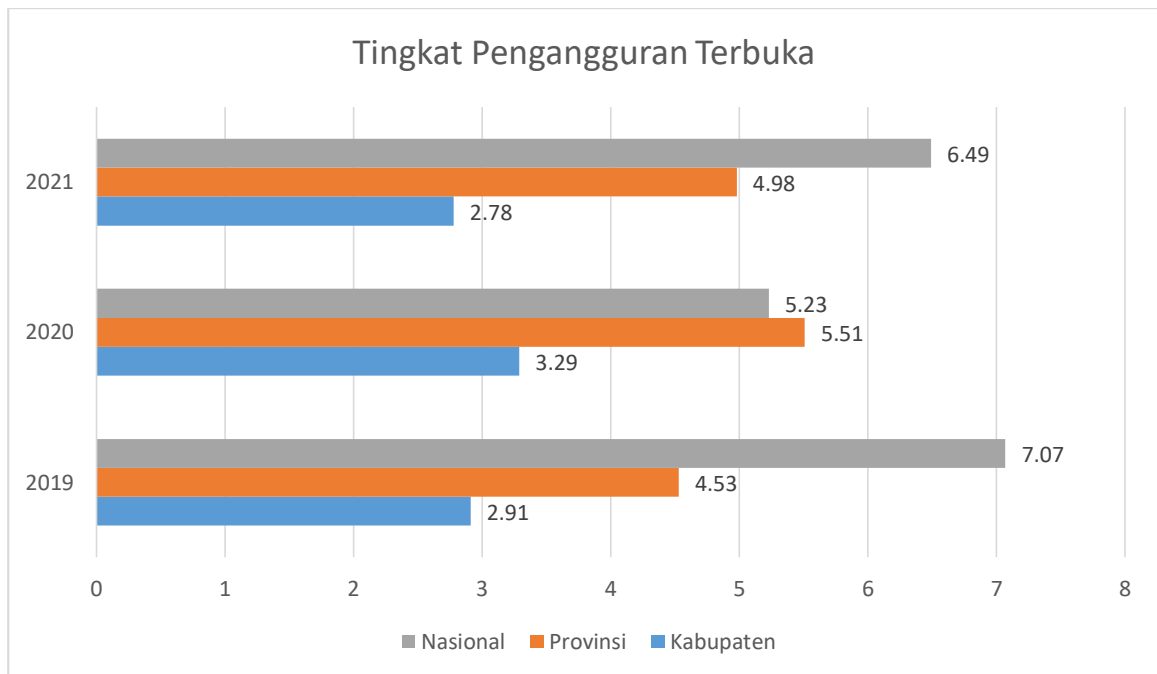
No	Indikator	2019	2020	2021
1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani (%)	30,45	50,47	93,20
2	Angka kemiskinan (%)	13,37	13,50	14,25

Sumber: Dinas Sosial Kab. Musi Rawas Tahun 2021

7. Tenaga Kerja

a. Tingkat Pengangguran Terbuka

Grafik 2.28
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Musi Rawas tahun 2019-2021



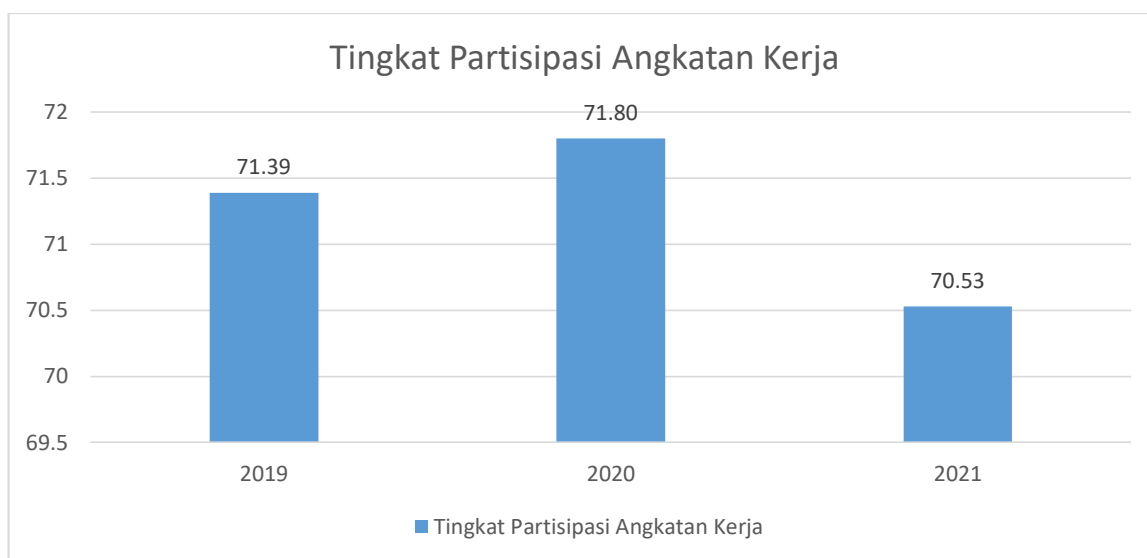
Sumber : BPS Nasional, BPS Provinsi dan BPS Musi Rawas 2021

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun 2019 mencapai 2,78. TPT Kabupaten Musi Rawas lebih rendah jika dibandingkan dengan TPT Provinsi sebesar 4,98 dan TPT Nasional sebesar 6,49.

b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2019 sebesar 71,39 mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 71,80 dan pada tahun 2021 mengalami penurunan yaitu 70,53.

Grafik 2.29
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019-2021



Sumber : Musi Rawas Dalam Angka, 2021

c. Tingkat Setengah Pengangguran

Tabel 2.14

Tingkat setengah pengangguran menurut jenis kelamin Tahun 2021

Jenis Kelamin	Tingkat Pengangguran (Persen)
	2021
Laki-Laki	9,27
Perempuan	7,86
Jumlah	8,56

Tabel 2.15

Tingkat setengah pengangguran menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2021

Tingkat Pendidikan	Tingkat Pengangguran (Persen) 2021
Tidak/Belum Pernah Sekolah/Belum Tamat dan Tamat SD	8,72
SMP	7,86

SMA Umum	8,56
SMA Kejuruan	8,59
Diploma I/II/III	6,33
Universitas	7,07
Jumlah	7,85

Tabel 2.16

Tingkat setengah pengangguran menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2021

Umur	Tingkat Pengangguran (Persen) 2021
15-19	13,55
20-24	14,48
25-29	10,89
30-34	9,49
35-39	8,36
40-44	8,14
45-49	8,05
50-54	7,03
55-59	6,40
60 ke Atas	4,17
Rata-Rata	8,71

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Musi Rawas

8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan dan anak diukur dengan indikator rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur, penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan. Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) setiap tahun mengalami peningkatan dengan capaian sebesar 85,45 pada tahun 2020 dan 85,85 pada tahun 2021. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yakni pada tahun 2019 sebesar 56,94, tahun 2020 sebesar 58,46 dan pada tahun 2021 sebesar 62,90. Secara umum indikator mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun pada tahun 2020 indikator mengalami

penurunan akibat dampak dari Covid 19 yaitu pembatasan aktivitas masyarakat dalam melakukan kegiatan yang mendukung capaian indikator. Data capaian kinerja urusan Pemberdayaan Perlindungan Anak lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.17

Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Musi Rawas Tahun 2019-2021

No	Indikator Kinerja	2019	2020	2021
1)	Rasio KDRT (%)	0,0005	0,00055	0,00055
2)	Rasio Korban Kekerasan Terhadap Anak (%)	0,01	0,012	0,00024
3)	Skor Kabupaten/Kota Layak Anak (Nilai)	Madya	Pratama	Pratama
4)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	85,59	85,45	85,85
5)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	56,94	58,46	62,90

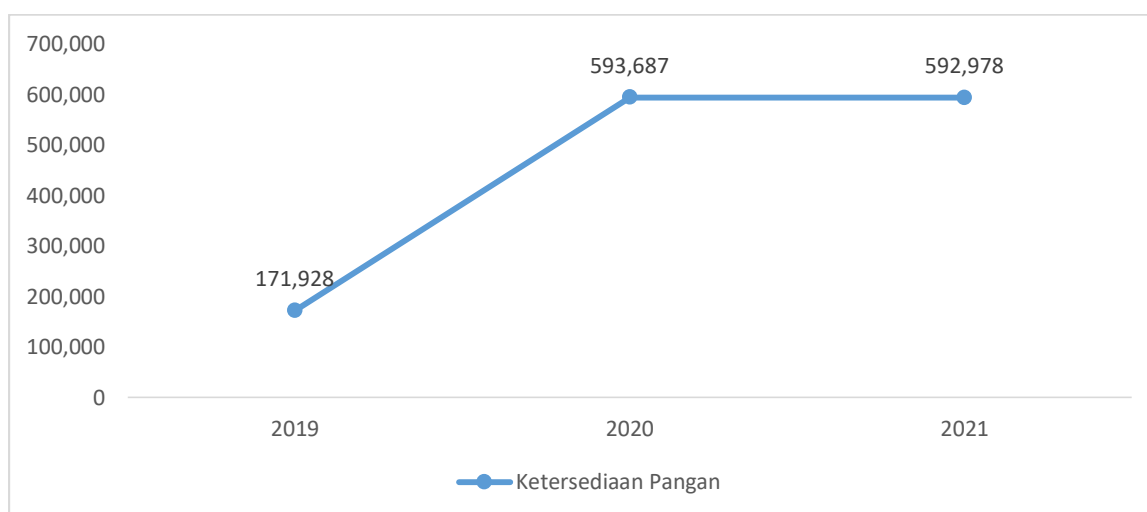
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Musi Rawas 2021

9. Pangan

a. Ketersediaan Pangan

Grafik 2.30

Ketersediaan Pangan (Ton) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019-2021



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2021

Dari grafik di atas diketahui bahwa Kabupaten Musi Rawas di tahun 2020 ketersediaan pangan mengalami peningkatan meskipun pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 592.978.

10. Pertanian

Secara umum Kinerja Pertanian yang diukur dengan Luas Lahan yang Bersertifikat di Kabupaten Musi Rawas terus mengalami kenaikan sebagaimana data tabel di bawah ini.

Tabel 2.18
Kinerja Pertanian Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015- 2020

No	Indikator	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas Lahan Yang Bersertifikat	221.765,90	227.473,43	234.297,19	290.475,61	497.838,83	53.539.923

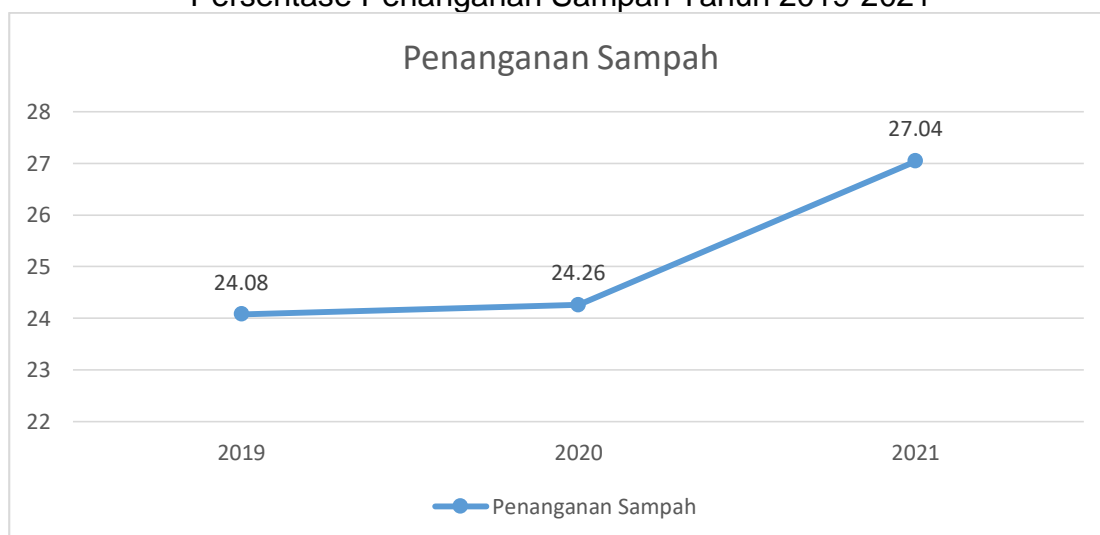
Sumber: BPN dan Bagian Tapem Setda Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 (Data Diolah)

11. Lingkungan Hidup

a. Persentase Penanganan Sampah

Penangan sampah di Kabupaten Musi Rawas terus mengalami peningkatan pada tahun 2019 mencapai 20,08 mengalami peningkatan kembali pada tahun 2020 dan 2021 mencapai 27.04 persen.

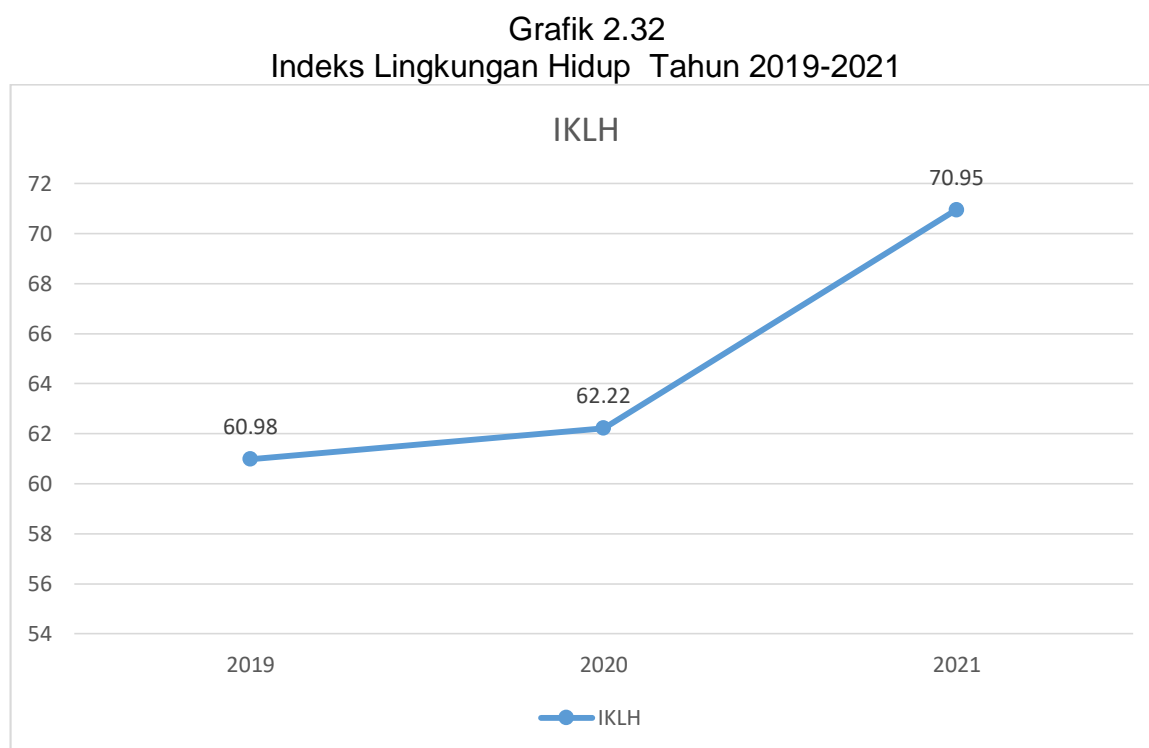
Grafik 2.31
Persentase Penanganan Sampah Tahun 2019-2021



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021

b. Indeks Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Musi Rawas setiap tahun terus mengalami kemajuan dari tahun 2019-2021, untuk tahun 2021 yang ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas sebesar 69,41% dengan realisasi sebesar 70,95% untuk lebih lanjut dapat dilihat pada grafik berikut.

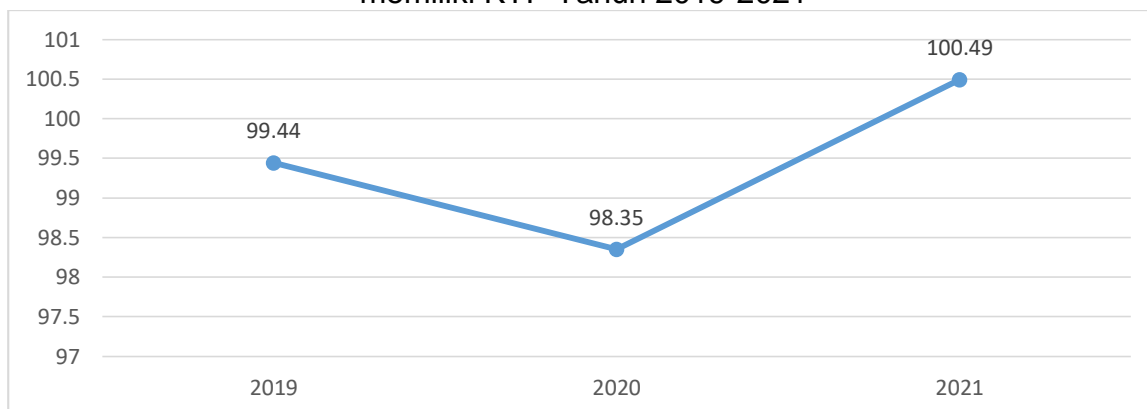


Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021

12. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan wajib pelayanan dasar yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menjadi kewenangan bersama antara pusat dan daerah. Pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas tahun 2021 Persentase Penduduk yang berusia 17 Tahun ke atas/telah menikah yang memiliki KTP sebesar 100,49 %, untuk lebih lanjut dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.33
Persentase Penduduk yang berusia 17 Tahun ke atas/telah menikah yang memiliki KTP Tahun 2019-2021



Sumber: Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil

13. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan indikator: Jumlah Lembaga Ekonomi Desa yang aktif, Persentase Masyarakat Desa memanfaatkan TKG dan Persentase Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa yang sesuai aturan dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.19
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab.Musi Rawas Tahun 2019-2021

No	Indikator	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Jumlah Lembaga Ekonomi Desa yang aktif (%)	98,92	98,92	100
2	Persentase Masyarakat Desa memanfaatkan TKG (%)	71,42	21,43	100
3	Persentase Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa Yang Sesuai Aturan	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021

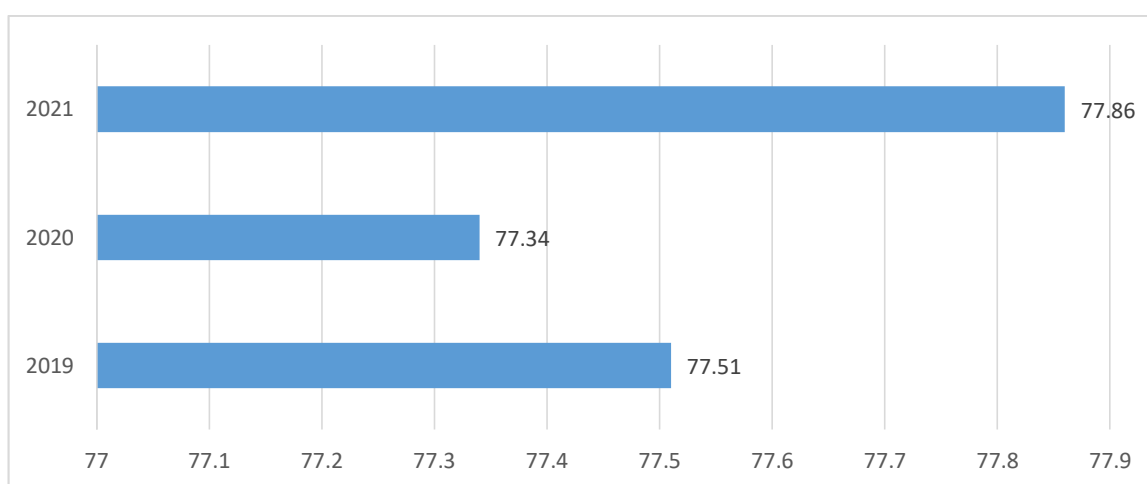
14. Penanggulangan Bencana

Kabupaten Musi Rawas termasuk daerah yang mempunyai potensi rawan bencana banjir, longsor, angin puting beliung dan kebakaran hutan. Sebagai daerah yang mempunyai potensi bencana alam Kabupaten Musi Rawas melakukan langkah-langkah monitoring untuk menekan terjadinya bencana alam. Pada tahun 2021 respon time kejadian bencana di Kabupaten Musi Rawas mencapai 78,00%.

15. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

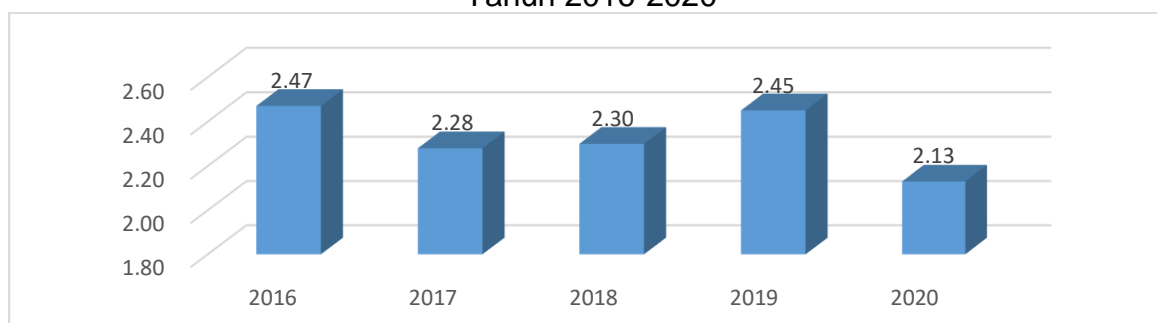
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Musi Rawas pemerintah sudah melakukan langkah-langkah terbaik, untuk membangkitkan kesadaran masyarakat menggunakan alat kontrasepsi yang telah ditargetkan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas. Capaian ini menunjukkan keberhasilan cukup baik, untuk lebih lanjut dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.34
Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive prevalence rate/CPR) %
Tahun 2019-2021



Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Musi Rawas Tahun 2021

Grafik 2.35
Angka kelahiran Total Fertility Rate (TFR)
Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Musi Rawas Tahun 2020

Capaian angka kelahiran Total Fertility Rate (TFR) dari grafik di atas pada tahun 2020 sebesar 2,13 bila di dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Musi Rawas sebesar 2,15 telah memenuhi target.

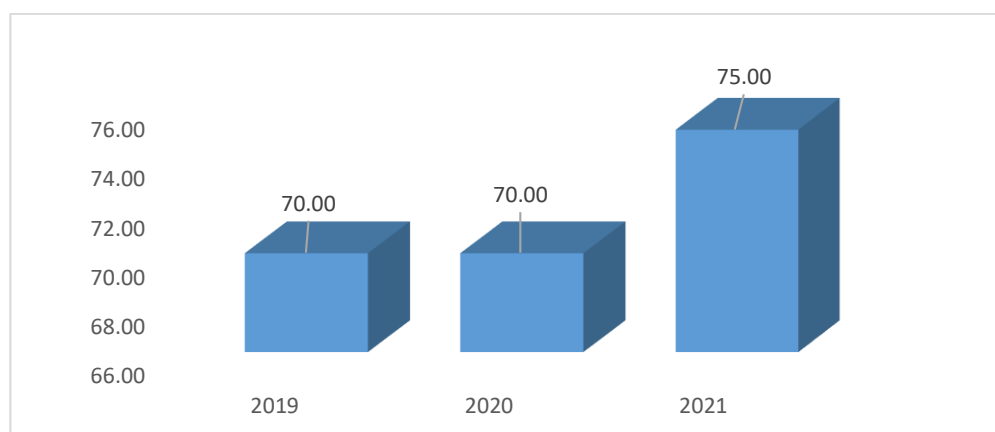
16. Perhubungan

Pada urusan perhubungan Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2021 memiliki 5 terminal yang masing – masing berkapasitas 450 kendaraan dan daya tampung kendaraan sebesar 50 kendaraan, selain terminal Kabupaten Musi Rawas juga memiliki 3 pelabuhan sungai yaitu : Dermaga Muara Kelingi, Tambatan Perahu di Desa Pasenan dan Tambatan Perahun di Desa Sri Pengantin.

17. Komunikasi dan Informatika

Untuk menjadikan kabupaten musu rawas yang lebih maju dan bersaing maka bidang komunikasi dan informatika adalah hal yang paling berpengaruh untuk mejudkan keberhasilan tersebut diantara dengan keterbukaan informasi dan kemudahan masyarakat untuk mendapatkan informasi. Langka ini didukung dengan adanya peningkatan jaringan komunikasi, untuk lebih lanjut dapat di lihat pada grafik berikut:

Grafik 2 .36
Persentase layanan penyebarluasan informasi pembangunan daerah
Tahun 2019-2021



Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Musi Rawas

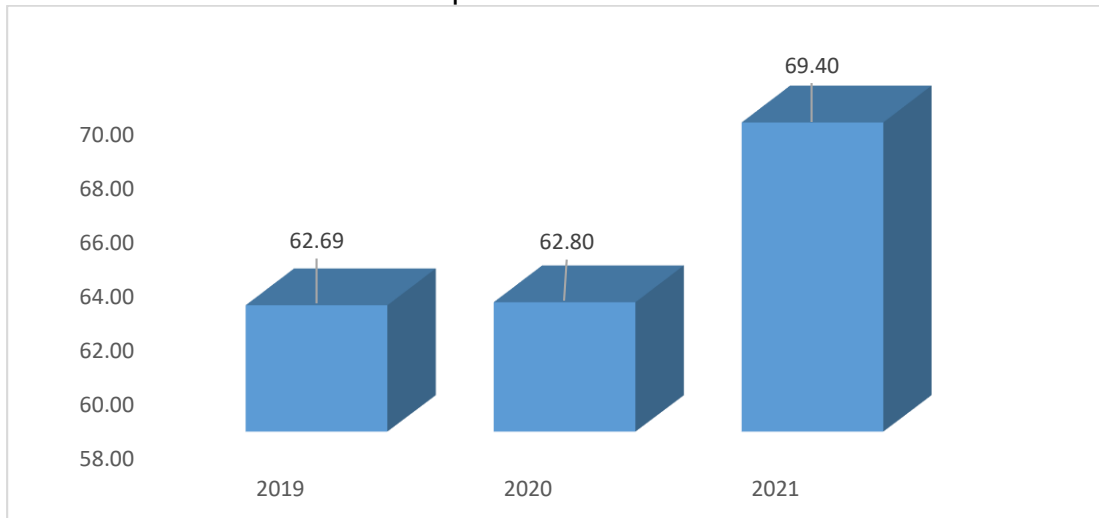
18. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Koperasi

Perkembangan koperasi di Kabupaten Musi Rawas dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan. Koperasi Aktif yang awalnya pada tahun 2019 sebesar 62,69% mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar

62,80%. Pada Tahun 2021, koperasi aktif mengalami peningkatan kembali sebesar 69,40% dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2.37
Persentase Koperasi Aktif Tahun 2019-2021

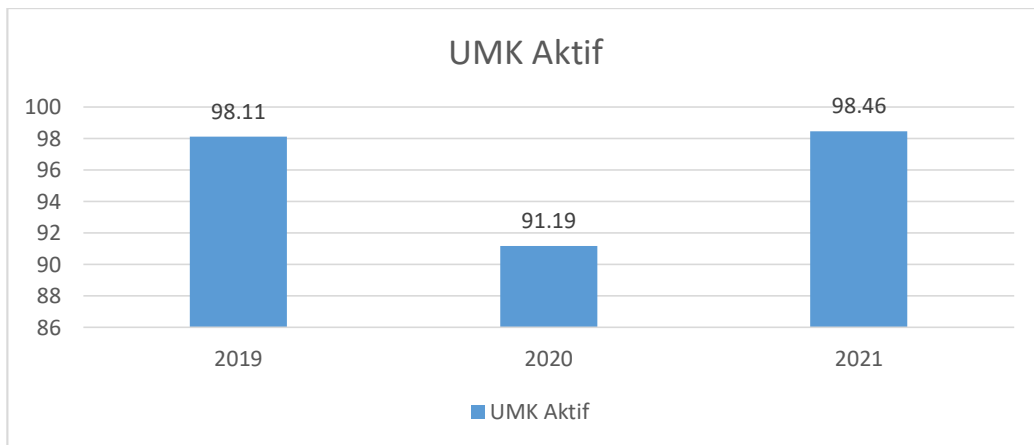


Sumber : Dinas Koperasi dan UKM 2021

b. Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada saat ini merupakan ujung tombak stabilitator dan penopang pertumbuhan perekonomian baik nasional maupun daerah. Untuk itu Kabupaten Musi Rawas terus berusaha meningkatkan pertumbuhan UKM. Adanya Pandemi Covid 19 sangat mempengaruhi pertumbuhan UKM tidak hanya di tingkat nasional namun juga memberikan pengaruh yang sangat besar bagi pertumbuhan UKM di Kabupaten Musi Rawas. Perumbuhan UKM di Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2021 mecapai 98,46 .UKM aktif dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.38
Usaha Mikro Kecil Aktif Tahun 2019-2021

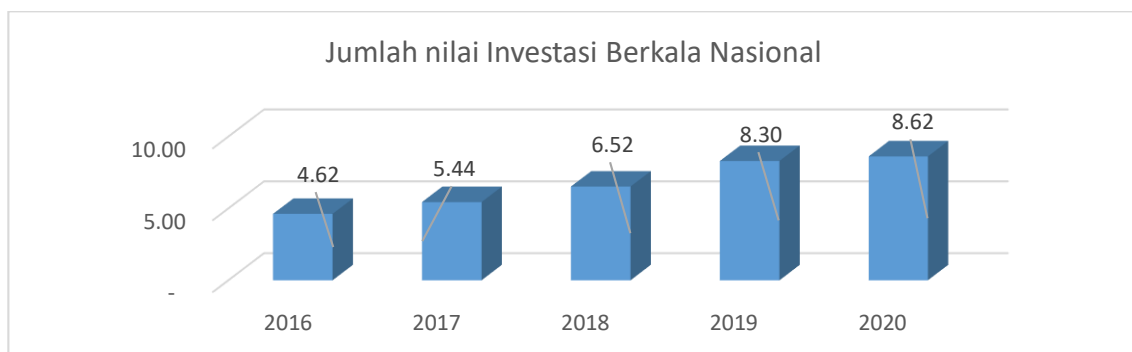


Sumber : Dinas Koperasi dan UKM 2021

19. Penanaman Modal

Perkembangan nilai investasi di Kabupaten Musi Rawas dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, khususnya pada nilai investasi berskala nasional, seperti tergambar pada grafik berikut:

Grafik 2.39
Persentase Peningkatan Investasi



Sumber : DPM-PTSP Kab. Musi Rawas Tahun 2020

20. Kepemudaan dan Olahraga

Kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Musi Rawas menjadi salah satu prioritas utama. Untuk mewujudkan pemuda yang berkualitas dan trampil banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Musi Rawas, diantaranya dengan mendirikan organisasi kepemudaan dan organisasi olahraga. Di tahun 2021 organisasi kepemudaan mencapai 18 organisasi.

21. Statistik

Urusan statistik merupakan salah satu urusan yang sangat berperan dalam proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas. Dalam hal ini Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik mengevaluasi dan menyajikan informasi guna untuk mendukung kebijakan nasional dan provinsi. Penyediaan data yang terintegrasi dan selalu di update merupakan modal utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan kedepannya. Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas menyiapkan data indikator makro maupun indikator sektoral yang dapat diakses langsung melalui website <https://musirawaskab.bps.go.id/> atau publikasinya Musi Rawas Dalam Angka.

22. Persandian

Urusan persandian merupakan salah satu upaya Kabupaten Musi Rawas untuk meningkatkan tata kelola pada bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik. Kabupaten Musi Rawas telah memanfaatkan teknologi informasi yang didukung dengan berbagai peralatan berupa sarana dan prasarana yang dilengkapi dengan Waren data (Network Operational Center), jaringan LAN, jaringan WAN dan perangkat komputer beserta kelengkapannya.

Tabel 2.20

Capaian Kinerja Urusan Persandian Kab.Musi Rawas Tahun 2019-2021

No	Indikator	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Persentase pengelolaan persandian dan keamanan informasi di daerah (%)	50	35	35

Sumber: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021

22. Kebudayaan

Capaian kinerja layanan umum pada urusan kebudayaan Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2021 diukur dengan indikator persentase warisan budaya yang dilestarikan dan indikator meningkatnya pelestarian budaya Musi Rawas, seperti pada table di bawah ini :

Tabel 2.21**Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kab. Musi Rawas Tahun 2021**

No	Indikator	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	74,35	74,5	100
2	Meningkatnya Pelestarian budaya Musi Rawas	67,2	70	104

23. Perpustakaan

Perpustakaan di Kabupaten Musi pada tahun 2021 terdiri dari Perpustakaan Daerah sebanyak 1 unit dengan pengelola sebanyak 12 orang, Perpustakaan Sekolah sebanyak 431 unit dengan pengelola sebanyak 792 orang, Perpustakaan Desa/Kelurahan sebanyak 396 unit dengan pengelola sebanyak 102 orang, Perpustakaan Perguruan Tinggi sebanyak 2 unit dengan pengelola sebanyak 10 orang dan Perpustakaan Khusus sebanyak 1 unit dengan pengelola sebanyak 4 orang. Jumlah pojok baca/ taman baca terdiri dari Pojok Baca Perpustakaan Daerah sebanyak 2 unit, Pojok Baca Desa sebanyak 58 unit. Sedangkan jumlah koleksi bahan pustaka berdasarkan jumlah judul sebanyak 229.991 dan berdasarkan jumlah eksemplar sebanyak 464.391 eksemplar. Jumlah Pemustaka di Kabupaten Musi Rawas sebanyak 50.065 orang.

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perpustakaan diukur dengan indikator: jumlah perpustakaan, persentase koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah, rasio jumlah pengunjung perpustakaan dan persentase perpustakaan yang terkelola dengan baik. Adanya Pandemi Covid 19 sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja layanan urusan perpustakaan pada tahun 2020. Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perpustakaan Kabupaten Musi Rawas mengalami penurunan, dapat dilihat dari data series pada tabel capaian kinerja urusan perpustakaan.

Tabel 2.22**Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kab.Musi Rawas Tahun 2021**

No	Indikator	Tahun 2021	
		Target	Realisasi
1	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	47,167	52,6
2	Rasio Pengunjung Perpustakaan	10,25	6,94

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021

24. Kearsipan

Kearsipan secara umum merupakan proses pengaturan dan penyimpanan bahan-bahan secara sistematis sehingga bahan tersebut dapat dicari dengan cepat atau diketahui tempatnya setiap diperlukan. Kabupaten Musi Rawas dalam urusan kearsipan mengalami perbaikan dan peningkatan di setiap tahun. Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kearsipan diukur dengan indikator: Rata-rata nilai audit kearsipan internal (LAKI), Persentase OPD yang nilai lakinya masuk dalam kategori baik. Data dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.23**Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021**

No	Indikator	Tahun 2021	
		Target	Realisasi
1	Rata-rata nilai audit kearsipan internal (LAKI)	65,00	56,98
2	Persentase OPD yang nilai lakinya masuk dalam kategori baik	12	29

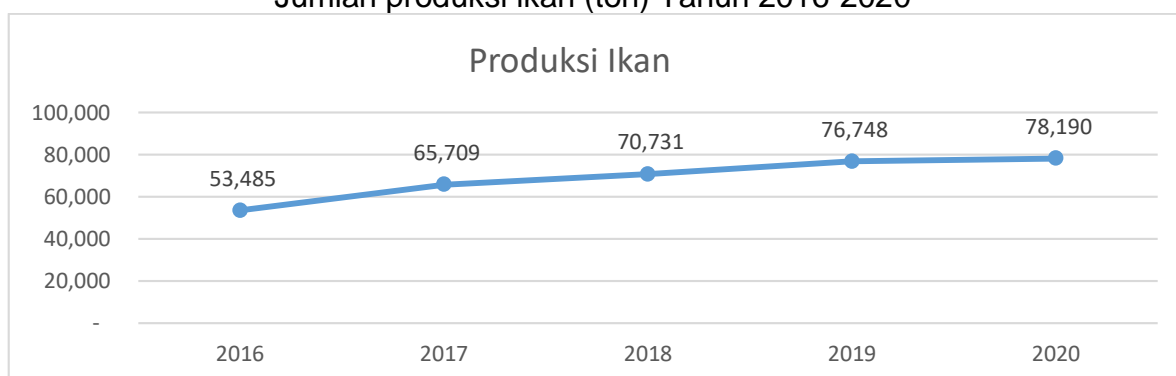
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Musi Rawas Tahun 2021

B. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Urusan Perikanan

Produksi ikan di Kabupaten Musi Rawas terus meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2016 produksi ikan Kabupaten Musi Rawas sebesar 53.485 ton meningkat 0,23% di tahun 2017 menjadi 65.709 ton dan pada tahun 2018 sebesar 70.731 ton atau meningkat 7,64%, di tahun 2019 meningkat sebesar 8,51% atau 76.748 ton dan tahun 2020 sebesar 78.190 ton atau meningkat sebesar 1,87%. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh banyaknya bantuan, pembinaan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Musi Rawas, dalam hal ini adalah Dinas Perikanan.

Grafik 2.40
Jumlah produksi ikan (ton) Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Perikanan Kab. Musi Rawas Tahun 2020

Untuk konsumsi ikan pada tahun 2020 RPJMD Kabupaten Musi Rawas itu menargetkan sebesar 38,9 kg/kapita/tahun. Dari target yang ditetapkan, Kabupaten Musi Rawas hanya mencapai 36,49 kg/kapita/tahun atau 93,80% pencapaiannya.

2. Pariwisata

Kabupaten Musi Rawas mempunyai banyak potensi wisata diantaranya wisata alam. Wisata alam yang ada di Kabupaten Musi Rawas kini mulai dilirik oleh Kabupaten/Kota dan Provinsi tetangga, dikarenakan adanya Pandemi Covid 19 menyebabkan pembatasan aktivitas dan penutupan objek wisata menyebabkan jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Musi Rawas.

Tabel 2.24
Kunjungan Wisata Tahun 2021

No	Indikator	Tahun 2021	
		Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kunjungan Wisata ke Musi Rawas	67,8	70

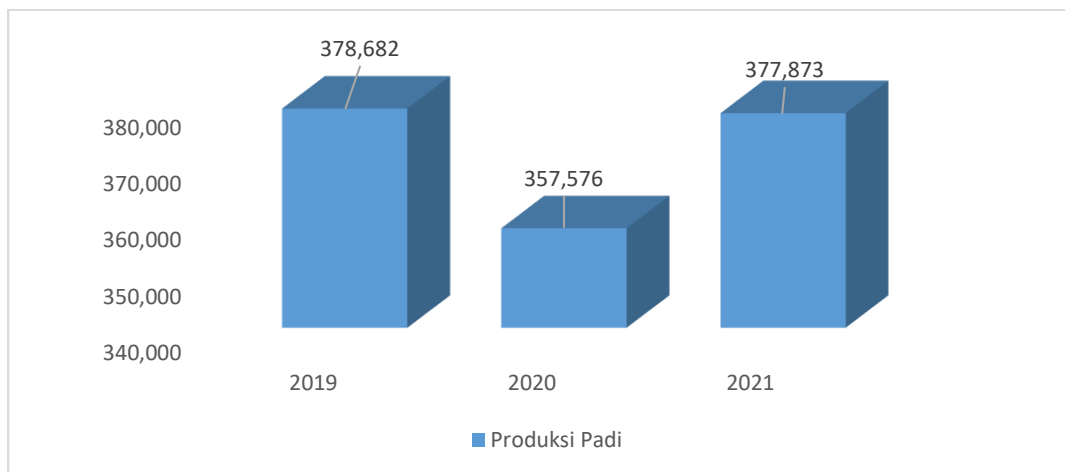
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Musi Rawas Tahun 202

3. Pertanian

Capaian urusan pertanian di Kabupaten Musi Rawas diantaranya difokuskan pada produksi padi, jagung dan kedelai. Berikut grafik capaian produksi padi, jagung dan kedelai.

- Padi

Grafik 2.41
Produksi Padi Tahun 2019 – 2021

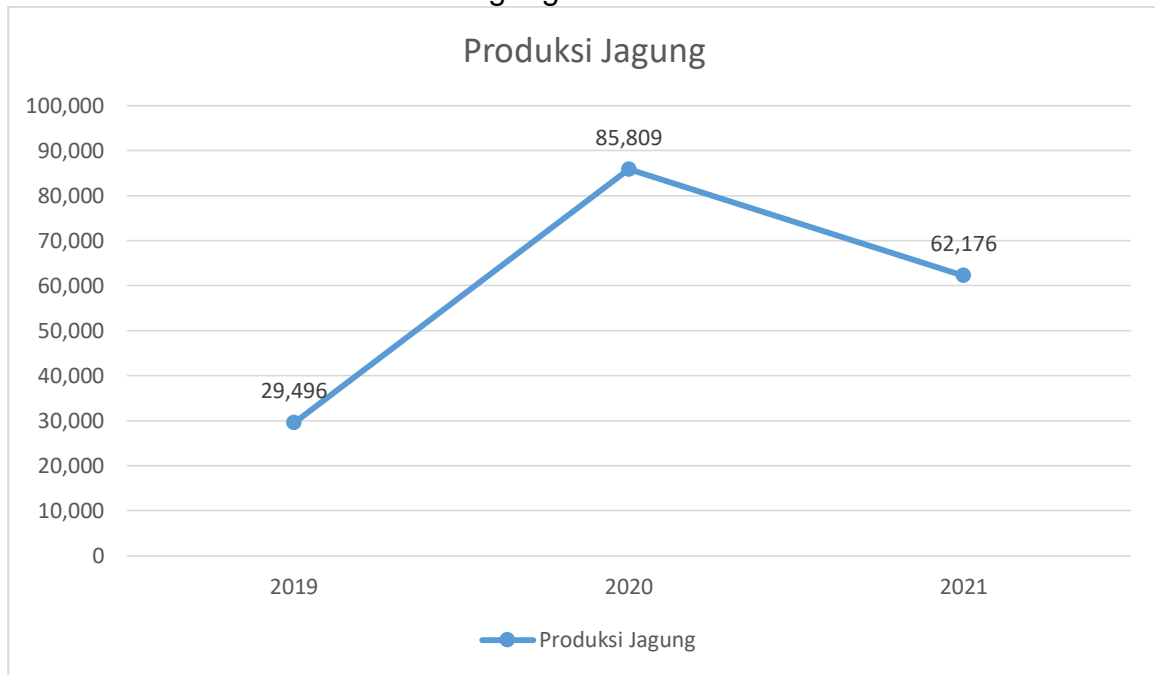


Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan

Dari grafik diatas menunjukkan produksi padi ditahun 2019 sampai dengan tahun 2021 berfluktuatif. Pada tahun 2021 produksi padi sebesar 377.873 ton.

- Jagung

Grafik 2.42
Produksi Jagung Tahun 2019 – 2021



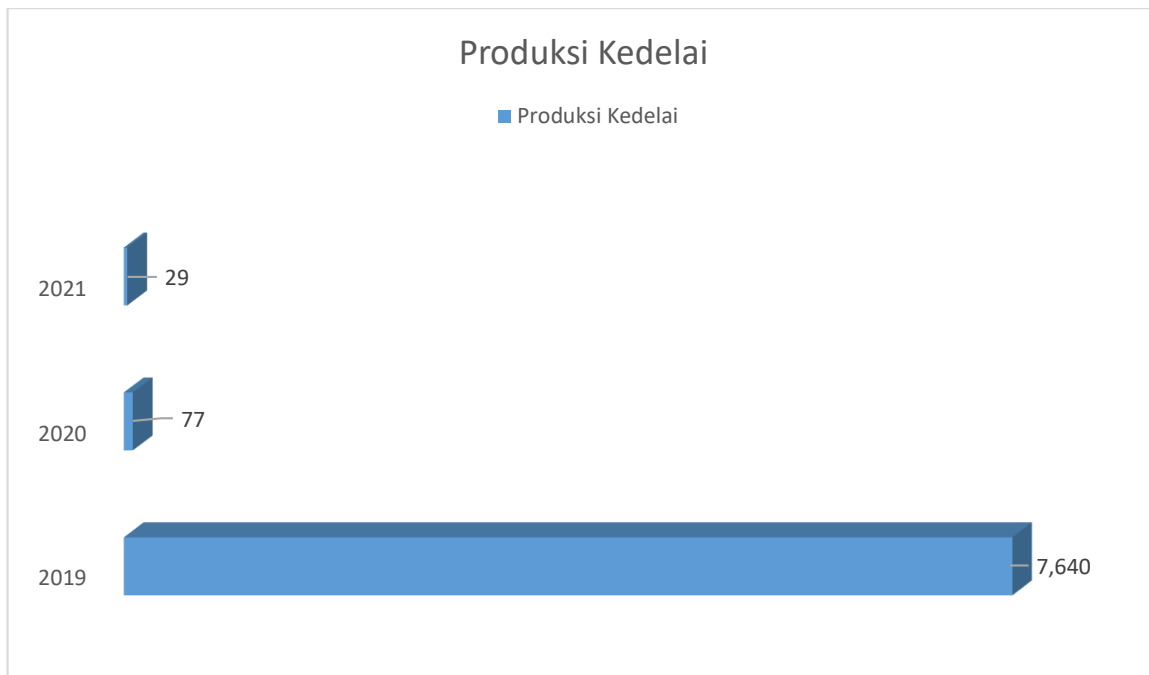
Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan

Urusan Pertanian pada sektor produksi jagung di Kabupaten Musi Rawas dari tahun 2019 sebesar 29.496 ton meningkat menjadi 85.809 ton di tahun 2020, pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 62.176 ton.

- Kedelai

Produksi Kedelai di Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2019 sebesar 7.640 ton. Mengalami penurunn pada tahun 2020 dengan capaian sebesar 77 ton. dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2021 sebesar 29 ton. Penurunan produksi kedelai disebabkan karena adanya disesuaikan dengan intruksi Menteri Pertanian untuk peningkatan produksi jagung.

Grafik 2.43
Produksi Kedelai Tahun 2019-2021

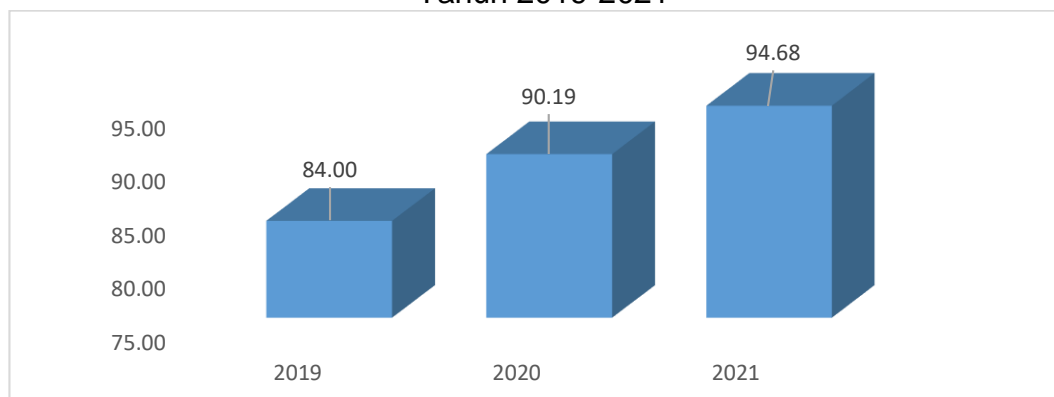


Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan

4. Energi dan Sumber Daya Mineral

Persentase Peningkatan Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Musi Rawas mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Persentase Peningkatan Rasio Elektrifikasi pada tahun 2019 sebesar 84,00 sampai dengan tahun 2021 meningkat sebesar 94,68. Jumlah ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.44
Persentase Peningkatan Rasio Elektrifikasi
Tahun 2019-2021

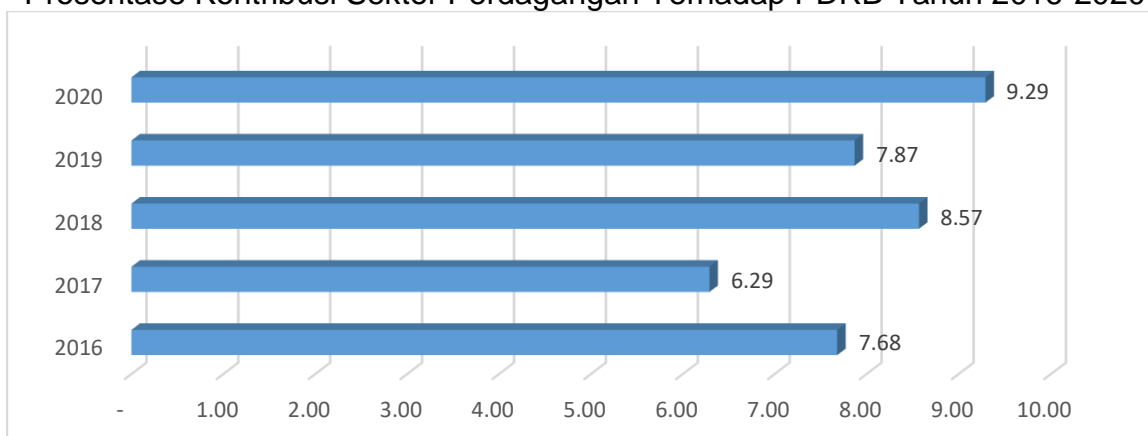


Sumber : Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kab. Musi Rawas Tahun 2021

5. Perdagangan

Sektor perdagangan di Kabupaten Musi Rawas dilihat dari prosentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB di tahun 2016 sebesar 7,68 % mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 6,29%. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 8,57%, tahun 2019 sebesar 7,87% dan pada tahun 2020 sebesar 9,29%.

Grafik 2.45
Prosentase Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Musi Rawas Tahun 2020

6. Perindustrian

Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Musi Rawas, pemerintah melaksanakan banyak – banyak terobosan dan inovasi, diantaranya yaitu di bidang perindustrian baik itu dari yang kecil, menengah dan besar. Untuk itu laju pertumbuhan industri di Kabupaten Musi Rawas dari tahun 2016 sebesar 7,68 % meningkat di tahun 2020 yaitu sebesar 9,29 % atau meningkat 1,61%.

7. Transmigrasi

Pada tahun 2017, Kabupaten Musi Rawas tidak menempatkan transmigran di lokasi transmigrasi. Sejak tahun 2013 jumlah transmigrasi yang di tempatkan adalah 15 KK dengan pendapatan perkapita pada tahun 2017 yaitu sebesar 1,4, capaian ini belum memenuhi target RPJMD Kabupaten Musi Rawas sebesar 1,6.

C. Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Diberlakukannya penyelenggaraan pemerintah melalui otonomi daerah, tentunya memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk mencapai prestasi, khususnya dalam pelayanan publik, termasuk di bidang perencanaan.

Untuk memastikan keberhasilan perencanaan Kabupaten Musi Rawas dalam kurun waktu 5 tahun berturut – turut dari tahun 2013, 2014, 2015 dan khususnya pada tahun 2016 Kabupaten Musi Rawas mendapat penghargaan terbaik (juara I) di tingkat Provinsi Sumatera Selatan atau Anugerah Pangripta Sriwijaya. Ditahun 2017 pemerintah Kabupaten Musi Rawas kembali mendapatkan Anugerah Pangrita Sriwijaya sebagai juara II ditingkat Provinsi Sumatera Selatan dan Tahun 2019 Kabupaten Musi Rawas mendapat penghargaan terbaik (juara I) di tingkat Provinsi Sumatera Selatan dan termasuk dalam 10 besar PPD tingkat Nasional. Pada tahun 2021, Kabupaten Musi Rawas meraih peringkat ketiga dalam lomba Penghargaan Pembangunan Daerah tingkat Provinsi.

2. Urusan Keuangan

Pada urusan keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Musi Rawas mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Dengan demikian Kabupaten Musi Rawas telah memperoleh predikat WTP di tahun 2014 sampai dengan tahun 2020. Penghargaan WTP merupakan penghargaan tertinggi akuntabilitas keuangan dari kementerian keuangan Republik Indonesia

3. Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Dalam peningkatan kapasitas ASN Kabupaten Musi Rawas, khususnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terus melaksanakan peningkatan kompetensi. Pada tahun 2020 Persentase penyelesaian administrasi kepangkatan mencapai 101,90% dari target RPJMD 79,00%.

4. Urusan Pengawasan

Akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Musi Rawas mengalami peningkatan setiap tahunnya, capaian ini diukur dengan indikator Persentase OPD dengan nilai Akuntabilitas dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kategori B, 60,08 ditahun 2017, mengalami peningkatan di tahun 2018 sebesar 64,34 terus meningkat menjadi 65,15 pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 67,51.

Selain itu hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) yang di lakukan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020, Kabupaten Mendapat prestasi **Sangat Tinggi**.

5. Penelitian dan Pengembangan

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah melakukan Inovasi daerah dalam bidang pemerintahan dan Sosbud dengan realisasi tahun 2021 sebesar 86,50, dan inovasi pada bidang ekonomi pembangunan sebesar 100.

Tabel 2.25

Capaian Kinerja Indikator Urusan Penelitian dan Pengembangan tahun 2021

No	Indikator	Target RPJMD Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Capaian (%)
1	Persentase Meningkatnya Inovasi Bidang Pemerintahan dan Sosbud	75,00	86,50	115,33
2	Persentase Meningkatnya Inovasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan	75,00	100,00	133,33
3	Meningkatnya Reward hasil Riset dan Inovasi	80,00	100,00	125,00

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021

6. Urusan Sekretariat Dewan

Sekretariat Dewan berfungsi sebagai pemberi layanan administratif dalam hal ini memfasilitasi penyelesaian sejumlah produk hukum baik itu perda dan keputusan DPRD yang diputuskan. Pada tahun 2019 produk hukum DPRD yang dihasilkan sebanyak 13 perda dan 13 keputusan, untuk lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.26

Capaian Kinerja Perda dan Keputusan DPRD yang Diputuskan Tahun 2020

No	Indikator	Target RPJMD (Tahun 2020)	Ralisasi Tahun 2020	Capaian (%)
1	Jumlah Perda yang di tetapkan	11	9	118,18
2	Keputusan DPRD yang diputuskan	11	12	118,18

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

a. Kemampuan Ekonomi Daerah

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Musi Rawas atas dasar harga berlaku sejak tahun 2015 hingga 2019 yang paling tinggi didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan. Pada tahun 2015 PDRB per kapita Bidang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tercatat sebesar 32,37 persen. Secara nominal terus mengalami penurunan hingga tahun 2019 mencapai 29,28 persen. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

b. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Capaian kinerja fokus fasilitas wilayah/infrastruktur tahun 2016-2019 ditunjukkan oleh :1) Persentase ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur perhubungan.

Tabel 2.27

Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Kab.Musi Rawas Tahun 2021

No	Indikator	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur perhubungan	79	81	81	50

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021

c. Iklim Berinvestasi

Capaian kinerja fokus iklim berinvestasi ditunjukkan oleh: Nilai Investasi,.

Tabel 2.28

Fokus Iklim Berinvestasi Kab.Musi Rawas Tahun 2019-2021

No	Indikator	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Realisasi Nilai Investasi	8,30	8,62	-

Sumber: Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu 2021

d. Fokus Sumber Daya Manusia

Fokus Sumber Daya Manusia diukur dengan Indikator Rasio terpenuhinya formasi pegawai, dan Persentase ASN yang memenuhi kualifikasi Jabatan. Pada tahun 2016, indikator Terpenuhinya Formasi Pegawai sebesar 109,56 setiap tahunnya mengalami penurunan sampai dengan tahun 2020 mencapai 77,34. Kondisi ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya formasi kebutuhan pegawai tidak terpenuhi sesuai dengan kebutuhan dikarenakan pada beberapa tahun mengalami pengurangan formasi (moratorium pegawai). Sedangkan Indikator Persentase ASN yang Memenuhi Kualifikasi Jabatan pada tahun 2016 sebesar 133,33 mengalami fluktuasi sampai dengan tahun 2020 mencapai 133,49.

Tabel 2.29

Fokus Sumberdaya Manusia Kab. Musi Rawas Tahun 2016- 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio terpenuhinya formasi pegawai	109,56	97,95	93,91	77,34	77,34
2	Persentase ASN yang memenuhi kualifikasi Jabatan	133,33	107,60	64,94	133,49	133,49

Sumber: BKPSDM Kabupaten Musi Rawas

2.2 REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN RKPD TAHUN 2021, ANALISIS INDIKATOR MAKRO DAN REALISASI TARGET SASARAN RPJMD TAHUN 2021

2.2.1 Evaluasi Kondisi Makro Kabupaten Musi Rawas

Secara detail capaian indikator makro RPJMD Musi Rawas tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.30
Capaian Indikator Makro Daerah dan target RPJMD Musi Rawas Dari Tahun 2021-2026

INDIKATOR MAKRO	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	2021		2022	2023	2024	2025	2026
	2020	Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target
Indikator Makro								
1) PDRB	19.303.450.000.000	20.125.776.970.000	20.418.194.660.000	21.232.694.703.000	22.400.492.912.000	23.632.520.022.000	24.932.306.623.000	26.303.585.597.000
2) Indek Pembangunan Manusia	66.79	67	67,01	67.5	68.1	68.8	69.7	70.1
3) Pengeluaran Perkapita	9.520.000	9.692.683	9.550.000	9.865.365	10.038.050	10.210.730	10.383.410	10.556.100
4) Laju Pertumbuhan Ekonomi	0.24	4.26	2.33	4.5%-5.5%	4.5%-5.5%	5%-6%	5%-6%	5%-6%
5) Tingkat Kemiskinan	84,94	13.35	14.25	13.2	13.05	11,9	10.85	9.9
6) Tingkat Pengangguran Terbuka	3,29	3,25	2.78	3.21	3.15	3.09	3.04	2.98

2.2.2 ANALISIS INDIKATOR MAKRO KABUPATEN MUSI RAWAS

Pembangunan Manusia yang tinggi mempengaruhi proses pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi mempengaruhi kualitas pembangunan manusia (Findi dan Ezkiriando, 2013). Pada tahun 2021, pembangunan manusia masuk pada level sedang dengan nilai IPM 67,01. Capaian ini diperoleh karena meningkatnya komponen kesehatan, pendidikan dan perekonomian di Kabupaten Musi Rawas. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas mencapai 2.33% dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2,78%. Perbandingan Pertumbuhan ekonomi dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Musi Rawas termasuk dalam kategori yg baik jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Selatan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu sejalan dengan tingginya kualitas pembangunan manusia di suatu wilayah. Selain itu permasalahan yang tidak kalah penting adalah mengenai kemiskinan dan ketimpangan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menjamin kesenjangan pendapatan di suatu wilayah menjadi rendah (Pangkiro, 2016). Dari 17 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Rawas termasuk dalam kategori sedang.

2.2.3 Realisasi Pelaksanaan Program RKPD Tahun 2021 dan Realisasinya

Pelaksanaan Program RKPD Tahun 2021 di Kabupaten Musi Rawas itu sebesar Rp. **2.105.148.363.225,-** dengan realisasi sebesar **94,76 %** atau Rp.**1.938.123.527.380,-** untuk lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.31

Rekap Realisasi Fisik dan Keuangan Belanja Langsung per OPD Tahun 2021

No	Nama SKPD	Jumlah Anggaran	Realisasi Fisik dan Keuangan		
			Fisik	Keuangan	
			Realisasi	Realisasi	
			%	Rp	%
1	Dinas Pendidikan	419.401.458.884	99,70	401.303.746.817	95,68

No	Nama SKPD	Jumlah Anggaran	Realisasi Fisik dan Keuangan		
			Fisik		Keuangan
			Realisasi		Realisasi
			%	Rp	%
2	Dinas Kesehatan	260.227.329.634	84,62	210.280.681.566	80,81
3	Rs. Dr. Sobirin	112.678.901.429	96,25	100.317.936.951	89,03
4	Dinas PU Bina Marga	254.218.705.489	90,32	251.339.760.388	98,87
5	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan	139.578.037.194	96,23	127.666.443.494	91,47
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	71.720.832.562	99,98	68.223.652.232	95,12
7	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	12.103.732.303	97,98	11.687.479.857	96,56
8	Dinas Sosial	15.009.201.174	98,00	14.675.273.290	97,78
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.743.753.693	83,92	6.219.060.394	92,22
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.982.013.198	93,55	3.620.076.336	90,91
11	Dinas Ketahanan Pangan	6.608.379.815	100,00	6.345.907.987	96,03
12	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	12.102.981.568	98,59	10.876.160.660	89,86
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.977.433.306	97,72	6.228.295.034	89,26
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.610.856.566	98,00	9.000.429.921	93,65
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12.100.748.929	99,62	11.070.272.027	91,48
16	Dinas Perhubungan	6.800.178.133	97,17	6.182.941.546	90,92
17	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	9.448.215.628	99,88	9.051.644.548	95,80
18	Dinas Koperasi dan UKM	6.634.977.234	99,21	5.745.766.116	86,60
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.078.888.854	96,80	4.682.463.269	92,19
20	Dinas Pemuda dan Olah Raga	17.292.015.024	94,04	16.260.582.447	94,04
21	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	7.082.609.182	96,97	6.257.786.357	88,35

No	Nama SKPD	Jumlah Anggaran	Realisasi Fisik dan Keuangan		
			Fisik		Keuangan
			Realisasi		Realisasi
			%	Rp	%
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	14.520.156.964	100,00	13.906.183.372	95,77
23	Dinas Perikanan	8.815.164.540	99,51	8.301.635.774	94,17
24	Dinas Pertanian dan Peternakan	36.898.196.909	97,28	35.128.642.119	95,20
25	Dinas Perkebunan	13.933.751.423	96,97	13.289.497.409	95,38
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	20.775.990.145	100,00	20.117.130.880	96,83
27	Bagian Perekonomian dan SDA	792.686.550	100,00	543.072.051	68,51
28	Bagian Tata Pemerintahan Dan Kerjasama	2.054.580.000	96,75	1.981.242.475	96,43
29	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3.930.000.000	81,86	3.246.240.506	82,60
30	Bagian Organisasi	799.972.300	81,00	693.600.450	86,70
31	Bagian Kesejahteraan Rakyat	9.072.902.400	87,83	8.430.677.500	92,92
32	Bagian Perencanaan dan Keuangan	25.647.934.840	90,79	22.784.216.946	88,83
33	Bagian Hukum	1.321.488.000	93,00	1.221.649.150	92,44
34	Bagian Administrasi Pembangunan	1.104.900.000	75,00	909.044.750	82,27
35	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1.109.036.800	88,84	664.200.800	59,89
36	Bagian Umum	25.647.934.840	92,46	22.784.216.946	88,83
37	Sekretariat DPRD	91.890.958.115	100,00	76.872.833.542	83,66
38	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.049.686.045	100,00	7.010.880.235	87,10
39	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.762.946.459	97,68	3.844.319.263	80,71
40	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	344.103.936.792	95,35	326.173.432.241	94,79
41	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	11.409.541.734	67,29	7.678.036.871	67,29
42	Inspektorat	16.900.681.215	91,79	14.537.557.376	86,02

No	Nama SKPD	Jumlah Anggaran	Realisasi Fisik dan Keuangan		
			Fisik	Keuangan	
			Realisasi	Realisasi	
			%	Rp	%
43	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	12.593.045.100	95,82	10.484.409.585	83,26
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.179.804.531	100,00	6.805.773.942	94,79
45	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.890.059.226	100,00	2.700.714.211	93,45
46	Kecamatan STL Ulu Terawas	2.940.196.422	96,97	2.700.776.740	91,86
47	Kecamatan Selangit	3.003.793.163	98,00	2.909.564.242	96,86
48	Kecamatan Sumber Harta	2.403.552.283	100,00	2.252.289.837	93,71
49	Kecamatan Tugumulyo	3.697.831.732	100,00	3.610.946.813	97,65
50	Kecamatan Purwodadi	4.383.834.552	100,00	4.128.518.452	94,18
51	Kecamatan Muara Beliti	3.090.604.671	98,48	2.844.835.460	92,05
52	Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut	1.976.075.361	100,00	1.848.589.101	93,55
53	Kecamatan Jayaloka	3.363.295.821	99,23	3.207.751.789	95,38
54	Kecamatan Sukakarya	1.775.316.817	100,00	1.685.040.789	94,91
55	Kecamatan Muara Kelingi	3.453.470.584	99,51	3.242.321.834	93,89
56	Kecamatan Tuah Negeri	1.817.086.253	85,00	1.615.882.126	88,93
57	Kecamatan Muara Lakitan	3.386.831.742	95,00	3.003.316.328	88,68
58	Kecamatan Mengang Sakti	4.726.183.739	96,49	4.560.063.326	96,49
59	Kecamatan BTS Ulu	3.523.685.358	97,62	3.368.060.912	95,58
JUMLAH		2.105.148.363.225	94,76	1.938.123.527.380	92,07

Penilaian RKPD dilakukan dengan menghitung realisasi sampai dengan bulan Desember 2021. Dari hasil evaluasi didapatkan bahwa dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.938.123.527.380,- atau sebesar 92,07 % termasuk

dalam kategori **Sangat Tinggi**. Namun ada beberapa realisasi dan keuangan yang dikategorikan **Rendah** yang capaian kinerjanya kurang dari 66%.

Penyebab rendahnya realisasi dan keuangan :

1. Adanya penyesuaian terhadap beberapa regulasi yaitu Permendagri 77 Tahun 2020, Kepmen 050-3708 Tahun 2020 terhadap pemetaan pada kode rekening belanja maupun uraian/rincian belanja yang masih belum sempurna dan harus diperbaiki melalui mekanisme penjabaran menyebabkan terhambatnya penyerapan realisasi fisik dan keuangan
2. Adanya Penyesuaian terhadap konsistensi penyajian informasi pada setiap tahapan perencanaan pembangunan hingga perencanaan anggaran yang harus menggunakan kodefikasi dan nomenklatur baru yang mengacu pada permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemuktahirannya.
3. Adanya penyesuaian pada petunjuk teknis pelaksanaan dan penatausahaan keuangan yang menyebabkan beberapa Perangkat Daerah kurang cepat dan tanggap sehingga proses pelaksanaan program/kegiatan dapat belum berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan target/waktu yang ditetapkan.
4. Proses Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan lebih awal agar dapat mempercepat proses pelaksanaan kegiatan dan penyerapan sesuai dengan target yang ditetapkan.
5. Terjadinya refocusing anggaran yang dialihkan untuk penanganan wabah Covid 19 sehingga terjadi penundaan dan realokasi anggaran sehingga penyerapan anggaran tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
6. Diperlukan komitmen dari Kepala OPD sebagai pelaksana program/kegiatan agar pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan senantiasa melakukan koordinasi kepada semua pihak terkait dan diupayakan adanya agenda kerja untuk kegiatan rutin bagi masing-masing OPD Pelaksana.

Sikap ketelitian petugas menjadi penting dan harus diutamakan dalam pelaksanaan tugas yang diutamakan dalam pelaksanaan tugas, sebaiknya

Kepala OPD menempatkan petugas yang kompeten di bidang program/kegiatan.

2.2.4 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Sampai dengan Tahun Berjalan

Secara umum, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah dapat melaksanakan tugas yang diamanatkan, walaupun dari sasaran yang telah ditetapkan masih terdapat beberapa sasaran yang belum menunjukkan kinerja sebagaimana yang diharapkan. Pengukuran, evaluasi dan analisis capaian sasaran strategis sampai dengan tahun 2021 dilakukan terhadap 21 sasaran didukung oleh program pada tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026. Adapun analisa atas pencapaian Sasaran Strategis tahun 2021 sebagai berikut:

TUJUAN 1 DARI MISI PERTAMA	MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (REFORMASI BIROKRASI) BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK
-----------------------------------	--

Untuk mewujudkan tujuan pertama dari misi pertama telah ditetapkan 3 sasaran dengan tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini:

1.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan
--------------	--

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Kinerja (%)
1.	Indeks RB	53,37	55,04*)	103,13
2.	Nilai SAKIP	B (68,52)	70,01*)	102,17
3.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	81,52	53,63	65,79

1.1.2	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi
--------------	---

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Kinerja (%)
1.	Indeks SPBE	2.85	2,00	70,18
2.	Indeks Profesionalitas ASN	60	61,68	102,8

1.1.3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
--------------	---

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Kinerja (%)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	89,81	102,8

TUJUAN 1 DARI MISI KEDUA	Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing dan berkualitas
---------------------------------	---

Untuk mewujudkan tujuan pertama dari misi kedua telah ditetapkan 3 sasaran, dengan tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini.

2.1.1	Meningkatnya Derajat Pendidikan
--------------	--

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Kinerja (%)
1.	Indeks Pendidikan	69,17	68,96*	99,65

2.1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan
--------------	---------------------------------------

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Kinerja (%)
1.	Indeks Kesehatan (%)	78,8	72,10	91,50

2.1.3	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan pemuda serta perlindungan anak
--------------	---

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Kinerja (%)
1.	Indeks Pembangunan Gender	86,45	85,85	102
2.	Kabupaten Layak Pemuda	Pratama	0	0
3.	Status Kabupaten Layak Anak	650 Pratama	596,55 (Pratama)	91,78

TUJUAN 2 DARI MISI KEDUA	Memantapkan Kehidupan Masyarakat yang aman dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religius dan kearifan local
---------------------------------	--

Untuk mewujudkan tujuan kedua dari misi kedua telah ditetapkan 3 sasaran dengan tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini

2.1.1	Terwujudnya Ketertiban, Keamanan, Ketentraman dan Kenyamanan Masyarakat
--------------	--

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Kinerja (%)
1.	Indeks Ketertiban dan Ketentraman	94%	92,85	98,78

2.1.2	Terwujudnya Keamanan dan Kerukunan Umat Beragama
--------------	---

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Kinerja (%)
1.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	73	68,76	94,19

2.1.3	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan nilai kearifan lokal dan kebudayaan
--------------	--

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Kinerja (%)
1.	Persentase Warisan budaya yang dilestarikan	60	70	116,67
2.	Indeks Budaya Literasi Daerah	29,8	20,13	67,55

TUJUAN 1 DARI MISI KETIGA	Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur
----------------------------------	---

Untuk mewujudkan tujuan pertama dari misi ketiga telah ditetapkan 2 sasaran, dengan tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini.

3.1.1	Meningkatnya konektivitas antar wilayah
--------------	--

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Kinerja (%)
1.	Persentase konektivitas antar wilayah (%)	91,26	92,59	101,46

3.1.2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar (Ciptakarya, Kelistrikan, Pemukiman, Irigasi, komunikasi)
--------------	--

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Kinerja (%)
1.	Indeks Infrastruktur Dasar	96	97,15	101,20
2.	Indeks Sumber Daya Air	48	48,88	101,83

TUJUAN 2 DARI MISI KETIGA	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup, penataan ruang serta ketahanan bencana
----------------------------------	--

Untuk mewujudkan tujuan kedua dari misi ketiga telah ditetapkan 3 sasaran, dengan tingkat pencapaian dijelaskan sebagai berikut.

3.2.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
--------------	---

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Kinerja (%)
1.	IKLH	69.41	70,95	102,22

3.2.2	Meningkatnya Penataan Ruang
--------------	------------------------------------

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Kinerja (%)
1.	Persentase ketaatan terhadap RTRW	94	92,26	98,14

3.2.3	Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan penanggulangan bencana
--------------	---

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Kinerja (%)
1.	Indeks Penurunan Dampak Resiko Bencana	48,27	50,9	105,45

TUJUAN 1 DARI MISI KEEMPAT	Pemulihan Ekonomi Dampak Pandemi Covid-19 melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan
-----------------------------------	---

Untuk mewujudkan tujuan pertama dari misi keempat telah ditetapkan 3 sasaran strategis, dengan tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini.

4.1.1	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian
--------------	---

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Kinerja (%)
1.	PDRB Sektor Pertanian	Rp 5.938,42 Milyar	6.094,96 Milyar **	102,63

4.1.2	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan
--------------	--

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Kinerja (%)
1.	PDRB Sektor Industri	Rp 1636,85 Milyar	1661,31 Milyar	101,49
2.	PDRB Sektor Perdagangan	Rp 943,6 Milyar	951,81 Milyar	100,87

4.1.3	Meningkatnya realisasi investasi Di Kabupaten Musi Rawas
--------------	---

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Kinerja (%)
1.	Persentase peningkatan investasi	5	6,54	130,80

TUJUAN 2 DARI MISI KEEMPAT	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
-----------------------------------	--

Untuk mewujudkan tujuan kedua dari misi keempat telah ditetapkan 3 sasaran strategis, dengan tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini.

4.2.1	Menurunnya tingkat kemiskinan
--------------	--------------------------------------

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Kinerja (%)
1.	Angka kemiskinan	13,35	14,25	93,26

4.2.2	Menurunnya tingkat pengangguran
--------------	--

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Kinerja (%)
1.	Tingkat Pengangguran	3,25	2,78	114,46

4.2.3	Meningkatnya Ketahanan Pangan
--------------	--------------------------------------

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Kinerja (%)
1.	Indeks Ketahanan Pangan	77,72	75,33	96,92

TUJUAN 3 DARI MISI KEEMPAT	Meningkatnya Pembangunan Masyarakat desa
-----------------------------------	---

Untuk mewujudkan tujuan ketiga dari misi keempat telah ditetapkan 1 sasaran, dengan tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini.

4.3.1	Meningkatnya Status Desa
--------------	---------------------------------

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Kinerja (%)
1.	Persentase Peningkatan Desa Maju	29,56	33,33	112,75

Tabel 2.32

Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja RKPd Tahun 2021

Sasaran	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%)
Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan	Indeks RB	53,37	55,04*)	103,13
	Nilai SAKIP	B (68,52)	70,01*)	102,17
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	81,52	53,63	65,79
Meningkatnya Kapabilitas birokrasi	Indeks SPBE	2,85	2,00	70,18
	Indeks Profesionalitas ASN	60	61,68	102,8
Meningkatnya pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,03	89,81	102,8
Meningkatnya Derajat Pendidikan	Indeks Pendidikan	69,17	68,96*	99,65
Meningkatnya Derajat Kesehatan	Indeks kesehatan	78,8	72,10	91,50

Sasaran	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%)
Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan pemuda serta perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	86,45	85,85	102
	Kabupaten Layak Pemuda	Pratama	0	0
	Status Kabupaten	650 Pratama	596,55 (Pratama)	91,78
Terwujudnya Ketertiban, keamanan, Ketentraman dan kenyamanan masyarakat	Indeks Ketertiban dan Ketentraman	94%	92,85	98,78
Terwujudnya keimanan dan kerukunan umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	73	68,76	94,19
Meningkatnya pelestarian dan pengembangan nilai kearifan local dan kebudayaan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	60	70	116,67
	Indeks Budaya Literasi Daerah	29,8	20,13	67,55
Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase Konektivitas Antar Wilayah	91,26	92,59	101,46
Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar (Ciptakarya, Kelistrikan, Pemukiman, Pengairan)	Indeks Infrastruktur dasar	96	97,15	101,20
	Indeks Sumber Daya Air	48	48,88	101,83
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IKLH	69,41	70,95	102,22
Meningkatnya penataan ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	94	92,26	98,14

Sasaran	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%)
Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan penanggulangan bencana	Indeks Penurunan Dampak resiko Bencana	48,27	50,9	105,45
Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian	PDRB sektor pertanian	5.938,42 Milyar	6.094,96 Milyar **	102,63
Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan	PDRB sektor Industri	1636,85 milyar	1661,31 Milyar	101,49
	PDRB sektor perdagangan	Rp 943,6 milyar	951,81 Milyar	100,87
Meningkatnya realisasi investasi Di Kabupaten Musi Rawas	Persentase peningkatan investasi	5	6,54	130,80
Menurunnya tingkat kemiskinan	Angka kemiskinan	13.35	14,25	93,26
Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat pengangguran	3,25	2,78	114,46
Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	77,72	75,33	96,92
Meningkatnya status desa	Persentase peningkatan Desa Maju	29,56	33,33	112,75

Pada tabel sasaran diatas, didapatkan hasil bahwa:

- a. Indikator termasuk dalam kriteria penilaian **SANGAT TINGGI** yaitu:
 - Indeks RB
 - Nilai SAKIP
 - Indeks Profesionalitas ASN
 - Indeks Kepuasan Masyarakat
 - Indeks Pendidikan

- Indeks kesehatan
 - Indeks Pembangunan Gender (IPG)
 - Status Kabupaten Layak Anak
 - Indeks Ketertiban dan Ketentraman
 - Indeks Kerukunan Umat Beragama
 - Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan
 - Persentase Konektivitas Antar Wilayah
 - Indeks Infrastruktur dasar
 - Indeks Sumber Daya Air
 - IKLH
 - Persentase ketaatan terhadap RTRW
 - Indeks Penurunan Dampak resiko Bencana
 - PDRB sektor pertanian
 - PDRB sektor Industri
 - PDRB sektor perdagangan
 - Persentase peningkatan investasi
 - Angka kemiskinan
 - Tingkat pengangguran
 - Indeks Ketahanan Pangan
 - Persentase peningkatan Desa Maju
- b. Indikator termasuk dalam kriteria penilaian **SEDANG** yaitu :
- Indeks SPBE
 - Indeks Budaya Literasi Daerah
- c. Indikator termasuk dalam kriteria **Rendah** yaitu :
- Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

2.4. Permasalahan Pembangunan dan Strategi Penanganan Masalah pada Tahun Berjalan

Setiap daerah memiliki permasalahan-permasalahan yang unik sebagai bagian dari tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga optimalisasi pembangunan daerah merupakan cerminan dari keberhasilan pemerintah daerah dalam merumuskan solusi setiap permasalahan yang ada. Penuntasan permasalahan merupakan esensi tujuan pembangunan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan merealisasikan tahapan demi tahapan pembangunan daerah melalui perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, permasalahan pembangunan menjadi salah satu rujukan utama dalam merumuskan setiap arah kebijakan pembangunan daerah mengingat permasalahan pembangunan daerah bersifat kompleks dan multi dimensional yang bersumber dari permasalahan sektoral maupun wilayah.

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas dapat teratasi dan dituntaskan dengan adanya kebijakan pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang tepat dan relevan. Kebijakan pemerintah Kabupaten Musi Rawas akan menghasilkan rumusan program dan kegiatan yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan Kabupaten Musi Rawas. Oleh karena itu, penting adanya pengendalian dan evaluasi capaian kegiatan serta program sebagai bagian dari pemahaman tingkat kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pembangunan dimasa lalu untuk memecahkan setiap permasalahan pembangunan.

Identifikasi permasalahan dapat diverifikasi dari informasi dan kinerja yang telah dicapai sampai dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana tercantum pada bab gambaran umum kondisi daerah. Segala perbandingan perihal apa yang telah dicapai terhadap standar dan rencana atau dengan melakukan *benchmarking* dapat diketahui berbagai kinerja pembangunan yang masih harus diperbaiki. Selain itu, pemahaman berbagai faktor yang menyebabkan permasalahan pembangunan akan terdeteksi melalui kajian dan analisis indikator kinerja pemerintah.

Dari hasil identifikasi dan analisis permasalahan pembangunan, maka dirumuskan permasalahan utama Kabupaten Musi Rawas sebagai berikut :

Tabel 2.33
Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan	Isu Strategis
<ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur dasar berkualitas yang belum merata 	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata
<ul style="list-style-type: none"> • Bertambahnya jumlah penduduk miskin 	<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan kemiskinan dan pemulihan ekonomi secara terintegrasi Terhadap penduduk dan sektor ekonomi produktif
<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM)
<ul style="list-style-type: none"> • Perlunya peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintah dan pelayanan prima 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan publik berkualitas, merata dan berwawasan lingkungan

a. Infrastruktur

Kondisi Infrastruktur Kabupaten Musi Rawas Pada tahun 2021 mengalami peningkatan seperti pada infrastuktur jalan pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020, terlihat dari jalan dalam kondisi baik yang pada tahun 2020 sebesar 806,34 dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 819,29 namun untuk jalan dalam kondisi sedang mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 272,18 menjadi 265,3 km pada tahun 2021, hal ini perlu menjadi perhatian kedepannya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur secara merata.

b. Kemiskinan

Pada Tahun 2021 Persentase jumlah penduduk miskin di Musi Rawas semakin bertambah mencapai 14,25 % dibanding dengan tahun 2020 sebesar 13,5 %.(data BPS Kab. Musi Rawas 2021)

c. Sumber Daya Manusia (SDM)

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Musi Rawas pada Tahun 2021 sebesar 67,01% masih berada dibawah capaian provinsi

dan capaian nasional, IPM Provinsi sebesar 70,24 dan IPM Nasional sebesar 72,29.

d. Tata Kelola Pemerintah

Tabel 2.34
Indikator Kinerja Tata Kelola Pemerintah

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Kinerja (%)
1.	Indeks RB	53,37	55,04*)	103,13
2.	Nilai SAKIP	B (68,52)	70,01*)	102,17
3.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	81,52	53,63	65,79
4.	Indeks SPBE	2.85	2,00	70,18
5.	Indeks Profesionalitas ASN	60	61,68	102,8
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	89,81	102,8

Berdasarkan indikator penunjang tata kelola pemerintah pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 masih terdapat target indikator kinerja yang belum tercapai yakni Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dengan target pada tahun 2021 sebesar 81,63% dengan realisasi sebesar 53,63% dan Indeks SPBE dengan target pada Tahun 2021 sebesar 2.86 dan realisasi sebesar 2.00%.

1.5 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

a) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan

Tabel 2.35

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Satuan	Target	Realisasi
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTS	%	100	105,55
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100	92,22
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	100	62,90

Urusan Pendidikan selama tahun 2021 telah dialokasikan dana sebesar Rp. 419.401.458.884,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 401.293.484.733,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.36

Alokasi Anggaran Tahun 2021

Tahun	Belanja		
	Anggaran	Realisasi	Persentase
2021	419.401.458.884,00	401.293.484.733,00	95,68%

b) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Tabel 2.37

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

No	Standar pelayanan minimal (SPM)	Defenisi Operasional	Satuan	Target	Capaian
1	Pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	%	100	96,00
2	Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar diwilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	%	100	92,00
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Cakupan jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar diwilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	%	100	96,39
4	Pelayanan kesehatan balita	Cakupan balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar diwilayah kerjanya	%	100	94,00

No	Standar pelayanan minimal (SPM)	Defenisi Operasional	Satuan	Target	Capaian
		dalam kurun waktu satu tahun.			
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai standar diwilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun ajaran.	%	100	87,00
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar diwilayah kerjanya dalam kurun satu tahun	%	100	81,00
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali diwilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	%	100	91,31
8	Pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 Tahun keatas yang mendapatkan pelayanan	%	100	78,00

No	Standar pelayanan minimal (SPM)	Defenisi Operasional	Satuan	Target	Capaian
		kesehatan sesuai standar diwilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.			
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar diwilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	%	100	70,00
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah OGDJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar diwilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	%	100	72,44
11	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	Persentase jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar diwilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	%	100	52,38
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>human</i>	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar diwilayah kerjanya	%	100	68,70

No	Standar pelayanan minimal (SPM)	Defenisi Operasional	Satuan	Target	Capaian
	<i>immunodeficiency virus-HIV</i>)	dalam kurun waktu satu tahun.			

Pada Tahun Anggaran 2020 Dinas Kesehatan melaksanakan kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan dana sebesar Rp. 211.996.747.036 (dua ratus sebelas milyar Sembilan ratus Sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh enam rupiah). Alokasi anggaran dan realisasi perjenis belanja pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.38
Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan
Tahun Anggaran 2020

No	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Reliasasi (Rp)	Capaian (%)
1	Belanja operasi :			
	- Belanja Pegawai	69.312.327.807	65.797.315.022	94,93
	- Belanja Barang dan Jasa	74.956.226.655	61.684.118.940	82,29
2	Belanja Modal	67.728.192.574	62.352.842.094	92,06
	Total	211.996.747.036	189.834.276.056	89,55

Pada Tahun 2020, terdapat 18 Program dan 82 Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Program dan Kegiatan tersebut hampir seluruhnya mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.

Urusan Kesehatan selama tahun 2021 telah dialokasikan dana sebesar Rp.260.227.279.634,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 210.253.361.365,60, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.39
Alokasi Anggaran Tahun 2021

No	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Belanja operasi :	190.651.875.399,00	147.635.136.438,60	77,44
	- Belanja Pegawai	83.231.213.451,00	77.915.947.877,00	93,61
	- Belanja Barang dan Jasa	107.220.661.948,00	69.519.188.561,60	64,84
	- Belanja Hibah	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
2	Belanja Modal	69.575.404.235,00	62.618.224.927,00	90,00
	Total	260.227.279.634,00	210.253.361.365,60	80,80

c) Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Standar Pelayanan Minimum Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pada Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pengairan Tahun 2021.

Tabel 2.40
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Standar pelayanan minimal (SPM)	Satuan	Target	Capaian
	Penyediaan kebutuhan pokok air minum			
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	100	98,97
	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik			
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	%	100	98,70

Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan (DPU CKTRP) pada Tahun Anggaran 2020 memperoleh pagu Anggaran Pendapatan sebesar Rp. 4.655.406.080,- dan pagu Anggaran Belanja sebesar Rp. 123.397.914.649,-. Anggaran tersebut tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) 1.03.02.01 tanggal 18 November 2019 sebagaimana telah diubah dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA-PD) Nomor 1.03.02.01 tanggal 19 September 2020.

Tabel 2.41

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	Pendapatan	4.655.406.080
2	Belanja Tidak Langsung	13.067.494.987
3	Belanja Langsung	110.330.419.662
SURPLUS / (DEFISIT)		(118.742.508.569)

Dari dana tersebut, anggaran yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM bidang pekerjaan umum adalah sebesar Rp.30.387.444.342,-. Selain dana APBD, DPU CKTRP juga mendapat kucuran dana dari APBN dan dana dari APBD Provinsi, DAK Reguler dan DAK Afirmatif. Adapun rincian program dan kegiatan yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM ini dapat dilihat di Bab III Program dan Kegiatan.

Anggaran Pendapatan DPU CKTRP berasal dari hasil penerimaan Pendapatan Lain-Lain Asli Daerah Yang Sah berupa Pendapatan Lain-lain BLUD SPAM Kabupaten Musi Rawas yang terealisasi sebesar Rp. 4.782.052.042,- dari target sebesar Rp. 4.665.406.080,-. Operasional BLUD SPAM juga mendukung penerapan SPM untuk jenis pelayanan dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.

Dalam Tahun Anggaran 2021, Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan (DPUCKTRP) melaksanakan kegiatan APBD dengan dana sebesar Rp.139.578.037.194,-. Dengan realisasi sebesar 133.190.788.970,00 Alokasi

anggaran per jenis belanja pada DPUCKTRP dapat dilihat pada tabel di bawah berikut:

Tabel 2.42
Alokasi anggaran Tahun 2021

No	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Belanja Operasi	53.574.923,364,00	50.605.345.097,00	94,46
	- Belanja Pegawai	13.333.373,475,00	12.714.767.221,00	95,36
	- Belanja Barang dan Jasa	40.241.549,889,00	37.890.577.876,00	94,16
2	Belanja Modal	86.003.113,830,00	82.585.443.873,00	96,03
TOTAL		139.578.037.194,00	133.190.788.970,00	95,42

d) Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2021

Tabel 2.43
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Standar pelayanan minimal (SPM)	Indikator	Satuan	Target	Capaian
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab / kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.	%	100%	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kab / kota	Jumlah warga negara terkena relokasi program pemerintah daerah kab/ kota yang memperoleh fasilitas	%	100%	100%

No	Standar pelayanan minimal (SPM)	Indikator	Satuan	Target	Capaian
		penyediaan rumah yang layak huni			

Bidang Perumahan Rakyat selama tahun 2021 telah mengalokasikan dana dengan realisasi sebagai berikut

Tabel 2.44

**Rincian Anggaran, Program Dan Kegiatan
Penerapan Dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat
Tahun 2021**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	Cakupan pelayanan dasar rumah korban bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota sesuai standar	Program Pengembangan Perumahan	- Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Rp.100.000.000	Rp. 87.101.400,00

e) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.45

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Capaian			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Capaian
1	Pelayanan pemeliharaan ketertiban umum, ketenteran	Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegak hukum perda	100 %	1 tahun	100%

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Capaian			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Capaian
	masyarakat dan perlindungan masyarakat	dan perkara kabupaten/ Kota			
2	Pelayanan dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana Kebakaran	100%	1 Tahun	100%

Alokasi anggaran tahun 2021 di Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.46

Alokasi Anggaran Pelaksanaan SPM

Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Anggaran
	Pemeliharaan Ketentraman & Ketertiban Masyarakat			
1	Jumlah Penanganan Keamanan Dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Keamanan Dan Ketertiban	- Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 Daerah Kabupaten Musi Rawas - Penegakan Perda	Rp. 1.167.629.700

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Anggaran
			Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Wali kota	
2	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Korban Bencana	- Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota - Pemadamaman dan Pengendalian Kebakarandalam daerah Kabupaten /Kota	Rp. 76.117.000

f) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial Realisasi Pencapaian Standat Pelayanan Minimal Pada Dinas Sosial Tahun 2021

Tabel 2.47

Standar Pelayanan Minimal Dinas Sosial

No	Standar pelayanan minimal (SPM)	Indikator	Satuan	Target	Capaian
	Bidang Rehabilitasi Sosial				
1	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang	Prosentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti Sosial	%	100%	89,60

No	Standar pelayanan minimal (SPM)	Indikator	Satuan	Target	Capaian
	Disabilitas Terlantar di luar Panti Sosial;	yang memperoleh bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar			
2	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial;	Persentase (%) Anak Terlantar di luar Panti Sosial yang memperoleh bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	100%	89,86
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial yang memperoleh bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	100	99,99
4	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial	Persentase (%) Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial yang memperoleh bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	100	100
	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial				
1	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.	Persentase (%) korban bencana daerah dalam 1 (satu) tahun yang menerima bantuan sosial saat dan	%	100	100

No	Standar pelayanan minimal (SPM)	Indikator	Satuan	Target	Capaian
		setelah tanggap darurat bencana			

Tabel 2.48
Alokasi Anggaran Pelaksanaan SPM
Bidang Sosial Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5
1.	Bidang Rehabilitasi Sosial			
	a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosia	Persentase PMKS Yang Mendapat Rehabilitasi Sosial.	849.372.800	837.175.760
2.	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial			
	a. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti	56.341.900	56.333.900
	b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data DTKS yang divalidasi	7.313.149.450	7.135.077.180

2.6 Evaluasi Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021

Seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 2020 telah terjadi penyebaran Pandemi Covid -19 yang terjadi di lebih dari 213 Negara di dunia termasuk Indonesia. Sampai saat ini belum dapat diperkirakan, penyebaran Pandemi Covid-19 akan berakhir bahkan Pandemi Covid-19 telah menyebabkan dampak yang signifikan terhadap seluruh sektor kehidupan manusia terutama sektor kesehatan yang ditandai dengan banyaknya korban jiwa, kemudian sektor strategis perekonomian juga terkena dampak Pandemi Covid-19 terutama sektor pariwisata, perdagangan, industri manufaktur dan pertanian.

Terkait dengan hal tersebut, dalam rangka Percepatan Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 maka Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mempedomani Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Mempedomani Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran APBD tahun 2020 dalam rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional sebagai dasar untuk melakukan penyesuaian terhadap target pendapatan daerah dalam APBD.
2. Laporan Kinerja Pencegahan Covid Bulan Desemberl 2021 Kabupaten Musi Rawas

a. Bidang Kesehatan

NO	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Penyerapan
1	Belanja Tidak Terduga	93.969.526.352	55.209.872.412	58,75%
	TOTAL	93.969.526.352		58,75%

b. Penanganan Dampak Ekonomi

NO	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Penyerapan
1	Belanja Tidak Terduga	335.783.035.543	331.219.307.755	98,64 %
	TOTAL	335.783.035.543		98,64 %%

c. Penangan Jaringan Pengamanan Sosial

NO	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Penyerapan
1	Belanja Tidak Terduga	38.293.354.850	33.810.011.698	75,00%
	TOTAL	335.783.035.543		75,00%

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah Tahun 2023 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kabupaten Musi Rawas baik yang dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian sangat penting, memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2023. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Fakta dan analisa yang diberikan terkait rancangan kerangka ekonomi tahun 2023 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Kabupaten Musi Rawas.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah Kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Musi Rawas di Tahun 2023 diselaraskan dengan arah kebijakan Provinsi Sumatera Selatan. Kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Musi Rawas di Tahun 2023 diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan kehidupan masyarakat Musi Rawas pasca pandemi *Corona Virus Disease 19* dengan mengedepankan upaya peningkatan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pembangunan sumber daya manusia dan

peningkatan tata kelola pemerintahan. Pada Tahun 2023 ekonomi makro Kabupaten Musi Rawas diharapkan dapat tumbuh lebih tinggi dibandingkan Tahun 2022 dengan tetap menjaga stabilitas kondisi ekonomi daerah.

Kondisi ekonomi di Kabupaten Musi Rawas sangat tergantung dengan perkembangan kondisi ekonomi nasional dan global serta sangat tergantung pada kondisi harga komoditas. Oleh sebab itu asumsi perekonomian Kabupaten Musi Rawas untuk Tahun 2023 memperhitungkan hasil analisis terhadap perekonomian global dan nasional pada Tahun 2021 dan 2022.

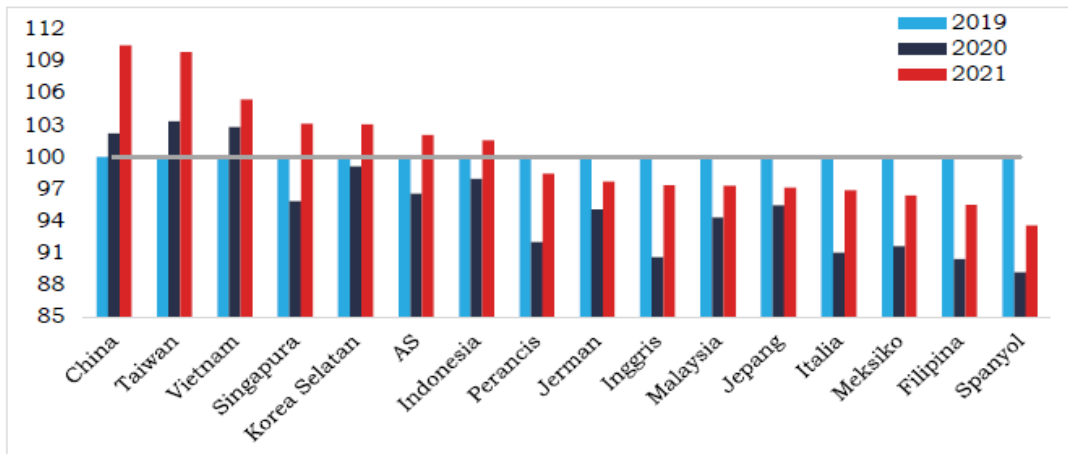
3.1.1. Analisis Perekonomian Global

Pandemi COVID-19 berdampak cukup signifikan baik pada perekonomian dunia maupun domestik. Oleh karenanya, evaluasi proses pemulihan ekonomi pada tahun 2021, serta langkah kebijakan yang diambil pada tahun 2022 akan sangat penting dalam perumusan sasaran makro pembangunan tahun 2023.

Persebaran pandemi COVID-19 hingga tahun 2021 terus berlanjut seiring munculnya perkembangan varian baru. COVID-19 varian Delta dan varian Omicron menyebabkan beberapa negara mengalami lonjakan kasus hingga memunculkan gelombang baru, yang membatasi pemulihan ekonomi pada tahun 2021. Meski demikian, ekonomi global diperkirakan telah mengalami pemulihan karena tingkat vaksinasi yang tinggi di beberapa negara, terjadinya peningkatan permintaan dan volume perdagangan, serta pemulihan pasar tenaga kerja di Amerika Serikat. Negara-negara cenderung telah beradaptasi pada pandemi dengan menerapkan kebijakan pengetatan yang fleksibel untuk mengendalikan pandemi dan mengupayakan pemulihan ekonomi. Beberapa negara telah mengalami pemulihan ekonomi, tecermin dari level PDB riil yang telah melampaui level prapandemi. Pemulihan yang relatif lebih cepat juga dialami oleh negara-negara dengan tingkat vaksinasi yang tinggi dalam upaya mencapai herd immunity.

Grafik 3.1

Indeks PDB Riil beberapa Negara Tahun 2019-2021

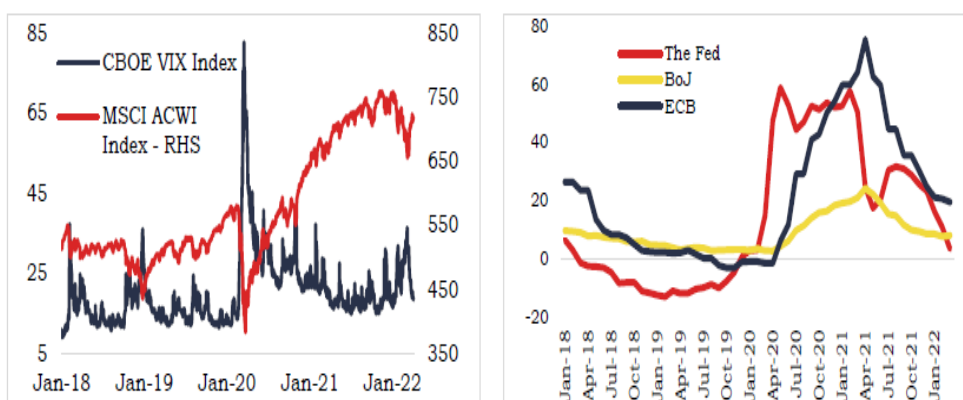


Sumber: Oxford Economics, Februari 2022.

Perkembangan Sektor Keuangan Dunia

Volatilitas pasar keuangan global pada tahun 2021 menurun dibandingkan tahun 2020, tecermin dari penurunan Chicago Board Option Exchange's Volatility Index (CBOE VIX Index) yang mendekati level prapandemi. Namun pada awal tahun 2022, volatilitas pasar keuangan global kembali meningkat, terlihat dari adanya peningkatan CBOE VIX Index yang dipicu oleh meningkatnya ketidakpastian global. Setelah mengalami penurunan pada tahun 2020, kondisi pasar saham global meningkat tajam pada tahun 2021 yang tecermin dari peningkatan Morgan Stanley Capital International All Country World Index (MSCI ACWI Index). Namun pada awal tahun 2022, pasar saham global kembali turun, dengan terjadinya penurunan MSCI ACWI Index seiring kekhawatiran investor terhadap perkembangan varian baru COVID-19 serta kebijakan pengurangan stimulus yang akan diambil oleh banyak Negara

Grafik 3.2
CBOE VIX dan MSCI ACWI Index dan Monetary Base (Persen, yoy)



Sumber: Bloomberg, 2022.

Tantangan Ekonomi Global

Setelah mengalami pemulihan kuat pada tahun 2021, ekonomi global diperkirakan mengalami perlambatan pada tahun 2023. Perekonomian negara berkembang diperkirakan belum mampu kembali menuju tren sebelum pandemi pada tahun 2022, berbeda dibandingkan dengan negara maju yang diperkirakan sudah kembali ke tren sebelum pandemi. Perlambatan ekonomi global tersebut disebabkan oleh ketidakseimbangan tingkat vaksinasi global antarnegara, penyebaran varian baru COVID-19, kebijakan fiskal dan moneter yang lebih ketat, berlanjutnya gangguan rantai pasok, dan dampak luka memar akibat pandemi COVID-19 (scarring effect).

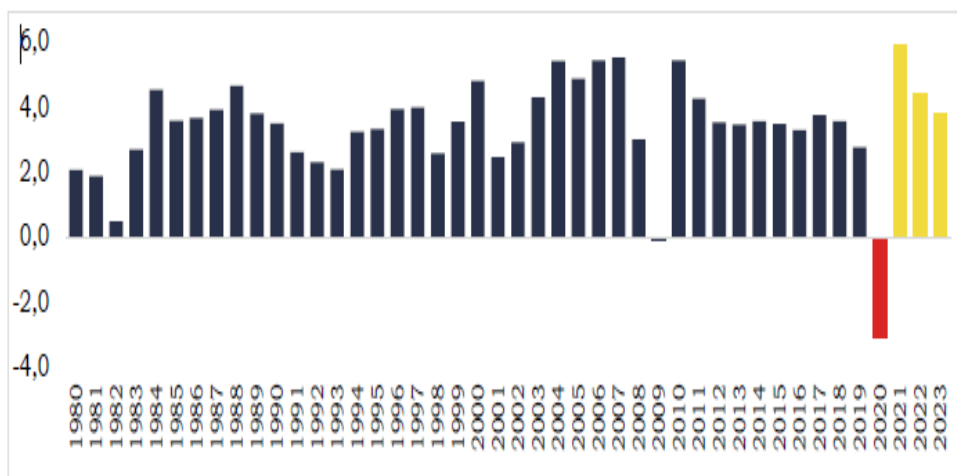
Luka memar tecermin juga dari kondisi keuangan korporasi yang pada akhirnya menimbulkan risiko pada ketahanan sistem keuangan. Pembatasan kegiatan sosial akibat pandemi menyebabkan penurunan pada aktivitas dunia usaha sehingga berdampak pada menurunnya tingkat penjualan, likuiditas, profitabilitas, dan permodalan korporasi. Tingkat keberhutangan (leverage) meningkat sejak pandemi baik di negara maju maupun negara berkembang. Beberapa kasus kegagalan korporasi juga dilaporkan terjadi di Amerika Serikat dan Cina. Sementara itu, isu perubahan kebijakan Cina terkait rencana peralihan ke energi terbarukan atau ramah lingkungan menimbulkan peningkatan risiko dalam keuangan, dengan banyaknya perusahaan padat karbon yang menghadapi profitabilitas lebih rendah dan kerentanan likuiditas.

Dari sisi moneter-fiskal, ketidakseimbangan dalam normalisasi kebijakan moneter dan fiskal di beberapa negara sebagai respons atas tingginya tekanan inflasi dan upaya menurunkan defisit anggaran fiskal menyebabkan ketatnya likuiditas global. Perkembangan pada akhir 2021, Bank Sentral Amerika Serikat telah mengumumkan siklus pengetatan kebijakan moneter yang lebih cepat. Sementara itu, Bank Sentral Korea, Norwegia, Rusia, dan Selandia Baru sudah menaikkan suku bunga kebijakannya yang disebabkan oleh tekanan inflasi seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi serta indikasi munculnya risiko stabilitas keuangan. Dinamika ini mendorong pelaku pasar memprakirakan kenaikan Fed Funds Rate lebih cepat, yakni pada paruh I-2022 dengan total kenaikan selama 2022 sebesar 75 bps.

Adanya geopolitik global, berupa ketegangan Rusia dan Ukraina juga telah memicu ketidakpastian global. Hal tersebut memberikan tekanan negatif pada perekonomian, khususnya dapat memengaruhi prospek pemulihan ekonomi, volatilitas pada pasar keuangan, dan arus perdagangan global.

Dengan berbagai perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi dunia diprakirakan mengalami perlambatan pada tahun 2022, setelah mengalami rebound di tahun 2021. International Monetary Fund (IMF, Januari 2022) menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi global menjadi sebesar 4,4 persen dari 4,9 persen pada tahun 2022, yang utamanya didorong oleh risiko seperti perkembangan varian Omicron, keberlanjutan gangguan rantai pasok, krisis energi, konflik Ukraina-Rusia, serta tekanan peningkatan inflasi. Lembaga internasional lain, World Bank dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2022 masing-masing sebesar 4,1 dan 4,5 persen.

Grafik 3.3
Pertumbuhan Ekonomi Global (Persen, yoy)



Sumber: WEO IMF, Januari 2022.

3.1.2. Analisis Perekonomian Nasional Tahun 2021

Proses pemulihan perekonomian Indonesia pada tahun 2021 dipengaruhi oleh perkembangan pandemi Covid-19. Perbaikan ekonomi yang berlangsung sejak triwulan I 2021 terus berlanjut meski sempat tertahan oleh merebaknya Covid-19 varian Delta pada triwulan III 2021. Secara keseluruhan tahun 2021, ekonomi Indonesia membaik dan akan tumbuh lebih tinggi lagi pada 2022, disertai dengan nilai tukar yang stabil dan inflasi yang terkendali. Sinergi dan inovasi kebijakan ekonomi nasional menjadi kunci dalam mendorong proses pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas. Sinergi akselerasi vaksinasi dan penguatan penanganan Covid-19, termasuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbagai level, dengan pembukaan sektor prioritas menjadi game changer tidak hanya dalam pengendalian penyebaran varian Delta, namun juga dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi.

Perbaikan kondisi ekonomi tersebut didukung oleh mobilitas yang terus meningkat sehubungan dengan semakin terkendalinya penyebaran Covid-19 dan adanya akselerasi vaksinasi. Pembukaan sektor-sektor ekonomi yang lebih luas, stimulus kebijakan yang berlanjut, dan tetap kuatnya kinerja ekspor juga

menunjang prakiraan tersebut. Untuk itu, sinergi dan inovasi kebijakan ekonomi nasional perlu terus diperkuat untuk mendukung berlanjutnya proses pemulihan ekonomi ke depan. Perbaikan tersebut didukung oleh pembukaan sektor-sektor ekonomi yang lebih luas, stimulus kebijakan yang berlanjut, dan tetap kuatnya kinerja ekspor. Kinerja ekspor yang baik menjaga kinerja NPI di tengah ketidakpastian di pasar keuangan global yang meningkat. Nilai tukar Rupiah pada 2021 secara keseluruhan terjaga stabil sesuai dengan fundamental. Stabilitas tersebut ditopang oleh kecukupan pasokan valas yang berasal dari residen dan nonresiden, serta ketersediaan instrumen lindung nilai. Inflasi tetap rendah hingga akhir tahun 2021 dipengaruhi oleh tertahannya permintaan domestik. Selain itu, memadainya pasokan untuk merespons permintaan, serta sinergi kebijakan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk menjaga kestabilan harga juga berkontribusi kepada tetap terkendalinya pergerakan harga. Stabilitas sistem keuangan, kinerja perbankan, dan pertumbuhan

Tabel. 3.1

Laju Pertumbuhan PDB Lapangan Usaha (Seri 2010) Tahun 2021

Laju Pertumbuhan Kumulatif (c-to-c) 2021					
	TW I	TW II	TW III	TW IV	Tahunan
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.44	1.87	1.72	1.84	1.84
B. Pertambangan dan Pengalihan	-2.02	1.53	3.61	4.00	4.00
C. Industri Pengolahan	-1.38	2.46	2.87	3.39	3.39
D. Pengadaan Listrik dan Gas	1.68	5.23	4.76	5.55	5.55
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.46	5.62	5.26	4.97	4.97
F. Konstruksi	-0.79	1.72	2.43	2.81	2.81
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-1.26	3.94	4.35	4.65	4.65
H. Transportasi dan Pergudangan	-13.09	2.75	1.57	3.24	3.24
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-7.27	5.35	3.51	3.89	3.89
J. Informasi dan Komunikasi	8.72	7.79	7.02	6.81	6.81
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	-2.97	2.37	3.00	1.56	1.56
L. Real Estate	0.94	1.88	2.40	2.78	2.78

M,N. Jasa Perusahaan	-6.10	1.31	0.68	0.73	0.73
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-2.26	3.77	-0.81	-0.33	-0.33
P. Jasa Pendidikan	-1.54	2.16	-0.11	0.11	0.11
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.39	7.45	9.81	10.46	10.46
R,S,T,U. Jasa lainnya	-5.15	2.71	1.69	2.12	2.12
A. Nilai Tambah Bruto Atas Harga Dasar	-0.95	2.95	2.97	3.27	3.27
B. Pajak Dikurang Subsidi Atas Produk	6.78	7.51	10.98	14.85	14.85
C. Produk Domestik Bruto	-0.70	3.10	3.24	3.69	3.69

2021: Angka sangat sementara

Ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 10,46 persen; diikuti Informasi dan Komunikasi sebesar 6,81 persen; dan Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 5,55 persen. Sementara itu, Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan tumbuh 3,39 persen. Sedangkan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masing-masing tumbuh sebesar 1,84 persen dan 4,65 persen. Kredit semakin menguat sejalan dengan terkendalinya penyebaran Covid-19. Selain itu, dengan kinerja ekonomi

yang semakin baik serta didukung program digitalisasi sistem pembayaran, transaksi sistem pembayaran diperkirakan terus meningkat.

3.1.3 Proyeksi Perekonomian Nasional Tahun 2022

Perekonomian Indonesia diperkirakan meningkat lebih tinggi pada tahun 2022 Sejalan dengan membaiknya permintaan domestik. Akselerasi perekonomian nasional di 2022 didukung oleh peningkatan mobilitas seiring dengan penyebaran Covid-19 yang lebih terkendali dan akselerasi vaksinasi, pembukaan sektor prioritas yang semakin luas disertai optimalisasi implementasi paket kebijakan terpadu KSSK, serta stimulus kebijakan fiskal Pemerintah dan bauran kebijakan seperti akselerasi digitalisasi pembayaran. (e-commerce).

Dari sisi PDB pengeluaran, berhasilnya pengendalian pandemi COVID-19 mendorong fenomena terjadinya “pent up demand” pada konsumsi masyarakat yang diikuti dengan peningkatan aktivitas pada sektor investasi. Secara keseluruhan tahun 2021, konsumsi rumah tangga mampu tumbuh secara progresif sebesar 2,0 persen. Sementara itu, aktivitas investasi yang sempat tertahan, juga kembali dapat meningkat yang ditunjukkan oleh pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 3,8 persen pada 2021. Keberlanjutan Program Strategis Nasional (PSN), akselerasi pada belanja modal pemerintah, serta mulai membaiknya kinerja investasi sektor swasta menjadi penopang perbaikan laju pertumbuhan investasi. Sementara itu, konsumsi pemerintah juga mampu tumbuh mencapai 4,2 persen secara keseluruhan tahun 2021, sejalan dengan peningkatan realisasi belanja negara, khususnya terkait akselerasi program vaksinasi, keberlanjutan program perlindungan sosial, dan pelaksanaan layanan publik pemerintah.

Pada tahun 2021, ekspor barang dan jasa mencatatkan pertumbuhan tertinggi sejak krisis Asia di tahun 2018, yakni mencapai 24,0 persen. Adapun kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDB tahun 2021 sebesar 21,6 persen. Tingginya pertumbuhan ekspor tersebut didorong oleh pertumbuhan ekspor barang terutama nonmigas yang mencapai 27,5 persen (yoy). Kinerja ekspor barang yang baik tersebut seiring dengan pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di negara mitra dagang, serta peningkatan harga

komoditas di tingkat global yang turut mendorong kenaikan volume ekspor komoditas. Seiring dengan kenaikan ekspor dan peningkatan aktivitas ekonomi domestik, impor barang dan jasa pun mengalami kenaikan sebesar 23,3 persen, dengan kontribusi sebesar 18,9 persen terhadap PDB.

Dari sisi lapangan usaha, hampir semua sektor mampu tumbuh positif selama tahun 2021. Industri pengolahan yang memiliki kontribusi terbesar pada PDB, tumbuh 3,4 persen selama tahun 2021. Hal ini didorong oleh pertumbuhan tinggi beberapa subsektor yang mampu mencapai dua digit, di antaranya industri alat angkutan, industri mesin dan perlengkapan, industri logam dasar, dan industri furnitur.

Sektor perdagangan juga mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 4,7 persen pada tahun 2021. Peningkatan tersebut didorong oleh membaiknya mobilitas masyarakat sejalan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang relatif mereda. Kebijakan pemberian pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) untuk pembelian mobil juga mendorong kinerja perdagangan kendaraan bermotor secara signifikan.

Sektor konstruksi dan real estate tumbuh positif masing-masing sebesar 2,8 dan 2,8 persen, didorong oleh membaiknya kinerja konstruksi gedung, berkurangnya restitusi, dan menurunnya pembayaran royalti. Selain itu, berlanjutnya pembangunan infrastruktur prioritas dan peningkatan pengeluaran dari pihak swasta dan pemerintah juga mendorong pertumbuhan di sektor ini.

Kinerja sektor penunjang pariwisata juga mulai menunjukkan perbaikan secara signifikan, walaupun masih di bawah level prapandemi. Sektor transportasi dan pergudangan, serta sektor penyediaan akomodasi makan-minum (akmamin) tumbuh masing-masing sebesar 3,2 dan 3,9 persen secara keseluruhan tahun 2021. Relaksasi pembatasan kegiatan masyarakat dan aturan perjalanan, serta peningkatan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penanganan pandemi mendorong aktivitas pariwisata untuk mulai pulih.

Tabel 3.2
Pertumbuhan PDB Sisi Permintaan Tahun 2021–2022 (Persen, yoy)

Uraian	2021		2022		
	Realisasi Pertumbuhan	Sumber Pertumbuhan	RPJMN	Outlook Pertumbuhan	Sumber Pertumbuhan
Pertumbuhan PDB	3,7	3,7	5,4-5,7	5,2-5,5	5,2-5,5
Konsumsi rumah tangga dan LNPRT	2	1,1	5,2-5,4	2,2-3	2,7-2,8
Konsumsi Pemerintah	4,2	0,3	4,5-4,6	5,0-5,2	0,2-0,2 ⁴
Investasi (PMTB)	3,8	1,2	5,8-6,2	5,4-6,3	1,7-2
Ekspor barang dan jasa	24	4,7	3,9-4,2	5,4-5,7	1,3-1,3 ⁴
Impor barang dan jasa	23,3	(3,4)	4,4-4,6	7,5-8,2	(1,4)-(1,5)

Sumber : BPS – 2022, RPJMN 2022=0-2024, Prakiraaan kementerian PPN/Bappenas 2022, Perbedaan angka decimal dalam range terjadi pada dua angka dibelakang koma.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan meningkat pada kisaran 5,2–5,5 persen, sejalan dengan akselerasi konsumsi masyarakat dan investasi, di tengah tetap terjaganya belanja fiskal pemerintah dan tingginya potensi ekspor. Optimisme ekonomi tahun 2022 didorong oleh aktivitas ekonomi yang terus meningkat sejalan dengan percepatan vaksinasi, pembukaan ekonomi yang semakin luas, dan stimulus kebijakan yang berlanjut. Meski demikian, target pemulihan tersebut masih dihadapkan pada risiko penyebaran varian baru COVID-19, permanent scar yang dialami oleh dunia usaha dan sosial, normalisasi kebijakan baik fiskal dan moneter, serta gangguan rantai pasok, dan krisis energi.

Keberhasilan pengendalian COVID-19 dan kebijakan penanganannya akan menjadi kunci peningkatan keyakinan masyarakat serta dunia usaha yang kemudian dapat meningkatkan komponen pertumbuhan. Konsumsi masyarakat diperkirakan meningkat dengan tumbuh sebesar 5,0-5,2 persen, ditopang oleh terkendalinya penyebaran COVID-19 seiring dengan tercapainya imunitas massal dan berangsur pulihnya mobilitas masyarakat. Kinerja ekspor barang dan jasa juga tetap akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dengan masih akan tingginya permintaan dan harga komoditas global, dengan pertumbuhan sebesar

5,4-5,7 persen. Investasi pada tahun 2022 diperkirakan akan meningkat dan tumbuh sebesar 5,4–6,3 persen, sebagai kunci peningkatan kapasitas produktif perekonomian. Konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh sebesar 2,2-3,0 persen, didorong oleh masih berlanjutnya program stimulus fiskal pemerintah, serta program vaksinasi yang diprediksi mencapai 99 persen total populasi penduduk dewasa Indonesia pada Maret 2022.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi akan didukung oleh sejumlah sektor yang diperkirakan tumbuh kuat, seperti pertambangan, industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian. Industri pengolahan diperkirakan akan menjadi motor penggerak pertumbuhan didukung oleh keberlanjutan pengembangan 7 sektor prioritas (makanan dan minuman, tekstil, kimia, otomotif, elektronika, farmasi, dan alat kesehatan), program industri hijau dan berkelanjutan, serta perluasan penerapan industri 4.0. Kinerja industri pengolahan diperkirakan meningkat pada tahun 2022 yang didukung oleh peningkatan permintaan baik dari domestik maupun eksternal.

Perluasan pembukaan aktivitas ekonomi mendorong sektor transportasi dan pergudangan, penyediaan akumamin, dan perdagangan tumbuh meningkat. Di sisi lain, sektor konstruksi terus meningkat sejalan dengan aktivitas konstruksi pemerintah dan swasta, yang didukung oleh stimulus kebijakan dan meningkatnya pendanaan yang bersumber dari akselerasi belanja modal pemerintah dan peningkatan kinerja kredit properti. Sementara itu, sektor pertanian dan pertambangan diperkirakan akan tetap tinggi sejalan dengan permintaan ekspor terutama dari AS dan Cina dan harga komoditas yang tetap tinggi.

Tabel 3. 3
Pertumbuhan PDB Sisi Lapangan Usaha
Tahun 2021–2022 (Persen, yoy)

Uraian	2021 ¹⁾		RPJMN ²⁾	2022	
	Realisasi Pertumbuhan	Sumber Pertumbuhan		Outlook Pertumbuhan ³⁾	Sumber Pertumbuhan ³⁾
Pertumbuhan PDB	3,7	3,7	5,4–5,7	5,2–5,5	5,2–5,5
Pertanian,	1,8	0,2	3,7–3,8	3,7–3,9 ^{b)}	0,5–0,5 ^{a)}

Uraian	2021 ¹⁾		RPJMN ²⁾	2022	
	Realisasi Pertumbuhan	Sumber Pertumbuhan		Outlook Pertumbuhan ³⁾	Sumber Pertumbuhan ³⁾
Kehutanan, dan Perikanan					
Pertambangan dan Penggalian	4,0	0,3	1,9–1,9	2,8–3,5 ^{b)}	0,2–0,3
Pengadaan Listrik dan Gas	5,5	0,1	5,2–5,2	5,5–5,8	0,1–0,1 ^{a)}
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulan	5,0	0,0	4,3–4,4	5,2–5,4 ^{b)}	0,0–0,0 ^{a)}
Konstruksi	2,8	0,3	5,8–6,1	6,1–6,3 ^{b)}	0,6–0,6 ^{a)}
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,7	0,6	5,6–6,0	4,9–5,1 ^{b)}	0,6–0,7
Transportasi dan Pergudangan	3,2	0,1	7,1–7,4	6,5–7,0 ^{b)}	0,2–0,3
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,9	0,1	6,1–6,3	4,9–5,3 ^{b)}	0,1–0,1 ^{a)}
Informasi dan Komunikasi	6,8	0,4	7,7–8,8	7,5–8,0 ^{b)}	0,5–0,5 ^{a)}
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,6	0,1	6,4–6,9	3,2–3,6 ^{b)}	0,1–0,2
<i>Real Estate</i>	2,8	0,1	5,0–5,0	4,0–4,6 ^{b)}	0,1–0,1 ^{a)}
Jasa Perusahaan	0,7	0,0	8,4–8,4	4,0–4,4 ^{b)}	0,1–0,1 ^{a)}
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	(0,3)	(0,0)	4,8–5,1	1,9–2,2 ^{b)}	0,1–0,1 ^{a)}
Jasa Pendidikan	0,1	0,0	5,2–5,2	2,9–3,5 ^{b)}	0,1–0,1 ^{a)}

Uraian	2021 ¹⁾		RPJMN ²⁾	2022	
	Realisasi Pertumbuhan	Sumber Pertumbuhan		Outlook Pertumbuhan ³⁾	Sumber Pertumbuhan ³⁾
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,5	0,1	7,6–8,0	8,2–8,7 ^{b)}	0,1–0,1 ^{a)}
Jasa Lainnya	2,1	0,0	9,3–9,5	5,4–5,7 ^{b)}	0,1–0,1 ^{a)}

Sumber: 1) BPS, 2022; 2) RPJMN Tahun 2020–2024; 3) Perkiraan Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Keterangan: a) Perbedaan angka desimal dalam range terjadi pada dua hingga empat angka di belakang koma; b) Terdapat penyesuaian angka outlook pertumbuhan 2022 dari sasaran pertumbuhan pada Pemutakhiran RKP Tahun 2022 setelah rilis realisasi PDB 2021.

Catatan: Angka dalam kurung “(x,x)” bernilai negatif

3.1.4 Proyeksi Perekonomian Nasional Tahun 2023

Proses pemulihan ekonomi domestik pada tahun 2023 diperkirakan akan berlanjut walaupun masih dihadapkan pada beberapa tantangan. Penyebaran varian baru COVID-19, risiko pengetatan likuiditas domestik, ketidakpastian global yang memengaruhi pola perdagangan, dan pemulihan sosial yang belum optimal dari dampak pandemi COVID-19 diperkirakan mampu memengaruhi kinerja perekonomian ke depan.

Ketidakseimbangan pemulihan yang terjadi baik antarprovinsi maupun antarsubsektor berpotensi menghambat akselerasi pertumbuhan ekonomi. Dari sisi kewilayahan, Provinsi Maluku Utara, Papua, dan Sulawesi Tengah merupakan provinsi yang mampu tumbuh tinggi di tahun 2021, sedangkan Provinsi Bali dan Papua Barat masih berkontraksi dan belum mampu pulih. Dari sisi subsektor, subsektor industri pengolahan tembakau, barang logam, kertas, kayu, dan tekstil masih mengalami berkontraksi.

Selain itu, dampak pandemi COVID-19 juga menyebabkan disrupsi pada pembelajaran yang mengakibatkan *learning loss* dan *earnings penalty*. Selama dua dekade terakhir, hasil pembelajaran siswa Indonesia menunjukkan stagnasi dan tertinggal jauh dari negara-negara lain. Dalam RPJMN Tahun 2020–2024 ditetapkan target yang cukup tinggi untuk mengejar ketertinggalan. Namun, pandemi COVID-19 diperkirakan akan menurunkan skor PISA ke titik terendah dalam dua dekade terakhir.

Pandemi COVID-19 juga menyebabkan belum pulihnya dunia usaha. Rendahnya permintaan terhadap kredit baru adalah indikasi dari rendahnya kecenderungan usaha untuk berinvestasi. Turunnya omzet cenderung menjadi motivasi utama dari usaha yang mendaftar untuk mendapatkan kredit baru. Hal ini berasosiasi dengan tren pertumbuhan kredit modal kerja yang relatif lebih baik dibandingkan dengan kredit investasi (sekalipun terdapat *base effect*). Dari sisi sosial, kondisi pengangguran dan kemiskinan Indonesia perlahan mengalami perbaikan. Namun, tingkat pengangguran dan kemiskinan tersebut belum dapat kembali ke masa sebelum pandemi COVID-19. Selain itu, proses penurunan *stunting* juga mengalami perlambatan pada saat pandemi, yang berisiko menurunkan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang.

Selain itu, ekspor barang dan jasa Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan tumbuh positif, namun tidak sebesar tahun 2021. Pertumbuhan ekspor barang diperkirakan lebih rendah pada tahun 2022 disebabkan oleh (a) pertumbuhan negara mitra yang diperkirakan positif namun lebih rendah dibandingkan tahun 2021, (b) masih berlanjutnya hambatan rantai pasok kelangkaan kontainer, (c) harga komoditas yang diperkirakan tidak setinggi di tahun 2021, dan (d) eskalasi politik Eropa Timur yang dapat mengganggu ketidakstabilan *supply-demand* beberapa komoditas penting seperti minyak bumi dan gandum. Sementara itu, risiko penyebaran COVID-19 masih akan memperlambat aktivitas perdagangan jasa yang sudah mulai pulih seiring pembukaan *border* di beberapa destinasi wisata. Pada tahun 2023, walaupun perekonomian negara mitra dagang diperkirakan semakin pulih seiring dengan tingkat vaksinasi yang semakin tinggi, besaran dampaknya terhadap peningkatan ekspor Indonesia masih dibayangkan oleh proteksionisme yang mungkin akan tetap tinggi. Beberapa produk komoditas Indonesia diperkirakan masih akan mengalami hambatan ekspor di beberapa negara akibat isu lingkungan dan *sustainability* yang akan semakin meningkat. Sementara itu, kinerja ekspor non-komoditas masih terkendala berbagai permasalahan di dalam negeri, di antaranya terkait dengan isu produktivitas dan daya saing, akses bahan baku domestik dan impor, kemampuan inovasi, akses pembiayaan dan investasi, akses pasar dan *buyer*, serta integrasi program fasilitasi promosi ekspor antar kementerian/lembaga.

Tabel 3.4
Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2023

Uraian	2021	2022	2023	
		Outlook	RPJMN	Sasaran
Perkiraan Besaran-Besaran Pokok				
Pertumbuhan PDB (% <i>, yoy</i>)	3,7	5,0–5,5	5,7–6,0	5,3–5,9
Laju inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (% <i>, yoy</i>): Akhir Periode	1,87	3,0	2,8	3 ± 1
Neraca Pembayaran				
Cadangan Devisa (US\$ miliar)	144,9	151,6–152,4c)	146,8	158,9–160,9
- dalam bulan impor	8,0	7,5–7,4c)	6,8	7,5–7,4
Defisit Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	0,3	(0,3)–(0,5)c)	(1,9)	(0,4)–(0,6)
Keuangan Negara				
Penerimaan Perpajakan (% PDB)	9,1	8,4a)	10,5–11,7	10,2–10,6
Keseimbangan Primer (% PDB)	(2,6)	(2,6)a)	0,2–0,0	(0,7)–(0,5)
Surplus/Defisit APBN (% PDB)	(4,6)	(4,9)a)	(1,6)–(1,7)	(2,9)–(2,8)
Stok Utang Pemerintah (% PDB)	40,7	43,8a)	28,9–29,6	41,7–42,4
PMTB/Investasi				
Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	3,8	5,4–6,0	7,2–7,8	6,1–6,7
Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Triliun Rp) Target Pembangunan	901,0	968,4	1294,1	1.250–1.400

Uraian	2021	2022	2023	
		Outlook	RPJMN	Sasaran
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,49	5,5–6,3	4,0–4,6	5,3–6,0
Tingkat Kemiskinan (%)	9,71	8,5–9,0	7,0–7,5	7,5–8,5
Rasio Gini (nilai)	0,381	0,376–0,378	0,374–0,377	0,375–0,378
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,29	72,67–72,69c)	74,77c)	73,31–73,49
Penurunan Emisi GRK	23,55	26,87	26,80	27,02
Indikator Pembangunan				
Nilai Tukar Petani (NTP)	104,64	103–105	104	103–105
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	104,69b)	104–106	106	106–107

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Stabilitas makro ekonomi tahun 2023 diupayakan tetap mendukung proses pemulihan pasca pandemi COVID-19. Tingkat inflasi dijaga stabil pada rentang 2,0–4,0 persen (yoy) dan nilai tukar rupiah diperkirakan berada pada kisaran Rp14.450 per US\$ berada pada rentang Rp13.800,00–Rp15.000,00 per US\$. Kondisi makro yang menguat dan stabil pada tahun 2023 diiringi oleh peningkatan kualitas pertumbuhan berkelanjutan. TPT pada tahun 2023 diharapkan turun menjadi 5,3–6,0 persen. Demikian pula rasio gini turun menjadi 0,375–0,378. Seiring dengan itu, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat, yang diindikasikan oleh meningkatnya IPM menjadi 73,31–73,49. Kebijakan peningkatan kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diharapkan dapat menjaga tingkat kesejahteraan petani dan nelayan, yang ditunjukkan oleh indikator NTP pada kisaran 103–105 dan NTN pada kisaran 106–107.

Tahun 2023 merupakan tahun untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mendorong transformasi ekonomi. Perkiraan vaksinasi penuh yang mendorong terciptanya kekebalan masal (herd immunity) pada tahun 2022, mendorong pemerintah mempersiapkan langkah untuk menuju masa transisi dari kondisi pandemi menjadi endemi. Langkah kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan aktivitas masyarakat yang tentunya juga akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, akselerasi pertumbuhan ekonomi juga didorong oleh tumbuhnya investasi untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian. Untuk mengurangi tekanan defisit transaksi berjalan seiring dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan juga sebagai salah satu upaya untuk peningkatan kapasitas produktif perekonomian pada tahun 2023, ekspor juga didorong untuk tumbuh lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih lanjut, mulai berjalannya program-program transformasi ekonomi juga menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Arah kebijakan dalam upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mengejar sasaran jangka menengah-panjang serta menghadapi tantangan yang ada pascapandemi, difokuskan pada peningkatan produktivitas di seluruh sektor ekonomi, penguatan pemulihan sosial serta optimalisasi transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan. Agenda tersebut akan mendorong penguatan fondasi ekonomi Indonesia untuk tumbuh lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

(a) Peningkatan Produktivitas

Peningkatan produktivitas diarahkan untuk mengembalikan trajectory pertumbuhan ekonomi ke level sebelum pandemi dan mengangkat trajectory tersebut ke level yang lebih baik lagi. Peningkatan produktivitas perlu dilakukan pada sektor itu sendiri (within sectors) diiringi dengan pergeseran struktur ekonomi menuju sektor-sektor bernilai tambah tinggi (between sectors). Upaya peningkatan produktivitas dilakukan melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan IKN, dan peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas.

(b) Penguatan Pemulihan Sosial dan Ekonomi yang Inklusif

Dampak pandemi COVID-19 yang masih dirasakan, khususnya bagi pembangunan sosial, menegaskan kembali perlunya penguatan pemulihan sosial. Penguatan pemulihan sosial ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing. Penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM merupakan bagian terpenting dari pembangunan yang pada akhirnya mampu meningkatkan kapasitas produktif suatu perekonomian. Upaya penguatan pemulihan sosial yang inklusif dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak.

(c) Pembangunan yang Berkelanjutan

Pembangunan perlu memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga sumber daya dapat dikembangkan secara optimal untuk kebutuhan saat ini maupun untuk generasi yang akan datang. Pembangunan yang berkelanjutan diarahkan pada penciptaan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah karbon dan meminimalkan eksploitasi sumber daya alam. Arah pembangunan berkelanjutan difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan dari perubahan iklim.

3.1.5 Proyeksi Perekonomian Sumatera Selatan Tahun 2022

Tahun 2022 merupakan tahun lanjutan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Diharapkan upaya pemerintah pusat dalam pemulihan ekonomi terus dilakukan dengan mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi : industry, pariwisata dan investasi melalui perbaikan berbagai aspek. Aktifnya mesin penggerak ekonomi diperlukan untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan serta menggerakkan usaha-usaha lain yang terkait.

Dari sisi permintaan konsumsi rumah tangga diperkirakan akan meningkat sejalan dengan peningkatan harga komoditas internasional pasca pemulihan perdagangan global. Pertumbuhan investasi diperkirakan akan menguat terutama setelah pemilu dan pilkada serta membaiknya sentiment bisnis karena usulan peningkatan Foreign Direct Investment (FDI). Beberapa Proyek Strategis Nasional dan Mayor Project di Sumatera Selatan diharapkan juga akan meningkatkan belanja pemerintah. Dari sisi ekspor barang dan jasa diharapkan kembali meningkat didorong oleh pulihnya aktivitas ekonomi dunia yang akan meningkatkan permintaan ekspor. Impor barang dan jasa juga diperkirakan akan naik seiring mulai bergerakinya ekonomi dan mulainya setting Kawasan Pembangunan Tanjung Carat.

Tabel 3.5
 Proyeksi Pertumbuhan Komponen PDRB ADHK Provinsi Sumatera Selatan
 Tahun 2022 (%)

No	Komponen / Subkomponen	Proyeksi Tahun 2022
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga	64,34
2	Pengeluaran konsumsi LNPRT	1,51
3	Pengeluaran konsumsi pemerintah	7,29
4	Pembentukan modal tetap bruto	35,50
5	Perubahan inventori	(0,20)
6	Net ekspor barang dan jasa	(8,44)
Produk Domestik Regional Bruto		100

Sumber: BPS & Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Dari sisi lapangan usaha pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan tetap akan ditopang oleh seluruh sektor lapangan usaha termasuk sektor transportasi dan pergudangan serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang diprediksi tumbuh positif pada tahun 2022 akan tumbuh dengan signifikan di tahun 2023 terutama dengan adanya beberapa agenda nasional dan internasional yang akan dilaksanakan di Sumatera Selatan, antara lain, kegiatan Danau ranau Grand Fondo, kegiatan Dunia Melayu Dunia Islam dan beberapa agenda lainnya. Percepatan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat, Kawasan Industri Tanjung Enim dan Proyek Strategis Nasional di harapkan dapat menumbuhkan lapangan usaha sektor Konstruksi. Selain itu sektor Industri Pengolahan seiring dengan mulai pulihnya perekonomian nasional dan internasional diharapkan dapat tumbuh dengan baik terutama pada subsektor industri makanan dan minuman, industri kayu dan barang dari kayu, industri kertas dan barang dari kertas, dan indutri kimia, farmasi dan Obat Tradisional. Prospek perekonomian Sumatera Selatan pada tahun 2022 diprakirakan meningkat didorong oleh terbentuknya herd immunity serta meningkatnya produktivitas komoditas ekspor didukung oleh cuaca yang kondusif. Namun, perkiraan ini harus mempertimbangkan beberapa risiko yang dapat menahan laju perekonomian diantaranya adanya kelangkaan kontainer dan meningkatnya bea masuk ekspor.

Rekomendasi pengembangan Ekonomi Sumatera Selatan Tahun 2022, yaitu:

1. Mendorong hilirisasi komoditas unggulan. Hilirisasi beberapa komoditas unggulan yang menjadi pendorong utama ekonomi Sumsel perlu untuk didukung oleh berbagai pihak agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Sumsel dengan memberikan nilai tambah.
2. Mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru. Mencari potensi subsektor dari beberapa LU yang berpotensi menjadi pendorong pemulihan ekonomi dengan kriteria subsektor yang memiliki dampak ekonomi yang tinggi namun risiko penyebaran yang rendah.
3. Mengembangkan UMKM & ekonomi kreatif. UMKM memeran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan dalam mendukung

peningkatan produktivitas, kualitas, kreatifitas, kompetensi dan kapabilitas UMKM perlu ditingkatkan.

4. Mengembangkan ekonomi syariah secara berkelanjutan. Ekonomi syariah Sumsel memiliki potensi sebagai pendorong ekonomi mengingat besarnya potensi pasar dan keuangan syariah. Pengembangan halal value chain serta UMKM dapat mendukung industri halal.
5. Mendorong penggunaan pembayaran non tunai untuk mengurangi risiko penyebaran COVID-19 & mendukung digitalisasi ekonomi. Penggunaan pembayaran non tunai seperti QRIS perlu menjadi salah satu prioritas untuk mengurangi risiko penyebaran COVID-19.
6. Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur. Percepatan pembangunan infrastruktur yang dapat membantu pemulihan ekonomi di daerah seperti pembangunan pelabuhan laut Tanjung Carat serta proyek swasta lainnya.
7. Industri pengolahan Sumatera Selatan masih tergantung pasokan dari impor, agar dapat memberikan nilai tambah ekspor maka perlu pengembangan industri berbasis substitusi impor.

Perkembangan inflasi Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan berada pada kisaran target inflasi pemerintah $3,0\pm 1\%$. Hal ini didorong oleh peningkatan confidence masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi seiring dengan berlanjutnya proses vaksinasi dan pelonggaran kebijakan bepergian/aktivitas luar.

Faktor pendorong inflasi, yaitu:

1. Potensi peningkatan mobilitas masyarakat di tengah pandemi COVID-19 yang semakin membaik.
2. Pemulihan perekonomian mendorong serta percepatan pembangunan infrastruktur, mendorong harga bahan bangunan.
3. Kenaikan harga kendaraan bermotor pasca berakhirnya kebijakan insentif tarif PPnBM.

4. Potensi kenaikan harga aneka rokok seiring dengan rencana kenaikan cukai tembakau sebesar 12%.
5. Potensi kenaikan harga angkutan udara di tengah peningkatan mobilitas masyarakat.
6. Potensi kenaikan tarif listrik setelah berakhirnya program subsidi listrik.

Faktor penahan inflasi, yaitu:

1. Kondisi cuaca yang lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya mendorong peningkatan produksi hortikultura.
2. Terjaganya pasokan beras dan gula pasir.
3. Terjaganya pasokan bawang putih seiring dengan kemudahan izin impor.

3.1.6 Proyeksi Perekonomian Sumatera Selatan Tahun 2023

Kinerja perekonomian daerah yang telah membaik, diharapkan akan berlanjut hingga tahun 2022, sehingga dapat mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023. Pemulihan ekonomi yang kuat tersebut diharapkan mampu menjadi fondasi untuk memulai proses transformasi ekonomi dimana kebijakan Pemerintah bertujuan tidak hanya ditujukan untuk kembali ke tingkat sebelum krisis, namun tumbuh lebih baik. Untuk mengejar sasaran yang telah ditetapkan dalam jangka menengah-panjang, upaya meningkatkan daya saing perekonomian pasca pandemi COVID-19 harus dilakukan.

Kondisi perekonomian daerah diperkirakan relatif baik pada tahun 2023. Meskipun pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi tahun 2023 diperkirakan masih berada pada tingkat yang relatif tinggi, yakni 5,8-6,5 persen. Hal ini sejalan dengan meningkatnya volume perdagangan dunia yang diperkirakan tumbuh tinggi, sebesar 6,3 persen.

Tahun 2023 diarahkan untuk mengatasi dampak jangka-menengah pasca pandemi COVID-19, mengakomodir berbagai perubahan yang terjadi akibat pandemi COVID-19, serta mengatasi permasalahan-permasalahan struktural yang ada sehingga berkontribusi pada peningkatan kapasitas produktif perekonomian yang turun akibat pandemi COVID-19. Peningkatan kapasitas

produktif tersebut diharapkan dapat bersumber dari peningkatan stok kapital dan produktivitas.

Dari sisi lapangan usaha pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan akan ditopang oleh seluruh sektor lapangan usaha terutama sector informasi dan akomodasi serta sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Dimana di tahun 2020 masyarakat banyak melakukan kegiatan melalui media daring sehingga meningkatnya penggunaan jasa internet, serta jasa kesehatan ditandai dengan meningkatnya kasus-kasus yang terkonfirmasi positif di Sumatera Selatan.

Tabel 3.6
Proyeksi Pertumbuhan Sektor PDRB ADHK Sisi Lapangan Usaha
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

Sektor	Proyeksi Pertumbuhan PDRB ADHK 2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,6 - 3,0
Pertambangan dan Penggalian	5,5 – 6,5
Industri Pengolahan	3,0 – 3,5
Pengadaan Listrik dan Gas	13,0-13,6
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,3 - 5,8
Konstruksi	1,0 – 1,5
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,0 – 4,6
Transportasi dan Pergudangan	2,5 - 3,0
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,5 - 2,0
Informasi dan Komunikasi	12,5-13,5
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,5-2,0
Real Estate	3,5 – 4,5
Jasa Perusahaan	3,0 - 4,1
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,5 - 5,1

Sektor	Proyeksi Pertumbuhan PDBP
Jasa Pendidikan	2,0-2,6
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,0-7,5
Jasa lainnya	5,2-6,2

Sumber Ranhir RKPD Provinsi Sumsel Tahun 2023

Selain itu perlu juga diperhatikan beberapa tantangan dalam pemulihan perekonomian Provinsi Sumatera Selatan antara lain :

1. Potensi re-eskalasi Covid-19 serta kemungkinan akan munculnya varian baru (resiko ketidakpastian)
2. Dinamika ekonomi global berpotensi menekan kinerja ekspor
3. Ketidakpastian dunia usaha (adanya Undang-Undang Ciptakerja)
4. Sektor pertanian (kelp sawit, karet, kopi, lada), sector pertambangan (batubara)
5. Sektor jasa (jasa Pendidikan dan Kesehatan) akan Kembali pada new normal, sector telekomunikasi akan tumbuh melambat
6. Fenomena kelas pendapatan menengah yang mulai membelanjakan uang akibat pola konsumsi masyarakat yang sudah mulai pulih serta investasi diprediksi akan mengalami peningkatan
7. Adanya isu *green economy* dan *sustainable development*

Beberapa strategi dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera untuk memantapkan dan memulihkan ekonomi Sumatera Selatan dilakukan melalui 8 (delapan) strategi, yaitu:

1. Pengembangan Industri Hilirisasi Sumber Daya Alam Mendorong Industri Hilirisasi Sumber Daya Alam berorientasi ekspor
2. Pengembangan UMKM agar naik kelas, dimana dengan mendorong digitalisasi UMKM, Kredit Usaha, Bantuan Teknologi, dan pendampingan
3. Pembangunan Infrastruktur yang merata
Pemerataan infrastruktur ke desa, Percepatan penyelesaian PSN
4. Optimalisasi Belanja Pemerintah (APBN dan APBD) Percepatan Penyerapan APBN, APBD Prov, APBD Kb/Kota Secara efektif dan berdayaguna

5. Pengembangan sumber pertumbuhan baru Mengembangkan ekonomi kreatif, industri kreatif, dan Pariwisata
6. Revitalisasi Sektor Pertanian
7. Peningkatan Investasi
Menarik investasi sebesar besarnya untuk membuka lapangan pekerjaan dan kemajuan daerah.
8. Perubahan mindset dari “pembeli” menjadi “penghasil”.
Gerakan Sumsel mandiri pangan adalah program Gubernur Sumatera Selatan untuk merubah pola pikir masyarakat dari “pembeli” menjadi “penghasil” melalui pemanfaatan pekarangan sekitar rumah dimana untuk rumah tangga miskin dibantu sarana dan prasarana budidaya yang mana dapat secara langsung dapat meringankan beban pengeluaran masyarakat. Dengan berbagai strategi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan di targetkan **pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan tahun 2023 pada kisaran 5,8-6,5 %**.

Inflasi pada tahun 2023 diharapkan tetap terjaga pada kisaran 2-4% dengan menjaga ketersediaan pasokan dengan melakukan perhitungan kebutuhan wilayah dan kebutuhan wilayah sekitar, dan peningkatan pengawasan dan pemantauan terhadap bahan pangan strategis.

Dengan masih terdampaknya pandemi Covid-19 di Indonesia kondisi **tingkat pengangguran terbuka ditargetkan menjadi 3,06 – 4,22% dan kemiskinan ditargetkan pada kisaran 11,59-12,66%**. Penurunan tingkat kemiskinan dilakukan melalui dua strategi yaitu menurunkan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Strategi menurunkan beban pengeluaran melalui kebijakan optimalisasi bantuan sosial baik tunai maupun non tunai dan penguatan fungsi pendampingan dalam melaksanakan program bantuan social serta edukasi penerima manfaat untuk mendorong perubahan perilaku kesehatan, Pendidikan dan ekonomi. Strategi peningkatan pendapatan melalui kebijakan pengembangan kegiatan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan pendapatan bagi kelompok miskin dan rentan melalui akselerasi penguatan ekonomi keluarga, pendampingan usaha dan peningkatan kualitas produksi usaha kecil dan mikro, akses administrasi kependudukan,

akses permodalan usaha, keperantaraan usaha, kemitraan, serta penataan penguasaan dan penggunaan lahan melalui reforma agraria dan perhutanan sosial.

Gini Ratio ditargetkan sebesar 0,35 melalui strategi penguatan ekonomi pada kelompok menengah bawah dan kelompok 40 persen terbawah. Kebijakan yang dilakukan adalah melalui peningkatan jumlah pekerja pada sektor formal dan pemberdayaan masyarakat, penyediaan Pendidikan vokasi dan pelatihan tenaga kerja untuk mengembangkan kesempatan kerja yang baik mencetak tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi. Indeks Williamson pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 0,563.

Tahun 2023 akan menjadi akselerasi percepatan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah-panjang, untuk menjadi negara berpendapatan tinggi sebelum tahun 2045. Akselerasi percepatan pemulihan ekonomi diarahkan untuk memulihkan daya beli masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan permintaan agregat. Upaya pemulihan juga dilakukan melalui diversifikasi ekonomi untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor-sektor yang terkena dampak besar dari Covid-19 dan mendorong sektor lain yang berpotensi tumbuh lebih cepat dan dapat meningkatkan pendanaan dan keuangan daerah.

3.1.7 Proyeksi Perekonomian Daerah Tahun 2023 pasca Pandemi Covid-19

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang mencerminkan peningkatan ekonomi yang tercipta di suatu wilayah. Sehingga semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, diharapkan mampu membawa dampak baik bagi kondisi ekonomi masyarakat di daerah bersangkutan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mencerminkan keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Kinerja perekonomian daerah yang telah membaik, diharapkan akan berlanjut hingga tahun 2023, sehingga dapat mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023. Pemulihan ekonomi yang kuat tersebut diharapkan mampu menjadi fondasi untuk memulai proses transformasi ekonomi

dimana kebijakan Pemerintah bertujuan tidak hanya ditujukan untuk kembali ke tingkat sebelum krisis, namun tumbuh lebih baik. Untuk mengejar sasaran yang telah ditetapkan dalam jangka menengah-panjang, upaya meningkatkan daya saing perekonomian pasca pandemi COVID-19 harus dilakukan.

Kondisi perekonomian daerah diperkirakan relatif baik pada tahun 2023. Meskipun pertumbuhannya masih relatif lambat dibandingkan tahun sebelumnya,. Hal ini sejalan dengan meningkatnya volume perdagangan dunia yang diperkirakan tumbuh tinggi, sebesar 6,3 persen.

Tahun 2023 diarahkan untuk mengatasi dampak jangka-menengah pasca pandemi COVID-19, mengakomodir berbagai perubahan yang terjadi akibat pandemi COVID-19, serta mengatasi permasalahan-permasalahan struktural yang ada sehingga berkontribusi pada peningkatan kapasitas produktif perekonomian yang turun akibat pandemi COVID-19.

Dari sisi lapangan usaha pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas akan ditopang oleh seluruh sektor lapangan usaha terutama sektor informasi dan komunikasi serta sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Pasca pandemic Covid masyarakat sudah lebih terbiasa memanfaatkan jasa internet untuk berbagai aktifitas sehari-hari..

Tabel 3.8

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Musi Rawas Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2018 – 2021 serta proyeksi pada Tahun 2022 dan 2023

Lapangan Usaha	Realisasi				Proyeksi	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,46	3,72	0,96	3,76	3,1	3,51
Pertambangan dan Penggalian	7,54	7,87	-0,92	-0,65	6,2	3,96
Industri Pengolahan	5,80	6,06	0,75	4,39	3,5	4,21
Pengadaan Listrik dan Gas	6,05	6,51	13,10	6,56	10	10,21

Lapangan Usaha	Realisasi				Proyeksi	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,39	5,05	5,46	0,23	5,5	9,90
Konstruksi	8,38	6,41	-1,44	1,30	5	4,88
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,84	6,94	-0,02	5,21	4,3	-48,27
Transportasi dan Pergudangan	6,81	8,75	-4,57	1,92	2,75	2,57
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,45	8,74	-0,56	2,13	2	0,89
Informasi dan Komunikasi	7,67	8,09	15,10	8,38	13	13,22
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,00	1,85	1,46	1,57	2,5	2,53
Real Estate	7,4	7,47	1,05	3,04	3,1	3,42
Jasa Perusahaan	7,58	7,63	7,91	7,98	3,6	3,52
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,51	2,22	2,99	1,47	4,8	5,03
Jasa Pendidikan	7,81	7,95	0,35	4,69	2,5	4,79
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,95	6,09	6,48	8,12	7,3	7,31
Jasa lainnya	4,44	4,81	1,37	1,65	5,6	5,91
PDRB	5,79	5,88	0,24	2,33	5,0	5,5

Sumber : Data diolah

Mengacu pada proyeksi Nasional dan Provinsi pada Tahun 2023 serta mempertimbangkan perkembangan sektor-sektor PDRB tersebut di atas, maka pada tahun 2023 perekonomian Kabupaten Musi Rawas diproyeksikan pada angka 5,5 persen.

b. PDRB

Pertumbuhan ekonomi bisa dilihat dari capaian PDRB baik dari sisi Lapangan Usaha maupun dari sisi Pengeluaran. Melalui pemberian stimulus dengan berbagai program maupun pembangunan fisik yang ikut membawa

dampak peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Musi Rawas serta peran serta Investasi Swasta dalam menggerakkan roda perekonomian. Selain itu fungsi lembaga perbankan sebagai intermediasi juga menunjukkan peningkatan kinerja sehingga perputaran ekonomi di Kabupaten Musi Rawas bisa berjalan dengan baik. Berikut ini, realisasi dan target PDRB Kabupaten Musi Rawas menurut sisi Lapangan Usaha :

Tabel 3.9
PDRB Kabupaten Musi Rawas ADHB menurut Lapangan Usaha
Tahun 2017-2021 dan Proyeksi Tahun 2022-2023 (milyar rupiah)

Lapangan Usaha	Realisasi					Proyeksi	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.985,20	5.289,73	5.586,00	5.821,98	6.094,95	5920	5949,03
Pertambangan dan Penggalian	4.826,24	5.520,96	6.206,80	5.944,77	6.377,85	6030	6059,75
Industri Pengolahan	2.120,01	2.365,01	2.571,30	2.705,27	2.885,81	2840	2869,59
Pengadaan Listrik dan Gas	4,55	4,81	5,00	5,74	6,2	6,2	36,36
Pengadaan Air, Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,24	1,37	1,50	1,58	1,61	3	31,18
Konstruksi	965,59	1.061,48	1.138,90	1.109,63	1.153,04	1160	1188,82
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.365,06	1.528,12	1.700,90	1.793,01	1.901,67	1960	1989,42
Transportasi dan Pergudangan	74,55	82,10	91,10	88,13	89,99	88,06	116,37
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	51,56	57,84	65,90	66,71	68,43	67,15	95,60
Informasi dan Komunikasi	50,06	56,26	62,10	72,69	79,58	73,28	103,65
Jasa Keuangan dan Asuransi	108,35	119,30	126,10	123,80	127,61	124,04	152,62
Real Estate	217,08	240,44	268,40	279,17	285,83	279,36	307,75
Jasa Perusahaan	2,77	3,14	3,60	3,95	4,285	4,33	34,42
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	381,05	382,06	391,00	407,30	414,43	407,06	435,27
asa Pendidikan	449,18	487,35	531,06	527,47	555,73	527,06	556,28

Lapangan Usaha	Realisasi					Proyeksi	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	115,13	122,73	131,60	146,79	555,73	147,19	252,31
Jasa lainnya	162,69	177,23	195,20	205,45	210,78	205,15	233,60
PDRB	15.880,31	17.499,94	19.076,90	19.303,45	20.418,19	21232,69	21262,02

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas (2018-2021)
Proyeksi 2022-2023 (data diolah)

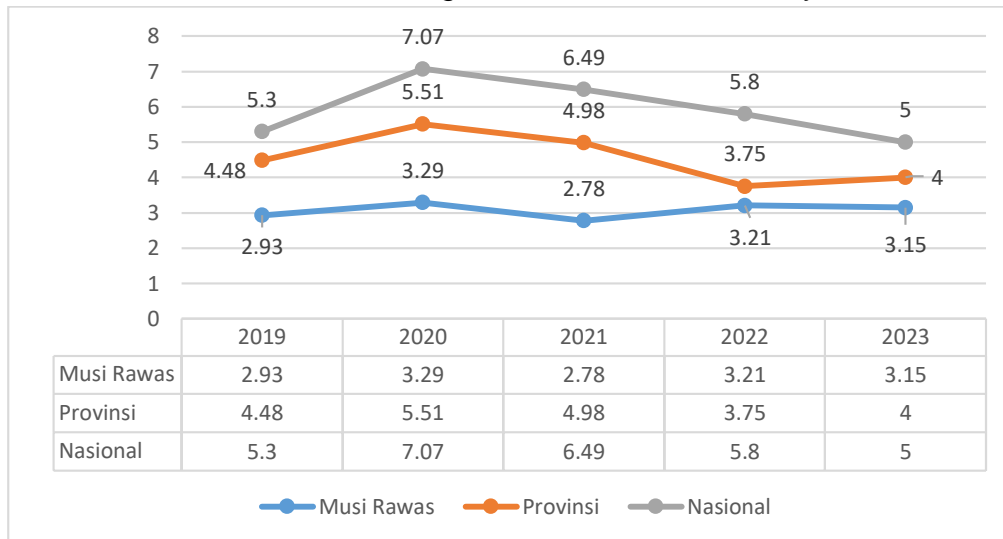
c. Pengangguran

Salah satu permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia termasuk di Kabupaten Musi Rawas adalah pengangguran yang cukup tinggi. Di negara-negara berkembang umumnya tingkat pengangguran yang tinggi utamanya di pedesaan belum dianggap masalah serius, karena masih adanya sektor alternatif (pertanian). Padahal jika dicermati, akibat yang ditimbulkan dari tingginya angka pengangguran ini sangat kompleks, bahkan bisa mengakibatkan terganggunya stabilitas kamtibmas di suatu daerah.

Selanjutnya dengan melihat indikator Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Musi Rawas tahun 2022 diperkirakan akan mengalami penurunan secara perlahan, seiring dengan meningkatnya kembali permintaan ekspor komoditi unggulan sehingga sektor pertanian, perkebunan dan industri pengolahan kembali bergairah. Selain itu, satu hal yang penting yaitu telah dilaksanakannya vaksinasi secara menyeluruh kepada masyarakat sehingga meningkatkan kepercayaan diri masyarakat (confidence) dan membentuk kekebalan kelompok (herd immunity) pasca vaksinasi.

Meski begitu tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Musi Rawas diproyeksikan masih dibawah angka nasional dan provinsi, untuk lebih lanjut dapat dilihat pada Grafik berikut ini:

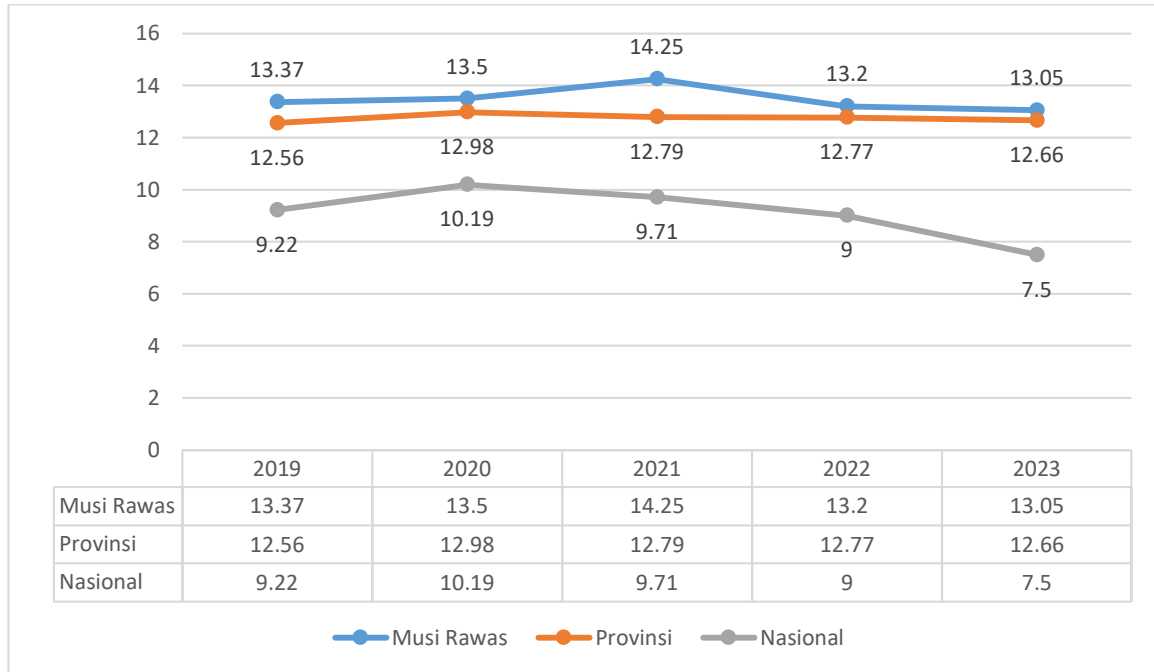
Grafik 3.4
Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi dan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019-2021 dan Target Tahun 2022 serta Proyeksi Tahun 2023



d. Kemiskinan

Angka kemiskinan Kabupaten Musi Rawas masih jauh di bawah Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional, pencapaian pada tahun 2021 sebesar 14, 25 % hal ini berarti jumlah penduduk miskin di Kabupaten Musi Rawas bertambah 0,75 % dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 13,5 % dan diproyeksikan akan turun menjadi 13,05 % pada tahun 2023.

Grafik 3.5
Angka Kemiskinan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2019-2021 dan Target Tahun 2022 serta Proyeksi Tahun 2023



Sumber: BPS, RPJMD Musi Rawas 2016-2021, RPJMD Sumatera Selatan 2018-203, RPJMN Tahun 2019-2024 (tahun 2021 data diolah)

Setelah terjadinya wabah Pandemi Covid, tentu akan berdampak pada angka kemiskinan secara nasional, regional (provinsi maupun kabupaten) khususnya Kabupaten Musi Rawas.

3.1.8 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023.

Tantangan dan prospek perekonomian Kabupaten Musi Rawas tidak bisa terlepas dari tantangan dan prospek global, nasional, provinsi dan Kabupaten Musi Rawas sendiri. Dengan memperhatikan kondisi dan dinamika perekonomian daerah, nasional dan global beberapa tahun sebelumnya serta proyeksi perkembangan ekonomi daerah secara makro, maka prospek pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 diprediksikan dalam kondisi cukup stabil walaupun dihadapkan dengan kondisi ketidakpastian perekonomian. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, indikator makro ekonomi Kabupaten Musi Rawas diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel 3.10
Target Makro Ekonomi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023

No	Uraian	Target Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi		
	a. Range	4,5 %-5,5 %	4,5%-5,5%
	b. Moderat	5,0 %	5,5 %
2	Ekonomi Kabupaten Musi Rawas		
	* PDRB (ADHB menurut LU/ Milyar Rupiah)	21.232,69	21.262,02
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,5	68,1
4	Kemiskinan	13,2	13,05
5	Tingkat Pengangguran	3,21 %	3,15%

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas diprediksikan akan tumbuh pada kisaran sebesar 4,5 -5,5 persen untuk Tahun 2023. PDRB akan dipacu di Tahun 2023 hingga mencapai 21.262,02 (milyar rupiah). Dari sisi tingkat kemiskinan, diprediksikan angka kemiskinan secara gradual akan menurun. Pada Tahun 2023, tingkat kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas ditargetkan menurun sampai pada angka **13,05** persen. Sejalan dengan tingkat kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga akan memiliki kecenderungan trend yang menurun. Pada Tahun 2023, TPT akan berada pada angka **3,15** persen. Secara sektoral, sektor primer diperkirakan masih akan menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas. Untuk sektor sekunder dan sektor tersier diperkirakan juga masih akan memberikan kontribusi dalam pertumbuhan perekonomian Kabupaten Musi Rawas. Dari sisi permintaan, konsumsi pemerintah yang lebih ekspansif diperkirakan menjadi komponen-komponen yang akan membantu mempertahankan kinerja perekonomian Kabupaten Musi Rawas tetap stabil dan investasi yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat yang dilandasi oleh perkiraan investasi swasta relatif stabil.

Untuk mencapai target ekonomi makro yang telah ditetapkan diperlukan strategi dan arah kebijakan untuk memperkuat sektor-sektor strategis yang ada di daerah seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 3.11
Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi Melalui Penguatan Sektor-sektor Strategis

No	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan aksesibilitas, konektivitas dan mutu infrastruktur dikawasan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan jalan-jembatan untuk kelancaran mobilitas produk; • Pembangunan Infrastruktur TIK.
2.	Pengembangan sektor pertanian dalam arti luas	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produktivitas komoditi unggulan daerah; • Rehabilitasi dan pengembangan jaringan irigasi; • Penataan kelembagaan tani; • Percepatan pembentukan food estate;
3.	Pengembangan Industri Pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi kemudahan perizinan dalam berinvestasi; • Penerapan inovasi untuk diversifikasi dan hilirasi produk • Peningkatan diversifikasi, nilai tambah dan daya saing produk hasil pertanian; • Melakukan labelisasi pada produk unggulan UMKM daerah.
4.	Mendorong pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah kecamatan.

Tabel 3.12
Strategi Dan Arah Kebijakan Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi (Sisi pengeluaran)

No	Strategi	Arah Kebijakan
1	Peningkatan konsumsi rumah tangga	<p>Menjaga daya beli masyarakat melalui bantuan pemulihan ekonomi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk pemulihan ekonomi masyarakat; • Memperkuat sistem kesehatan masyarakat;

No	Strategi	Arah Kebijakan
		<ul style="list-style-type: none"> • Updating data masyarakat penerima bantuan, khususnya warga kurang mampu. Seperti bantuan BLT, PKH
2	Peningkatan konsumsi pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi kemudahan perizinan, terutama industri pengolahan; • Efektivitas penyaluran dan KUR;
3	Peningkatan investasi	<ul style="list-style-type: none"> • Efisiensi belanja daerah untuk peningkatan belanja modal dalam rangka pembangunan infrastruktur kawasan strategis;
4	Ekspor	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan daya saing produk unggulan.

Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian saat ini serta tantangan, peluang dan prospek perekonomian Kabupaten Musi Rawas maka Fokus Perencanaan Pembangunan Kabupaten Musi Rawas akan diarahkan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kondisi Infrastruktur Kecamatan dan Desa
2. Penanggulangan Kemiskinan
3. Pengentasan Desa Tertinggal
4. Pemenuhan Persentase Alokasi Dana Desa
5. Perbaikan Pelayanan Dasar di Tingkat Kecamatan dan Desa
6. Pengurangan Persentase Belanja Operasional dan Peningkatan Persentase Belanja Modal
7. Peningkatan Pelayanan Publik / Perbaikan Penyelenggaraan Pemerintah
8. Fokus Pada Program Prioritas (Program Nyata dalam RPJMD 2021-2026)
9. Penyederhanaan Jenis Program dan Kegiatan pada Perangkat Daerah

Kebijakan ekonomi Kabupaten Musi Rawas di Tahun 2023 juga akan disinergikan untuk memperkuat pelaksanaan berbagai kebijakan Pemerintah Pusat untuk mempercepat pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat dengan fokus pada industri, pariwisata, investasi dan penguatan sistem kesehatan nasional serta memperkuat pelaksanaan kebijakan Pemerintah Provinsi Tahun 2023 untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui

peningkatan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintah maka kebijakan ekonomi pada RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 diarahkan untuk mendukung **Peningkatan Infrastruktur untuk Musi Rawas MANTAB.**

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 mencakup arah dan kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kebijakan keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai perencanaan pembangunan daerah. Kebijakan keuangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 secara umum disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026, tidak terlepas dari kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi pembangunan Kabupaten Musi Rawas. Tingkat kemampuan keuangan daerah, dapat diukur dari kapasitas pendapatan asli daerah, rasio pendapatan asli daerah terhadap jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Rencana pendapatan daerah yang dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur melalui proses analisis secara efektif untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Upaya yang digunakan untuk memenuhi target pendapatan dilakukan antara lain, penelitian potensi pendapatan daerah, pembebasan dan penyerderhanaan prosedur pajak dan non pajak, pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga, operasionalisasi penagihan pajak daerah *door to door*. Kebijakan umum pendapatan daerah pemerintah Kabupaten Musi Rawas diarahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi

pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pembangunan sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan, agar dapat semaksimal mungkin dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Musi Rawas merupakan perkiraan terukur secara nasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, upaya-upaya penting yang terus dilakukan dalam rangka meningkatkan penerimaan PAD tersebut adalah :

1. Menghitung kembali PAD secara riil, khususnya pada sumber-sumber pendapatan tertentu dalam kerangka ekstensifikasi dan intensifikasi pungutan PAD, baik sumber-sumber retribusi daerah maupun pajak.
2. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan cara mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah yang bersifat ekonomis dan rasional dengan merangsang pertumbuhan potensi perekonomian daerah.
3. Optimalisasi peran BUMD guna memacu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah, serta dapat memberikan kontribusinya secara signifikan terhadap peningkatan PAD.
4. Mempelajari kemungkinan meningkatkan pendapatan melalui penjualan jasa-jasa publik.
5. Menyempurnakan administrasi penerimaan pendapatan daerah dan meningkatkan pengendalian pendapatan daerah untuk menjamin efektivitas pengumpulan pendapatan.

Sedangkan, upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan dana perimbangan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pendapatan daerah, antara lain melalui penyampaian akurasi data maupun penyusunan kegiatan prioritas yang berskala nasional dan regional.

2. Pengusulan kegiatan khusus dan strategis dalam skala daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan potensi perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.13
Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2022 dan proyeksi Tahun 2023

No	Uraian	APBD TA. 2022	PROYEKSI APBD TA. 2023
1	2		4
4	PENDAPATAN DAERAH	1.690.386.316.763	1.456.438.980.282
4.1	Pendapatan Asli Daerah	227.038.035.454	294.824.835.942
4.1.01	Pajak Daerah	114.638.732.187	185.293.398.374
4.1.02	Retribusi Daerah	4.328.326.875	2.677.281.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	8.000.000.000	8.000.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	100.070.976.392	98.854.156.568
4.2	Pendapatan Transfer	1.463.348.281.309	1.161.614.144.340
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.394.043.220.000	1.079.794.305.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	69.305.061.309	81.819.839.340
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0	0
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	0
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0

Sumber : BPKAD, 2021

Tabel 3.13 di atas menunjukkan bahwa pendapatan daerah Tahun 2022 diproyeksikan menurun dari pendapatan di Tahun 2022 karena pendapatan daerah dari sektor Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) belum dimasukkan dalam struktur pendapatan daerah di atas. Proyeksi pendapatan ini merupakan sekumpulan angka-angka perkiraan yang dapat

berubah dan atau asumsi-asumsinya tidak mengalami perubahan. Komponen pendapatan diproyeksikan berkontribusi paling besar yaitu pajak daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, kemudian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Pengalokasian belanja daerah oleh pemerintah Kabupaten Musi Rawas tahun 2023 disesuaikan dengan asumsi ekonomi makro, kebutuhan penyelenggaraan daerah, prioritas kebutuhan pembangunan dan mengikuti ketentuan perundangan berlaku. Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Belanja daerah di arahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Bupati Musi Rawas. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

a. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Belanja

Anggaran yang tersedia dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dengan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Berikut ini pelaksanaan terkait dengan efisiensi dan efektifitas belanja daerah :

1. Memperbaiki komposisi dan efisiensi belanja dengan peningkatan efisiensi belanja dengan penajaman nomenklatur belanja (jelas peruntukannya, penyederhanaan jenis program dan kegiatan dan menghindari duplikasi.

2. Memperkenalkan pembangunan dengan pendekatan holistik, tematik, terintegrasi, serta spasial untuk meningkatkan kualitas belanja
3. Menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, Perangkat Daerah maupun program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran.
4. Pengurangan persentase belanja operasional dan peningkatan persentase belanja langsung

b. Prioritas Anggaran

Prioritas penggunaan anggaran tahun 2023 diarahkan untuk mendanai kegiatan dalam memenuhi tema pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 yaitu **Peningkatan Infrastruktur untuk Musi Rawas MANTAB**. Terutama dalam hal peningkatan infrastruktur dasar khususnya infrastruktur jalan dan jembatan, pengentasan kemiskinan melalui pemulihan ekonomi daerah yang terdampak oleh wabah Pandemi Covid-19, pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan untuk pencegahan dan penanganan dampak Covid 19. Selain itu juga untuk mendukung kegiatan pelayanan publik dan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional yang tertuang dalam RPJMN di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan dan pembangunan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk pemulihan ekonomi akibat dampak Pandemi Covid 19 demi mewujudkan masyarakat Musi Rawas yang Maju, Mandiri dan Bermartabat (MANTAB) berdasarkan RPJMD Kabupaten Musi Rawas 2021-2026.

c. Pengoptimalan belanja modal

Belanja modal diupayakan dengan tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja modal disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan. Bentuk optimalisasi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur publik dengan dilakukan kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai dengan ketentuan berlaku.

d. Transparansi dan Akuntabel

Transparansi dan akuntabel setiap pengeluaran belanja harus dengan pertanggungjawaban sesuai ketentuan berlaku. Pelaporan pertanggungjawaban harus memenuhi aspek administrasi dan juga menyangkut proses keluaran dan hasil harus jelas.

Tabel 3.14

Struktur Belanja Tahun Anggaran 2022 dan Proyeksi Belanja Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Musi Rawas

No	Uraian	Belanja	
		APBD TA. 2022	Proyeksi APBD TA. 2023
	BELANJA DAERAH	1.700.386.316.763	1.466.438.980.282
1.	Belanja Operasi	1.127.627.154.629	970.151.296.608
a.	Belanja Pegawai	646.367.056730	607.109.762.739
b.	Belanja Barang dan Jasa	466.144.316.855	349.017.019.869
c.	Belanja Bunga	-	-
d.	Belanja Subsidi	-	-
e.	Belanja Hibah	15.115.781.044	14.024.514.000
f.	Belanja Bantuan Sosial	-	-
2.	Belanja Modal	239.413.278.728	190.163.528.636
3.	Belanja Tidak Terduga	53.858.565.300	16.311.011.400
4.	Belanja Transfer	279.487.318.106	289.813.143.638
a.	Belanja Bagi Hasil	11.896.705.906	18.797.067.938
b.	Belanja Bantuan Keuangan	267.590.612.200	271.016.075.700

Berikut uraian dari Struktur Belanja dan Pengeluaran Wajib Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 dan Proyeksi Tahun 2023.

1. Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai

- 1) Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai yang sudah dilakukan dalam rangka perhitungan DAU Tahun Anggaran 2023 serta memperhitungkan penganggaran gaji ke-13 dan ke-14.
- 2) Penganggaran Tambahan Penghasilan, Tunjangan Kinerja Daerah atau Tunjangan Beban Kerja PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan PNSD memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5 % dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan).
- 4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun 2023 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Nasional (BPJS) serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Sosial.
- 5) Penganggaran untuk Tunjangan Jabatan Fungsional dirinci secara jelas sesuai dengan klasifikasi dan jabatan fungsional yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- 7). Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD.
- 8 Belanja Pegawai bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah.

Pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Dengan ditetapkannya Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, pada jenis belanja barang/jasa ditambahkan obyek belanja pemeliharaan, jasa konsultasi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis. Sehingga terhadap penganggaran upah tenaga kerja dan tenaga lainnya yang terkait dengan jasa pemeliharaan atau jasa konsultasi baik yang dilakukan secara swakelola maupun pihak ketiga dianggarkan pada belanja barang dan jasa dimaksud.
2. Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan riil yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa barang persediaan tahun sebelumnya.
3. Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing Perangkat Daerah. Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya;
4. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi

serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Permenkeu No. 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017. Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah menerapkan penganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (*at cost*). Standar satuan harga perjalanan dinas selanjutnya akan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

5. Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan SDM yang tempat penyelenggaraannya di luar daerah, sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam pelatihan/bimbingan teknis dalam rangka pencapaian efektifitas penggunaan anggaran daerah.
6. Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan diprioritaskan menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.
7. Dalam merencanakan belanja pemeliharaan barang inventaris kantor disesuaikan dengan kondisi fisik barang yang akan dipelihara dan lebih diprioritaskan untuk mempertahankan kembali fungsi barang inventaris yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 27 tahun 2014.
8. Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap) yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat pada Tahun Anggaran 2023, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa.

c. Belanja Hibah

Belanja hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah. Sehubungan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 bahwa Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan

kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Modal

- a. Pengadaan kebutuhan barang milik daerah, menggunakan dasar perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan memperhatikan standar barang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 7 Tahun 2006.
- b. Kemudian dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka untuk penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/bangun aset tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

3. Belanja Tidak Terduga

Penetapan anggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.

4. Belanja Transfer

Penetapan belanja transfer dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan proyeksi pendapatan pada Tahun Anggaran 2023, belanja transfer direncanakan terdiri dari :

- Belanja Bantuan Keuangan terdiri dari Dana Desa yang berasal dari APBN, Alokasi Dana Desa dan bantuan partai politik.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.

Dalam Struktur APBD selain komponen Pendapatan dan Belanja daerah, terdapat juga pembiayaan daerah. Kebijakan pembiayaan terdiri dari kebijakan dan rencana penerimaan Pembiayaan daerah serta kebijakan dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan daerah. Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Sumber pembiayaan dapat berasal dari.

1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas penerimaan dana perimbangan pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
2. Pembiayaan pembangunan dengan pola *cost sharing* antara Pemerintah Pusat dan Provinsi ke Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
3. Transfer dari dana cadangan daerah, pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan, dengan Jumlah yang dianggarkan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan. Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dianggarkan dalam belanja langsung Perangkat Daerah pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.

Tabel 3.15
Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Musi
Rawas Tahun 2022 dan Proyeksi Tahun 2023

No	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah	
		APBD TA. 2022	Proyeksi TA. 2023
	PEMBIAYAAN DAERAH		
1	Penerimaan pembiayaan	10.000.000.000	10.000.000.000
1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran(SiLPA) tahun sebelumnya	10.000.000.000	10.000.000.000
1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-
1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang Dipisahkan	-	-
1.4	Penerimaan pinjaman daerah	-	-
1.5	Penerimaan kembali pemberian Pinjaman	-	-
1.6	Penerimaan piutang daerah	-	-
2	Pengeluaran pembiayaan	0	0
2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-
2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	-	-
2.3	Pembayaran pokok utang	-	-
2.4	Pemberian pinjaman daerah		

Dari proyeksi pendapatan pada tahun 2023 sebesar Rp. 1.456.197.159.314,- dan proyeksi penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp. 10.000.000.000,-, maka untuk belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp. 1,466,438,980,282,-

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2023

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP Nasional. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas melalui penyesuaian terhadap tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat keutamaan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah berdasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan secara keseluruhan.

Perencanaan pembangunan tahun 2023 ini merupakan merupakan pelaksanaan periode ke empat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021- 2026. Perencanaan tahun 2023 dirumuskan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, hasil evaluasi RKPD tahun sebelumnya dan capaian kinerja RPJMD, identifikasi isu strategis, permasalahan dan kendala yang dihadapi pada pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya serta permasalahan-permasalahan yang mendesak. Disamping hal tersebut di atas, dalam penentuan prioritas pembangunan seharusnya juga memperhatikan sasaran

pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2018-2023.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017, tujuan dan sasaran pembangunan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana yang terdapat dalam RPJMD. Untuk itu, dalam penetapan sasaran pembangunan tahun 2023, RKPD Kabupaten Musi Rawas mengacu mempertimbangkan tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas.

Tujuan pembangunan Kabupaten Musi Rawas tahun 2021-2026 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Musi Rawas didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan merupakan target yang ingin dicapai di Kabupaten Musi Rawas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Tabel 4.1
Keterkaitan Misi dan Tujuan Pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2021-2026

No	Misi	Tujuan
1	2	3
1	Mewujudkan birokrasi yang profesional berbasis teknologi informasi	1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik bagi pemenuhan pelayanan publik
2	Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas	1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing dan berkualitas
		2. Memantapkan kehidupan masyarakat yang religius dan aman serta menjunjung tinggi nilai kearifan lokal
3	Pemerataan Infrastruktur berwawasan lingkungan	1. Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur
		2. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup, penataan ruang dan ketahanan bencana
4	Memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat	1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan
		2. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat
		3. Meningkatnya pembangunan masyarakat desa

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 terdapat 21 (dua puluh satu) Sasaran Pembangunan yang di terjemahkan dalam bentuk prioritas daerah, yang akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, dalam menjabarkan program dan kegiatan Tahun 2023. Selain itu prioritas pembangunan daerah dimaksudkan juga untuk mendukung percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi. Sasaran pembangunan Kabupaten Musi Rawas tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Sasaran Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator	Target 2023
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas birokrasi	1. Indeks RB	57,85
		2. Nilai SAKIP	BB (71,02)
		3. IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	81,52
2	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	1. Indeks SPBE	3.1
		2. Indeks Profesionalitas ASN	65,84
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,05
4	Meningkatnya Derajat Pendidikan	Indeks Pendidikan	69,61
5	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Indeks kesehatan	79,5
6	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan pemuda serta perlindungan anak	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,45
		2. Indeks Pembangunan Pemuda	Pratama
		3. Status Kabupaten Layak Anak	725 Madya
7	Terwujudnya Ketertiban, Keamanan, Ketentraman dan Kenyamanan Masyarakat	Indeks Ketertiban dan Ketentraman	97%
		Indeks Demokrasi	92%
8	Terwujudnya Peningkatan Kehidupan beragama dan Kerukunan Umat Beragama	Indeks kerukunan umat beragama	75
9	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan kearifan dan kebudayaan lokal	1. Persentase lembaga adat yang aktif	72
		2. Indeks Budaya Literasi Daerah	30,5
10	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah	Persentase konektivitas antar wilayah	93,12

No.	Sasaran	Indikator	Target 2023
11	Kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar (Ciptakarya, Kelistrikan, Pemukiman, Pengairan)	Indeks Infastruktur Dasar	97
		Indeks Sumber Daya Air	56
12	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IKLH	70,50
13	Meningkatnya penataan ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	97
14	Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan penanggulangan bencana	Indeks Penurunan Dampak resiko Bencana	51,72
15	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian	PDRB sektor pertanian	Rp 6.178,33 milyar
16	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan	PDRB sektor Industri	Rp 1727,73 milyar
		PDRB sektor perdagangan	Rp 1021,4 milyar
17	Meningkatnya realisasi investasi Di Kabupaten Musi Rawas	Persentase peningkatan investasi	11
18	Menurunnya tingkat kemiskinan	Angka kemiskinan	13.05
19	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat pengangguran	3,15
20	Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	78,18
21	Persentase peningkatan desa maju	Persentase peningkatan Desa Maju	40,32

4.2. Tema dan Tematik Pembangunan Daerah Tahun 2023

RKPD Tahun 2023 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 maka pemerintah daerah perlu untuk menetapkan tema pembangunan yang tertuang dalam RKPD tahun 2023 guna mendukung prioritas nasional dan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023. Tema pembangunan nasional yang ditetapkan untuk tahun 2023 tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 adalah "Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan. Sedangkan tema pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang tertuang dalam arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 adalah "Sumsel Maju Untuk Semua". Selanjutnya dengan berpedoman pada arah pembangunan berdasarkan RPJPD Kabupaten Musi Rawas tahun 2005-2025, RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021- 2026, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2021, arah kebijakan RKP 2023, arah kebijakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023, maka

permasalahan di Kabupaten Musi Rawas, serta kerangka RKPD Kab. Musi Rawas Tahun 2023 dirumuskan didalam tema RKPD Kabupaten Musi Rawas tahun 2023 yaitu :

“Peningkatan Infrastruktur Untuk Musi Rawas Mantab”

Dampak pandemi COVID-19 sejatinya tidak hanya melanda Indonesia tetapi juga hampir seluruh negara di dunia. Resesi ekonomi menjadi ancaman baru bagi negara-negara di belahan dunia. Pertumbuhan ekonomi global yang berkontraksi pada tahun ini menandakan semakin dalamnya ketidakpastian ekonomi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, untuk mempercepat pemulihan ekonomi di Kabupaten Musi Rawas, maka Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam perencanaan pembangunan tahun 2023 akan terfokus pada 2 keyword/kata kunci tema yang akan dilaksanakan di tahun 2023. Keyword tema pembangunan tahun 2023 adalah:

a. Peningkatan Infrastruktur

Dalam upaya mewujudkan infrastruktur yang berkualitas yaitu tersedianya infrastruktur yang merata dan berwawasan lingkungan, maka perlu dilakukan beberapa hal :

- Meningkatkan konektivitas antar wilayah
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar (Ciptakarya, Kelistrikan, Pemukiman, Irigasi, komunikasi)

b. Musi Rawas Mantab

- **Musi Rawas** yaitu merefleksikan seluruh wilayah dan isi Kabupaten Musi Rawas, artinya Kabupaten Musi Rawas dan seluruh masyarakat yang berada dan tercatat dalam wilayah administratif Kabupaten Musi Rawas.
- **Maju** yaitu kondisi masyarakat yang terus bergerak menuju kearah yang lebih baik, lebih sehat, lebih cerdas, lebih sejahtera dan religius, ditandai oleh semakin meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta adanya perhatian utama pada terpenuhinya kebutuhan dasar pokok manusia, seperti pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan

lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur fisik, sosial budaya dan ekonomi yang memadai. Peningkatan kualitas kehidupan ini akan lebih difokuskan pada upaya pengentasan masyarakat miskin sehingga secara simultan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, serta adanya iklim berusaha dan berkegiatan yang sehat untuk kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Perlu ditekankan di sini bahwa kemajuan-kemajuan yang ingin diraih, tidak hanya sekedar kemajuan di bidang fisik dan ekonomi saja, akan tetapi berupaya keras pula untuk dapat meraih kemajuan-kemajuan pada dimensi mental – spiritual, keagamaan, kebudayaan dan non fisik, agar kehidupan masyarakat benar-benar sejahtera lahir dan batin serta berakhlakul mulia (religius).

- **Mandiri** adalah kemampuan riil Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh agar secara setahap demi setahap bisa mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain (luar) tanpa kehilangan adanya kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan. Selain itu ditandai oleh (bersifat) mampu menghasilkan (dalam jumlah besar) produk-produk yang mendatangkan (memberi hasil, manfaat, dan sebagainya) serta menguntungkan dan mampu menghasilkan secara terus menerus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru secara berkisambungan. Mandiri juga ditandai dengan kecukupan ruang untuk hidup dan berkembang, kecukupan pangan, fasilitas peribadatan, pengelolaan air bersih, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas kebugaran, fasilitas transportasi, keselamatan permukiman/kota, pengelolaan air kotor dan drainase serta sanitasi layak, fasilitas pejalan kaki, ruang terbuka hijau, fasilitas untuk semua penduduk dan informasi pembangunan dan keterlibatan masyarakat serta wilayah dengan keseimbangan antara fisik-infrastruktur dan alam yang lestari, kemajuan perekonomian serta sosial budaya.
- **Bermartabat** yaitu masyarakat Musi Rawas menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan beretika termasuk didalamnya ramah sebagai ciri khas Musi Rawas.

Tabel 4.3

Tema dan Tematik Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023

TEMA
“Peningkatan Infrastruktur Untuk Musi Rawas Mantab”

TEMATIK
Peningkatan Infrastruktur untuk Musi Rawas Mantab
Prioritas: 1. Peningkatan Infrastruktur berwawasan lingkungan 2. Pengentasan kemiskinan 3. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah
KONDISI PERLU
Prioritas : - Meningkatkan kualitas dan kuantitas Infrastruktur untuk mempercepat upaya pengentasan kemiskinan, pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan terlaksananya tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan prima dalam mencapai visi Mura Mantab.

Untuk mencapai target dalam tema pembangunan tersebut kemudian ditentukan tematik yang sesuai dengan mempertimbangkan 2 (dua) dimensi pembangunan. Dimensi penguatan sektor strategis mengangkat tematik optimalisasi pengelolaan sektor unggulan dan sumber daya alam di Kabupaten Musi Rawas, sedangkan dimensi pemulihan ekonomi mengangkat tematik pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musi Rawas. Kedua tematik tersebut didukung dengan kondisi perlu yang diwujudkan dalam Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa berbasis teknologi informasi untuk pelayanan prima.

Adapun keselarasan antara Tema Pembangunan Nasional, Tema Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dan Tema Pembangunan Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4

Keselarasan Tema Pembangunan RKP Nasional Tahun 2023 dan Tema Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 dengan Tema Pembangunan Musi Rawas Tahun 2023

RKP Nasional	RKPD Musi Rawas	RKPD Sumatera Selatan
Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan	Peningkatan Infrastruktur untuk Musi Rawas Mantab	Sumsel Maju Untuk Semua

Keselarasan tema pembangunan antara RKPD Musi Rawas dengan prioritas RKP Nasional yang ke 5 (lima) “**Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar**” dan prioritas Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 yang ke 3 (tiga) “**Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang**”

Selanjutnya pada RKPD kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 dengan tema yang sesuai dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 dan dilatarbelakangi oleh tingkat capaian target bidang Infrastruktur pada tahun 2021 yang masih ada yang belum sesuai sehingga dipilihlah tema yang berkaitan dengan rencana “Peningkatan Infrastruktur ”

4.3 Telaah Terhadap Dokumen Perencanaan Untuk Penentuan Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Tahun 2023

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian indikator pembangunan Kabupaten Musi Rawas tahun sebelumnya, dan memperhatikan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas serta mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis (internal dan eksternal) yang akan dihadapi Musi Rawas pada Tahun 2023.

4.3.1. Telaah Terhadap RKP 2023

Tujuan pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional, sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan dasar dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun skala daerah. Perencanaan pembangunan nasional Tahun 2023 mengacu kepada RPJMN Tahun 2020 – 2024.

Dalam RPJPN Tahun 2005-2025 Visi Pembangunan 2005-2025 adalah “INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR”, maka tujuan RPJPN Tahap ke-4 Tahun 2020-2024 diarahkan kepada “**Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui**

percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”.

Tujuan RPJMN ke-4 dapat tercapai dengan acuan pada empat fokus pembangunan sebagai berikut:

1. Kelembagaan politik dan hukum.
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat.
3. Struktur Perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif.
4. Terjaganya daya dukung dan daya tampung lingkungan, dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Sesuai dengan arahan pada RPJPN maka tema pada RPJMN 2020-2024 adalah **”Indonesia Berpenghasilan Menengah–Tinggi Yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan”** yang didukung dengan :

1. SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2. Karakter Bangsa
3. Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas
4. Pengembangan Wilayah Untuk Pemerataan
5. Infrastruktur Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
7. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

Selanjutnya berdasarkan RPJPN dan RPJMN 2020-2024 maka ditetapkan tema RKP Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

“Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”

Tema RKP Tahun 2023 tersebut didukung dengan 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Nasional yang terdiri dari:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan

- berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
 3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
 7. Memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik.

4.3.2. Telaah RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

Pada tahun 2022 tema RKPD Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai Berikut:

“ Sumsel Maju Untuk Semua ”

Dalam kaitan itu, Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 terdiri dari:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial;
2. Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi;
3. Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang;
4. Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah.

4.3.3. Telaah Terhadap pemenuhan janji Kepala Daerah pada saat kampanye yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021– 2026

Sesuai dengan janji kampanye Ratna Machmud dan Suwarti pada kampanye Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas yang telah lalu, telah dituangkan kedalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 melalui visi dan misi RPJMD. Visi Pembangunan Kabupaten Musi Rawas tahun 2021 -2026 adalah:

“Terwujudnya Musi Rawas Yang Maju, Mandiri dan Bermartabat (MANTAB)”

Makna visi tersebut adalah “terwujudnya keseimbangan masyarakat Kabupaten Musi Rawas maju dan mandiri yang ditopang oleh produktivitas masyarakat yang tinggi dan didukung oleh SDM yang unggul dalam tata kehidupan masyarakat bermartabat”. Adapun pengertian dari akronim “*Musi Rawas Maju, Mandiri dan Bermartabat (Mantab)*” adalah sebagai berikut:

Musi Rawas : Yaitu merefleksikan seluruh wilayah dan isi Kabupaten Musi Rawas. Artinya Kabupaten Musi Rawas dan seluruh masyarakat yang berada dan tercatat dalam wilayah administratif Kabupaten Musi Rawas.

Maju : Yaitu kondisi masyarakat yang terus bergerak menuju kearah yang lebih baik, lebih sehat, lebih cerdas, lebih sejahtera dan religius, ditandai oleh semakin meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta adanya perhatian utama pada terpenuhinya kebutuhan dasar pokok manusia, seperti pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur fisik, sosial budaya dan ekonomi yang memadai. Peningkatan kualitas kehidupan ini akan lebih difokuskan pada upaya pengentasan masyarakat miskin sehingga secara simultan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, serta adanya iklim berusaha dan berkegiatan yang sehat untuk kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Perlu ditekankan di sini bahwa kemajuan-kemajuan yang ingin diraih, tidak hanya sekedar kemajuan di bidang fisik dan ekonomi saja, akan tetapi berupaya keras pula untuk dapat meraih kemajuan-kemajuan pada dimensi mental – spiritual, keagamaan, kebudayaan dan non fisik, agar kehidupan masyarakat benar-benar sejahtera lahir dan batin serta berakhlaqul mulia (religius).

- Mandiri** : adalah kemampuan riil Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh agar secara setahap demi setahap bisa mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain (luar) tanpa kehilangan adanya kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan. Selain itu ditandai oleh (bersifat) mampu menghasilkan (dalam jumlah besar) produk-produk yang mendatangkan (memberi hasil, manfaat, dan sebagainya) serta menguntungkan dan mampu menghasilkan secara terus menerus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru secara berkisambungan. Mandiri juga ditandai dengan kecukupan ruang untuk hidup dan berkembang, kecukupan pangan, fasilitas peribadatan, pengelolaan air bersih, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas kebugaran, fasilitas transportasi, keselamatan permukiman/kota, pengelolaan air kotor dan drainase serta sanitasi layak, fasilitas pejalan kaki, ruang terbuka hijau, fasilitas untuk semua penduduk dan informasi pembangunan dan keterlibatan masyarakat serta wilayah dengan keseimbangan antara fisik-infrastruktur dan alam yang lestari, kemajuan perekonomian serta sosial budaya.
- Bermartabat** : yaitu Masyarakat Musi Rawas menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan beretika termasuk didalamnya ramah sebagai ciri khas Musi Rawas.

Untuk menjabarkan Visi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026, ditetapkan menjadi 4 (empat) Misi yaitu :

1. Mewujudkan Birokrasi yang Profesional Berbasis Teknologi Informasi;
2. Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas
3. Pemerataan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan;
4. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat.

Tabel 4.5

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Sasaran RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026

No	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Capaian (2023)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mewujudkan Birokrasi yang Profesional Berbasis Teknologi Informasi	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Reformasi Birokrasi) bagi pemenuhan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas birokrasi	Indeks RB	55,62
					Nilai SAKIP	BB (70,01)
					Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	81,51
				Meningkatnya Kapabilitas birokrasi	Indeks SPBE	2,95
					Indeks Profesionalitas ASN	62,92
Meningkatnya pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,44				
2.	Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing dan berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya Derajat Pendidikan	Indeks Pendidikan	69,39
				Meningkatnya Derajat Kesehatan	Indeks kesehatan	79,20
				Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan pemuda serta perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87,45
					Indeks Pembangunan Pemuda	0,178
					Status Kabupaten Layak Anak	650 Pratama
		Memantapkan kehidupan masyarakat yang religius	Indeks Demokrasi	Terwujudnya Ketertiban, Ketenteraman	100%	

No	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Capaian (2023)
1	2	3	4	5	6	7
		dan aman serta menjunjung tinggi nilai kearifan lokal		keamanan, Ketentraman dan kenyamanan masyarakat		
				Terwujudnya keimanan dan kerukunan umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	73
				Meningkatnya pelestarian dan pengembangan nilai kearifan dan kebudayaan lokal	Persentase Lembaga Adat yang Aktif	72
					Indeks Literasi Budaya membaca	30,00
3.	Pemerataan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur	Indeks Infrastruktur	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase Konektivitas Antar Wilayah (%)	92,19
				Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar (Ciptakarya, Kelistrikan, Pemukiman, Pengairan)	Indeks Infrastruktur dasar	96,5
		Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup, penataan ruang dan ketahanan bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IKLH	69,90
				Meningkatnya penataan ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	96
				Meningkatnya	Indeks Penurunan Dampak	50%

No	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Capaian (2023)
1	2	3	4	5	6	7
				kesiapsiagaan dan penanganan penanggulangan bencana	resiko Bencana	
4	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan	PDRB Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian	PDRB sektor pertanian	6.057,19 (milyar)
				Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan	PDRB sektor Industri	1682,29
					PDRB sektor perdagangan	982,5
				Meningkatnya realisasi investasi Di Kabupaten Musi Rawas	Persentase peningkatan investasi	8
		Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Pengeluaran perkapita	Menurunnya tingkat kemiskinan	Angka kemiskinan	13,2
				Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat pengangguran	3,21
				Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	77,94
Meningkatnya Pembangunan Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun	Meningkatnya status desa	Persentase peningkatan Desa Maju	89,57		

4.3.4. Telaah Terhadap Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Musi Rawas

Sesuai dengan pasal Pasal 78 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, salah satu perumusan rancangan awal RKPD adalah penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten.

Pokok-Pokok Pikiran ini memiliki nilai yang strategis karena menjadi pertimbangan dalam merumuskan permasalahan daerah, sehingga diharapkan dapat memiliki kontribusi positif dalam menyempurnakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas di masa yang akan datang. Penyusunan ini sekaligus merupakan penyaluran dari aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD pada saat pelaksanaan reses maupun komunikasi dengan masyarakat pada berbagai event kegiatan sosial kemasyarakatan. Penyusunan pokok-pokok pikiran ini sebagai bagian dari strategi mewujudkan visi dan misi Kabupaten Musi Rawas sehinggadiupayakan memiliki keselarasan dan kesinambungan dengan RKPD 2023 sebagaimana dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas.

4.3.5. Telaah Terhadap Hasil evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Sebelumnya

Pelaksanaan Evaluasi terhadap RKPD tahun sebelumnya dilakukan terhadap tiga aspek yaitu :

- a. Evaluasi terhadap capaian indikator makro RKPD tahun sebelumnya:
 1. Ada beberapa indikator makro yang capaiannya perlu ditingkatkan yaitu “**Angka Kemiskinan**”. Sejak tahun 2020 angka kemiskinan terus mengalami kenaikan, akibat Pandemi Covid 19 sehingga penduduk dengan pengeluaran per kapita dibawah garis kemiskinan Kabupaten Musi Rawas yaitu Rp. 504.598,- sekitar 37.750 jiwa atau 19,47 %. Tentunya saja masih sangat sulit untuk mencapai target “**Satudigit**” sesuai dengan target yang telah ditetapkan

oleh Provinsi yaitu Angka Kemiskinan Satu Digit sehingga diperlukan upaya yang maksimal dari OPD dan pihak-pihak terkait agar capaian kinerjanya dapat meningkat dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

b. Evaluasi Indikator Sasaran RKPD tahun sebelumnya

Beberapa indikator yang capaian kinerjanya kurang dari 75% yaitu :

1. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian yang capaian kinerjanya 70 %.
2. Jumlah Desa Tertinggal dan sangat tertinggal yang capaian kinerjanya 57, 14%.
3. Persentase Anak Usia SD yang bisa baca tulis Al Quran yang capaian kinerjanya 50, 24 %.
4. Persentase Anak Usia SD yang Hafidz Al-Quran Jus 30 yang capaian kinerjanya 29, 83%.

c. Evaluasi Pelaksanaan terhadap Program RKPD Tahun 2021 dan Realisasi Fisik mencapai 94,76 % dan Realisasi Keuangan mencapai 92,07 %.

Secara umum Evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. OPD perlu memperhatikan capaian indikator program yang masih rendah. Hal yang perlu dipertimbangkan adalah apakah target indikator terlalu tinggi, apakah indikator kurang tepat dalam menggambarkan hasil keluaran dari program, atau apakah program tersebut belum dilaksanakan dengan optimal. Dengan demikian dapat dilakukan perubahan target/ mengganti indikator dan/atau mengoptimalkan pelaksanaan program/kegiatan. Dalam menentukan target-target indikator harus berdasarkan data-data kondisi eksisting atau data-data realisasi periode lalu yang akurat sebagai asumsi. Sehingga target indikator tidak melebihi batas kemampuan sumberdaya OPD (*man, money, method, material, machine*).

- b. Menyusun perencanaan anggaran tidak dapat dipisahkan dari penyusunan perencanaan kebijakan (analisa terhadap persoalan eksternal/internal yang perlu diberikan solusi). Dengan kata lain menyusun rencana anggaran harus melalui analisa kebutuhan (bukan keinginan), sehingga alokasi anggaran untuk kegiatan/program bertitik tolak dari persoalan atau kewajiban yang perlu dilaksanakan (amanah Kepala Daerah/amanah RPJMN), dengan demikian program dan kegiatan dapat dibiayai lebih realistis (efisien). Terhadap OPD yang memiliki anggaran besar dan serapan kecil maka perlu melakukan perubahan perencanaan anggarandan kebijakan.

- c. Untuk menghindari potensi tumpang tindih kewenangan menjalankan program/kegiatan/indikator antara OPD satu dengan yang lain, seharusnya pada saat menentukan program/ kegiatan/indikator hal yang pertama perlu diperhatikan adalah tupoksi dari OPD tersebut. Setelah tupoksi diketahui, langkah kedua adalah menganalisis data-data indikator yang relevan dengan tupoksi tersebut. Jika data indikator menunjukkan kondisi yang belum baik, maka dapat dibuat program/kegiatan, namun jika dirasa sudah tidak ada persoalan, maka dapat melihat apakah terdapat persoalan lain yang relevan dengan tupoksi dan perlu diberikan solusi. Jika ya, maka dari persoalan tersebut dapat dibuat analisis *Logical Frame Work*, sehingga munculnya program/kegiatan/indikator berangkat dari kebutuhan akan penyelesaian terhadap persoalan eksiting (bukan dari keinginan) yang relevan dengan Tupoksi-nya. OPD yang memiliki persoalan tumpang tindih kewenangan perlu melakukan perbaikan program-kegiatan-indikatornya.

4.3.6. Telaah Terhadap RTRW Kabupaten Musi Rawas

Strategi dan prioritas pembangunan disusun agar mencapai tujuan dan hasil yang terukur dalam hal melaksanakan kegiatan didaerah agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah secara sistematis dan terarah.

Berdasarkan prioritas pembangunan serta strategi yang ditempuh, maka arah kebijakan pembangunan wilayah diupayakan untuk melakukan percepatan

menjadi pusat pelayanan sosial

ekonomi bagi wilayah *hinterland*. Agar struktur tersebut dapat terwujud dibutuhkan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1). Pembangunan pusat pemerintahan dan pusat agropolitan di Muara Beliti yang terdiri dari :
 - a. Pembangunan infrastruktur kawasan perkantoran, pusat perdagangan dan jasa serta pusat agropolitan berupa sistem jaringan jalan, listrik, drainase, air minum dan telekomunikasi.
 - b. Pembangunan bangunan utama perkantoran, pusat perdagangan dan bangunan pendukung kegiatan agropolitan.
 - c. Pembangunan pemukiman perkotaan, fasilitas sosial, ekonomi dan budaya, serta RTH untuk mendukung fungsi pusat perkotaan dengan pelayanan skala kabupaten.
 - d. Muara Beliti yang berfungsi sebagai *Agropolitan Center (AC)* didukung dengan pembangunan Terminal Peti Kemas di desa Durian Remuk dan Pergudangan.
- 2). Pembangunan Sub Pusat Agropolitan atau Pusat Pelayanan pada 4(empat) lokasi yaitu Simpang Terawas, Megang Sakti, Muara Lakitan dan Simpang Semambang berupa :
 - a. Sub Terminal Agropolitan.
 - b. Kawasan pertokoan/ruko.
 - c. Perkantoran untuk jasa dan keuangan.
 - d. Sub Terminal Penumpang.
 - e. Permukiman perkotaan.
 - f. Industri agro.
 - g. Workshop dan fasilitas pendukung kegiatan agropolitan.
- 3). Pembangunan infrastruktur wilayah yang mendukung terbangunnya sistem perkotaan dan agropolitan, yaitu :
 - a. Jalan kolektor yang menghubungkan pusat agropolitan Muara Belitidengan sub pusat agropolitan dan antar sub pusat agropolitan.
 - b. Pembangunan sistem pengairan berupa Bendung Daerah Irigasi (DI) Lakitan, DI Kelingi, DI Megang Tikip, dan DI lainnya, dengan sistem jaringan

irigasi untuk kecamatan yang telah dan akan dikembangkan pertanian padi-sawah seperti Tugumulyo, Muara Beliti, Purwodadi, Sumber Harta, STL Ulu Terawas, dan Megang Sakti.

- c. Pembangunan infrastruktur strategis lainnya seperti jalan Kereta Api (KA) yang akan menghubungkan Lubuklinggau, rencana Terminal Peti Kemas (di Selatan Muara Beliti), Palembang dan peningkatan Bandara Silampari.
- 4). Pembangunan fasilitas sosial ekonomi pada setiap ibukota kecamatan (sub pusat pelayanan) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan, yaitu:
- a. Pasar Kecamatan
 - b. Puskesmas
 - c. Fasilitas Pendidikan Dasar dan Menengah
 - d. Fasilitas umum; Tempat Ibadah, RTH dan lainnya

4.3.7. Telaah Terhadap Isu Strategis

Untuk mengatasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas sebagaimana telah dijabarkan pada tabel di Bab 2 di depan, maka Kabupaten Musi Rawas menerjemahkan permasalahan pembangunan ke dalam isu strategis pada perencanaan pembangunan daerah tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 4.6
Isu Strategis Pembangunan Daerah

Permasalahan	Isu Strategis
<ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur dasar berkualitas yang belum merata 	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata
<ul style="list-style-type: none"> • Bertambahnya jumlah penduduk miskin 	<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan kemiskinan dan pemulihan ekonomi secara terintegrasi Terhadap penduduk dan sektor ekonomi produktif
<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM)
<ul style="list-style-type: none"> • Perlunya peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintah dan pelayanan prima 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan publik berkualitas, merata dan berwawasan lingkungan

4.4 Prioritas, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

Dengan memperhatikan telaah tersebut diatas, maka prioritas pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2023 adalah:

Tabel 4.7
Prioritas Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Sasaran	Indikator Prioritas Daerah	Target 2023
1	Peningkatan Infrastruktur Berwawasan lingkungan	Meningkatnya panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	Persentase Konektivitas antar wilayah	93,12
		Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar (Ciptakarya, Kelistrikan, Pemukiman, Irigasi, komunikasi)	Indeks Infrastruktur Dasar	97
			Indeks Sumber Daya Air	56
		meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,50
		Meningkatnya penataan ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	97
		Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan penanggulangan bencana	Indeks Penurunan Dampak Resiko Bencana	51,72
2	Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya kontribusi pertanian dalam arti luas terhadap pertumbuhan perekonomian	PDRB sektor pertanian	Rp 6.178,33 milyar
		Meningkatnya kontribusi perindustrian perdagangan terhadap perekonomian	PDRB sektor Industri	Rp 1727,73 milyar
			PDRB sektor perdagangan	Rp 1021,4 milyar
		Meningkatnya realisasi investasi Di Kabupaten Musi Rawas	Persentase peningkatan investasi	11

No	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Sasaran	Indikator Prioritas Daerah	Target 2023
		Menurunnya tingkat kemiskinan	Angka kemiskinan	13,05
		Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat pengangguran	3,15
		Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	78,18
		Meningkatnya status desa	Persentase Peningkatan Desa Maju	40,32
3	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas	Meningkatnya Derajat Pendidikan	Indeks Pendidikan	69,61
		Meningkatnya Derajat Kesehatan	Indeks Kesehatan	79,5
		Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan pemuda serta perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,45
			Kabupaten Layak Pemuda	Pratama
		Terwujudnya Ketertiban, Keamanan, Ketentraman dan Kenyamanan Masyarakat	Status Kabupaten Layak Anak	725 Madya
			Indeks Ketertiban dan Ketentraman	97%
			Indeks Kerukunan Umat Beragama	75
			Persentase Warisan budaya yang dilestarikan	72
			Indeks Budaya Literasi Daerah	30,5
		4	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan
	Nilai SAKIP			BB (71,02)
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)			81,52
Meningkatnya kapabilitas birokrasi	Indeks SPBE			3.1
	Indeks Profesionalitas ASN			65,84

No	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Sasaran	Indikator Prioritas Daerah	Target 2023
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,05

Selain memperhatikan isu strategis daerah sebagaimana yang tertuang didalam tabel 4.6 diatas serta RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 dalam penentuan prioritas daerah tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas juga memperhatikan arahan Pemerintah Pusat sebagaimana yang tertuang didalam RPJMN 2020-2024 dan arah kebijakan RKP Tahun 2023, serta arah kebijakan RKPDP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023. Berdasarkan arahan Pemerintah Pusat dan Provinsi, selanjutnya dilakukan sinkronisasi kondisi dan karakteristik daerah, prioritas daerah yang akan dilaksanakan oleh Kabupaten Musi Rawas tahun 2023 yaitu untuk mendukung pencapaian fokus dan sasaran pembangunan daerah dengan mengacu isu permasalahan yang ada di Kabupaten Musi Rawas maka penjabaran tema dan prioritas pembangunan dituangkan ke dalam arah kebijakan, program prioritas dan program nomenklatur pembangunan daerah untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat dilihat tabel sebagai berikut:

Tabel 4.8
Prioritas, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Pembangunan
Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2023	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
1	Peningkatan Infrastruktur berwawasan lingkungan	1.Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan infrastruktur	Membangun dan meningkatkan kualitas jalan dan jembatan	Membangun jalan dan jembatan untuk konektivitas antar wilayah	Program pembangunan jalan dan jembatan	Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan
				Memelihara dan meningkatkan kualitas jalan dan jembatan	Program peningkatan jalan dan jembatan	
			Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur kelistrikan, sanitasi, jaringan irigasi	Pemenuhan jaringan listrik untuk konektivitas dan pengembangan wilayah	Pembangunan dan peningkatan kualitas jaringan listrik	Pembangunan sarana dan prasarana listrik
				Membangun dan meningkatkan kualitas jaringan irigasi	Pengelolaan sumber daya air untuk irigasi	

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2023	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
				Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur sanitasi	Pengelolaan Limbah dan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi	Pengelolaan Limbah Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi
				Meningkatkan jaringan air bersih bagi wilayah rawan air/pemenuhan akses rumah tangga terhadap air bersih	Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Pemasangan jaringan penyediaan air minum ke rumah-rumah penduduk
			Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur fasilitas umum dan pemerintahan	Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur fasilitas pelayanan publik	Peningkatan sarana dan prasarana umum	Pembangunan sarana dan prasarana Umum
			meningkatkan cakupan layanan infrastruktur TIK	Membangun infrastruktur TIK	Pembangunan sarana dan prasarana TIK	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana TIK

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2023	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
		2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Membangun infrastruktur pengelolaan persampahan	Pembangunan prasarana pengelolaan persampahan	Pengelolaan persampahan
				Meningkatkan peran aktif masyarakat dan korporasi dalam pengelolaan lingkungan hidup	Pemberdayaan masyarakat dan korporasi dalam pengelolaan lingkungan hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran lingkungan hidup
2	Pengentasan kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan	1. Memperkuat Ketahanan sosial bagi masyarakat miskin	Memantapkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin	Program Jaringan Pengamanan Sosial	Pemberian Bantuan bagi masyarakat miskin
			2. meningkatkan akses layanan dasar bagi masyarakat miskin	Pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat miskin	1. Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan	pendidikan gratis bagi masyarakat miskin
					2. Peningkatan akses dan mutu	Pengobatan gratis bagi masyarakat miskin

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2023	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
					Pelayanan kesehatan	
					3. Penyediaan Rumah layak huni	Pembangunan Rumah Layak Huni
					4. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kelistrikan	Penyediaan listrik yang murah dan merata untuk penduduk miskin
			3. Memperkuat ketahanan ekonomi bagi masyarakat miskin	Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap Sumber Daya Ekonomi	Program Pemberdayaan masyarakat miskin	pemberian modal usaha, bantuan alat usaha, pelatihan, penciptaan lapangan kerja
3	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	1. Meningkatnya kualitas pendidikan	Meningkatkan cakupan layanan pendidikan dasar	Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan dasar	Pendidikan yang terjangkau untuk penduduk miskin	Penyelenggaraan pendidikan dasar dua belas tahun
						Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan
				Meningkatkan kualitas sarana	Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan	Pembangunan dan peningkatan kualitas gedung sekolah

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2023	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
				dan prasarana pendidikan	prasarana pendidikan	Pengadaan sarana pendidikan
			Meningkatkan kualitas SDM tenaga kependidikan	Pemerataan guru	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM tenaga pendidik	Penyelenggaraan peningkatan kapasitas SDM Bidang pendidikan
				Peningkatan kualitas guru		Penerimaan / pengadaan tenaga pendidik
			Meningkatkan kualitas pendidikan nonformal	Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan ketrampilan melalui peningkatan kualitas lembaga pendidikan nonformal	Penyelenggaraan pendidikan nonformal	Pendidikan keagamaan Rumah tahfiz, pondok pesantren
					Pendidikan kejar paket	
		2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan serta SDM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan yang cepat dan tepat

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPd TAHUN 2023	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
4	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan akses dan kemudahan layanan	memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan TIK	Penyelenggaraan pelayanan publik berbasis elektronik
				Pengembangan SDM layanan publik	Peningkatan kualitas SDM layanan Publik	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas/kompetensi ASN
				Peningkatan kualitas kelembagaan unit layanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintah yang baik

Prioritas pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 didukung dengan Program Prioritas Daerah dan Kegiatan Prioritas Daerah. Program Prioritas dan Kegiatan Daerah harus memiliki indikator dan target yang akan dicapai pada tahun 2023. Masing-masing Program Prioritas Daerah dan Kegiatan Prioritas Daerah akan dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 4.9

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023

Prioritas Daerah : **Peningkatan Infrastruktur berwawasan lingkungan**

Program Prioritas : Program pembangunan jalan dan jembatan

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Program Prioritas RPJMD Tahun 2023	OPD Penanggung jawab
Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan	Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan infrastruktur	• Persentase pembangunan Jalan	17,44	Dinas PU BinaMarga
		• Persentase pembangunan jembatan	15	

Tabel 4.10

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023

Prioritas Daerah : **Peningkatan Infrastruktur berwawasan lingkungan**

Program Prioritas : Program peningkatan jalan dan jembatan

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Program Prioritas RPJMD Tahun 2023	OPD Penanggung jawab
Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan	Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan infrastruktur	• Persentase peningkatan jalan	17,7	Dinas PU BinaMarga
		• Persentase rehab/pemeliharaan jalan	20,04	
		• Persentase peningkatan jembatan	16,67	
		• Persentase jembatan yang terpelihara	15,79	

Tabel 4.11

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023

Prioritas Daerah : **Peningkatan Infrastruktur berwawasan lingkungan**

Program Prioritas : Pembangunan dan peningkatan kualitas jaringan listrik

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Program Prioritas RPJMD Tahun 2023	OPD Penanggungjawab
Pembangunan sarana dan prasarana listrik	Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan infrastruktur	• Persentase jangkauan jaringan listrik	37,9	DPUCKTRP
		• Persentase jumlah lampu penerangan jalan umum	44	

Tabel 4.12

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023

Prioritas Daerah : **Peningkatan Infrastruktur berwawasan lingkungan**Program Prioritas : Pengelolaan sumber daya air untuk irigasi
Pengelolaan sumber daya air untuk irigasi

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Program Prioritas RPJMD Tahun 2023	OPD Penanggungjawab
Pembangunan dan optimalisasi jaringan irigasi	Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan infrastruktur	• Persentase prasarana fisik irigasi dalam kondisi baik	25	DPUCKTRP

Tabel 4.13

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023

Prioritas Daerah : **Peningkatan Infrastruktur berwawasan lingkungan**

Program Prioritas : Pengelolaan Limbah dan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2023	OPD Penanggungjawab
Pengelolaan Limbah	Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan infrastruktur	• Persentase usaha/kegiatan yang patuh dalam mengelola B3 dan limbah B3	• 68	Dinas LH

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2023	OPD Penanggungjawab
Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi	Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> Rasio rumah tangga bersanitasi per IPAL Komunal 	<ul style="list-style-type: none"> 91 	<ul style="list-style-type: none"> DPUCKTRP

Tabel 4.14

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023

Prioritas Daerah : **Peningkatan Infrastruktur berwawasan lingkungan**

Program Prioritas : Pemasangan jaringan penyediaan air minum ke rumah-rumah penduduk

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2023	OPD Penanggungjawab
Pemasangan jaringan penyediaan air minum ke rumah-rumah penduduk	Pemasangan jaringan penyediaan air minum ke rumah-rumah penduduk	<ul style="list-style-type: none"> Rasio rumah tangga pengguna air minum per SPAM IKK 	<ul style="list-style-type: none"> 29 	<ul style="list-style-type: none"> DPUCKTRP

Tabel 4.15

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023

Prioritas Daerah : **Peningkatan Infrastruktur berwawasan lingkungan**

Program Prioritas : Peningkatan sarana dan prasarana umum

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2023	OPD Penanggungjawab
Pembangunan sarana dan prasarana Umum	Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> Persentase PSU perumahan yang layak 	<ul style="list-style-type: none"> 40 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perkim

Tabel 4.16

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023

Prioritas Daerah : **Peningkatan Infrastruktur berwawasan lingkungan**

Program Prioritas : Pembangunan sarana dan prasarana TIK

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2023	OPD Penanggungjawab
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana TIK	Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan TIK	<ul style="list-style-type: none"> Persentase desa yang tersedia jaringan TIK 	<ul style="list-style-type: none"> 55 	<ul style="list-style-type: none"> Diskominf o dan Statistik

Tabel 4.17

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023

Prioritas Daerah : **Peningkatan Infrastruktur berwawasan lingkungan**

Program Prioritas : Pembangunan prasarana pengelolaan persampahan

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2023	OPD Penanggungjawab
Pengelolaan persampahan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> Persentase sampah yang dikelola Jumlah sampah yang diangkut ke TPA 	<ul style="list-style-type: none"> 34 2700 ton 	Dinas LH

Tabel 4.18

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023

Prioritas Daerah : **Peningkatan Infrastruktur berwawasan lingkungan**

Program Prioritas : Pemberdayaan masyarakat dan korporasi dalam pengelolaan lingkungan hidup

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2023	OPD Penanggungjawab
Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran lingkungan hidup	Meningkatnya Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> Persentase diklat dan penyuluhan LH untuk masyarakat Persentase penghargaan LH untuk masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> 100 100 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas LH Dinas LH

Tabel 4.19

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023

Prioritas Daerah : **Pengentasan kemiskinan**

Program Prioritas : Program Jaringan Pengamanan Sosial

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2023	OPD Penanggungjawab
Pemberian Bantuan bagi masyarakat miskin	Meningkatnya pemerataan bantuan yang diterima masyarakat miskin	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keluarga PMKS penerima manfaat yang memperoleh jaminan sosial sesuai ketentuan Persentase PMKS yang memiliki kemampuan ketrampilan berwirausaha Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan kebutuhan dasar 	<ul style="list-style-type: none"> 95 82 82 	Dinas Sosial

Tabel 4.20

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023

Prioritas Daerah : **Pengentasan kemiskinan**

Program Prioritas : Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2023	OPD Penanggungjawab
Pendidikan gratis bagi masyarakat miskin	Terpenuhinya pendidikan gratis bagi masyarakat miskin	<ul style="list-style-type: none"> Persentase siswa penerima subsidi 	<ul style="list-style-type: none"> 40 	Dibnas Pendidikan

Tabel 4.21

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023

Prioritas Daerah : **Pengentasan kemiskinan**

Program Prioritas : Peningkatan akses dan mutu Pelayanan kesehatan

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2023	OPD Penanggungjawab
Pengobatan gratis bagi masyarakat miskin	Terlaksananya pengobatan gratis bagi masyarakat miskin	<ul style="list-style-type: none"> Cakupan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat yang terlaksana. 	100	RS. Dr. Sobirin

Tabel 4.22

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023

Prioritas Daerah : **Pengentasan kemiskinan**

Program Prioritas : Penyediaan Rumah layak huni

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2023	OPD Penanggungjawab
Pembangunan Rumah Layak Huni	Meningkatnya Rehabilitasi rumah tidak layak huni	<ul style="list-style-type: none"> Persentase pemenuhan kebutuhan MBR mendapatkan akses bantuan RTLH 	<ul style="list-style-type: none"> 50 	Dinas Perkim

Tabel 4.23

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023

Prioritas Daerah : **Pengentasan kemiskinan**

Program Prioritas : Peningkatan akses dan mutu pelayanan kelistrikan

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2023	OPD Penanggungjawab
Penyediaan listrik yang murah dan merata untuk penduduk miskin	Tersedianya listrik yang murah dan merata untuk penduduk miskin	<ul style="list-style-type: none"> Persentase jangkauan jaringan listrik 	<ul style="list-style-type: none"> 37,9 	Dinas PUCKTRP

Tabel 4.24

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023

Prioritas Daerah : **Pengentasan kemiskinan**

Program Prioritas : Program Pemberdayaan masyarakat miskin

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2023	OPD Penanggungjawab
Pemberian modal usaha, bantuan alat usaha, pelatihan, penciptaan lapangan kerja	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat miskin	<ul style="list-style-type: none"> Persentase PMKS yang memiliki kemampuan ketrampilan berwirausaha 	<ul style="list-style-type: none"> 82 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Sosial

Tabel 4.25

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023

Prioritas Daerah : **Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas**

Program Prioritas : Pendidikan yang terjangkau untuk penduduk miskin

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2023	OPD Penanggungjawab
Penyelenggaraan pendidikan dasar dua belas tahun		<ul style="list-style-type: none"> Persentase PAUD dalam kondisi baik Persentase SD, SMP dalam kondisi baik 	<ul style="list-style-type: none"> 100 76,30 	Dinas Pendidikan

Tabel 4.26

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023

Prioritas Daerah : **Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas**

Program Prioritas : Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2023	OPD Penanggungjawab
Pembangunan dan peningkatan kualitas gedung sekolah	Meningkatnya kualitas gedung sekolah	<ul style="list-style-type: none"> Persentase PAUD cukup saporas Persentase SD, SMP cukup saporas 	<ul style="list-style-type: none"> 66,30 66,30 	Dinas Pendidikan

Tabel 4.27

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023

Prioritas Daerah : **Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas**

Program Prioritas : Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM tenaga pendidik

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2023	OPD Penanggungjawab
Penyelenggaraan peningkatan kapasitas SDM Bidang pendidikan		<ul style="list-style-type: none"> Persentase kualifikasi guru berpendidikan S1 Persentase guru bersertifikasi 	<ul style="list-style-type: none"> 75 75,3 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pendidikan

Tabel 4.28

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023

Prioritas Daerah : **Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas**

Program Prioritas : Penyelenggaraan pendidikan nonformal

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2023	OPD Penanggungjawab
Pendidikan keagamaan Rumah tahfiz, pondok pesantren		<ul style="list-style-type: none"> Persentase peningkatan pemberian bantuan bidang keagamaan 	<ul style="list-style-type: none"> 100 	Bagian Kesra

Tabel 4.29

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023

Prioritas Daerah : **Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas**

Program Prioritas : Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan serta SDM Bidang Kesehatan

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2023	OPD Penanggungjawab
Pelayanan kesehatan yang cepat dan tepat	Terciptanya pelayanan kesehatan yang cepat dan tepat	<ul style="list-style-type: none"> Persentase ketersediaan SDM Kesehatan yang berkompeten di bidang kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> 100 	Dinas Kesehatan

Tabel 4.30

Kegiatan Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023

Prioritas Daerah : **Peningkatan Tata Kelola Pemerintah**

Program Prioritas : Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan TIK

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2023	OPD Penanggungjawab
Penyelenggaraan pelayanan publik berbasis elektronik	Terselenggaranya pelayanan publik yang berbasis elektronik	<ul style="list-style-type: none"> Persentase aplikasi yang diintegrasikan Persentase desa yang tersedia jaringan TIK 	<ul style="list-style-type: none"> 55 55 	Diskominfo dan Statistik

Tabel 4.31

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023

Prioritas Daerah : **Peningkatan Tata Kelola Pemerintah**

Program Prioritas : Peningkatan kualitas SDM layanan Publik

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2023	OPD Penanggungjawab
Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas/kompetensi ASN	Meningkatnya kapasitas / kompetensi ASN	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai dimensi kompetensi aparatur ASN Pemkab Musi Rawas 	<ul style="list-style-type: none"> • 15 	<ul style="list-style-type: none"> • BKPSDM

Tabel 4.32

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023

Prioritas Daerah : **Peningkatan Tata Kelola Pemerintah**

Program Prioritas : Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2023	OPD Penanggungjawab
Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintah yang baik		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah PD dengan tingkat maturitas SPIP level 3 • Jumlah PD yang menerapkan penilaian resiko • Jumlah PD yang memperoleh nilai SAKIP min. Nilai BB 	<ul style="list-style-type: none"> • 19 PD • 36 PD • 31 PD 	<ul style="list-style-type: none"> • Inspektorat

4.5 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 Dengan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2023.

4.5.1 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 Dengan Prioritas Nasional Tahun 2023

No	Prioritas Nasional Tahun 2023	Garis Keterkaitan	Prioritas Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023	Program Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan		Peningkatan Infrastruktur berwawasan lingkungan	Program pembangunan jalan dan jembatan
				Program peningkatan jalan dan jembatan
				Pembangunan dan peningkatan kualitas jaringan listrik
				Pengelolaan sumber daya air untuk irigasi
				Pengelolaan Limbah dan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi
				Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
				Peningkatan sarana dan prasarana umum
				Pembangunan sarana dan prasarana TIK
				Pembangunan prasarana pengelolaan persampahan
				Pemberdayaan masyarakat dan korporasi dalam pengelolaan lingkungan hidup
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan		Pengentasan kemiskinan	Program Jaringan Pengamanan Sosial
				Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan
				Peningkatan akses dan mutu Pelayanan kesehatan
				Penyediaan Rumah layak huni
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing		Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Program Pemberdayaan masyarakat miskin
				Pendidikan yang terjangkau untuk penduduk miskin
4.	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan			Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan
				Penyelenggaraan pendidikan nonformal
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan Dasar			Pendidikan kejar paket
				Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan serta SDM Bidang Kesehatan
6.	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim		Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan TIK
				Peningkatan kualitas SDM layanan Publik
7.	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik			Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih

4.5.2 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 Dengan Prioritas Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

Kabupaten Musi Rawas secara administratif merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Untuk itu Prioritas Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2023 yang direncanakan pada sub bab didepan juga ditujukan untuk mendukung pencapaian Prioritas Provinsi Sumatera Selatan pada RKPD Sumatera Selatan Tahun 2023. Sinkronisasi prioritas daerah dengan prioritas provinsi disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.33
Sinkronisasi Prioritas Daerah Tahun 2023 dengan
Prioritas Provinsi Tahun 2023

No	Prioritas Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023	Garis Keterkaitan	Prioritas Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023	Program Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023
1.	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial		Peningkatan Infrastruktur berwawasan lingkungan	Program pembangunan jalan dan jembatan
				Program peningkatan jalan dan jembatan
				Pembangunan dan peningkatan kualitas jaringan listrik
				Pengelolaan sumber daya air untuk irigasi
				Pengelolaan Limbah dan Peningkatan
				pembangunan sarana dan prasarana sanitasi
				Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
				Peningkatan sarana dan prasarana umum
				Pembangunan sarana dan prasarana TIK
				Pembangunan prasarana pengelolaan persampahan
				Pemberdayaan masyarakat dan korporasi dalam pengelolaan lingkungan hidup
2.	Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi		Pengentasan kemiskinan	Program Jaringan Pengamanan Sosial
				Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan
				Peningkatan akses dan mutu Pelayanan kesehatan
				Penyediaan Rumah layak huni
				Peningkatan akses dan mutu pelayanan kelistrikan
				Program Pemberdayaan masyarakat miskin
3.	Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang		Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Pendidikan yang terjangkau untuk penduduk miskin
				Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan
				Penyelenggaraan pendidikan nonformal
				Pendidikan kejar paket

No	Prioritas Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023	Garis Keterkaitan	Prioritas Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023	Program Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023
				Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan serta SDM Bidang Kesehatan
4.	Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	←	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan TIK Peningkatan kualitas SDM layanan Publik Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih

4.5.3 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2023

Tabel 4.34
Sinkronisasi Prioritas Daerah Tahun 2023 dengan RPJMD 2021-2026

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPDTAHUN 2023	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Misi
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan Infrastruktur berwawasan lingkungan	Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan infrastruktur	Membangun dan meningkatkan kualitas jalan dan jembatan	Membangun jalan dan jembatan untuk konektivitas antar wilayah Memelihara dan meningkatkan kualitas jalan dan jembatan	M3. Pemerataan infrastruktur yang berkualitas serta berwawasan lingkungan
			Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur kelistrikan, sanitasi, jaringan irigasi	Pemenuhan jaringan listrik untuk konektivitas dan pengembangan wilayah	
			Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur fasilitas umum dan pemerintahan	Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur fasilitas pelayanan publik	
			meningkatkan cakupan layanan infrastruktur TIK	Membangun infrastruktur TIK	
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Membangun infrastruktur pengelolaan persampahan	
				Meningkatkan peran aktif masyarakat dan korporasi dalam pengelolaan lingkungan hidup	
2.	pengentasan kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan	Memperkuat Ketahanan sosial bagi masyarakat miskin	Memantapkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin	M4. Memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat
			Meningkatkan akses layanan dasar bagi	Pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat	

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPDTAHUN 2023	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Misi
1	2	3	4	5	6
		Memperkuat ketahanan ekonomi bagi masyarakat miskin	masyarakat miskin Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap Sumber Daya Ekonomi	miskin Program Pemberdayaan masyarakat miskin	
3.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pendidikan	Meningkatkan cakupan layanan pendidikan dasar Meningkatkan kualitas SDM tenaga kependidikan Meningkatkan kualitas pendidikan nonformal	Meningkatkan aksebilitas masyarakat terhadap pendidikan dasar Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan Pemerataan guru Peningkatan kualitas guru Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan ketrampilan melalui peningkatan kualitas lembaga pendidikan nonformal	M2. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas
		Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat	
4.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan akses dan kemudahan layanan	memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) Pengembangan SDM layanan publik Peningkatan kualitas kelembagaan unit layanan publik	M1. Mewujudkan birokrasi yang profesional berbasis teknologi

4.5.3 Sandingan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Musi Rawas yang Dilengkapi Dengan Indikator Prioritas Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Serta Program Prioritas Kabupaten Musi Rawas

Tabel 4.35

Sandingan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Musi Rawas yang Dilengkapi Dengan Indikator Prioritas Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Serta Program Prioritas Kabupaten Musi Rawas

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Sasaran	Indikator Prioritas Daerah	Target 2023	Program Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023
1	<p>Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan</p> <p>Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan</p> <p>Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan Dasar</p> <p>Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim</p>	Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Peningkatan Infrastruktur Berwawasan lingkungan	Meningkatnya panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	Persentase Konektivitas antar wilayah	93,12	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pembangunan jalan dan jembatan 2. Program peningkatan jalan dan jembatan 3. Pembangunan dan peningkatan kualitas jaringan listrik 4. Pengelolaan sumber daya air untuk irigasi 5. Pengelolaan Limbah dan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi 7. Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
				Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar (Ciptakarya, Kelistrikan, Pemukiman, Irigasi, komunikasi)	Indeks Infrastruktur Dasar	97	
					Indeks Sumber Daya Air	56	
				meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,50	

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Sasaran	Indikator Prioritas Daerah	Target 2023	Program Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023
				Meningkatnya penataan ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	97	8. Peningkatan sarana dan prasarana umum 9. Pembangunan sarana dan prasarana TIK
				Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan penanggulangan bencana	Indeks Penurunan Dampak Resiko Bencana	51,72	10. Pembangunan prasarana pengelolaan persampahan 11. Pemberdayaan masyarakat dan korporasi dalam pengelolaan lingkungan hidup
2	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya kontribusi pertanian dalam arti luas terhadap pertumbuhan perekonomian	PDRB sektor pertanian	Rp 6.178,33 milyar	1. Program Jaringan Pengamanan Sosial 2. Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan 3. Peningkatan akses dan mutu Pelayanan kesehatan 4. Penyediaan Rumah layak huni 5. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kelistrikan 6. Program Pemberdayaan
				Meningkatnya kontribusi perindustrian perdagangan terhadap perekonomian	PDRB sektor Industri	Rp 1727,73 milyar	
				Meningkatnya realisasi investasi Di Kabupaten Musi Rawas	PDRB sektor perdagangan	Rp 1021,4 milyar	
				Menurunnya tingkat kemiskinan	Persentase peningkatan investasi	11	
				Menurunnya tingkat pengangguran	Angka kemiskinan	13,05	
						3,15	

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Sasaran	Indikator Prioritas Daerah	Target 2023	Program Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023
				Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	78,18	masyarakat miskin
				Meningkatnya status desa	Persentase Peningkatan Desa Maju	40,32	
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas	Meningkatnya Derajat Pendidikan	Indeks Pendidikan	69,61	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan yang terjangkau untuk penduduk miskin 2. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan 3. Penyelenggaraan pendidikan nonformal 4. Pendidikan kejar paket 5. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan serta SDM Bidang Kesehatan
				Meningkatnya Derajat Kesehatan	Indeks Kesehatan	79,5	
				Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan pemuda serta perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,45	
					Kabupaten Layak Pemuda	Pratama	
					Status Kabupaten Layak Anak	725 Madya	
				Terwujudnya Ketertiban, Keamanan, Ketentraman dan Kenyamanan Masyarakat	Indeks Ketertiban dan Ketentraman	97%	
Indeks Kerukunan Umat Beragama	75						

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Sasaran	Indikator Prioritas Daerah	Target 2023	Program Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023
					Persentase Warisan budaya yang dilestarikan	72	
					Indeks Budaya Literasi Daerah	30,5	
4	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan	Indeks RB	30,5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan TIK 2. Peningkatan kualitas SDM layanan Publik 3. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih

4.6 Strategi Pendukung Tujuan Pembangunan

4.6.1 Strategi Untuk Pencegahan dan Penanganan Pandemi Covid-19

Penyebaran kasus Corona virus Disease 2019 (covid-19) sudah mulai terdapat di Kabupaten Musi Rawas sejak bulan April 2020. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Musi Rawas terus mengupayakan langkah pencegahan dan penanganan Covid-19 melalui berbagai strategi pencegahan dan penanganan pandemi covid 19 yaitu:

1. Strategi Tata Kelola

Tata kelola pencegahan dan penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Musi Rawas dipayungi dengan diterbitkannya SK Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Kabupaten Musi Rawas. Satuan tugas ini bertugas untuk pengendalian dan penanganan dampak pandemi Corona Virus Disease (Covid- 19) di Kabupaten Musi Rawas. Secara kelembagaan, untuk setiap desa dan kecamatan telah dibentuk Posko Siaga Penanggulangan Covid-19 di 199 Desa/Kelurahan dan 14 Kecamatan.

2. Strategi Penanganan Kesehatan

Penanganan kesehatan secara komprehensif dan terintegrasi dari hulu ke hilir. Di sektor hilir, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas melakukan kebijakan-kebijakan pendukung untuk diterapkan di Musi Rawas seperti mengampanyekan kewajiban memakai masker saat berada di ruang publik atau di luar rumah, sosialisasi pola hidup bersih dan sehat termasuk perilaku rajin cuci tangan, serta sosialisasi physical distancing dan mengurangi kerumunan dan keramaian. Selain itu, sesuai dengan program pemerintah pusat telah diadakan program pemberian vaksin kepada masyarakat yang dilakukan secara bertahap.

Di sektor hulu dilakukan penelusuran kontak (tracing) dari kasus positif yang dirawat dengan menggunakan rapid test atau tes cepat, edukasi dan penyiapan isolasi secara mandiri pada sebagian hasil tracking yang menunjukkan hasil tes positif dari rapid tes atau negatif dengan gejala untuk melakukan isolasi mandiri, dan isolasi rumah sakit yang dilakukan kala isolasi mandiri tidak mungkin dilakukan, seperti karena ada tanda klinis yang

membutuhkan layanan definitif di rumah sakit.

3. Strategi Penyediaan Jaminan Sosial

Penyediaan jaminan sosial dilaksanakan berupa pemberian Bantuan Sosial kepada masyarakat terdampak pandemi covid 19. Bentuk bantuan sosial yang diberikan berupa paket sembako. Barang yang diberikan kepada masyarakat dibeli dari masyarakat petani di Kabupaten Musi Rawas, sehingga selain penyediaan jaminan sosial juga secara tidak langsung berkaitan dengan penanganan dampak ekonomi masyarakat. Adapun kriteria masyarakat penerima bantuan terdiri dari :

- Masyarakat yang sudah terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
- Masyarakat miskin baru akibat pandemi covid-
- Masyarakat terdampak karena profesi (pekerja seni dan pelaku wisata)
- Masyarakat lain yg dipandang perlu untuk dibantu sesuai usulan pemerintah desa/kelurahan

4. Strategi Pemulihan Ekonomi

Melalui stimulus yang diberikan kepada masyarakat, berupa bantuan modal usaha dan prasarana sebagai upaya penguatan dan optimalisasi produktivitas sektor-sektor strategis di Kabupaten Rawas yaitu sektor pertanian dalam arti luas, meliputi tanaman padi sawah irigasi, perkebunan karet, kopi, sawit dan lain-lain, budidaya ikan tawar dan peternakan. Selain itu, stimulus yang dimaksud, diberikan juga kepada para pelaku usaha mikro dan kecil. Kriteria penerima bantuan ini berdasarkan usulan dari pemerintah desa dan kecamatan.

4.6.2 Strategi Untuk Mendukung Pencapaian Tujuan SDGs

SDGs (Sustainable Development Goals) atau yang lebih dikenal sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan sebuah kesepakatan global baru yang dibuat oleh PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) sebagai bentuk dari tindak lanjut kesepakatan global yang telah dibuat sebelumnya yakni MDGs (Millennium Development Goals). SDGs juga dapat didefinisikan sebagai kesepakatan tujuan pembangunan baru yang dapat mendorong pembangunan ke arah yang lebih lanjut didasarkan pada hak asasi manusia ataupun kesetaraan manusia dengan tujuan mendorong pembangunan dalam bidang sosial, ekonomi, lingkungan hidup dan sebagainya. SDGs juga dilaksanakan dengan prinsip universal dan memiliki motto yaitu *"No One Left Behind"* yang memiliki arti tidak ada satu pun yang tertinggal.

SDGs (Sustainable Development Goals) sendiri memiliki 17 tujuan yang diadopsi, diperbaharui serta dimodifikasi dari MDGs (Millennium Development Goals) itu sendiri, yakni sebagai berikut :

1. Tanpa adanya kemiskinan.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu segala bentuk kemiskinan di berbagai tempat harus diminimalisirkan, entah itu dengan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan ataupun hal semacamnya.

2. Tanpa adanya kelaparan.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu untuk mengakhiri kelaparan yang ada, mencapai dan mempertahankan ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi yang dicakup, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan ke depannya.

3. Kehidupan sehat dan sejahtera.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua jenjang usia.

4. Pendidikan berkualitas.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu memastikan setiap pendidikan yang diterima berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang di dunia.

5. Kesetaraan gender.
Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu mencapai kesetaraan gender sekaligus mengurangi kesenjangan antar gender dan memberdayakan semua perempuan sebagaimana mestinya.
6. Air bersih dan sanitasi layak.
Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua.
7. Energi bersih dan terjangkau.
Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu memastikan akses untuk energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua kalangan.
8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.
Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu pertumbuhan ekonomi itu sendiri dapat dilakukan dengan cara mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua sebagai salah satu contohnya.
9. Industri, inovasi dan infrastruktur.
Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu membangun infrastruktur yang kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi.
10. Berkurangnya kesenjangan.
Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu mengurangi kesenjangan di dalam dan diantara negara-negara.
11. Kota dan komunitas berkelanjutan.
Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu membuat wilayah perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan.
12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.
Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
13. Penanganan perubahan iklim.
Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya. Contohnya mengurangi pemakaian Air Conditioner yang dapat merusak lingkungan,

14. Ekosistem laut.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu perlindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.

15. Ekosistem daratan.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu ekosistem yang ada di darat contohnya seperti hutan harus dikelola secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati.

16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif.

17. Kemitraan untuk mencapai tujuan.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan.

17 tujuan di atas telah disetujui oleh 197 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan Agustus tahun 2015 lalu. SDGs (Sustainable Development Goals) ini sendiri akan dijadikan sebagai tujuan pembangunan global selama 15 tahun ke depan hingga tahun 2030. Dengan adanya SDGs (Sustainable Development Goals) ini, diharapkan pembangunan yang ada di dunia menjadi lebih baik dan terarah ke depannya seiring perubahan zaman.

Berikut ini tabel 4.21 yang menyajikan keterkaitan antara prioritas pembangunan Kabupaten Musi Rawas dalam upaya untuk mendukung pencapaian tujuan SDGs

Tabel 4.36
Korelasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun
2023 Dalam Merespon Program SDGs

No	Tujuan Pembangunan SDGs	Prioritas Pembangunan RKPDKabupaten Musi Rawas	Program Prioritas RKPDKabupaten Musi Rawas
1	Tanpa adanya kemiskinan	Pengentasan kemiskinan	1. Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan 2. Peningkatan akses dan mutu Pelayanan kesehatan 3. Penyediaan Rumah layak huni 4. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kelistrikan 5. Program Pemberdayaan masyarakat miskin
2	Tanpa adanya kelaparan	Pengentasan kemiskinan	Program Jaringan Pengamanan Sosial
3	Kehidupan sehat dan sejahtera	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan serta SDM Bidang Kesehatan
4	Pendidikan berkualitas	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan yang terjangkau untuk penduduk miskin • Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan • Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM tenaga pendidik • Penyelenggaraan pendidikan nonformal • Pendidikan kejar paket
5	Kesetaraan gender.	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan serta SDM Bidang Kesehatan
6	Air bersih dan sanitasi layak	Peningkatan Infrastruktur berwawasan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Limbah dan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi • Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
7	Energi bersih dan terjangkau	Peningkatan Infrastruktur berwawasan lingkungan	Pembangunan dan peningkatan kualitas jaringan listrik
8	Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi	Pengentasan kemiskinan	Program Pemberdayaan masyarakat miskin rakyat

No	Tujuan Pembangunan SDGs	Prioritas Pembangunan RPKDKabupaten Musi Rawas	Program Prioritas RKPD Kabupaten Musi Rawas
9	Industri, inovasi dan infrastruktur	Peningkatan Infrastruktur berwawasan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan sarana dan prasarana TIK
10	Berkurangnya kesenjangan	Peningkatan Infrastruktur berwawasan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Program pembangunan jalan dan jembatan • Program peningkatan jalan dan jembatan
11	Kota dan komunitas berkelanjutan	Peningkatan Infrastruktur berwawasan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Program pembangunan jalan dan jembatan • Program peningkatan jalan dan jembatan • Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana • Pembangunan sarana dan prasarana TIK • Pembangunan dan peningkatan kualitas jaringan listrik • Peningkatan penanganan pemukiman kumuh •
12	Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab	Pengentasan kemiskinan	Program Pemberdayaan masyarakat miskin
13	Penanganan perubahan iklim	Peningkatan Infrastruktur berwawasan lingkungan	Pemberdayaan masyarakat dan korporasi dalam pengelolaan lingkungan hidup
14	Ekosistem laut.	Peningkatan Infrastruktur berwawasan lingkungan	Pemberdayaan masyarakat dan korporasi dalam pengelolaan lingkungan hidup
15	Ekosistem daratan	Pengentasan kemiskinan	Program Pemberdayaan masyarakat miskin
		Peningkatan Infrastruktur berwawasan lingkungan	Pemberdayaan masyarakat dan korporasi dalam pengelolaan lingkungan hidup
16	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih
			Peningkatan kualitas SDM layanan Publik
17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih

4.6.3 Strategi Untuk Mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarustamaan adalah upaya/strategi yang harus dilakukan untuk memberi peluang kepada seluruh komponen atau stakeholders agar dapat berperan secara optimal dalam pembangunan. Pengarusutamaan Gender (gender mainstreaming) merupakan sebuah upaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang menyebabkan tidak tercapainya kesetaraan dan keadilan gender (marginalisasi, stereotype, subordinasi, kekerasan dan beban ganda).

Pelaksanaan PUG dalam masyarakat tercermin dalam berbagai aktivitas yang dijalankan oleh OPD dengan didukung Tim Penggerak PKK dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW). Bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas terhadap kaum perempuan dan anak-anak antara lain :

- Sosialisasi Kesetaraan Keadilan Gender (KKG)
- Pencanangan Musi Rawas sebagai Kabupaten layak anak,
- Fasilitasi upaya perlindungan perempuan dari tindak kekerasan,
- Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan melalui koordinasi dan sosialisasi dengan kader PKK, posyandu, puskesmas dan RS dalam upaya mengurangi/ meminimalisir kematian Ibu dan bayi.
- Kegiatan usaha ekonomi produktif dalam rangka program terpadu pemberdayaan masyarakat berbasis gender, serta
- Koordinasi dan sosialisasi terhadap organisasi masyarakat perempuan di Musi Rawas meliputi PKK, DWP, dan GOW.

Tabel 4.37
Dukungan Prioritas Daerah Terhadap Pengarusutamaan Gender

Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah	Kegiatan Nomenklatur Daerah
Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	<ul style="list-style-type: none">• Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah

Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah	Kegiatan Nomenklatur Daerah
			Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
		<ul style="list-style-type: none"> Program Perlindungan Perempuan 	<ol style="list-style-type: none"> Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

4.6.4. Strategi Untuk Mendukung Penurunan Stunting

Usaha pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menurunkan angka prevalensi stunting berpedoman pada Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) periode 2018-2024, yang diikuti dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Dalam Perpres ini diatur mengenai strategi nasional percepatan penurunan stunting; penyelenggaraan penurunan stunting; koordinasi penyelenggaraan penurunan stunting; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan pendanaan.

Formulasi program percepatan dalam penurunan stunting mengarah pada intervensi berbasis keluarga beresiko stunting dengan menekankan pada

penyiapan kehidupan berkeluarga, pemenuhan asupan gizi, perbaikan pola asuh, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan peningkatan akses air minum dan sanitasi.

4.6.5. Strategi Untuk Mendukung Pelaksanaan SPM

SPM merupakan jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sementara itu, pelayanan dasar yang menjadi kewajiban pemerintah/pemerintah daerah untuk memenuhinya merupakan jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

Dengan demikian maka penerapan SPM yang dilakukan oleh Pemerintah daerah, akan menjadi tolak ukur kinerja pemerintah daerah terhadap mutu dan jenis pelayanan yang prioritas kepada masyarakat. Oleh karenanya, dalam rangka percepatan pencapaian SPM di Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2023, telah dirumuskan beberapa strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

a. Strategi

- 1) Penataan kelembagaan pemerintah yang sesuai kebutuhan, tepat fungsi dan tepat ukuran
- 2) Peningkatan kualitas SDM aparatur yang berkinerja tinggi dan sejahtera
- 3) Pemanfaatan teknologi bagi aparatur untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi
- 4) Pemberian kemudahan akses infrastruktur dan akses modal bagi masyarakat

b. Arah Kebijakan

- 1) Mewujudkan Organisasi Pemerintah Daerah yang efektif dan efisien;
- 2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM Aparatur melalui pendidikan dan pelatihan;
- 3) Peningkatan dan pemenuhan pelayanan dasar publik terutama di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, air minum, energi/listrik, telekomunikasi, perumahan dan permukiman melalui pemanfaatan teknologi informasi;
- 4) Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui produk unggulan daerah,

posisi strategis, dan keterkaitan antar kawasan yang meliputi aspek infrastruktur, manajemen usaha, akses permodalan, inovasi, dan pemasaran.

4.7 Arah Pengembangan Kecamatan

Strategi kebijakan pembangunan wilayah kabupaten Musi Rawas diarahkan untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan di seluruh wilayah dengan memperhatikan karakteristik suatu wilayah seperti kandungan sumber daya alam, perbedaan demografis, dan konsentrasi kegiatan ekonomi di suatu wilayah.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Berdasarkan visi, misi, kebijakan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 maupun perkembangan kebijakan pemerintah dalam skala regional dan nasional, serta dengan memperhatikan kondisi umum dan permasalahan yang dihadapi dan diformulasikan dari hasil Musrenbang Tahun 2022, maka dalam rangka penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah untuk Tahun 2023 disusun fokus pembangunan daerah yang menjadi kebijakan umum dalam penyusunan APBD Tahun 2023. Fokus pembangunan daerah yang tercakup dalam rancangan akhir RKPD ini pada dasarnya merupakan kerangka operasional sebagai arah atau tindakan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, yang berisi sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran.

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab IV, bahwa dalam rangka pencapaian visi dan misi sesuai dengan isu aktual dan kondisi umum yang dihadapi, maka agenda pada Tahun 2023 adalah pencapaian target prioritas pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, prioritas pembangunan daerah tersebut tertuang dalam daftar program dan kegiatan serta pagu indikatif Perangkat Daerah, karena bersifat indikatif maka implementasinya akan disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah, berikut rencana pembiayaan berdasarkan prioritas pembangunan daerah tahun 2023.

Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan Berdasarkan Prioritas
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023

NO	PRIORITAS	FOKUS	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	Peningkatan Infrastruktur Berwawasan lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap 2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar (Ciptakarya, Kelistrikan, Pemukiman, Irigasi, komunikasi) 3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 4. Meningkatnya penataan ruang 5. Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan penanggulangan bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 2. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan 3. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 4. Dinas Lingkungan hidup 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6. Dinas Perhubungan 7. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik 	280.804.030.250
2	Pengentasan kemiskinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kontribusi pertanian dalam arti luas terhadap pertumbuhan perekonomian 2. Meningkatnya kemandirian pangan 3. Meningkatnya kontribusi perindustrian perdagangan terhadap perekonomian 4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi dan UMKM serta Lembaga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pertanian dan Peternakan 2. Dinas Ketahanan Pangan 3. Dinas Perkebunan 4. Dinas Perikanan 5. Dinas Koperasi UKM 6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 7. DPMPTSP 8. BPPRD 9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 10. Dinas Sosial 11. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 12. Dinas Tenaga 	88.105.069.113

NO	PRIORITAS	FOKUS	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
		<p>Ekonomi non pertanian</p> <p>5. Meningkatnya pelayanan dan bantuan sosial dalam upaya penurunan PMKS</p> <p>6. Meningkatnya jumlah kunjungan wisata</p>	<p>Kerja dan Transmigrasi</p>	
3	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas	<p>1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat</p> <p>2. Meningkatnya kualitas pendidikan</p> <p>3. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama</p>	<p>1. Dinas Kesehatan</p> <p>2. RS. Dr. Sobirin</p> <p>3. Dinas Pendidikan</p> <p>4. Badan Kesatuan Bangsa Politik</p> <p>5. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB</p> <p>6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</p> <p>7. Dinas Pemuda dan Olahraga</p> <p>8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>9. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p>10. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah</p>	522.788.006.905
4.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	<p>1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan profesionalisme aparatur</p> <p>2. Meningkatnya keamanan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat</p>	<p>1. Sekretariat DPRD</p> <p>2. Sekretariat Daerah</p> <p>3. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran</p> <p>4. Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> <p>5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</p>	574.741.874.014

NO	PRIORITAS	FOKUS	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
			6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 7. Inspektorat 8. 14 Kecamatan	
Jumlah				1.466.438.980.282

Selanjutnya pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Musi Rawas tetap mengupayakan langkah pencegahan dan penanganan pasca pandemi Covid-19 melalui berbagai strategi yaitu: 1). Strategi Tata Kelola, 2) Strategi Penangan Kesehatan 3) Strategi Penyediaan Jaminan Sosial, dan 4) Strategi Penanganan Dampak Ekonomi, dengan mengedepankan Peningkatan Infrastruktur untuk mempercepat pencapaian strategi – strategi yang dimaksud diatas.

Dari usulan rencana kerja dan pendanaan daerah melalui perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 dapat dilihat pada berikut tabel berikut ini :

Tabel 5.2
Rekap Rencana Pendanaan Per Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2023

Perangkat Daerah	Anggaran
Dinas Pendidikan	268.330.079.264
Dinas Kesehatan	132.752.337.464
Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Sobirin	85.509.697.562
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya,Tata Ruang dan Pengairan	72.826.718.998
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	174.500.525.046
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	10.078.566.858
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	11.136.913.521
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.925.897.711
Dinas Sosial	11.976.339.543
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.184.469.841
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.082.602.229

Perangkat Daerah	Anggaran
Dinas Ketahanan Pangan	4.038.309.216
Dinas Lingkungan hidup	8.142.923.831
Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.506.179.198
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.201.187.109
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.477.417.633
Dinas Perhubungan	4.946.867.893
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	8.382.529.913
Dinas Koperasi ,Usaha Kecil dan Menengah	3.353.121.059
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.446.339.796
Dinas Pemuda dan Olahraga	7.658.618.190
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4.371.279.724
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.518.151.817
Dinas Perikanan	4.293.072.881
Dinas Pertanian dan Peternakan	25.502.223.995
Dinas Perkebunan	7.398.634.368
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.747.763.002
Sekretariat Daerah	58.815.518.944
Sekretariat DPRD	92.318.063.831
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.497.090.782
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	351.337.312.900
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	8.592.328.579
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.142.172.891
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.301.211.202
Inspektorat	17.075.898.167
Kecamatan BTS ULU	2.647.585.386
Kecamatan Muara Kelingi	2.973.028.436
Kecamatan Muara Lakitan	2.566.238.610
Kecamatan Jayaloka	2.429.357.593
Kecamatan Mengang Sakti	3.442.477.099
Kecamatan Sukakarya	1.364.224.651
Kecamatan Tuah Negeri	1.601.182.758
Kecamatan Tugumulyo	3.125.475.946
Kecamatan Purwodadi	3.551.250.526
Kecamatan STL ULU Terawas	2.291.884.682
Kecamatan Sumber Harta	2.009.495.847
Kecamatan Muara Beliti	2.160.622.170
Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut	1.412.979.575
Kecamatan Selangit	2.479.093.392
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.015.718.655
Jumlah	1.466.438.980.284

Adapun rencana program/kegiatan pembangunan dalam rancangan akhir RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 sesuai urusan pemerintah daerah dan Organisasi Perangkat Daerah diuraikan secara rinci pada tabel berikut:

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu tujuan atau sasaran yang ditetapkan organisasi. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja. Indikator kinerja berfungsi untuk:

1. Memperjelas tentang apa, berapa dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan daerah/perangkat daerah;
2. Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kebijakan /program/kegiatan dan dalam menilai kinerjanya;
3. Membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja organisasi/unit kerja;
4. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

Penetapan Indikator kinerja Daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Musi Rawas dapat dilihat pada :

Tabel 6.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Musi Rawas

No.	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	2023
1	Indeks RB	Penilaian terhadap kemajuan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi	Hasil penilaian dari KemenPANRB Ket : -AA : nilai >90-100, Predikat istimewa -A : Nilai > 80-90, predikat Sangat Baik -BB : Nilai .70-80, predikat Baik -B : Nilai >60-70, predikat Cukup Baik -CC : Nilai >50-60, predikat Cukup -C : Nilai >30-50, predikat Buruk	57,85 (CC)

No.	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	2023
			-D : Nilai 0-30, predikat Sangat Buruk	
2	Nilai SAKIP	Ukuran untuk mendapatkan gambaran kinerja pemerintah daerah yang merupakan hasil penilaian dari Kementerian PAN dan RB	Hasil penilaian dari KemenPANRB	BB (71,02)
3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	$" = (15\%n1) + (20\%n2) + (15\%n3) + (20\%n4) + (15\%n5) + (15\%n6) "$ n1 = Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran n2 = pengelolaan anggaran belanja dalam APBD n3 = transparansi pengelolaan keuangan daerah n4 = penyerapan anggaran n5 = kondisi keuangan daerah n6 = opini BPK atas LKPD	81,52
4	Indeks SPBE	Bobot Nilai dari 3 Domain Tingkat Kematangan : Domain Kebijakan Internal, Domain Tata Kelola, Domain Layanan.	4,2-5,0 = memuaskan 3,5-<4,2 = sangat baik 2,6-<3,5 = baik 1,8-<2,6 = cukup <1,8 = kurang	3.1
5	Indeks Profesionalitas ASN	Indek profesionalitas aparatur merupakan fungsi kesesuaian antara kompetensi pejabat, kinerja pejabat, kompensasi dan kedisiplinan	$IP = IP1 + IP2 + IP3 + IP4$ Keterangan : IP= Indeks Profesionalisme -IP 1= Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi -IP2= Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi -IP3=Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja -IP4= Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin	65,84
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil penilaian survey indeks kepuasan masyarakat	=nilai rata-rata dari hasil survey kepuasan masyarakat di perangkat daerah	84,66 (A)
7	Indeks Pendidikan	Gambaran secara umum untuk mengetahui perkembangan pendidikan	$= \left(\frac{I RLS - I HLS (min)}{2} \right)$ I RLS = Indeks rata-rata lama sekolah I HLS(min)= Indeks harapan lama sekolah minimal	69,61

No.	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	2023
8	Indeks kesehatan	Sebagai indikator untuk menilai kondisi kesehatan masyarakat.	$I \text{ Kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$	79,5
9	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks yang digunakan untuk mengukur kesetaraan pembangunan perempuan, dengan cara membandingkan IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki	IPG = Nilai IPM perempuan/nilai IPM laki-laki Ket: Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 dijadikan patokan untuk menginterpretasikan angka IPG, karena angka tersebut merupakan nilai rasio paling sempurna.	88,45
10	Kabupaten Layak Pemuda	Kabupaten/Kota Layak Pemuda yang selanjutnya disebut KLP adalah Kabupaten/Kota yang memiliki sistem layanan kepemudaan berbasis penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda melalui integrasi komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana dan sistematis, menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin kemajuan dan kemandirian pemuda	Hasil penelitian dan penilaian Kementerian Pemuda dan Olahraga	Pratama
11	Status Kabupaten Layak Anak	Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak	Hasil penilaian dari Kementerian PPPA	700 Madya

No.	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	2023
		melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak		
12	Indeks Ketertiban dan Ketentraman	Indeks komposit dari persentase jumlah penegakan perda dan persentase penanganan unjuk rasa dalam satu tahun	= %jumlah penegakan perda + %penanganan unjuk rasa	100%
13	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Untuk mengukur kerukunan umat beragama disuatu wilayah berdasarkan pada tiga aspek yaitu toleransi, kesetaraan dan kerjasama	Jumlah aspek kerukunan kehidupan beragama/ jumlah total aspek kehidupan beragama) x100%	74
14	Persentase Warisan budaya yang dilestarikan	Persentase warisan budaya (Benda atau tak berbenda) yang merupakan jati diri suatu masyarakat, yang diwariskan dari generasi-generasi sebelumnya dan dilestarikan untuk generasi yang akan datang	Adapun cara pengukuran Persentase warisan budaya dilestarikan adalah $\frac{\text{jumlah warisan budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah warisan budaya yang ter data}} \times 100\%$	72
15	Indeks Budaya Literasi Daerah	Parameter yang digunakan untuk mengukur tingkatan budaya membaca dan keilmuan serta keberadaan dan kondisi perpustakaan	= (UPLM/AM)x100% UPLM = Unsur pembangunan literasi masyarakat yang terdiri dari Pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, tingkat kunjungan ke perpustakaan, perpustakaan berSNP, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan dan jumlah anggota perpustakaan. AM= Aspek masyarakat	30,5

No.	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	2023
16	Persentase Konektivitas Antar Wilayah (%)	Hubungan antar ruas jalan dengan ruas jalan lainnya, yang menghubungkan satu wilayah dengan wilayah yang lainnya dengan tingkat kemantapan jalan sebagai salah satu indikatornya	$\frac{\text{Jumlah jalan kondisi baik} + \text{Jumlah Jembatan kondisi baik}}{\text{Total Jumlah Jalan} + \text{Jumlah Jembatan}} \times 100\%$	82,44
17	Indeks Infrastruktur dasar	Komponen penilaian kinerja suatu kota/wilayah berdasarkan presentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas mendasar seperti sanitasi, air minum dan listrik. Semakin tinggi indeks yang dicapai berarti tingkat pembangunan kota/wilayah tersebut semakin baik	Persentase rumah tangga bersanitasi, persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang layak, rasio elektrifikasi	93,12
18	Indeks Sumber Daya Air	Penilaian kinerja sistem irigasi suatu wilayah yang meliputi prasarana fisik, prasarana penunjang, personil, dokumentasi, dan kelembagaan P3A. Semakin tinggi indeks yang dicapai maka dapat dikatakan kinerja semakin baik	Persentase indeks prasarana fisik, indeks prasarana penunjang, indeks dokumentasi, indeks produktivitas tanam, indeks P3A dan indeks organisasi personalia	56
19	IKLH	parameter yang digunakan untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah.	$\text{IKLH} = (0.376 \times \text{IKA}) + (0.405 \times \text{IKU}) + (0.219 \times \text{IKL})$	70,50
20	Persentase ketaatan terhadap RTRW	Persentase Ketaatan terhadap RTRW adalah penilaian kesesuaian realisasi penataan ruang terhadap rencana	$\frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Peruntukan}} \times 100\%$	97

No.	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	2023
		peruntukan yang ditetapkan dalam RTRW. Semakin tinggi persentase yang dicapai maka tingkat ketaatan dinilai semakin baik.		
21	Indeks Penurunan Dampak resiko Bencana	Angka yang menunjukkan bahwa semakin tinggi bencana yang tertangani maka semakin tinggi juga persentase dampak penurunan resiko bencana	Bencana yang tertangani x Jumlah Bencana tiap tahun	51,72
22	PDRB sektor pertanian	Gambaran perkembangan perekonomian khusus lapangan usaha pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terdiri dari : Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, dan perikanan	$\frac{\text{PDRB ADHK lapangan Usaha Pertanian tahun sekarang dikurang PDRB ADHK lapangan usaha pertanian tahun sebelumnya}}{\text{PDRB ADHK lapangan usaha Pertanian tahun sebelumnya}} \times 100$	Rp 6.178,33 milyar
23	PDRB sektor Industri	Gambaran perkembangan perekonomian khusus lapangan usaha industri pengolahan dilihat dari perubahan lapangan usaha industri pengolahan pada PDRB ADHK	$\frac{\text{PDRB ADHK Lapangan Usaha Industri pengolahan tahun sekarang dikurang PDRB ADHK lapangan Usaha Industri pengolahan tahun sebelumnya}}{\text{PDRB ADHK lapangan usaha industri pengolahan tahun sebelumnya}} \times 100$	Rp 1727,73 milyar
24	PDRB sektor perdagangan	Gambaran perkembangan perekonomian khusus lapangan usaha perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	$\frac{\text{PDRB ADHK Lapangan Usaha Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun sekarang dikurang PDRB ADHK Lapangan Usaha perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan sepeda motor tahun sebelumnya}}{\text{PDRB ADHK lapangan usaha perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tahun sebelumnya}} \times 100$	Rp 1021,4 milyar
25	Persentase peningkatan investasi	Gambaran realisasi investasi baik PMDN maupun PMA sampai dengan tahun ini	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Investasi tahun sekarang dikurang Jumlah Realisasi Investasi Baseline}}{\text{Jumlah Realisasi Investasi Baseline}} \times 100$	11 T

No.	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	2023
		berdasarkan LKPM sesuai dengan UU 25 tahun 2007		
26	Angka kemiskinan	Gambaran persentase penduduk yang berada dibawah Garis kemiskinan	$(Pa) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^a$ <p> $a = 0,1,2$ z =garis kemiskinan y_i = rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah gariskemiskinan ($i=1,2,\dots,q$), $y_i < z$ q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = Jumlah penduduk </p>	13,05
27	Tingkat pengangguran	Tingkat pengangguran adalah banyaknya jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja dan aktif mencari pekerjaan.	Tingkat Pengangguran Terbuka = (Jumlah pengangguran/Angkatan Kerja) x 100%	3,15
28	Indeks Ketahanan Pangan	Capaian ketahanan Pangan dan Gizi Kab/Kota/provinsi dan peringkat (rangking) relatif antara satu wilayah dibandingkan dengan wilayah yang lain	Hail hitungan foo security and Vurnerability (FSVA) yaitu analisis ketahanan dan kerentanan Pangan	78,18
29	Persentase peningkatan Desa Maju	Dalam pengukuran status desa oleh Kemendes, terdapat lima klasifikasi status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Lima status itu adalah (1) Desa Sangat Tertinggal; (2) Desa Tertinggal; (3) Desa Berkembang; (4) Desa Maju; dan (5) Desa Mandiri.	Jumlah desa maju/Total desa dalam Kabupaten Musi Rawas x 100	90,79

Tabel 6.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian 2023
1	2	5
I	Urusan Wajib	
1	Terkait Pelayanan Dasar	
	Pendidikan	
	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD/ TK (%)	69,00
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI (%)	114,00
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs (%)	104,00
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI (%)	98,50
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%)	98,00
	Persentase Sekolah SD dan SMP terakreditasi A (%)	35,00
	Nilai Rata-rata Asesmen Kompetensi CAKAP- SD/MI/Sederajat	21,50
	Nilai Rata-rata Asesmen Kompetensi CAKAP- SMP/MTs/Sederajat	26,50
	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar (%)	100,00
	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Kesetaraan (%)	100,00
	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	100,00
	Kesehatan	
	Angka harapan hidup	69,50
	Angka kematian Ibu	88,05
	Angka Kematian Bayi	3,01
	Prevalensi Stunting	6%
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan	100%

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian 2023
1	2	5
	persalinan	
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%
	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%
	Persentase penderita hipertensi yang mnedapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%
	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%
	Rs. dr. Sobirin	
	Indeks Kesehatan (%)	74.1
	Persentase Standar Pelayanan Minimal yang terpenuhi	86%
2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	PU Bina Marga	
	Persentase Pembangunan Jalan	19,70
	Persentase Peningkatan Jalan	18,28
	Persentase Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	22,90
	Persentase Pembangunan Jembatan	15,00
	Persentase Peningkatan Jembatan	16,67
	Persentase Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	15,79

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian 2023
1	2	5
	PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan	
	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum yang Layak (%)	99
	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi (%)	99
	Rasio Elektrifikasi (%)	95
	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (%)	70
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (%)	100
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	100
	Indeks Luas Kawasan Permukiman dan Persawahan Yang Terlindungi (%)	65
	Persentase ketaatan terhadap RTRW (%)	97
	Persentase gedung negara beserta sarana penunjang yang berfungsi baik (%)	94
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	98
	Cakupan Rumah Layak Huni yang terjangkau (%)	25.3%
	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	40%
	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	70
	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab / kota (SPM)	100%
	Persentase Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kab / kota (SPM)	100%
	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebaran	
	Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban	91

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian 2023
1	2	5
	Persentase Penegakan Peraturan Daerah	91
	Persentase pendampingan Pelayanan pemadam dan Penyelamatan Kebakaran	90
	cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten	90
	Dinas Sosial	
	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi	92
	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	94,5
	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial	92
	Jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100
	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100
	Urusan Wajib	
2	Tidak Terkait Pelayanan Dasar	
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	72,66
	Angka Angkatan Kerja (Orang)	217280
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,15
	Cakupan Tenaga Kerja Terlatih (%)	288
	Cakupan Perlindungan Lembaga Ketenagakerjaan (%)	75
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	
	Angka partisipasi angkatan kerja perempuan	79,12
	Persentase partisipasi perempuan pada lembaga pemerintah	10,16
	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga	0,000428

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian 2023
1	2	5
	Rasio Korban Kekerasan Terhadap Anak	0,000497
	Pangan	
	Dinas Ketahanan Pangan	
	Skor PPH Ketersediaan Pangan	92,57 %
	Skor PPH Konsumsi Pangan	93,06 %
	Pertanahan	
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	Persentase luas lahan bersertifikat	80
	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah negara	100
	Penyelesaian Izin Lokasi (%)	100
	lingkungan hidup	
	Dinas Lingkungan Hidup	
	Indeks Kualitas Air	63.86
	Indeks Kualitas Udara	90.58
	Indek Tutupan Hutan dan Lahan	1.63
	Persentase Sampah yang dikelola (%)	44.75
	Persentase Limbah B3 yang dikelola (%)	34.00
	Persentase penurunan Emisi GRK (%)	68
	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan	66.83%
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93%
	Persentase OPD yang memanfaatkan data	15%

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian 2023
1	2	5
	kependudukan	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	
	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa	77%
	Meningkatnya Ketahanan Sosial Masyarakat Desa	77%
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa	54
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate/CBR) (%)	18,97
	Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR) (%)	77,64
	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	53,3
	Perhubungan	
	Dinas Perhubungan	
	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perhubungan	89
	Persentase Penurunan Kejadian Kecelakaan	37
	Komunikasi dan informatika	
	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	
	Persentase penuntasan blank spot area (%)	87
	Persentase pengembangan dan pemanfaatan aplikasi (%)	85
	Persentase layanan penyebarluasan informasi pembangunan daerah (%)	85
	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian 2023
1	2	5
	Dinas Koperasi dan Usahakecil Menengah	
	Persentase Koperasi Aktif (%)	72
	Persentase Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil (%)	0,29
	Penanaman Nodal	
	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	
	Realisasi Nilai Investasi	9,4 T
	Kepemudaan dan Olah Raga	
	Dinas Pemuda dan Olah Raga	
	Persentase Prestasi Pemuda	78%
	Persentase Prestasi Olahraga	83%
	Persentase Prestasi Keparamukaan	73%
	Statistik	
	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	
	Jumlah Ketersediaan data/informasi/statistik daerah	5
	Persandian	
	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	
	Persentase pengelolaan persandian dan keamanan informasi di daerah (%)	55
	Kebudayaan	
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	Meningkatnya Pelestarian budaya Musi Rawas	45,5
	Perpustakaan	
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian 2023
1	2	5
	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	48,00
	Jumlah Koleksi naskah kuno yang terlestarikan	1,00
	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang terlestarikan	14,00
	Arsip	
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	Rata- rata nilai Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI)	72,00
II	Urusan Pilihan	
	Kelautan dan Perikanan	
	Dinas Perikanan	
	Persentase peningkatan produksi perikanan per tahun	0,5%
	Persentase luas lahan dilakukan intensifikasi	0,005%
	Persentase luas lahan dilakukan ekstensifikasi	0,0005%
	Pariwisata	
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	Meningkatnya Kunjungan Wisata ke Musi Rawas	67,2
	Pertanian	
	Dinas Pertanian dan Peternakan	
	Persentase Capaian Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (%)	3
	Persentase Capaian Peningkatan Produksi Hortikultura (%)	3
	Persentase Capaian Peningkatan Produksi Peternakan (%)	3
	Dinas Perkebunan	
	Meningkatnya Produksi Perkebunan (%)	
	Persentase peningkatan produksi karet	1
	Persentase Peningkatan Produksi Kelapa Sawit	1

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian 2023
1	2	5
	Persentase Peningkatan Produksi Kelapa	1
	Persentase Peningkatan Produksi Kopi	1
	Persentase Peningkatan Produksi Kakao	1
	Perdagangan	
	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar	
	PDRB Sektor Perdagangan (Rp x M)	1.021,40
	Persentase Pertumbuhan pelaku usaha perdagangan (%)	5
	Tingkat Inflasi (%)	1,5
	Perindustrian	
	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar	
	PDRB Sektor Perindustrian (Rp x M)	1.727,73
	Prosentase Peningkatan Jumlah Industri Kecil dan Menengah (%)	4
	Transmigrasi	
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	Cakupan Tingkat Kesejahteraan Eks Transmigrasi (Juta/orang/bulan)	4,29
III	Urusan Penunjang	
	Perencanaan Pembangunan	
	Nilai Perencanaan Kinerja Pada Komponen SAKIP	25
	Nilai Pengukuran Kinerja Pada Komponen SAKIP	17
	Nilai Capaian Kinerja Pada Komponen SAKIP	14
	Keuangan	
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	81,51

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian 2023
1	2	5
	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
	Persentase Peningkatan PAD (Pajak Daerah) terhadap Kontribusi Pendapatan Daerah (%)	100
	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
	Persentase Pengisian Jabatan sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan	50
	Indeks Profesionalitas Aparatur	65,84
	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian	88,05
	Penelitian dan Pengembangan	
	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
	Persentase Meningkatnya Inovasi Bidang Pemerintahan dan Sosbud	85%
	Persentase Meningkatnya Inovasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan	80%
	Persentase Meningkatnya Reward Hasil Riset dan Inovasi	90%
	Pengawasan	
	Inspektorat	
	Level maturitas penyelenggaraan SPIP	3
	Persentase rekomendasi pengawasan yang tuntas ditindaklanjuti	94,37
	Persentase PD yang memperoleh nilai Evaluasi SAKIP minimal kategori BB	62
	Persentase PD yang meningkatkan implementasi aspek pengungkit 8 area perubahan pada pelaksanaan reformasi birokrasi	34

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian 2023
1	2	5
	Persentase Capaian Hasil Evaluasi Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi (Renaksi PPKT) Pemerintah Kabupaten Musi Rawas	95,47
	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	97,71
	Level kapabilitas APIP	3
	Sekretariat Dewan	
	Persentase Propemperda yang di sahkan	85
	Indeks Kepuasan layanan Anggota DPRD	85
	Pemerintahan Umum	
	Sekretariat Daerah	
	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (%)	60
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan (%)	60
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Tingkat Konflik Sara	89
	Tingkat Konflik Politik Sesimal budaya pertahanan dan keamanan	92
	Persentase angka partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak-hak politik	78
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Indeks Penurunan dampak resiko bencana	51,72
	Persentase Penanggulangan bencana (%)	52,32
	Kecamatan	
	Kecamatan Tugumulyo	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,00
	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa	90,00%

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian 2023
1	2	5
	dan Kelurahan dalam pembangunan	
	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	94,00%
	Persentase Desa dan Kelurahan Yang Bebas Konflik	100%
	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	90,00%
	Kecamatan Sumber Harta	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,00
	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan	90,00%
	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	94,00%
	Persentase Desa dan Kelurahan Yang Bebas Konflik	100%
	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	90,00%
	Kecamatan Jayaloka	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,00
	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan	80,00%
	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	87,00%
	Persentase Desa dan Kelurahan Yang Bebas Konflik	100%
	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	82,00%
	Kecamatan Megang Sakti	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,00
	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan	90,00%
	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100,00%
	Persentase Desa dan Kelurahan Yang Bebas Konflik	100,00%
	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	90,00%

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian 2023
1	2	5
	Kecamatan STL Ulu Terawas	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93
	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan	90%
	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	90%
	Persentase Desa dan Kelurahan Yang Bebas Konflik	93%
	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	92%
	Kecamatan Muara Beliti	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,00
	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan	90,00%
	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	95%
	Persentase Desa dan Kelurahan Yang Bebas Konflik	100%
	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	92,00%
	Kecamatan Selangit	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,00
	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan	85%
	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	94%
	Persentase Desa dan Kelurahan Yang Bebas Konflik	100%
	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	89%
	Kecamatan Sukakarya	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80
	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan	80%

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian 2023
1	2	5
	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	90%
	Persentase Desa dan Kelurahan Yang Bebas Konflik	95%
	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	85%
	Kecamatan Muara Lakitan	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,00
	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan	78,00%
	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	88,00%
	Persentase Desa dan Kelurahan Yang Bebas Konflik	100%
	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	83,00%
	Kecamatan Muara Kelingi	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75,00
	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan	72,00%
	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	85,00%
	Persentase Desa dan Kelurahan Yang Bebas Konflik	85%
	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	85,00%
	Kecamatan BTS Ulu	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,00
	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan	80,00%
	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	87,00%
	Persentase Desa dan Kelurahan Yang Bebas Konflik	100%
	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	82,00%

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian 2023
1	2	5
	Kecamatan Purwodadi	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,00
	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan	84,00%
	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100,00%
	Persentase Desa dan Kelurahan Yang Bebas Konflik	100,00%
	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	92,00%
	Kecamatan Tuah Negeri	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,00
	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan	85,00%
	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	75,00%
	Persentase Desa dan Kelurahan Yang Bebas Konflik	80%
	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	75,00%
	Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,00
	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan	80,00%
	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	87,00%
	Persentase Desa dan Kelurahan Yang Bebas Konflik	100%
	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	82,00%

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas terus mendorong peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah. Salah satu upaya tersebut adalah dengan reformasi birokrasi untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Dengan perbaikan layanan kepada masyarakat partisipasi masyarakat akan meningkat dalam pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 merupakan tahun ke tiga RPJMD 2021-2026. Untuk mewujudkan keterpaduan, sinkronisasi pelaksanaan kegiatan dan penjangkauan aspirasi masyarakat, maka dalam penyusunan RKPD 2023 dilaksanakan melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan dalam menyusun rencana pembangunan daerah atau Musrenbang secara berjenjang yang dimulai dari Musrenbang Desa / Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kabupaten.

Untuk pelaksanaan dokumen RKPD 2023 baik berupa prioritas maupun sasaran-sasaran pembangunan wajib dilaksanakan secara profesional dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Sehingga diharapkan hasilnya dapat dirasakan secara lebih adil dan merata bagi seluruh masyarakat termasuk dunia usaha, akademisi, maupun pemangku kepentingan lainnya.

Dalam penyusunannya, RKPD 2023 memerlukan kaidah dan prinsip pelaksanaan yang harus menjadi komitmen bagi seluruh stakeholder yang berperan baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas. Kaidah dan prinsip tersebut adalah:

1. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat;
2. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan, baik

sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan;

3. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas serta seluruh pelaku pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan dengan sebaik-baiknya;
4. RKPD digunakan sebagai pedoman penyusunan APBD, oleh karena itu RKPD perlu dijabarkan ke dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Musi Rawas;
5. Dalam upaya sinkronisasi / sinergitas pelaksanaan prioritas dan sasaran pembangunan yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan serta subkegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN/BLN dan sumber lainnya, setiap Perangkat Daerah harus membuat Rencana Kerja (Renja) yang dapat menggambarkan sinergitas program/kegiatan sesuai dengan sumber anggaran. Dengan kaidah dan prinsip seperti disebutkan di atas, diharapkan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas dapat berjalan dengan baik, lancar, transparan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pada akhirnya diharapkan tujuan utama pembangunan, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat Musi Rawas secara lahir dan bathin dapat terwujud.

Demikian RKPD Tahun 2023 ini disusun, sebagai pedoman untuk pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023.

Musi Rawas, 2022

